

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
URUSAN WAJIB

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1.1 DINAS PENDIDIKAN

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- 2) Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Presentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
i. Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	97,25	98,48	101,26%
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	97,25	98,48	101,26%
II, Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan Dasar yang berkualitas	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS)	95,36	95,36	100,00%
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS)	95,35	95,36	100,01%
III, Meningkatnya ketersediaan,	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah	80,09	82,80	103,38%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Presentase (%)
		Target	Realisasi	
pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Menengah	(APK DIKMEN)			
1. Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK DIKMEN)	80,09	82,80	103,38%
IV. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Nonformal	Angka Melek Huruf 15 - 59 th (AMH)	0%	0%	0%
1. Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf 15 - 59 th (AMH)	0%	0%	0%
Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi	Jumlah pendidik berkualifikasi minimal D4/S1	90,01	98,80	109,76%
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Presentase pendidik berkualifikasi minimal D4/S1	90,01	98,80,-	109,76%
Meningkatnya ketersediaan pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berkualitas di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)	26	38	146,15%
1. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)	26	38	146,15%

Keterangan: Data AMH sementara dari BPS

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

➤ Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)

Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan sebesar 97,25% menjadi 98,48% pada tahun 2017. Pencapaian APK PAUD pada tahun 2017 yang menggembirakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia 3 – 6 tahun yang terlayani oleh PAUD melalui jenjang formal (TK) maupun nonformal (KB, TPA, SPS). Hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah Jawa Timur berhasil meningkatkan perluasan akses bagi anak usia 3-6 tahun yang memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar melalui intensifikasi program PAUD.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan agar semua anak usia dini, laki laki maupun perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Program ini dititikberatkan pada peningkatan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan Dasar yang berkualitas, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2017 sebesar 97,99%.

Persentase Program Pendidikan Menengah di tahun 2017 dengan target sebesar 95,35% dan terealisasi sebesar 95,36% atau 100,01% telah mencapai target. Pada tahun 2017, partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anak usia 7 - 12 tahun ke jenjang SD/MI dan anak usia 13 - 15 tahun ke jenjang SMP/MTs cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS) yang mencapai 95.36% dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Jawa Timur sangat efektif dan signifikan terhadap tingginya APM

DIKDAS yang juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anaknya. Diharapkan pemerintah Jawa Timur tetap mengupayakan keberlanjutan program Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program demi penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Peningkatan APM DIKDAS di Jawa Timur didukung oleh Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup SD termasuk MI dan Paket A serta SMP, MTs dan Paket B. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru. Program ini dimaksudkan untuk menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar SMP/MTs, termasuk Paket B. Program ini juga dititikberatkan untuk meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah dan mengulang kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan, seti daknya, pendidikan pada jenjang menengah pertama.

Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Menengah, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2017 dengan target sebesar 80,09% dan terealisasi sebesar 82,80% atau mencapai lebih dari target 103,38% ,Dalam rangka memperluas daya tampung lembaga jenjang pendidikan menengah sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik

secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Dampaknya, peningkatan terjadi pada APK Pendidikan Menengah yang menunjukkan bahwa Program Pendidikan Menengah menunjukkan keberhasilan.

Program Pendidikan Menengah bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki – laki dan perempuan melalui jalur formal maupun nonformal, yang mencakup SMA, SMK, MA dan Paket C serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk dunia kerja. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru. Sasaran program ini adalah lulusan sekolah menengah pertama yang meningkat secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun. Indikator keberhasilan program ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2017 APK terealisasi sebesar 82,80% dari target sebesar 80,09%. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang tua yang memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak – anak mereka yang berusia 16 – 18 tahun karena memahami bahwa manfaat sekolah lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Di samping itu, patut diapresiasi pula upaya Pemerintah Jawa Timur untuk mengupayakan keberlanjutan program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA serta SMK disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan kejuruan dalam pembangunan daerah khususnya dalam rangka mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan memperhatikan kemampuan serta kondisi

ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi dengan SMK yang berbasis keunggulan lokal. Karena itu, Provinsi Jawa Timur telah menetapkan bahwa salah satu dari tolok ukur utama keberhasilan pembangunan pendidikan di Jawa Timur adalah meningkatnya rasio jumlah siswa SMK dibanding siswa SMA. Upaya peningkatan rasio tersebut didukung dengan berbagai upaya-upaya inovatif (penyelenggaraan SMK Mini di Pondok Pesantren, penyelenggaraan kelas wirausaha, praktek industri luar negeri dsb). Jumlah SMK juga harus ditingkatkan. Namun demikian, dengan pertimbangan bahwa pendirian dan pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu membutuhkan komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana. Peningkatan program pembangunan dan pembinaan SMK yang telah dilaksanakan di Jawa Timur akan terus dikembangkan dan lebih diintensifkan. Program peningkatan pembinaan SMK akan dilaksanakan secara sinergi dalam arti bahwa program peningkatan rasio siswa SMK: SMA tidak hanya diatasi dengan penyediaan tempat belajar tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen, kualitas pembelajaran, pemenuhan kebutuhan guru, peralatan dan juga pembangunan citra atau pencitraan SMK yang mampu menghasilkan tamatan yang terampil, cerdas dan kompetitif.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Nonformal, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Angka Melek Huruf 15-59 th (AMH) pada tahun 2016 sebesar 0% dan pada tahun 2017 sebesar 0%.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mempunyai andil besar atas keberhasilan pemerintah pusat dalam meraih 'King Sejong Literacy Prize'. Sebagai provinsi dengan penyumbang angka tertinggi jumlah orang yang belum melek huruf di tingkat nasional versi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, dari tahun ke tahun,

Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jatim berhasil menekan angka buta huruf hingga ratusan ribu jiwa menjadi melek aksara. Sehingga Gubernur Jawa Timur tidak mencanangkan program ini sebagai prioritas program pendidikan mengingat Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang bebas buta aksara.

Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1 pada tahun 2017 dengan target sebanyak 90,01% dan terealisasi sebanyak 98,80% atau mencapai target sebanyak 109,76%

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur juga terlihat dari semakin banyaknya guru yang saat ini telah memenuhi standar kualifikasi minimal S1 sebanyak Capaian tersebut didukung oleh program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik baik laki – laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri dan swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang berakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, menilai hasil pembelajaran dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu, program ini juga menseleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi untuk mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Adapun sasaran program ini

adalah tenaga pendidik (guru/kepala sekolah) dan tenaga kependidikan di seluruh Jawa Timur.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan diwujudkan dengan peningkatan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen melalui pemberian beasiswa S1 (770 guru setiap tahun) dan S2 (182 guru setiap tahun) bekerja sama dengan Filipina, Thailand, dan Cina.

Sasaran 6 : Meningkatkan ketersediaan pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berkualitas di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi) pada tahun 2017 ada sebanyak 38 kab/kota ,Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai Pergub tentang pendidikan inklusif. Sehingga bisa dikatakan Jawa Timur adalah provinsi yang paling peduli dengan pendidikan inklusif. Pelaksanaan Pergub No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur pada tahun 2017 telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Hingga tahun 2017 seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi). Adapun jumlah Kab/Kota yang telah mendeklarasikan secara resmi sebagai Kab/Kota inklusif adalah sebanyak 14 Kab/Kota. Berikut ini adalah nama- nama Kab/Kota tersebut :

Kabupaten dan kota yang mendeklarasikan sebagai kab/kota inklusif di Tahun 2017 :

- 1) Kota Malang
- 2) Kota Batu
- 3) Kota Probolinggo
- 4) Kab. Sidoarjo
- 5) Kab. Gresik

- 6) Kab. Trenggalek
- 7) Kab. Pacitan
- 8) Kab. Ngawi
- 9) Kab. Magetan
- 10) Kab. Nganjuk
- 11) Kab. Probolinggo
- 12) Kab. Bondowoso
- 13) Kab. Tuban
- 14) Kota Pasuruan
- 15) Kab. Banyuwangi

c. Program

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran Rp 4.355.326.500,- realisasi sebesar RP 4.338,510.260,- atau 99,61% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan anggaran Rp. Rp 2.464.829.100,- realisasi sebesar Rp 2.327.480.040,- atau 95,36% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 3) Program Pendidikan Menengah dengan anggaran Rp 1.557.222.903.500,- realisasi sebesar Rp 1.509.331.700.795,- atau 82,80% untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 4) Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp 1.466.642.900,- realisasi sebesar Rp 1.448.861.900,- atau 0% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan dengan anggaran Rp 59.938.000.000,- realisasi sebesar Rp 57.326.272.793,- atau 95,43% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 6) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) dengan anggaran Rp. 28.395.680.866 realisasi sebesar Rp 16.668.968.024 atau 25,15% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

1) Program PAUD:

- Kurangnya fasilitas belajar yang ada di lembaga PAUD

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun :

- Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran disekolah
- Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Multimedia pada sekolah-sekolah.
- Perbedaan struktur organisasi yang ada di kabupaten dan kota dengan provinsi sehingga mempersulit koordinasi serta penyusunan program prioritas peningkatan mutu pendidikan.

3) Program Pendidikan Menengah:

- Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah

- Budaya pemanfaatan TIK untuk kepentingan pembelajaran belum dipahami secara sadar dan optimal oleh guru, siswa dan masyarakat
- Pemanfaatan media audio dan video pembelajaran sebagai bahan ajar dengan system pendidikan jarak jauh, melalui Radio Streaming (rapendik on streaming) belum dimanfaatkan oleh guru dan siswa
- Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/ peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK
- Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/ industry

4) Program Pendidikan Non Formal

- Tidak semua warga buta aksara terdata oleh petugas instansi setempat.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Belum semua guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1)
- Sebaran guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan
- Tingkat kesejahteraan guru belum memadai
- Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (Kepala sekolah), laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan.
- Masih banyak tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu

6) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

- Belum semua guru dari sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan mengikuti pelatihan penanganan ABK.
- Belum semua sarana prasarana SLB/SDLB/SMPLB/SMALB memenuhi standar nasional.
- Sekolah Luar Biasa (SLB) masih tersebar di Ibu Kota Kecamatan, sehingga ABK khususnya dari masyarakat miskin dipedesaan terpencil tidak mendapatkan akses untuk bersekolah.
- Di beberapa lembaga SLB masih kekurangan guru, khususnya guru mata pelajaran untuk jenjang SMPLB dan SMALB
- Data penduduk penyandang ketunaan di Jawa Timur belum dapat diketahui secara detail dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama informasi dengan pihak – pihak yang berwenang terutama di daerah.

Solusi

1) Program PAUD:

- Data dari Kabupaten/Kota lebih dilengkapi.
- Menambah fasilitas belajar yang memadai

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- Perlu koordidasi dalam menyusun RPJMD dan Renstra sehingga ada keselarasan program antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat
- Meningkatkan kompetensi SDM agar semakin menguasai TIK dan multimedia.
- Menyelenggaraan program pembelajaran secara praktis, efisien dan murah serta terjangkau kepada guru-guru SD maupun SMP dengan system pembelajaran PJJ/BJJ (Pendidikan jarak jauh/ belajar jarak jauh)
- Perbaiki fisik dan infrastruktur SD dan SMP beserta penambahan sarana penunjang pembelajaran (perpustakaan, laboratorium bahasa, ruang

ekspresi/kreasi siswa dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu proses dan output pembelajaran

- Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah (SD dan SMP) dalam upaya penguatan akuntabilitas dan pencitraan public terhadap penyelenggaraan pendidikan

3) Program Pendidikan Menengah:

- Perlu koordinasi dalam menyusun RPJMD dan Renstra sehingga ada keselarasan program antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
- Perlu menambah sarana penunjang di sekolah-sekolah.
- Menunjang pengayaan pembelajaran melalui operasional dan pemanfaatan ICT dan E-Learning
- Menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pembelajaran kepada guru secara berkesinambungan (TOT) dan terkoordinasi mulai dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota.
- Menyelenggarakan program pembelajaran secara praktis, efisien dan murah serta terjangkau kepada guru-guru SMA/MA, maupun SMK dengan system pembelajaran PJJ/BJJ (Pendidikan Jarak Jauh/ Belajar Jarak Jauh)
- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengadaan bahan praktik, bahan ajar dan alat bantu pembelajaran
- Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dengan memberikan BKSM sehingga mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan
- Memberikan beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik
- Membantu sekolah dalam bentuk pemberian hibah sebagai upaya pemenuhan/ pencapaian standart kompetensi lulusan, standart penilaian, standart pendidik dan tenaga kependidikan, standart pengelolaan, standart sarana dan prasarana dan standart pembiayaan

- Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disbanding Sekolah Menengah Umum (SMU) hingga mencapai perbandingan 70%:30% untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah
- Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta tuntutan pasar kerja local dan global, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industry
- Meningkatkan daya tamping SMK dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
- Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan SMK berkeunggulan local
- Memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi tamatan SMK

4) Program Pendidikan Non Formal

- Pendataan dilakukan per Kepala Keluarga mulai dari desa setempat sehingga datanya dapat terinci keseluruhan.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Memberikan beasiswa kepada guru-guru yang belum berkualifikasi S1 untuk menempuh pendidikan sampai berkualifikasi S1
- Memberikan bantuan/ tunjangan/insentif kepada guru-guru non PNS jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK sehingga kesejahteraan mereka meningkat
- Melaksanakan diklat kepada pendidik dan tenaga kependidikan mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK sehingga kompetensi mereka menjadi meningkat
- Mengupayakan keberlangsungan program sertifikasi guru.

6) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

- Menambah jumlah pelatihan guru tentang penanganan ABK.
- Usulan bantuan sosial peningkatan sarana prasarana SLB dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud.

- Upaya pengembangan jejaring informasi penduduk penyandang ketunaan antar instansi lebih ditingkatkan terutama dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur
- Diupayakan dibentuk dan menyelenggarakan sekolah di beberapa desa yang berdekatan dengan SLB yang dibentuk dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat.
- Menyelenggarakan program pembelajaran secara praktis, efisien dan murah serta terjangkau kepada guru-guru SLB dengan system pembelajaran PJJ/BJJ
- Menindaklanjuti dan mensosialisasikan Permendiknas No. 70/2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan dan desa serta Pergub Jawa Timur No. 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur secara merata ke semua jenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Lembaga Sekolah
- Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Guru-guru untuk SLB

e. Penghargaan nasional yang diterima

- 1) Anugerah Ki Hajar oleh Pustekom Kemendikbud sebagai anugerah penghargaan khusus untuk provinsi di bidang penerapan TIK untuk pendidikan, 16 Nopember 2017 di Jakarta
- 2) Stand Terbaik Kategori Open Space Pameran Jatim Fair 2017, 15 Oktober 2017 Di Grand City, Surabaya
- 3) PPID 18 Desember 2017 Kategori B sebagai implementasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Juara 1 Lomba band
- 5) Juara II Lomba Paduan Suara
- 6) Penghargaan SAKIP Tahun 2017 Kategori A (memuaskan)
- 7) Juara I Lomba Bercerita jenjang SDLB pada Festival dan Lomba Literasi ABK 2017

- 8) Juara II Lomba Manajemen Keterampilan PK-PLK pada Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia 2017
- 9) Juara II Lomba Membuat Kreasi Barang Bekas / Limbah Jenjang SMPLB / SMALB pada Lomba Keterampilan Siswa Nasional ABK 2017
- 10) Juara I Lomba Melukis Jenjang SDLB pada FLS2N ABK Tahun 2017
- 11) Juara II Lomba Menyanyi Jenjang SDLB pada FLS2N ABK Tahun 2017
- 12) Juara II Lomba Pantomim Jenjang SMPLB/SMALB pada FLS2N ABK Tahun 2017
- 13) Juara III Cabang Lomba Bulutangkis Putra Jenjang SMPLB pada O2SN ABK Tahun 2017
- 14) Juara III Cabang Lomba Bocce Putri Jenjang SMALB pada O2SN ABK Tahun 2017
- 15) Prestasi Siswa Smk Jawa Timur Pada Lomba Kompetensi Siswa Nasional Di Solo

Mendapat Peringkat Nasional Ke 2 Dengan Meraih :

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Medali Emas | 9 medali |
| - Medali Perak | 14 medali |
| - Medali Perunggu | 9 medali |

- 16) Prestasi Siswa Smanor, Jumlah perolehan medali :

- | | |
|--|------------------|
| • Jumlah perolehan medali di tingkat Regional/Provinsi | 219 medali |
| • Jumlah perolehan medali di tingkat Nasional | 247 medali |
| • Jumlah perolehan medali di tingkat Internasional | <u>47 medali</u> |
| Total perolehan medali | 513 medali |
| • ATLETIK | |
| – Medali Emas | 17 medali |
| – Medali Perak | 17 medali |
| – Medali Perunggu | 12 medali |
| • PENCAK SILAT | |
| – Medali Emas | 35 medali |
| – Medali Perak | 5 medali |
| – Medali Perunggu | 10 medali |
| • GULAT | |
| – Medali Emas | 12 medali |
| – Medali Perak | 17 medali |
| • SEPAK TAKRAW | |
| – Medali emas | 3 medali |
| – Medali Perak | 3 medali |

– Medali Perunggu	3 medali
• JUDO	
– Medali emas	10 medali
– Medali Perak	24 medali
– Medali Perunggu	24 medali
• PANJAT TEBING	
– Medali emas	2 medali
– Medali Perak	7 medali
– Medali Perunggu	8 medali
• RENANG	
– Medali emas	27 medali
– Medali Perak	10 medali
– Medali Perunggu	6 medali
• KARATE	
– Medali emas	47 medali
– Medali Perak	33 medali
– Medali Perunggu	13 medali
• SELAM	
– Medali emas	8 medali
– Medali Perak	8 medali
• SEPATU RODA	
– Medali emas	13 medali
– Medali Perak	21 medali
– Medali Perunggu	24 medali
• VOLLI PANTAI	
– Medali emas	47 medali
– Medali Perak	33 medali
– Medali Perunggu	13 medali
• ANGGAR	
– Medali emas	5 medali
– Medali Perak	7 medali
– Medali Perunggu	7 medali
• TENIS MEJA	
– Medali Perunggu	2 medali
• TENIS LAPANGAN	
– Medali emas	1 medali
– Medali Perak	1 medali
• TAEKWONDO	

- Medali emas 2 medali

17) Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2017 di Pekanbaru Riau, Provinsi Jawa

Timur berhasil meraih Peringkat III Nasional, yang terdiri dari :

- Jenjang SD dan Jenjang SMA
 - 2 (dua) emas 6 (enam) emas
 - 2 (dua) perak 9 (sembilan) perak
 - 1 (satu) perunggu 20 (dua puluh) perunggu
- Jenjang SMP
 - 2 (dua) emas
 - 9 (sembilan) perak
 - 6 (enam) perunggu

18) Olimpiade Olah Raga Nasional (O2SN) tahun 2017 di Medan, Provinsi Jawa

Timur berhasil meraih Juara Umum Tingkat Nasional yang terdiri dari :

- Jenjang SD dan Jenjang SMA
 - 10 (sepuluh) emas 2 (dua) emas
 - 3 (tiga) perak 2 (dua) perak
 - 5 (lima) perunggu 2 (dua) perunggu
- Jenjang SMP dan Jenjang SMK
 - 4 (empat) emas 5 (lima) emas
 - 3 (tiga) perak 1 (satu) perak
 - 6 (enam) perunggu 2 (dua) perunggu

19) Juara Harapan 1 Anugerah Konstitusi 2017 SMA/SMK (Achmad Syaifudin) Guru MKPP Juara 2 Guru Berprestasi tingkat Nasional yang diadakan oleh BPSPDM Kementrian

20) Juara 1 Tata Rias Kecantikan SMKN 1 Pringkuku Pacitan

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

2.1. DINAS KESEHATAN

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- 2) Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat.
- 3) Melaksanakan upaya penanggulangan masalah gizi.
- 4) Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana.
- 5) Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat.
- 6) Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makan.
- 7) Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan.
- 8) Optimalisasi tata kelola kesehatan untuk menunjang program kesehatan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI	12	17	141,67
	1. Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	70	73,97	105,67
	2. Persentase rumah tangga sehat	56	54,02	96,46
	3. Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu	45	46,39	103,09

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 * 100)
II. Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	91,97	91,92	100,05
	2. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar	14	41,7	297,86
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar	70	74,5	106,43
	4. Persentase kasus pemasunga (penurunan kasus pasung)	914 kasus	752 kasus	82,28
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan puskesmas dan jaringannya sesuai standar	14	41,70	297,86
	2. Jumlah Puskesmas PONED yang aktif	25	59	236
	3. Jumlah Puskesmas dengan pelayanan gawat darurat sesuai standar	100	105	105
	4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia	56	68	121,4
	5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	67	65	97
	6. Cakupan Peserta KB Aktif	69	68,9	99
	7. Cakupan Pelayanan Bayi	96	95,56	100
	8. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	96	94,63	99
	9. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	100	100	100

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
	10. Persentase Kasus pasung ditangani	100	77,94	77,94
	11. Cakupan Ponkesdes sesuai standar	50	51,60	103,09
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan	1. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit terakreditasi)	70	74,50	106,43
	2. Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar	60	60	100
	3. Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar	80	89	111,25
	4. Berfungsinya Rumah Sakit Tersier sebagai TOP Referral > 50 %	70	22	31,4
III. Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal	1. Prevalensi Balita Gizi Buruk	1,9	0,74	161,05
	2. Prevalensi Balita Stunting	26,2	26,7	98,09
	1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	10,90	15,5	57,8
	2. Persentase Balita Stunting	26,20	26,7	98,02
IV. Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana	1. Persentase Penanggulangan KLB Penyakit Menular Prioritas Lintas Kab/Ko kurang dari 48 jam	80	80	100

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
1. Program Pengendalian Penyakit	2. Persentase skrining PTM bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi	18	11,10	61,7
	1. Persentase keberhasilan pengobatan TB	90	90,1	100,1
	2. Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi	20	20,6	97
	3. Persentase KLB Pasca Bencana	10	45,62	456,2
	4. Persentase RFT Rate	91	89,2	98
	5. Persentase ODHA dengan ARV	100	80	80
	6. Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT	95	100	105
	7. Insiden rate DBD	<51	17,20	166,27
	8. Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE	100	100	100
	9. Persentase cakupan diare	85	51	60
	10. Persentase cakupan pneumonia	45	47,70	106
V. Meningkatnya akses pada lingkungan yang sehat	1. Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sarana air minum layak/terlindung	85	87,85	103,35
	2. Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban sehat	83	85,62	103,16
	1. Persentase akses rumah	85	87,85	103,35

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
Pengembangan Lingkungan Sehat	<p>tangga yg memiliki akses thd. sarana air minum layak/terlindung</p> <p>2. Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban sehat</p>	83	85,62	103,16
VI. Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman	1. Meningkatnya Persentase produk sediaan farmasi, yang memenuhi syarat	72	71	96,61
1. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	1. Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	98	97	99
	2. Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat	71	75	106
	3. Persentase produk makanan yang memenuhi syarat	74	72	97
	4. Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat	66	61	92
VII. Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal	1. Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk			
	- Dokter Spesialis Anak	1/100.000 penduduk (265 orang)	1/100.000 penduduk (290 orang)	100%
	- Dokter spesialis Obgyn	1/100.000 penduduk (363 orang)	1/100.000 penduduk (356 orang)	98%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Bidan - Perawat 	22/100.000 penduduk (7.832 org)	10/100.000 penduduk (3.970 org)	51%
		54/100.000 penduduk (19.652 org)	46/100.000 penduduk (18.1 org)	92%
		97/100.000 penduduk (34.699 org)	84/100.000 penduduk (33.054org)	95%
	2. Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar	80	80	100
1. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	1. Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah penduduk/100.000)			
	- Dokter Spesialis Anak	1/100.000 penduduk (265 orang)	1/100.000 penduduk (290 orang)	100%
	- Dokter spesialis Obgyn	1/100.000 penduduk (363 orang)	1/100.000 penduduk (356 orang)	98%
	- Dokter Umum	22/100.000 penduduk (7.832 org)	10/100.000 penduduk (3.970 org)	51%
	- Bidan	54/100.000 penduduk (19.652 org)	46/100.000 penduduk (18.1 org)	92%
	- Perawat	97/100.000 penduduk	84/100.000 penduduk	95%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
	- Nutrisionis	(34.699 org) 6/100.000 penduduk (2.361)	(33.054org) 4/100.000 penduduk (1.629 org)	64%
VIII. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen keuangan , aset , perencanaan dan evaluasi	1. Menurunnya Jumlah Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset	89	89	100
1. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1. Persentase termanfaatkannya dokumen kesehatan untuk bahan penentuan kebijakan	100	100	100
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	100	100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100	100
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1. Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100	100
4. Program: Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian hasil laporan kinerja	100%	199%	100%

Pada Tahun 2017 kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

➤ Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI

Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI pada tahun 2017 dengan target sebesar 12% dan terealisasi sebesar 17% atau 141,67%; sudah melampaui target yang ditetapkan. Keadaan ini dapat dicapai karena kerjasama yang terpadu dari stakeholder terkait dalam pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada masa sekarang dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa (*shaping the health nations*), tidak hanya bertujuan kuratif, namun juga pencegahan penyakit, perlindungan keselamatan, dan promosi kesehatan. Desa siaga menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.

Sasaran 2: Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu pada Tahun 2017 dengan target sebesar 91,97 dan terealisasi sebesar 91,92. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/ WHO*), Maternal Mortality Rate (MMR) atau AKI adalah kematian selama kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dan atau diperberat oleh kehamilan atau penangannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera; dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama.

Jumlah kelahiran hidup yang lebih rendah pada Tahun 2017 memberikan dampak pada belum tercapainya target AKI. Walaupun di lain sisi, penurunan jumlah kelahiran hidup mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana.

➤ Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar

Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar pada Tahun 2017 dengan target sebesar 14% (135 Puskesmas) dan terealisasi sebesar 41,7% (402 Puskemas) atau 297,86 persen, dapat melampaui target yang ditetapkan.

Fasilitas Kesehatan Dasar dinyatakan memenuhi standar, jika sudah lulus akreditasi. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; setiap Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2).

Dukungan sumber daya dari tingkat pusat maupun daerah diiringi antusiasme kabupaten kota dalam menyiapkan proses akreditasi, menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini

➤ Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar

Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar pada Tahun 2017 dengan target sebesar 70 dan terealisasi sebesar 74,5 atau mencapai 106,43 persen; mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RS, diamanatkan bahwa setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi. Akreditasi Rumah Sakit merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian sehingga sebuah Rumah Sakit lulus/mampu memenuhi Standar Akreditasi.

➤ Persentase kasus pemasangan (Penurunan Kasus Pasung)

Persentase kasus pemasangan (penurunan kasus pasung) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 0,5% (914) kasus dan mencapai realisasi 0,9% (752 kasus), tercapai sebesar 82,28%. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa kasus pasung tidak

bisa disembuhkan, putus obat dimana obat sudah habis diminum dan tidak ditindaklanjuti dengan control ke faskes serta obat yang diminum tidak sesuai aturan baik frekuensi dan jadwalnya, berpengaruh terhadap penurunan kasus pasung.

Sasaran 3: Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ **Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Prevalensi Balita Gizi Buruk pada Tahun 2017 dengan target sebesar 1,9 dan terealisasi sebesar 0,74; sudah memenuhi target, dimana pada Tahun 2017 target prevalensi gizi buruk sebesar 1,9; dan hanya 0,74 balita di Tahun 2017 dengan gizi buruk. Keberhasilan ini merupakan perwujudan dari kerja keras seluruh stake holder dalam pembangunan kesehatan khususnya pada Program Gizi Masyarakat, dengan melibatkan semua komponen. Pemberian Makanan Tambahan merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai pemulihan gizi. Kepedulian dari keluarga, masyarakat tenaga kesehatan beserta pemangku kepentingan untuk mensukseskan Program Gizi Masyarakat sangat mendukung tercapainya keberhasilan program ini.

➤ **Prevalensi Balita Stunting**

Prevalensi Balita Stunting pada Tahun 2017 dengan target sebesar 26,2 dan terealisasi sebesar 26,7 belum memenuhi target dimana pada Tahun 2017 diharapkan prevalensi balitas stunting sebesar 26,2. Hal ini dipengaruhi oleh asupan gizi pada ibu hamil dan anak balita kurang seimbang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu faktor higiene dan sanitasi serta lingkungan pada keluarga balita mempengaruhi kejadian kesakitan pada anak balita, sehingga prevalensi balita stunting belum memenuhi target yang diharapkan

Sasaran 4: Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Persentase Penanggulangan KLB Penyakit Menular Prioritas Lintas Kab/Ko kurang dari 48 jam

Persentase Penanggulangan KLB Penyakit Menular Prioritas Lintas Kab/Ko kurang dari 48 jam pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% atau 100 persen, sudah mencapai target yang ditetapkan.

- Persentase skrining PTM bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi

Persentase skrining PTM bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi pada Tahun 2017 dengan target sebesar 18% dan terealisasi sebesar 11,10% atau 67 persen, belum mencapai target.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan upaya untuk pengendalian penyakit tidak menular dengan melakukan skrining atau deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dengan mengoptimalkan Posbindu serta melaksanakan surveilans epidemiologi FR PTM, dalam upaya skrining Penyakit Tidak Menular dengan selalu melakukan upaya promotif kepada masyarakat mengingat PTM adalah penyakit yang tidak menimbulkan gejala dan membutuhkan perjalanan yang panjang dalam manifestasi klinisnya.

Sasaran 5: Meningkatnya akses pada lingkungan yang sehat ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sarana air minum layak/terlindung

Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sarana air minum layak/terlindung pada Tahun 2017 mencapai 87,85 %, atau sebanyak 9.774.093 Angka ini sudah memenuhi dari

target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 85 % atau 9.457.006

Hal ini disebabkan karena adanya komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder dalam pembangunan sarana air minum untuk memenuhi target Universal Akses pada tahun 2019 yaitu akses masyarakat terhadap air bersih atau air layak sebesar 100 % termasuk melalui dana desa sesuai Permenkes No. 22 th 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

- Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban seha

Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban seha pada Tahun 2017 mencapai 85,62 %, atau sebanyak 9.525.986 KK/RT. Angka ini sudah memenuhi target pada tahun 2017 yaitu sebesar 83 % atau 9.234.488.

Jamban merupakan sanitasi dasar penting yang harus dimiliki setiap masyarakat. Masyarakat harus menyadari untuk menerapkan pola hidup sehat (PHBS), salah satunya dengan membuat jamban.

Sasaran 6: Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu

- Meningkatnya Persentase produk sediaan farmasi, yang memenuhi syarat pada Tahun 2017 dengan target sebesar 72 dan terealisasi sebesar 71 atau 96,61.

Sasaran 7: Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal ditetapkan indikator kinerja yaitu:

- Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk

- Dokter Spesialis Anak dengan target 1/100.000 penduduk (265 orang) tercapai sebesar 1/100.000 penduduk (290 orang) atau 100%
 - Dokter spesialis Obgyn dengan target 1/100.000 penduduk (363 orang) tercapai sebesar 1/100.000 penduduk (356 orang) atau 98%
 - Dokter Umum dengan target 22/100.000 penduduk (7.832 org) tercapai sebesar 10/100.000 penduduk (3.970 org) atau 51%
 - Bidan dengan target 54/100.000 penduduk (19.652 org) tercapai sebesar 46/100.000 penduduk (18.116 org) atau 92%
 - Perawat dengan target 97/100.000 penduduk (34.699 org) tercapai sebesar 84/100.000 penduduk (33.054org) atau 95%
- Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% atau 100 persen; sudah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 8: Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen keuangan , aset , perencanaan dan evaluasi ditetapkan indikator kinerja yaitu:

- Menurunnya Jumlah Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset pada Tahun 2017 dengan target sebesar 89% dan terealisasi sebesar 89% atau 100 persen, mencapai target yang ditetapkan.

c. Program

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.3.923.489.312,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.675.384.588,- atau 93,68%,

untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.7.762.843.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,946,820,378,- atau 89,49%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.2.726.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.726.870.000,- atau 93,11%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.1.067.128.165,- dan terealisasi sebesar Rp.1.017.889.250,- atau 95,39%, untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 6.596.960.151,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.010.147.207,- atau 91,10%, untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 3.001.132.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.510.329.300,- atau 83,65%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.1.462.032.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.350.655.110,- atau 92,38%,

untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom

- 8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 880.833.465,- atau 97,87%, untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 9) Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.173.264.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.070.161.175,- atau 91,21%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 10) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.735.653.835,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.647.328.949,- atau 94,91%, untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 11) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan dengan anggaran sebesar Rp. 6.660.379.393,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.477.559.433,- atau 82,34%, untuk mendukung 11 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 12) Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.32.473.139.164,- dan terealisasi sebesar Rp.32.079.488.027,- atau 98,79%, untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom
- 13) Program Pengendalian Penyakit dengan anggaran sebesar Rp.5.810.005.380,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.505.139.698,- atau 94,75%, untuk mendukung 13 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing

kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan
- 2) Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk mempersiapkan Universal Coverage pada Tahun 2019
- 3) Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- 4) Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat
- 5) Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
- 6) Kondisi Kesehatan Lingkungan tidak sehat, masyarakat rentan terjangkit penyakit.

Solusi:

- 1) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) membutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholder*. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah kematian ibu dan bayi. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan aktivitas masyarakat dalam mengawal kehamilan dan persalinan serta dalam berbagai upaya menjaga kesehatan bayi dan balita; untuk itu akan lebih mengintensifkan Pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan bumil dan taman posyandu dengan fokus penurunan AKI dan AKB
- 2) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas, yang memberikan dampak yang signifikan pada meningkatnya derajat kesehatan di masyarakat dengan mengupayakan Peningkatan layanan dasar dan rujukan
- 3) Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan di Jawa Timur dengan mengupayakan :

Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

- 4) Mengupayakan Penurunan prevalensi stunting melalui optimalisasi pelayanan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
- 5) Pengendalian penyakit menular (Kusta, TB, dan HIV) dan penyakit tidak menular (diabetes, kanker, hipertensi, dan gangguan kesehatan jiwa); untuk meminimalkan angka kesakitan dan kematian pada masyarakat di Jawa Timur.
- 6) Peningkatan akses air bersih dan jamban sehat; dimana karena Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat karena berdasarkan teori HL. Blum, Persentase pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah lebih dari 30%.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Penghargaan Dinas Kesehatan Provinsi “Terbaik Pertama” dalam pelaksanaan “Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Periode Tahun 2016-2017



Gambar 4.1 Piagam Penghargaan Gema Cermat Periode Tahun 2016-2017

- 2) Penghargaan Bagi Institusi Yang Berjasa Dalam Pembangunan Kesehatan Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional



Gambar 4.2 Piagam Penghargaan Institusi yang Berjasa Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan

3) Penghargaan Terbaik Ke V katagori Inovasi E-Health



Gambar 4.3 Piagam Penghargaan katagori Inovasi E-Health MESES JAMUR

4) Penghargaan Pelayanan KB Implant Serentak di 38 Kab/Kota Dengan Peserta Terbanyak



Gambar 4.4 Piagam MURI Pelayanan KB Implant Serentak di 38 Kab/Kota Dengan Peserta Terbanyak

2.2. RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA

a. Tujuan

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS Pendidikan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	74,41%	93,01
	Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar :	90%	100%	111
	1. <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	60 – 85%	85,51%	Memenuhi standar
	2. <i>Average Length of Stay</i> (ALOS)	6 – 9 hari	7,68 hari	Memenuhi standar
	3. <i>Bed Turn Over</i> (BTO)	40 – 50 kali	40,68 kali	Memenuhi standar
	4. <i>Turn Over Interval</i> (TOI)	1 – 3 hari	1,54 hari	Memenuhi standar
	5. <i>Net Death Rate</i> (NDR)	25 ⁰ / ₀₀	21,8 ⁰ / ₀₀	Memenuhi standar
	Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target	90%	86%	95,56%
	Persentase kesesuaian terhadap standar akreditasi rumah sakit	80%	86,36%	107,95
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan peralatan BLUD	100%	100%	100
2. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	74,41%	93,01

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Daerah (BLUD)				
II. Meningkatnya mutu pelatihan/ pendidikan di Rumah Sakit	Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu	80%	81,7%	102,13
	Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi klinis dari RSDS	60%	87,46%	145,77
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	74,41%	93,01
III. Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit	Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah	50%	58,82%	117,64
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	74,41%	93,01
IV. Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan	<i>Cost Recovery Ratio</i> (CRR)	60%	73,73%	122,88
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	74,41%	93,01

Pada tahun 2017 kinerja RSUD Dr. Soetomo yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit, ditetapkan empat indikator kinerja, yaitu:

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 74,41% atau dengan tingkat capaian sebesar 93,01%

(belum mencapai target). Perubahan alat ukur, yaitu penambahan detail item pengukuran kepuasan masyarakat disertai wawancara mendalam (*indepth interview*) mempengaruhi besaran penilaian IKM dibandingkan pengukuran IKM tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran IKM, penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan aspek pelayanan yang memerlukan perhatian dan perbaikan di samping perbaikan aspek *waiting time*, prosedur, dan persyaratan pelayanan. Dengan demikian, RSUD Dr. Soetomo akan lebih berkomitmen dalam memfasilitasi penanganan aduan, saran dan masukan melalui pemanfaatan media massa (cetak, elektronik, termasuk media sosial) guna mengakomodasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan saran serta dapat menerima *feedback* atas keluhan dan saran yang telah direspons dengan cepat. Media massa ini juga digunakan dalam penyampaian keterbukaan informasi, kejelasan, kemudahan persyaratan, dan prosedur pelayanan di RSUD Dr. Soetomo;

➤ **Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar**

Persentase nilai ideal pelayanan RS yang sesuai standar pada tahun 2017 dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian sebesar 111% **(mencapai target)**. Tercapainya nilai ideal pelayanan RS yang disebabkan oleh meningkatnya manajemen bed, koordinasi yang baik, antara dokter penanggung jawab pelayanan dengan perawat penanggung jawab pasien disertai dengan *flow* pasien yang terencana dan teratur mulai dari rawat jalan, rawat inap, dan penunjang;

➤ **Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target**

Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target pada tahun 2017 dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 86% atau dengan tingkat capaian sebesar 95,56% **(belum mencapai target)**. Tidak tercapainya nilai SPM berkaitan erat dengan tidak tercapainya nilai IKM, waktu tunggu operasi elektif, dan waktu tunggu pelayanan rawat jalan;

- Persentase kesesuaian terhadap standar akreditasi rumah sakit

Persentase kesesuaian terhadap standar akreditasi rumah sakit pada tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 86,36% atau dengan tingkat capaian sebesar 107,95% (**mencapai target**). Tercapainya target tersebut di antaranya disebabkan oleh komitmen dan dukungan pimpinan untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan, adanya Pekan Akreditasi (*accreditation weeks*) di setiap instalasi, peningkatan pemahaman dan kemampuan SDM Rumah Sakit melalui pendidikan dan pelatihan, terdapat pengukuran rutin standar akreditasi melalui *self assessment* sehingga sebelum dinilai oleh surveyor lebih siap dengan memperbaiki standar penilaian yang kurang terlebih dulu.

Sasaran 2: Meningkatnya mutu pendidikan/pelatihan di rumah sakit, ditetapkan dua indikator kinerja, yaitu:

- Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu

Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu pada tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 81,7% atau dengan tingkat capaian sebesar 102,13% (**mencapai target**). Tercapainya target ini disebabkan oleh kerja sama pendidikan dokter spesialis I RSUD Dr. Soetomo/Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga lebih mengutamakan kualitas lulusan dengan memperhatikan rasio dokter klinis dibandingkan dengan peserta didik untuk selalu ideal, yaitu 1:5. Selain itu, bimbingan yang intensif dan terencana antara dosen pembimbing dan mahasiswa turut berkontribusi atas tercapainya kelulusan PPDS I tepat waktu;

- Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi klinis dari RSDS

Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi klinis dari RSDS pada tahun 2017 dengan target sebesar 60% dan terealisasi sebesar 87,46% atau dengan tingkat capaian sebesar 145,77% (**mencapai target**). Penambahan ruang pendidikan pelatihan disertai tenaga

pengajar yang berkompetensi dan berpengalaman yang dimiliki RSUD Dr. Soetomo sehingga RSUD Dr. Soetomo dapat mencapai target kewajiban mendidik dan melatih tenaga kesehatan dari instansi atau rumah sakit lain. Sebagai rumah sakit tipe A pendidikan RSUD Dr. Soetomo selalu menjadi rujukan rumah sakit lain dalam meningkatkan kompetensi SDMnya. Sampai saat ini, RSUD Dr. Soetomo tidak dapat memenuhi semua permintaan pendidikan dan pelatihan tersebut disebabkan oleh masih terdapat kekurangan sarana prasarana kedokteran serta SDM pengajar. Selain itu, RSUD Dr. Soetomo berkewajiban meningkatkan kompetensi tenaga administrasi dan kesehatan yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan internal.

Sasaran 3: Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit, ditetapkan dengan satu indikator kinerja, yaitu:

- Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah

Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah pada tahun 2017 dengan target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 58,82% atau dengan tingkat capaian sebesar 117,64 (**mencapai target**). Terdapatnya penelitian unggulan melalui pendampingan dan pembiayaan di *Clinical Research Unit* (CRU) meningkatkan mutu penelitian sehingga hasil penelitian layak dimuat dalam jurnal, terutama terhadap penelitian-penelitian *clinical trial* atau eksperimental. Selain itu, SMF-SMF di RSUD Dr. Soetomo juga mendorong para anggotanya untuk rajin membuat karya tulis layak jurnal, terutama pada kasus-kasus sulit atau kompleks dan menjadi perhatian ilmuwan saat ini.

Sasaran 4: Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan, ditetapkan dengan satu indikator kinerja, yaitu:

- *Cost Recovery Ratio*

Cost recovery ratio pada tahun 2017 dengan target sebesar 60% dan terealisasi sebesar 73,73% atau dengan tingkat capaian sebesar 122,88% (**mencapai target**). Terpenuhinya target tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen pimpinan untuk selalu meningkatkan

efektivitas dan efisiensi anggaran, terutama terhadap pos-pos yang kurang efisien, di antaranya pengurangan penggunaan kertas, mematikan sumber daya air listrik dan air jika tidak diperlukan yang mana dalam pelaksanaannya dipantau oleh Tim Hemat Energi.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp 327.227.835.956,00 dan terealisasi sebesar Rp 296.554.661.003,00 atau 90,63%, untuk mendukung tiga kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp 1.145.067.790.214,13 dan terealisasi sebesar Rp 1.058.500.506.925,93 atau 92,44%, untuk mendukung satu kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan yang terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Penurunan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di RSUD Dr. Soetomo, terutama masalah penanganan aduan, saran, dan masukan. Nilai ini merupakan ukuran kepuasan/persepsi masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Dengan penanganan secara tepat maka rumah sakit akan kembali mendapatkan kepercayaan/*trust masyarakat* atas layanan kesehatan yang diberikan, persepsi mutu dan kepuasan masyarakat terhadap RSUD Dr. Soetomo akan meningkat;
- 2) Belum tercapainya nilai standar pelayanan minimal rumah sakit terkait erat dengan tidak tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, terutama manajemen pengaduan, saran, dan keluhan.

Solusi

- 1) RSUD Dr. Soetomo akan lebih berkomitmen dalam memfasilitasi penanganan aduan, saran dan masukan melalui pemanfaatan media massa (cetak, elektronik, termasuk media sosial) guna mengakomodasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan saran serta dapat menerima *feedback* atas keluhan dan saran yang telah direspons dengan cepat. Media massa ini juga digunakan dalam penyampaian keterbukaan informasi, kejelasan, kemudahan persyaratan, dan prosedur pelayanan di RSUD Dr. Soetomo;
- 2) Untuk meningkatkan nilai standar pelayanan minimal terutama target kepuasan masyarakat RSUD Dr. Soetomo akan lebih memfasilitasi penanganan aduan, saran, dan keluhan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas. Selain itu, RSUD Dr. Soetomo akan senantiasa berusaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan melalui pendidikan dan pelatihan SDM, menjaga mutu obat dan bahan habis pakai lainnya serta pemenuhan sarana, prasarana, peralatan sesuai standar dan kebutuhan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Lulus Reakreditasi KARS Versi 2012 Tingkat Paripurna Tahun 2017;
- 2) Terbaik Kategori *Corporate Social Responsibility Project* dari PERSI – IHMA Tahun 2017;
- 3) *Runner Up* Kategori *Human Resources Development Project* dari PERSI – IHMA Tahun 2017;
- 4) Juara 3 Terbaik RS Implementasi *Green Hospital* dari Kementerian Kesehatan;
- 5) Bapeten *Safety and Security Awards* Tahun 2017;
- 6) Juara I Kategori Inovasi Alat Kesehatan IndoHCF *Innovation Awards* Tahun 2017.

2.3 RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia;
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen RS yang profesional, akuntabel dan transparan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 * 100)
I. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat	1. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	100%	100%	100%
	2. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar versi KARS Internasional	90%	-	-
	3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	90%	87.34%	97%
	4. Bed Occupancy Rate (BOR)	73 %	66.25%	91%
	5. Average Length of Stay (ALOS)	7 hari	6.23 hari	89%
	6. Turn Over Interval (TOI)	2 hari	2.85 hari	143%
	7. Bed Turn Over (BTO)	44 kali	43.19 kali	98%
	8. Net Death Rate (NDR)	4.5 %	7.45%	0%
	9. Gross Death Rate (GDR)	6.5 %	10.46%	0%
	10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	84.27%	103%
1. Program Peningkatan	1. Presentase Indikator Standar Pelayanan	90%	87.34%	97.04%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
Pelayanan BLUD	Minimal (SPM)			
	2. Bed Occupancy Rate (BOR)	73 %	66.25%	91%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	84.27%	103%
	4. Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan	80%	61.17%	76%
	5. Presentase penyelesaian pendidikan di RS	-	-	-
II. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Publikasi ilmiah Internasional	1. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan Pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi KARS.	85%	98%	115%
	2. Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS	100 %	100%	100%
	3. Persentase karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional	87.5%	100%	114%
1. Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Presentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	90%	87.34%	97.04%
	2. Bed Occupancy Rate (BOR)	73 %	66.25%	91%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	84.27%	103%
	4. Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan	80%	61.17%	76 %
	5. Presentase penyelesaian pendidikan di RS	-	-	-
III. Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	1. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu	100%	100%	100%
	2. Cost Recovery Ratio (CRR)	86 %	82.4%	96%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	84.27%	103%
	4. Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik	95%	100%	105%
1. Program Peningkatan	1. Presentase Indikator Standar Pelayanan	90%	87.34%	97%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
Pelayanan BLUD	Minimal(SPM)			
	2. Bed Occupancy Rate (BOR)	73 %	66.25%	91%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	84.27%	103%
	4. Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan	80%	61.17%	76%
	5. Presentase penyelesaian pendidikan di RS	-	-	-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan layanan umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kedokteran RS	100%	86.53%	86.53%

Pada tahun 2017 kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 (satu) : Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 pada tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tercapai target sebesar 100%. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat lulus paripurna pada tanggal 28 Maret 2015. Upaya yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:
 - 1) Mengadakan kick off untuk membangun komitmen bagi seluruh pokja dan jajaran manajemen;
 - 2) Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - 3) Mengadakan bimbingan akreditasi yang langsung dipimpin oleh KARS;
 - 4) Mengadakan self assesment oleh surveyor internal;

- 5) Mengadakan mock survey untuk melihat kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan sertifikasi ini antara lain sbb:

Pembentukan tim khusus yang berfungsi sbg evaluator dan motivator terhadap implementasi seluruh elemen akreditasi dan membuat analisa capaian standar (self assessment) secara berkala dan RTL.

- Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi KARS Internasional pada tahun 2017 dengan target sebesar 90% belum dapat dinilai pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena RSUD Dr. Saiful Anwar Malang baru akan dilakukan penilaian akreditasi Internasional menggunakan Standar Akreditasi Nasional Rumah Sakit (SNARS) Edisi I pada tanggal 19-23 Februari tahun 2018.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai sesuai dengan target, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan kinerja Surveyor Internal sesuai dengan BAB di akreditasi untuk melakukan telusur ke seluruh area di RS;
 - 2) Membentuk tim lima bintang yang bertugas memperbaiki hasil temuan baik surveyor internal maupun Asesor KARS di masing-masing satuan kerja tempatnya bekerja;
 - 3) Membentuk tim 5 (lima) K, yang meliputi Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan, baik petugas, pengunjung maupun pasien, yang penilaiannya akan dikait dengan reward remunerasi.
- Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target, pada tahun 2017 dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 87.34% atau persentase pencapaiannya sebesar 97%. Belum tercapai indikator tersebut sesuai target karena ada beberapa indikator SPM misalnya angka kematian < 48 jam (NDR)

dan angka kematian kasar (GDR) yang belum tercapai sesuai target yaitu sebesar 100%, karena RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit rujukan dimana pasien yang dirujuk ke RSUD Dr. Saiful Anwar golden periodnya telah hilang, sehingga sulit sekali untuk mencapai angka NDR dan GDR sesuai standart. Akan tetapi upaya peningkatan pelayanan tetap dilakukan, untuk meminimalisir angka NDR dan GDR. Sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia maupun pemenuhan sarana prasarana;
 - 2) Melakukan monitoring dengan cara kunjungan rutin ke satuan kerja oleh tim penanggungjawab SPM;
 - 3) Evaluasi secara berkala melalui umpan balik hasil laporan kepada satuan kerja terkait;
 - 4) Rapat evaluasi kinerja antara struktural dan fungsional serta Dewan Pengawas RS.
- Bed Occupancy Rate (BOR) atau rata-rata pemakaian tempat tidur, pada tahun 2017 dengan target sebesar 73% dan terealisasi sebesar 66.25% atau prosentase pencapaian sebesar 91%, meskipun realisasinya belum sesuai dengan target akan tetapi indikator ini masih dalam standar ideal yaitu 60-85%, sehingga pencapaian tersebut masih tergolong ideal;
 - Average Length of Stay (ALOS) atau rata-rata lama rawatan pasien, pada tahun 2017 dengan target sebesar 7 hari dan terealisasi sebesar 6.23 hari atau prosentase capaian sebesar 89%. Pencapaian tersebut masih tergolong ideal karena standar idealnya 6-9 hari;
 - Bed Turn Over (BTO) atau rata-rata penggunaan tempat tidur dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia, pada tahun 2017 dengan target sebesar 44 kali dan terealisasi sebesar

- 43.19 kali sehingga prosentase capaian 98%. Pencapaian tersebut masih tergolong ideal karena standar idealnya 40-50 kali per tahun;
- Turn Over Interval (TOI) atau rata-rata hari tempat tidur ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya, pada tahun 2017 dengan target sebesar 2 hari dan terealisasi sebesar 2.85 hari atau persentase capaian sebesar 143%. Pencapaian tersebut masih tergolong ideal karena standar idealnya 1-3 hari;
 - NDR yaitu tingkat kematian ≥ 48 jam, pada tahun 2017 dengan target sebesar 4.5% dan terealisasi sebesar 7.45% atau persentase pencapaiannya belum sesuai target yaitu 0%.
 - Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum per 100 penderita keluar, pada tahun 2017 dengan target 6.5% dan terealisasi sebesar 10.46% atau persentase terhadap belum tercapai target 0%. Capaian NDR dan GDR pada tahun 2016 masih tinggi karena RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit rujukan tersier atau Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III (PPK III), sehingga pasien yang datang rata-rata hasil rujukan dari PPK I dan PPK II yang pada umumnya dalam kondisi sudah parah (critical ill). RSUD Dr. Saiful anwar Malang dalam periode tahun 2017 sudah mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian BOR, ALOS, TOI, BTO. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut antara lain:
 - 1) Meningkatkan mutu pelayanan, melalui upaya peningkatan profesionalisme SDM dan pemenuhan sarana prasarana RS sesuai standar;
 - 2) Melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - 3) Upaya evaluasi Standar Prosedur Operasional (SPO) di seluruh unit pelayanan;
 - 4) Meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit rujukan, untuk segera merujuk pasien yang tidak mampu ditangani;

- 5) Memberikan pelatihan kegawatdaruratan komprehensif.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2017 dengan target sebesar 81.5 dan terealisasi sebesar 84.27 atau persentase pencapaian sebesar 103.4%. Upaya yang dilakukan RSUD Dr. Saiful Anwar dalam meningkatkan nilai IKM, antara lain:
- 1) Meningkatkan mutu pelayanan, melalui upaya peningkatan profesionalisme SDM dan pemenuhan sarana prasarana RS sesuai standar;
 - 2) Melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - 3) Melayani keluhan maupun pengaduan masyarakat melalui sms, wa, fb, email maupun telepon.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan publikasi ilmiah internasional, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan Pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi KARS pada tahun 2017 dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 98% atau persentase capaiannya sebesar 115% disebabkan hasil temuan para asesor tahun lalu langsung ditindaklanjuti, baik dengan upaya perbaikan, maupun peningkatan mutu, selain itu seluruh elemen penilaian yang ada pada standar Akreditasi KARS dapat dipenuhi dan implementasikan secara sempurna;
- Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS, pada tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau persentase capaiannya sebesar 100% hal ini disebabkan karena seluruh peserta didik dapat menyelesaikan semua stase yang ada dipendidikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut, dengan cara menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Instansi Pendidikan tempat peserta didik berasal.

- Persentase karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional pada tahun 2017 dengan target sebesar 87,5% dan terealisasi sebesar 100% atau persentase pencapaiannya sebesar 114%. Pencapaian tersebut karena RSSA mengikuti kompetisi baik dalam tingkat regional, nasional dan internasional. Hasil dari kompetisi tersebut dapat diimplementasikan di satuan kerja masing-masing, guna mempermudah, membantu meringankan pekerjaan yang ada. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut, dengan cara sosialisasi melalui nota dinas agar setiap satker mengirimkan proposal penelitian yang akan dibiayai RS, diadakan pekan mutu dengan salah satu agendanya lomba QCC di tingkat RS, dan pemenangnya akan diikuti sertakan pada ajang regional, nasional maupun internasional.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional, dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu dengan, pada tahun 2017 dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% atau persentase pencapaiannya sebesar 100%. RSUD Dr. Saiful Anwar capaian kinerja yang berupa kegiatan maupun keuangan sudah dapat terukur. Hal itu dapat dibuktikan melalui perjanjian kinerja yang dilakukan diawal tahun, kemudian setiap pengukuran kinerja di setiap tribulan, mulai dari pejabat eselon II sampai dengan staf. Dengan mengukur kinerja setiap tribulan maka progress setiap kegiatan dapat diketahui secara dini, sehingga langkah-langkah perbaikan bisa segera dapat diambil, untuk indikator yang tidak tercapai. Upaya untuk mempertahankan capaian agar sesuai dengan target yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dengan bidang terkait untuk indikator untuk membahas indikator yang tidak dapat tercapai. Laporan-laporan yang menjadi bahan kelengkapan SAKIP dilaksanakan tepat waktu. Adanya software e-

planning dan e-monev yang memudahkan dalam memonitor rangkaian SAKIP mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

- Cost Recovery Ratio (CRR) pada tahun 2017 dengan target sebesar 86% dan terealisasi sebesar 82.4% atau persentase capaiannya 82.4%. Belum tercapainya sesuai target karena pendapatan RS yang tidak sesuai target akibat klaim BPJS yang belum terbayar. Upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses verifikasi klaim BPJS dengan membentuk Instalasi Kerjasama Pembayaran Kesehatan. Harapannya apabila verifikasi bisa cepat, akurat dan akuntabel maka pembayaran BPJS kepada RS juga bisa segera.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2017 dengan target sebesar 81.5 dan terealisasi sebesar 84.27 atau persentase pencapaian sebesar 103.4%. Upaya yang dilakukan RSUD Dr. Saiful Anwar dalam meningkatkan nilai IKM, antara lain:
 - 1) Meningkatkan mutu pelayanan, melalui upaya peningkatan profesionalisme SDM dan pemenuhan sarana prasarana RS sesuai standar;
 - 2) Melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - 3) Melayani keluhan maupun pengaduan masyarakat melalui sms, wa, fb, email maupun telepon.
- Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik pada tahun 2017 dengan target 100% terealisasi sebesar 100% atau persentase pencapaiannya sebesar 100%. Penilaian pegawai dilaksanakan setiap akhir tahun. Hasil yang didapatkan tidak terdapat pegawai yang hasil penilaian kinerjanya buruk, sehingga capaiannya 100%. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM, memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi, adanya *punishment* melalui pemotongan poin remunerasi bagi pegawai yang *indisipline*.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 597.600.535.860.79 dan terealisasi sebesar Rp 568.257.613.048.07 atau 95.09% untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom;
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 133.761.857.397 dan terealisasi sebesar Rp 115.741.061.801 atau 86.53% untuk mendukung dari 5 (lima) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Berubah-ubahnya regulasi dalam tahun anggaran berjalan khususnya untuk anggaran yang bersumber dari subsidi (pajak rokok) sehingga menyulitkan OPD dalam memulai proses realisasi penyerapan anggaran.
- 2) Pada awal-awal tahun realisasi penyerapan relatif rendah dibandingkan dengan target normatif. Hal ini karena penyerapan lebih berfokus pada kebutuhan operasional rutin pelayanan. Sedangkan untuk belanja modal masih memerlukan proses lelang, sehingga banyak menumpuk di tribulan berikutnya.

Solusi

- 1) RSSA melaksanakan monitoring evaluasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan terhadap pengelola anggaran. Antara lain dengan menciptakan sistem e-planning, rapat koordinasi rutin terkait evaluasi penyerapan anggaran.

- 2) Mengadakan rapat koordinasi dengan para pengguna anggaran secara rutin pertribulan, sehingga dapat memonitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran.
- 3) Proses lelang dilaksanakan lebih awal sehingga penyerapan anggaran bisa sesuai dengan target dan tidak menumpuk diakhir tahun.

e. Penghargaan

- 1) Mendapat penghargaan Nasional Tahun 2017, *Contribution and Commitment for the completion of "THE HAPIE STUDY"* yaitu lebih selektif terhadap penugasan luar yang terkait biaya perjalanan dinas;
- 2) Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional *Sinovik* "MENCEGAH PERDARAHAN TALI PUSAT (TALISAT) DENGAN KARET TALI PUSAT (KALISAT)", pada Tahun 2017 di Tingkat Nasional;
- 3) Penghargaan Nasional "*Gold Award*" pada acara Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN) XXI dan *Internasional Quality and Productivity Convention 2017 (IQPC)* dengan risalah "Meniadakan Kejadian Produksi ASI Minimal Pada Pasien Post Partum di IRNA III dalam Kurun Waktu 6 Bulan", pada Tahun 2017;
- 4) Mendapat penghargaan "*Ruby Award*" dalam Kompetisi Mutu *IQC* pada Tahun 2017 dan meraih Score Tertinggi ke 2 Tingkat Nasional.

2.4. RSUD Dr. SOEDONO MADIUN**a. Tujuan**

Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh masyarakat.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan medis dan penunjang medis	1. Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (BOR). Standar : 60% - 85%	63 %	66,19%	95,18 %
	2. Rata-rata lama rawat seorang pasien (ALOS). Standar : 6 – 9 hari	6 hari	5 hari	83,3 %
	3. Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (BTO). Standar : 40 – 50 kali	50 kali	58 kali	116%
	4. Rata-rata hari dimana tepat tidur tidak ditempati (TOI). Standar: 1-3 hari	2 hari	2 hari	100%
	5. Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar (NDR). Standar: < 25 ‰	25 ‰	58,34‰	42,85%
	6. Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (GDR). Standar: ≤ 45‰	45 ‰	98,90‰	219,78%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan pengadaan peningkatan sarana dan prasarana BLUD	100%	70,48%	70,48%
2. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum daerah (BLUD)	Prosentase pelayanan yang memenuhistandar pelayanan minimal	96%	83,31%	86,78%
II. Meningkatnya mutu pelayanan manajemen rumah	1. Prosentase pemenuhan elemen	80 %	85%	106,25%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
sakit	akreditasi pelayanan yang memenuhi Standar Akreditasi RS Versi 2012			
	2. Prosentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	76 %	83,31%	109,62%
	3. Prosentase kemampuan rumah sakit menutup biaya operasional dari pendapatan (CRR)	76 %	79,24%	104,26%
	4. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	76%	76,62%	100.81%
III. Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan	Prosentase pemenuhan elemen penilaian akreditasi rumah sakit pendidikan dengan kriteria A	80 %	82 %	102,5%

Pada Tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan medis dan penunjang medis, ditetapkan 6 indikator kinerja, yaitu:

- Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (BOR).

Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (BOR) RSUD dr. Soedono Madiun pada Tahun 2017 dengan target sebesar 63% dan terealisasi sebesar 66,19%, atau 95,18%. Dari realisasi tersebut menggambarkan bahwa target sudah tercapai. Berdasarkan standar dari Departemen Kesehatan bahwa realisasi tahun 2017 masuk dalam range (60 – 86%);

- Rata-rata lama rawat seorang pasien (ALOS)

Rata-rata lama rawat seorang pasien (ALOS) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 6 hari dan terealisasi sebesar 5 hari atau 83,3%. Dari realisasi tersebut bahwa target belum tercapai.

Berdasarkan Standar dari Departemen Kesehatan adalah 6 – 9 hari, realisasi ALOS tahun 2017 belum tercapai;

➤ Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (BTO)

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (BTO) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 50 kali dan terealisasi sebesar 58 kali atau 116%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa target belum tercapai. Berdasarkan Standar Departemen Kesehatan 40 kali – 50 kali dan realisasi BTO tahun 2017 belum tercapai;

➤ Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati (TOI)

Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati (TOI) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 2 hari dan terealisasi sebesar 2 hari atau 100%. Dari data tersebut bahwa target tercapai. Berdasarkan Standar dari Departemen Kesehatan 1 – 3 hari dan realisasi TOI tahun 2017 tercapai;

➤ Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar (NDR)

Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar (NDR) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 25‰ dan terealisasi sebesar 58,34‰ atau 42,85%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa target belum tercapai. Berdasarkan Standar Departemen Kesehatan NDR adalah < 25‰. Realisasi NDR tahun 2017 tidak tercapai;

➤ Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (GDR)

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar (GDR) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 45‰ dan terealisasi 98,90‰ atau 219,78%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa target belum tercapai. Berdasarkan Standar Departemen Kesehatan GDR Tahun 2017 $\leq 45\%$.

Evaluasi : Pencapaian Sasaran 1 merupakan indikator-indikator pelayanan di RSUD dr. Soedono Madiun. Pencapaian indikator

tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. RSUD dr. Soedono Madiun ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/359/KPTS/013/2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur mampu rujukan dari wilayah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Mekanisme rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) Pertama ke Faskes Kedua, Faskes Ketiga. Dari mekanisme berjenjang tersebut dalam merujuk tidak boleh melompat dari Faskes Pertama ke Faskes ke Tiga. Salah satu faktor eksternal tersebut adalah kondisi pasien yang dirujuk tidak dapat dikendalikan. Adapun faktor internal akan dilakukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung Rumah Sakit Rujukan Regional.

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan manajemen rumah sakit, ditetapkan 3 indikator kinerja, yaitu:

- Prosentase pemenuhan elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi Standar Akreditasi RS Versi 2012

Prosentase pemenuhan elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi Standar Akreditasi RS Versi 2012 pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 85% atau 106,25%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa target telah terpenuhi. RSUD dr. Soedono Madiun telah terakreditasi dengan Predikat Lulus Tingkat Paripurna pada Tahun 2015. Dan pada Tahun 2016 dilakukan survey verifikasi pertama dan Tahun 2017 dilakukan survey verifikasi kedua;

- Prosentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target

Prosentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target pada tahun 2017 dengan target sebesar 76% dan terealisasi sebesar 83,31% atau 109,62%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa target SPM tercapai. Beberapa pencapaian SPM dipengaruhi faktor eksternal, yaitu pada kalibrasi alat-alat kedokteran yang ada di RSUD dr. Soedono Madiun yang diusulkan dikalibrasi ada sebagian yang tidak terkalibrasi karena instansi yang berwenang dalam kalibrasi alat kekurangan tenaga;

- Prosentase kemampuan rumah sakit menutup biaya operasional dari pendapatan (CRR)

Prosentase kemampuan rumah sakit menutup biaya operasional dan pendapatan (CRR) pada tahun 2017 dengan target sebesar 76% dan terealisasi sebesar 79,24% atau 104,26%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa CRR mencapai target. Pencapaian target tersebut dipengaruhi peningkatan kunjungan pasien dan kelancaran dari klain BPJS;

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2017 dengan target sebesar 76% dan terealisasi sebesar 76,62% atau 123,58%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa IKM mencapai target. Pencapaian target tersebut dipengaruhi peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas pelayanan.

Sasaran 3: Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan, ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu:

- Prosentase pemenuhan elemen penilaian akreditasi rumah sakit pendidikan dengan kriteria A

Prosentase pemenuhan elemen penilaian akreditasi rumah sakit pendidikan dengan kriteria A pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 82% atau 102,5%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa target tercapai. Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh peningkatan sarana dan prasarana untuk

pemenuhan standar Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan di RSUD dr. Soedono Madiun.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp. 96.585.455.496,00 dan terealisasi sebesar Rp. 68.074.493.145,00 atau 70,48% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom;
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp. 215.490.916.122,01 dan terealisasi sebesar Rp. 201.293.128.353,00 atau 93,41% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Belum tercapainya beberapa target yang terkait dengan pelayanan karena sistem rujukan yang berjenjang dan kondisi pasien karena waktu yang dipakai untuk sampai di RSUD dr. Soedono lebih lama;
- 2) Instansi yang menangani Kalibrasi Alat-Alat Kedokteran yang berwenang kekurangan tenaga untuk melakukan kalibrasi alat yang sudah didaftarkan.

Solusi:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan yang optimal sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Barat – Selatan Provinsi Jawa Timur;
- 2) Melakukan komunikasi dengan instansi terkait dan Dinas Kesehatan Provinsi terkait kalibrasi alat-alat kedokteran.

2.5 RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan
- 2) Mewujudkan kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan
- 3) Mewujudkan kualitas SDM sesuai standar kompetensi profesi
- 4) Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan
- 5) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan transparan

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan	Persentase sarana dan prasarana Alat Kedokteran rumah sakit sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi	79%	97,97%	124
1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan BLUD	Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana dan prasarana RS (%)	82	82	100
II. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,4	78,23	94,94
	2. Persentase kepuasan pelayanan kesehatan Jamaah Haji	82,2	81,6	99,27
	3. Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai target	88	70,86	80,52
	4. Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada	100	100	100

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
	setiap standar akreditasi versi 2012			
	5. Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien	60	33,3	55,55
	6. BOR (Bed Occupancy Rate)	72	71,72	99,61
	7. ALOS (Average Long Of Stay)	4,4	3,1	70,45
	8. TOI (Turn Over Interval)	1,6	2,25	140,63
	9. BTO (Bed Turn Over)	47	62	131,91
	10. NDR (Net Death Rate)	18,4	9,5	51,63
	11. GDR (Gross Death Rate)	29,4	24,9	84,69
1.Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Kepuasan pasien/ masyarakat, karyawan, dan manajemen RS terhadap kualitas pelayanan RS	82	82	100

Pada tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang telah dicapai berdasarkan sasaran yang didukung oleh dana pembangunan dan fungsional adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu :

- Persentase sarana dan prasarana Alat Kedokteran rumah sakit sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi :

Persentase sarana dan prasarana Alat Kedokteran rumah sakit sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi, realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 97,97% dari target yang ditentukan sebesar 79%. Capaian kinerja ini mencapai 124%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit telah melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggandidukung oleh 11 indikator kinerja yaitu :

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di RSUD Haji Surabaya pada tahun 2017 adalah sebesar 78,23 dari target yang ditetapkan sebesar 82,4. Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan ada beberapa unsur penilaian yang turun diantaranya waktu tunggu pelayanan dan prosedur pelayanan.

➤ Persentase kepuasan pelayanan kesehatan Jamaah Haji :

Pelayanan kesehatan jamaah haji yang menjadi indikator kinerja RS baru ditetapkan pada tahun 2016. Target tahun 2017 adalah sebesar 82,2 dengan realisasi sebesar 81,6.

➤ Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai target :

Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai target pada tahun 2017 adalah sebesar 70,86% dari target sebesar 88%. Realisasi capaian SPM pada tahun 2017 sebesar 70,86%, meningkat dari tahun sebelumnya. Belum tercapainya indikator SPM sesuai dengan target antara lain disebabkan karena belum optimalnya pemenuhan sumberdaya, belum optimalnya implementasi SPO, belum optimalnya monitoring pelaksanaan tindak lanjut perbaikan pada setiap periode waktu evaluasi, koordinasi dengan unit-unit terkait, kurangnya kesadaran/kesungguhan terhadap pelaksanaan SPM.

➤ Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standar akreditasi versi 2012 :

Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standar akreditasi versi 2012 capaian kinerja pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2017 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa RSUD Haji Surabaya mampu mempertahankan capaian nilai standart akreditasi versi 2012 dalam kurun waktu tahun 2015-2017 dan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standart. Predikat yang telah dicapai RSUD Haji Surabaya adalah lulus paripurna 100% berdasarkan sertifikat dari KARS nomor KARS-SERT/119/VI/2015. Namun dalam hal ini rumah sakit tetap

menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga penilai akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.



Gambar 4.5 Penghargaan Akreditasi Rumah Sakit th 2012 lulus paripurna

➤ Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien :

Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 33,33% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran keselamatan pasien dengan capaian sebesar 55,55%. Hal tersebut dikarenakan dari 6 indikator sasaran keselamatan pasien hanya 2 yang memenuhi standar pada tahun 2017. Perlu adanya upaya untuk menjadi daya ungkit meningkatkan nilai capaian indikator sasaran keselamatan pasien di tahun mendatang.

➤ BOR (Bed Occupancy Rate) :

Realisasi BOR tahun 2017 sebesar 71,72 % dari target yang ditetapkan sebesar 72%, dimana target tersebut merupakan target tahunan rumah sakit. Realisasi BOR rumah sakit sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Depkes yaitu antara 60% - 85% (DEPKES RI, 2005). Peningkatan BOR dari tahun 2016 ke tahun 2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penggunaan tempat tidur (TT) sudah bisa digunakan secara optimal karena perbaikan ruangan yang sebelumnya rusak telah dipenuhi.

➤ ALOS (Average Long Of Stay):

Realisasi kinerja ALOS (Average Long Of Stay) pada tahun 2017 sebesar 3,1 dari target yang ditetapkan sebesar 4,4. Namun berdasarkan standart Depkes untuk nilai ALOS yang ideal yaitu antara 6-9 hari, nilai ALOS yang dibawah standar justru menunjukkan kinerja yang lebih baik karena perawatan pasien sampai dengan pasien pulang (KRS) sudah sesuai dengan *Clinical Pathway* yang ditetapkan Rumah Sakit.

➤ TOI (Turn Over Interval) :

Realisasi kinerja TOI (Turn Over Interval) pada tahun 2017 sebesar 2,25 dari target yang ditetapkan sebesar 1,6 hari. Realisasi TOI tersebut masih berada dalam kisaran standar Depkes (1-3 hari).

➤ BTO (Bed Turn Over) :

Capaian kinerja BTO (Bed Turn Over) pada tahun 2017 sebesar 62 kali dari target yang ditetapkan sebesar 47 kali. Realisasi BTO untuk tahun 2017 cukup besar dikarenakan pemakaian TT cukup tinggi dari pasien pulang ke pasien berikutnya.

➤ NDR (Net Death Rate) :

Realisasi kinerja NDR (Net Death Rate) pada tahun 2017 sebesar 9,5‰ dari target yang ditetapkan sebesar 18,6‰. Hal tersebut menunjukkan mutu pelayanan di RS semakin meningkat, karena indikator ini berarti angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar semakin menurun. Dalam hal ini Nilai NDR semakin menurun menunjukkan bahwa angka kematian pasien rawat inap > 48 jam yang dirawat semakin mampu ditekan. Nilai NDR dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar dihitung keseluruhan dan berdasarkan jenis kelamin.

➤ GDR (Gross Death Rate) :

Capaian kinerja GDR (Gross Death Rate) pada tahun 2017 sebesar 24,9‰ dari target yang ditetapkan sebesar 29,4‰. Hal ini memberikan gambaran mutu pelayanan kesehatan yang ada sudah baik untuk pelayanan Rawat Inap maupun penanganan kegawatan.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD , dengan anggaran PAPBD Rp. 26.422.881.447,- Realisasi sebesar Rp. 23.987.801.301,-atau 90,78% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan anggaran PAPBD Rp. 184.489.445.514,57,- Realisasi sebesar Rp. 162.444.981.834,-atau sebesar 88,05% untuk mendukung1 kegiatan yang secara rinci terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan :**

- 1) Penerapan indikator keselamatan pasien masih perlu perhatian karena konsistensi petugas dalam menjalankan sasaran keselamatan pasien masih belum optimal
- 2) Utilisasi alat alat belum dapat termonitor dengan baik karena belum semua alat dapat difasilitasi utilitasnya dengan menggunakan SIM (Sistem Informasi Manajemen)

Solusi :

- 1) Meningkatkan kepatuhan petugas dalam implementasi sasaran keselamatan pasien dengan jalan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap 1 bulan sekali.
- 2) Melakukan koordinasi dengan SIM, untuk membuat aplikasi monitor utilitas alat.

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

- 1) Penghargaan tertinggi “ Diamond Medal ” dalam Kompetisi Budaya Kerja (KBK) tingkat Nasional KBK “Pharmakeia” Instalasi Farmasi Tahun 2017.

2.6 RUMAH SAKIT Jiwa Menur

a. Tujuan

Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 * 100)
I. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di Rumah Sakit yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	1. Bed Occupancy Rate (BOR)	73%	78,13%	107,03
	2. Average Length of Stay (ALOS)	24 hari	27 hari	87,5
	3. Bed Turn Over (BTO)	10 kali	9,49 kali	94,9
	4. Turn Over Interval (TOI)	10 hari	8,41 hari	115,9
	5. Persentase indikator SPM yang mencapai target	84,50%	83,33%	98,62
	6. Cost Recovery Rate (CRR)	43%	49,11%	114,98
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (konversi) terhadap seluruh layanan	86	79,199	92,09
	8. Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial di masyarakat	87%	95,42%	109,68
	9. Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi RS Versi 2012	81%	99,66%	123,04
	10. Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar	100%	100%	100%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pasien pasung terlayani	100%	100%	100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	79,199	92,09

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 * 100)
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)				
3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Bed Occupancy Rate (BOR)	73%	78,13%	107,03
	2. Persentase pencapaian indikator pelayanan RS	100%	100%	100
	3. Persentase kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS	100%	99,89%	99,89

Pada Tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di Rumah Sakit yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yaitu:

- Bed Occupancy Rate (BOR) dalam satuan %, dengan target sebesar 73% dan terealisasi sebesar 78,13% atau 107,03 persen. Persentase capaian telah mencapai target karena BOR adalah tingkat hunian yaitu jumlah pasien dirawat dibanding jumlah tempat tidur. Target tercapai karena adanya peningkatan jumlah pasien rawat Inap tahun 2017 sebesar 2937 orang, dan tahun 2016 sebesar 2573 orang;
- Average Length of Stay (ALOS) dalam satuan hari, dengan target sebesar 24 hari dan terealisasi sebesar 27 hari atau 87,50 persen. Persentase capaian belum mencapai target karena ALOS adalah lama dirawat (lebih lama belum tentu lebih baik). ALOS tahun 2017 tinggi karena masih adanya keluarga pasien yang tidak segera menjemput pasien yang sudah waktunya dipulangkan, dan adanya pasien pasung

dengan penyulit dan komorbiditas yang memerlukan hari perawatan lebih lama;

- Bed Turn Over (BTO) dalam satuan kali, dengan target sebesar 10 kali dan terealisasi sebesar 9,49 kali atau 94,90 persen. Persentase capaian belum mencapai target karena karena BTO adalah berapa kali satu tempat tidur digunakan dalam satu tahun. BTO tidak mencapai target karena tingginya ALOS atau lama dirawat, sehingga pasien menempati satu tempat tidur lebih lama. Sehingga frekuensi satu tempat tidur ditempati menjadi lebih sedikit;
- Turn Over Interval (TOI) dalam satuan hari, dengan target sebesar 10 hari dan terealisasi sebesar 8,41 hari atau 115,90 persen. Persentase telah mencapai target karena karena TOI adalah rata – rata lama tempat tidur tidak dipakai dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Keberhasilan capaian TOI karena meningkatnya kecepatan perpindahan dari ruang akut ke ruang tenang;
- Persentase indikator SPM yang mencapai target dalam satuan %, dengan target sebesar 84,5% dan terealisasi sebesar 83,33% atau 98,62 persen. Persentase capaian belum mencapai target masih adanya indikator per unit yang belum mencapai target antara lain di Rawat jalan yaitu waktu tunggu, Intalasi Laboaratorium dan Instalasi Farmasi;
- Cost Recovery Rate (CRR) dalam satuan % , dengan target sebesar 43,% dan terealisasi sebesar 49,11% atau 114,98 persen. Persentase capaian telah mencapai target karena adanya peningkatan pendapatan yaitu tahun 2017 sebesar Rp 36.264.999.077,42 dari tahun 2016 sebesar Rp 32.165.911.071,79;
- Indeks Kepuasan Masyarakat (konversi) (Survey Kepuasan Masyarakat) terhadap seluruh layanan, dengan target sebesar 86 dan terealisasi sebesar 79,199 atau 92,09 persen. Persentase capaian belum mencapai target karena secara umum SKM dari masing – masing unit layanan belum memenuhi target yaitu berkisar dari

terendah 78,949 (Instalasi Radiologi & Elektromedik) sampai tertinggi 79,615 (Instalasi Radiologi). Faktor kemungkinan penyebab berdasarkan pendapat pasien di Instalasi Radiologi, masih adanya petugas yang kurang ramah, adanya petugas yang tidak bersedia jika ditanya. Instalasi Laboratorium yaitu adanya penerimaan pasien yang sangat baik, penanganan cepat, petugas ramah, komunikasi baik dan suasana enak. Demikian halnya SKM perunsur berkisar dari terendah, unsur waktu pelayanan 77,700 sampai tertinggi unsur kompetensi pelaksana 80,808. Faktor kemungkinan penyebab kecepatan layanan, adanya keluhan di sejumlah klinik khususnya rawat jalan terkait kehadiran dokter tepat waktu, adanya keluhan menunggu obat di Farmasi yang terlalu lama. Sedangkan unsur kompetensi petugas adanya petugas yang sopan dan ramah, dokter baik, ramah dan penuh perhatian. Upaya yang telah dilakukan yaitu penegakan SOP kehadiran dokter dan peningkatan publikasi pada papan pengumuman untuk pasien terkait jam layanan antara jam pemberian pelayanan dan jam dibukanya loket pendaftaran;

- Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial di masyarakat dalam satuan %, dengan target sebesar 87% dan terealisasi sebesar 95,42% atau 109,68 persen. Persentase capaian telah mencapai target karena (1) Semakin meningkatnya kemampuan dokter dengan adanya pelatihan baik internal maupun eksternal. (2) Semakin meningkatnya ilmu farmasi atau pengobatan bagi penderita gangguan jiwa, sehingga tersedia obat – obat baru dengan efek yang jauh lebih baik. (3) Adanya kebijakan bahwa seluruh pasien rawat inap ditangani oleh psikiater, dibantu oleh dokter. (4) Semakin dikembangkannya kegiatan terapi ADL (Activity Daily Living) dan TAK (Terapi Aktivitas Kelompok) oleh Tim Perawatan di ruangan. (5) Sudah mulai terlaksananya kegiatan di Instalasi Rehabilitasi Mental Psikosial, dimana pasien rawat inap mendapat mendapatkan berbagai terapi antara lain terapi kerja, terapi olah raga dan terapi

musik. Terapi kerja meliputi pembuatan sulaman, anyaman, sulak, melukis dan membuat bunga, sehingga membantu percepatan kesembuhan pasien;

- Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi RS Versi 2012 dalam satuan %, dengan target sebesar 81% dan terealisasi sebesar 99,66% atau 123,04 persen. Persentase capaian telah mencapai target karena adanya upaya RS untuk menindaklanjuti dan memperbaiki hasil rekom KARS sehingga elemen rekom di tahun 2016 sebanyak 52 elemen menjadi 4 elemen di tahun 2017;
- Persentase pasien pasung terlayani dalam satuan %, dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau 100 persen. Persentase capaian telah mencapai target karena semua pasien pasung yang datang ke RS Jiwa Menur semua terlayani. Hal ini juga karena adanya kebijakan Gubernur, Jatim Bebas Pasung, dan ditunjang inovasi RSJ Menur Multi Level Manajemen Pasung, sehingga terjadi peningkatan pasien dan rujukan pasung ke RSJ Menur.

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp Rp 224.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 184.508.500,- atau 82,06%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp 5.660.662.746,- dan terealisasi sebesar Rp 5.124.010.598,- atau 90,52%, untuk mendukung 6 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;

- 3) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 34.763.029.068,82 dan terealisasi sebesar Rp 35.283.628.550 atau 101,5%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih tingginya ALOS karena berbagai sebab;
- 2) Masih adanya indikator SPM yang belum memenuhi target diantaranya waktu tunggu di Instalasi Rawat Jalan, dimana indikator ini juga seirama dengan hasil IKM kecepatan layanan di rawat jalan yang bernilai kurang;
- 3) Meskipun CRR telah mencapai target, namun peningkatan pendapatan RSJ Menur cenderung stagnan;
- 4) Masih belum terpenuhinya indikator IKM sesuai target.

Solusi

- 1) Upaya yang dilakukan untuk tingginya ALOS (lama dirawat) yaitu dilakukannya pendataan ALOS bulanan di setiap ruangan, dilakukannya sistem ALARM berjenjang 3 tahap bagi pasien yang seharusnya pulang, dan peningkatan edukasi bagi keluarga pasien. Sehingga ALOS dapat dikembalikan lagi menjadi 24 hari;
- 2) Upaya yang dilakukan yaitu penegakan SOP jadwal layanan di klinik agar kembali sesuai jadwal, penataan ulang pemanfaatan ruang poliklinik dan penambahan kursi tunggu, agar ruang tunggu pasien lebih nyaman, dan pemasangan TV dengan materi edukasi;
- 3) Meningkatkan pendapatan rumah sakit dengan perubahan naman RSJ Menur, penambahan fasilitas pelayanan yaitu Gedung Diagnostic Center, penambahan pelayanan Mind and Body Check Up dan Cost Containment;

- 4) Memperbaiki indikator pelayanan yang dinilai kurang yaitu unsur kecepatan layanan (di Poli Jiwa dan Farmasi) dengan penegakan SOP jadwal pemeriksaan oleh dokter dan Unit layanan di Instalasi Radiologi terkait petugas yaitu membudayakan senyum, sapa, salam dalam pelayanan prima.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) TOP 99 Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) Tahun 2017 dari Kemenpan-RB dengan Tema HOME PROGRAMME (HP) Solusi Anak Berkebutuhan Khusus;
- 2) Penghargaan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) Tahun 2017 dari Kemendagri, dengan RS Jiwa Menur membawa tema SACEMIRA Sabtu Ceria Minggu Gembira;
- 3) Ditetapkan mewakili Jawa Timur dalam event UNPSA untuk inovasi Multilevel Manajemen Pasung (MLM Pasung).

2.7 RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU

a. Tujuan

- Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
- Meningkatkan kualitas manajemen RS yang profesional dan akuntabel dengan didukung sistem teknologi informasi yang handal
- Meningkatkan ketersediaan sumber daya untuk menjadi RS Kelas B

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 * 100)
I. Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1. BOR	60,00	52,34	87,23
	2. TOI	≤3,00	3,16	94,67
	3. NDR	≤23,00	24,51	93,43
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	93,92	110,49
	5. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	80,00	82,41	103,02
	6. Persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012	100,00	100,00	100,00
	7. Persentase peningkatan kunjungan pasien rawat jalan	10,00	19,85	198,5
	8. Cost Recovery Rate	80,00	67,23	84,04
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase angka keberhasilan MDGs	80,00	80,00	100,00
2. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase Cakupan Kinerja Pelayanan Rumah sakit	70,00	94,00	134,28

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
II. Meningkatnya kualitas manajemen RS yang profesional dan akuntabel dengan didukung sistem teknologi informasi yang handal	Persentase unit RS yang sudah terintegrasi SIMRS	70,00	57,14	81,63
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase sarana prasarana dengan standar RS sesuai Kemenkes	80,00	82,68	103,35
III. Meningkatnya ketersediaan sumber daya untuk menjadi RS Kelas B	1. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS Kelas B	80,00	82,68	103,35
	2. Persentase kelengkapan jumlah SDM sesuai dengan standar RS Kelas B pendidikan	80,00	81,39	101,74
	3. Persentase ketersediaan jenis pelayanan sesuai dengan standar RS Kelas B	80,00	93,75	117,19
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase sarana prasarana dengan standar RS sesuai Kemenkes	80,00	82,68	103,35

Pada Tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, ditetapkan 8 indikator kinerja yaitu:

➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

Bed Occupancy Rate (BOR) pada tahun 2017 dengan target sebesar 60,00% dan terealisasi sebesar 52,34% atau 87,23 persen **(belum mencapai target)**. BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur rawat inap pada satuan waktu tertentu atau singkatnya adalah angka penggunaan tempat tidur rawat inap. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Kemenkes RI. 2005). Nilai BOR jika dilihat secara menyeluruh memang belum sesuai dengan standar Kemenkes, akan tetapi jika dilihat di masing-masing ruang rawat inap, banyak ruang dengan angka penggunaan tempat tidur yang ideal. Beberapa penyebab masih rendahnya angka pemanfaatan tempat tidur antara lain:

- a. Ruang Dahlia: Bila ada pasien TB di ruang kelas yang memiliki lebih dari 1 tempat tidur, maka tempat tidur sisanya yang ada di ruangan tersebut tidak bisa diisi pasien dengan diagnosa selain TB.

Tabel 4.1 Capaian BOR Ruang Rawat Inap RSU Karsa Husada Batu Tahun 2017

RUANGAN	NILAI BOR (%)
Dahlia	36.80
Kemuning	56.62
Teratai	69.53
Mawar	57.27
ICU	48.58
Seruni	34.92
Peri	32.30
Matahari	27.82
Unit stroke	82.19

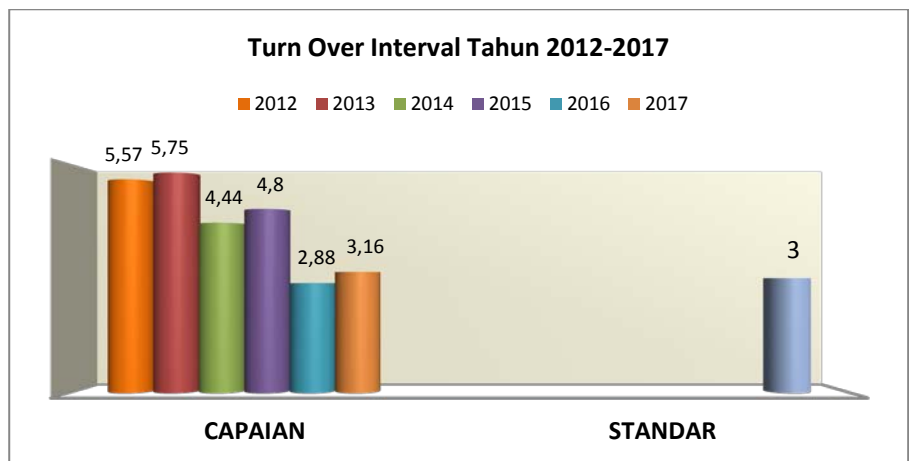
RUANGAN	NILAI BOR (%)
Paviliun	64.66
RSU Karsa Husada Batu	52.34

*Sumber Data : Rekam Medis RSU Karsa Husada Batu

➤ Turn Over Interval (TOI)

Turn Over Interval (TOI) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 3,00 hari dan terealisasi sebesar 3,16 hari atau 94,67 persen (**belum mencapai target**).

TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya (Kemenkes RI;2005) atau tenggang perputaran tempat tidur. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.



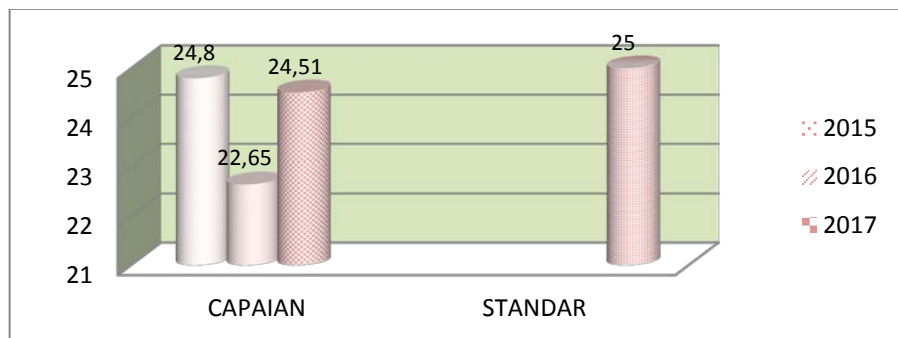
Gambar 4.6 Capaian Turn Over Interval (TOI) RSU Karsa Husada Batu Tahun 2012-2017

TOI yang tinggi dapat diturunkan dengan melakukan restrukturisasi ruang rawat inap.

➤ Nett Death Rate (NDR)

Nett Death Rate (NDR) pada Tahun 2017 dengan target maksimal 23,00 per mil dan terealisasi sebesar 24,51 permil atau 93,43 persen (**belum mencapai target**).

NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005). Standar nilai NDR menurut Kemenkes ≤ 25 per mil. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Beberapa penyebab belum tercapainya target NDR adalah masih adanya pasien kritis yang menolak untuk dirujuk, peralatan kesehatan yang masih belum cukup lengkap, komplikasi penyakit yang diderita pasien.



Gambar 4.7 Capaian *Nett Death Rate* (NDR) RSUD Karsa Husada Batu Tahun 2015-2017

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 85,00% dan terealisasi sebesar 93,92% atau 110,49 persen (Mencapai target).

Tabel di bawah ini merupakan nilai interval indeks kepuasan masyarakat untuk tiap – tiap unsurnya secara keseluruhan :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Pelayanan Seluruh Unit RSUD Karsa Husada Batu

No	Unsur Pelayanan	NRR Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	2,93	Sangat Baik
2	Prosedur	2,93	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	2,63	Sangat Baik
4	Biaya / Tarif	2,86	Sangat Baik

No	Unsur Pelayanan	NRR Unsur	Keterangan
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	2,88	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	2,92	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	2,91	Sangat Baik
8	Maklumat Pelayanan	2,72	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,63	Sangat Baik

*Sumber Data : Humas RSU Karsa Husada Batu

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil penilaian interval Indeks Kepuasan Masyarakat yang diteliti dalam survei ini. Dari sembilan unsur pelayanan, semuanya berada dalam kategori “Sangat Baik” (nilai antara 2,36 – 3,00). Sembilan unsur pelayanan tersebut adalah :persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan kritik dan saran. Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan terhadap unsur pelayanan RSU Karsa Husada Batu pada tahun 2017 ini sebesar 93,92%.

➤ **Persentase Indikator SPM yang mencapai target**

Persentase indikator SPM yang mencapai target pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80,00% dan terealisasi sebesar 82,41% atau 103,02 persen (**Mencapai target**). Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (Kepmenkes RI No.129 / Menkes / SK /II / 2008). SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka,

terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Dari 22 jenis pelayanan, jumlah indikator yang ada di masing-masing jenis pelayanan sebanyak 91 indikator dan yang memenuhi standar tercapai 82,41%.

Tabel 4.3 Capaian SPM di RSUD Karsa Husada Batu Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan	Σ Indikator tiap unit pelayanan	Σ Indikator yang mencapai target SPM
1	Gawat Darurat	8	5
2	Rawat Jalan	5	5
3	Rawat Inap	10	9
4	Bedah	7	7
5	Persalinan dan Perinatologi	9	8
6	Intensif	2	1
7	Radiologi	4	4
8	Laboratorium	4	3
9	Rehabilitasi Medik	3	3
10	Farmasi	5	3
11	Gizi	3	3
12	Transfusi Darah	2	1
13	GAKIN	1	1
14	Rekam Medik	4	3
15	Limbah	2	2
16	Administrasi dan Manajemen	9	7
17	Ambulance/Kereta Jenazah	2	2
18	Pemulasaraan Jenazah	1	1
19	IPS	3	2
20	Laundry	2	2
21	PPI	3	2
22	Satpam	2	1
Total		91	75

*Sumber Data : Tim SPM RSUD Karsa Husada Batu

➤ **Persentase elemen penilaian akreditasi RS versi 2012 yang memenuhi standar**

Persentase elemen penilaian akreditasi RS versi 2012 yang memenuhi standar pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% atau 100,00 persen (**mencapai target**). Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi KARS merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi KARS. Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 (mencapai 100%) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar $\geq 80\%$ dari seluruh elemen yang ada. Sebagai tindak lanjut, di bulan april sudah dilakukan survei verifikasi untuk menilai follow up dari rekomendasi yang diberikan saat survei akreditasi tahun 2016.

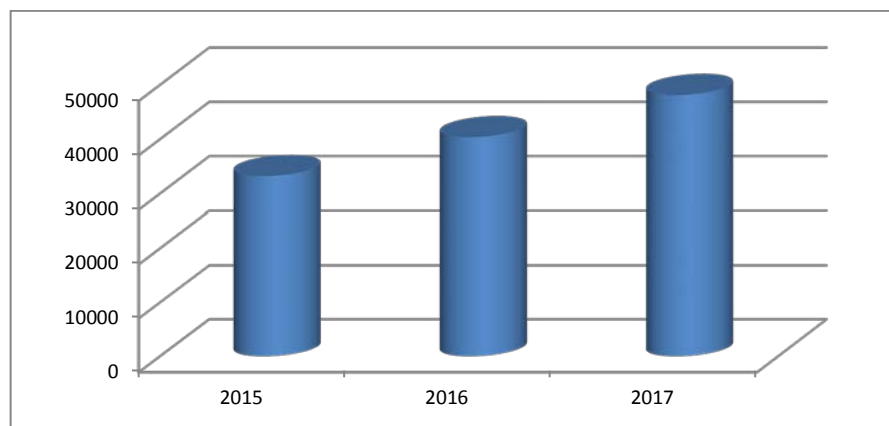


Gambar 4.8 Persentase Nilai Kelulusan Akreditasi RS Versi 2012

➤ **Persentase peningkatan kunjungan rawat jalan**

Persentase peningkatan kunjungan rawat jalan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 19,85%

atau 198,5 persen (**Mencapai target**). Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu secara bertahap tumbuh dan berkembang memperbaiki penampilan Rumah Sakit dan meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan dengan melakukan diversifikasi layanan. Pada tahun 2017, Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu melakukan pengembangan pelayanan antara lain pelayanan hemodialisa dan patologi anatomi. Sampai saat ini, jumlah kunjungan pelayanan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Untuk memaksimalkan pelayanan, Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu sedang mengusulkan perubahan kelas rumah sakit dari RSU Kelas C menjadi RSU kelas B. Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu juga berhasil mendapatkan penghargaan berupa Lulus Akreditasi Tingkat Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit sehingga sudah ada pengakuan bahwa Rumah Sakit Umum Karsa Husada telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit.



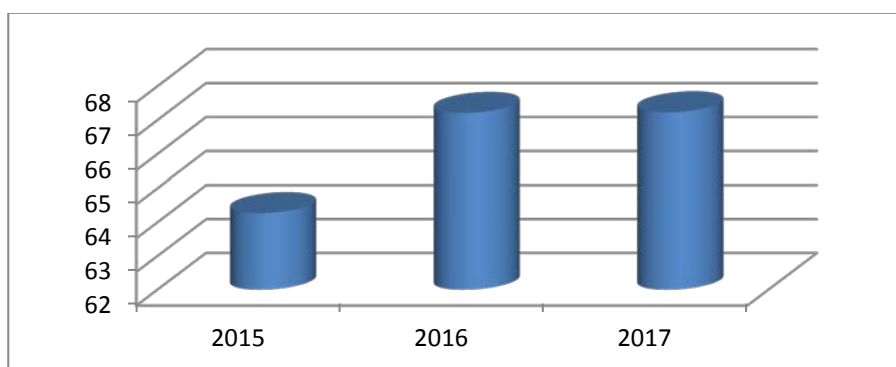
Gambar 4.9 Kunjungan Instalasi Rawat Jalan RSU Karsa Husada Batu Tahun 2015-2017

➤ **Cost Recovery Rate (CRR)**

Cost Recovery Rate (CRR) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80,00% dan terealisasi sebesar 67,23% atau 84,04 persen (**belum mencapai target**).

Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional

rumah sakit. Agar optimalisasi pendapatan terus meningkat maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, pemenuhan peralatan medis untuk menggantikan alat medis yang rusak atau aus, pemenuhan kebutuhan reagen pada pemeriksaan laboratorium dan juga perbekalan farmasi. Angka capaian CRR selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

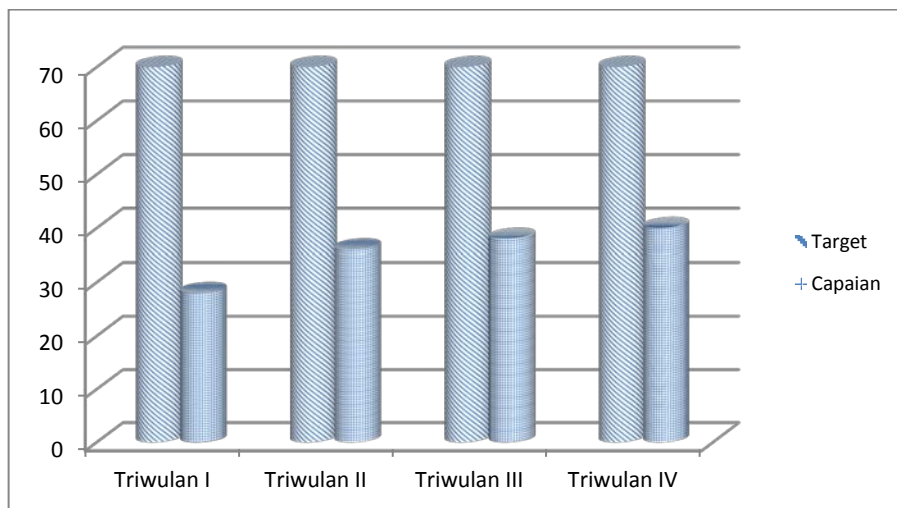


Gambar 4.10 Cost Recovery Rate Tahun 2015-2017

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas manajemen RS yang profesional dan akuntabel dengan didukung sistem teknologi informasi yang handal, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ **Persentase Unit RS yang sudah terintegrasi SIM RS**

Persentase unit RS yang sudah terintegrasi SIM RS pada Tahun 2017 dengan target sebesar 70,00% dan terealisasi sebesar 57,14% atau 81,63 persen (**belum mencapai target**) Hal ini terjadi karena ada keterlambatan dalam pemenuhan *hardware* dan juga pemasangan jaringan.



Gambar 4.11 Capaian Unit Kerja yang Terintegrasi SIM RS Tahun 2017

Tabel 4.4 Cakupan Unit Kerja yang Terintegrasi SIMRS berdasarkan *Grand Design*

NO	MODUL	UNIT KERJA	SUB UNIT	JUMLAH MODUL	CAPAIAN TAHUN 2017			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	SI APEL 3 IN 1	1. Instalasi Rekam Medis	Pendaftaran Rawat Jalan	1	1	1	1	1
			Pendaftaran Rawat Inap dan IGD	1	1	1	1	1
			Rekam Medis	1	1	1	1	1
		2. Instalasi Rawat Jalan	Poli Paru	1	1	1	1	1
			Poli Syaraf	1	1	1	1	1
			Poli Mata	1	1	1	1	1
			Poli THT	1	1	1	1	1
			Poli Bedah	1	1	1	1	1
			Poli Orthopedi	1	1	1	1	1
			Poli Kandungan	1	1	1	1	1
			Poli Komplementer	1	1	1	1	1
			Poli Gigi	1	1	1	1	1
			Poli Anestesi	1	1	1	1	1
			Poli Penyakit	1	1	1	1	1

NO	MODUL	UNIT KERJA	SUB UNIT	JUMLAH MODUL	CAPAIAN TAHUN 2017			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Dalam					
			Poli Bedah	1	1	1	1	1
			Poli Anak	1	1	1	1	1
			Poli Jantung	1	1	1	1	1
			Poli Kulit Kelamin	1	1	1	1	1
			Poli DM	1	1	1	1	1
		3. Instalasi Rawat Inap	Ruang Teratai	1	1	1	1	1
			Ruang Kemuning	1	1	1	1	1
			Ruang Anggrek	1	1	1	1	1
			Ruang Mawar	1	1	1	1	1
			Ruang Dahlia	1	1	1	1	1
			Ruang Seruni	1	1	1	1	1
			Ruang Matahari	1	1	1	1	1
			Ruang Perinatologi	1	1	1	1	1
			ICU	1	1	1	1	1
		4. Instalasi Gawat Darurat		1	0	1	1	1
		5. Farmasi	Depo Rawat Jalan	1	0	1	1	1
			Depo Rawat Inap	1	0	1	1	1
			Depo OK	1	0	1	1	1
			Gudang Farmasi	1	0	0	1	1
		6. Radiologi		1	0	1	1	1
		7. Laboratorium		1	0	1	1	1
		8. Gizi		1	0	1	1	1
		9. OK		1	0	0	0	1
		10. Kamar Jenazah		1	0	0	0	0
		11. Manajemen Keperawatan		1	0	0	0	1
		12. Loker Pembayaran		1	0	0	1	1

NO	MODUL	UNIT KERJA	SUB UNIT	JUMLAH MODUL	CAPAIAN TAHUN 2017			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		13. Diklat		1	0	1	1	1
		14. Hemodialisa		1	0	0	0	0
		15. Endoskopi		1	0	0	0	0
		16. OK Paru		1	0	0	0	0
		17. OK Mata		1	0	0	0	0
		18. Poli VCT		1	0	0	0	0
		19. Bank Darah		1	0	0	0	0
		SUB TOTAL		47	28	36	38	40
2	SI BATU	1. Sistem Kepegawaian		1	0	0	0	0
		2. Sistem Akuntansi dan Keuangan		1	0	0	0	0
		3. Sistem Gudang		1	0	0	0	0
		4. System Aset dan Inventory		1	0	0	0	0
		5. System Persuratan		1	0	0	0	0
		6. Sisten Perencanaan Pengadaan, Monitoring dan Evaluasi	Perencanaan	1	0	0	0	0
			Pengadaan	1	0	0	0	0
			Monev	1	0	0	0	0
		7. System Perpustakaan		1	0	0	0	0
		SUB TOTAL		9	0	0	0	0
3.	SI MANTAP	1. Decision Suppport Sistem	Direktur	1	0	0	0	0
			Kasi UKM Litbang	1	0	0	0	0
			Kasie Yanmed	1	0	0	0	0

NO	MODUL	UNIT KERJA	SUB UNIT	JUMLAH MODUL	CAPAIAN TAHUN 2017			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			KA TU	1	0	0	0	0
			Rekam Medis	1	0	0	0	0
			Akuntansi	1	0	0	0	0
			Kasir	1	0	0	0	0
			IPS	1	0	0	0	0
			Monev	1	0	0	0	0
		2. Business Intelligence System	Direktur	1	0	0	0	0
			Kasi UKM Litbang	1	0	0	0	0
			Kasie Yanmed	1	0	0	0	0
			KA TU	1	0	0	0	0
			PMKP	1	0	0	0	0
			SUB TOTAL	14	0	0	0	0
			TOTAL	70	28	36	38	40

**Sumber Data : Tim IT RSU Karsa Husada Batu*

Sasaran 3: Meningkatnya ketersediaan sumber daya untuk menjadi RS Kelas B, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

➤ **Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS kelas B**

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS kelas B pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80,00% dan terealisasi sebesar 82,68% atau 103,35 persen (**mencapai target**). Sesuai dengan standar Permenkes 56 Tahun 2014 Peralatan yang harus ada paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Sampai dengan tahun 2017,

untuk peralatan yang ada di RSUD Karsa Husada Batu baru mencapai 72,34% dari standar yang ada, sedangkan sarana-prasarana mencapai 93,02%. Dengan banyaknya peralatan kesehatan yang harus dipenuhi, RSUD Karsa Husada masih memerlukan anggaran yang besar pula.

Tabel 4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana RSUD Karsa Husada Batu sesuai Standar RSUD Kelas B

No	Persyaratan	Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket
1	Bangunan/ Ruang Gawat Darurat	+	+	
2	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	
3	Bangunan/ Ruang Rawat Inap	+	+	
4	Bangunan/ Ruang Bedah	+	+	
5	Bangunan/ Ruang Rawat Intensif	+	+	
6	Ruang Isolasi	+	+	
7	Ruang Penyimpanan Peralatan dan Barang Bersih	+	+	
8	Ruang Perawat	+	+	
9	Ruang Staf Dokter	+	+	
10	Ruang Tunggu Keluarga Pasien	+	+	
11	Bangunan/ Ruang Isolasi	+	+	
12	Bangunan/ Ruang Radiologi	+	+	
13	Bangunan/Ruang Laboratorium Klinik	+	+	
14	Bangunan/ Ruang Farmasi	+	+	
15	Bangunan/Ruang Gizi	+	+	
16	Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	
17	Bangunan/Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	+	+	
18	Bangunan/Ruang Pengelolaan	+	+	

No	Persyaratan	Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket
	Limbah			
19	Ruang Sterilisasi	+	+	
20	Bangunan/Ruang Laundry	+	+	
21	Bangunan/Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	
22	Bangunan/Ruang Administrasi	+	+	
23	Bangunan/Ruang Gudang	+	+	
24	Bangunan/Ruang Sanitasi	+	+	
25	Bangunan/Rumah Dinas & Asrama	+	+	
26	Ambulans	+	+	
27	R. Komite Medis	+	+	
28	R. PKMRS	+	+	
29	R. Perpustakaan	+	+	
30	Ruang Jaga Koass	+	-	
31	R. Pertemuan	+	+	
32	Ruang Diklat	+	+	
33	Ruang Diskusi	+	+	
34	Skill Lab dan Audiovisual	+	-	
35	Ssitem Informasi Rumah Sakit	+	+	
36	Sistem Dokumentasi Medis Pendidikan	+	-	
37	Listrik	+	+	

No	Persyaratan	Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket
38	Air	+	+	
39	Gas Medis	+	+	
40	Limbah Cair	+	+	
41	Limbah Padat	+	+	
42	Penanganan Kebakaran	+	+	
43	Komunikasi	+	+	

*Sumber Data : Bagian Aset RSU Karsa Husada Batu

➤ **Persentase kelengkapan jumlah dan jenis SDM sesuai dengan standar RS kelas B**

Persentase kelengkapan jumlah dan jenis SDM sesuai dengan standar RS kelas B dengan target sebesar 80,00% dan terealisasi sebesar 81,39% atau 101,74 persen (**Mencapai target**). Pada tahun 2017, RSU Karsa Husada telah melaksanakan rekrutmen tenaga BLUD. Meskipun sudah mencapai target di tahun ini, tapi jumlah dan jenis SDM yang wajib dipenuhi sebagai RSU Kelas B masih cukup banyak, antara lain: pemenuhan dokter gigi, dokter spesialis bedah, dokter spesialis patologi anatomi dan rehabilitasi medis, dokter spesialis gigi konservasi serta apoteker.

Tabel 4.6 Kondisi Sumber Daya Manusia RSU Karsa Husada Batu sesuai Standar RSU Kelas B

No	Persyaratan	Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket
A. Pelayanan Medik Dasar				
1.	Dokter Umum	12	14	
2.	Dokter Gigi	3	1	
B. Pelayanan Medik Spesialis Dasar				
1.	Penyakit dalam	3	4	
2.	Kesehatan anak	3	3	
3.	Bedah	3	2	

No	Persyaratan	Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket
4.	Obstetri & ginekologi	3	2	
C. Pelayanan Medik Spesialis Penunjang				
1.	Anestesiologi	2	2	
2.	Radiologi	2	2	
3.	Patologi Klinik	2	2	
4.	Patologi Anatomi	2	1	(MOU)
5.	Rehabilitasi Klinik	2	-	
D. Pelayanan Medik Spesialis Lain				
1.	Mata	1	2	
2.	Telinga Hidung Tenggorokan	1	2	
3.	Syaraf	1	2	
4.	Jantung dan Pembuluh Darah	1	2	
5.	Kulit dan Kelamin	1	1	
6.	Kedokteran Jiwa	1	-	
7.	Paru	1	1	
8.	Orthopedi	1	2	
9.	Urologi	1	1	
10.	Bedah Syaraf	1	-	
11.	Bedah Plastik	1	1	
12.	Kedokteran Forensik	1	-	
E. Pelayanan Medik Subspesialis				
1.	Bedah	1	1	
2.	Penyakit Dalam	1	-	
3.	Kesehatan Anak	1	-	
4.	Obstetri dan Ginekologi	1	1	
F. Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut				
1.	Bedah Mulut	1	1	(MOU)
2.	Konservasi / endodonsi	1	-	

No	Persyaratan	Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket
3.	Orthodonti	1	1	
G. Pelayanan Kefarmasian				
1	Kepala Instalasi Farmasi RS	1	1	
2	Apoteker bertugas di rawat jalan	4	2	
3	Apoteker bertugas di rawat inap	4	4	
4	Apoteker bertugas di gawat darurat	1	1	
5	Apoteker di ruang ICU	1	1	
6	Apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi farmasi	1	1	
7	Apoteker sebagai koordinator produksi farmasi	1	-	
H. Tenaga Kesehatan dan Petugas Lainnya				
1	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	1:1 (2/3 tenaga tetap)		
2	Gizi	+	+	13
3	Keterampilan Fisik	+	+	2
4	Radiografer	+	+	15
5	Fisikawan Medik	+	+	2
6	Petugas Proteksi Radiasi Medik	+	+	
7	Tenaga Elektromedik	+	+	4
8	Keteknisan Medis	+	+	
9	Rekam Medik	+	+	12
10	Petugas IPSRS	+	+	5
11	Petugas Pengelola Limbah	+	+	2
12	Petugas Kamar Jenazah	+	+	4

*Sumber Data: Kepegawaian RSU Karsa Husada Batu

➤ **Persentase ketersediaan jenis pelayanan sesuai dengan standar RS kelas B**

Persentase ketersediaan jenis pelayanan sesuai dengan standar RS kelas B dengan target sebesar 80,00% dan terealisasi sebesar 93,75% atau 117,19 persen (Mencapai target). Pada tahun 2017, jenis pelayanan yang tersedia sudah mencapai target yang ditetapkan. Sesuai dengan standar Rumah Sakit Umum Kelas B di Permenkes 56 Tahun 2014, masih ada beberapa jenis layanan yang harus segera dipenuhi antara lain; pelayanan gigi endodonsi, bank darah dan juga pelayanan rawat inap ICU yang jumlah tempat tidurnya belum sesuai standar.

Tabel 4.7 Kondisi Jenis Pelayanan RSUD Karsa Husada Batu sesuai Standar RSU Kelas B

No	Persyaratan	Standar Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket.
1	Pelayanan Medik Umum	Dasar Gigi Mulut KIA/KB	Sudah tersedia	Memenuhi
2	Pelayanan Gawat Darurat	24 jam & 7 hari seminggu	Sudah tersedia IGD level 2 dengan Sp.EM	Memenuhi
3	Pelayanan Medik Spesialis Dasar	Penyakit Dalam Kesehatan Anak Bedah ObsGyn	Sudah tersedia	Memenuhi
4	Pelayanan Medik Spesialis Penunjang	Anestesiologi Radiologi Patologi Klinik Patologi Anatomi Rehabilitasi Medik	Sudah tersedia	Pelayanan Rehab Medik sedang berproses, satu dokter PPDS
5	Pelayanan Medik	paling sedikit berjumlah 2 (dua)	Tersedia pelayanan	Memenuhi

No	Persyaratan	Standar Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket.
	Subspesialis	elayanan subspesialis dari 4 (empat) subspesialis dasar	subspesialis Bedah Digestif, serta Obstetri dan Ginekolog Konsultan	
6	Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut	paling sedikit berjumlah 3 (tiga) pelayanan	Tersedia Bedah Mulut, dan Orthodonti	Belum Memenuhi Kurang Konservasi/ Endodonsi, berproses mencari dokter tamu
6	Pelayanan Medik Spesialis Lain	paling sedikit berjumlah 8 (delapan) dari 12 (dua belas) pelayanan	Tersedia pelayanan Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Saraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Saraf, Bedah Plastik	Memenuhi
8	Pelayanan Kefarmasian	pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai	Sudah tersedia	Memenuhi

No	Persyaratan	Standar Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket.
		dan pelayanan farmasi klinik		
9	Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan	Sudah tersedia	Memenuhi
10	Pelayanan Penunjang Klinik	Pelayanan Bank Darah, Perawatan Intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, Gizi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik	Sudah tersedia	Pelayanan bank darah sedang dalam tahap persiapan alat
11	Pelayanan Penunjang Non Klinik	Laundry/Linen, Jasa Boga/Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemulasaraan Jenazah, Penanggulangan Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Pengelolaan Air Bersih	Sudah tersedia	Memenuhi (Pengelolaan Limbah Medis bekerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Putra Restu Ibu Abadi)
12	Pelayanan rawat inap	jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit 30%	48,87% (63TT)	Memenuhi
		jumlah tempat tidur perawatan intensif	3,76% (5 TT)	Belum Memenuhi,

No	Persyaratan	Standar Kelas B	Kondisi Saat Ini	Ket.
		sebanyak 5%		akan dipenuhi di tahun 2018 (pindah gedung baru)

**Sumber Data: Seksi Pelayanan Medik RSUD Karsa Husada Batu*

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 807.753.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 489.078.175,- atau 60,55%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp. 169.899.966.218,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.426.084.445,- atau 90,89%, untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp. 44.693.855.908,54 dan terealisasi sebesar Rp. 44.345.694.382,- atau 99,22%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Proses peningkatan kelas RSUD Karsa Husada Batu menuju Rumah Sakit Umum kelas B

- 2) Tuntutan pengembangan pelayanan seiring dengan pergeseran pola penyakit terbanyak yang semula penyakit menular menjadi penyakit tidak menular
- 3) Mempertahankan *performance* Rumah sakit yang sudah terakreditasi versi 2012 tingkat Paripurna dan tuntutan akreditasi SNARS
- 4) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk menunjang pelayanan rumah sakit belum optimal;
- 5) Adanya program JKN yang mendorong Pelayanan Kesehatan di RS memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya.
- 6) Rumah Sakit masih memerlukan upaya peningkatan dari sisi fisik bangunan dan prasarana (alat kesehatan/kedokteran, sistem penanggulangan kebakaran , gas sentral, jaringan limbah cair) serta jumlah sumber daya manusia (dokter spesialis, perawat dan tenaga kesehatan non medis yang kompeten).
- 7) Pengelolaan Keuangan Rumah sakit yang transparan, akuntabel dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Solusi:

- 1) Penyiapan seluruh dokumen pendukung kenaikan kelas rumah sakit dan pengurusan izin kenaikan kelas
- 2) Pengembangan layanan baru, antara lain;
 - o Hemodialisa
 - o Peningkatan layanan jantung dalam pemakaian alat echocardiografi, treadmill, cath lab.
 - o Pelayanan bedah mulut
 - o Pengembangan layanan patologi anatomi
- 3) Peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi dan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
- 4) Pengembangan layanan rawat inap, bedah sentral, Rawat Jalan, IGD, ICCU, NICU, pengembangan pelayanan medik;

- 5) Pemenuhan kebutuhan software dan hardware, penambahan jaringan serta pendampingan langsung pada operator SIM RS di masing-masing unit kerja.
- 6) Pengajuan anggaran APBD, Pajak rokok dan cukai untuk pembangunan alih fungsi gedung asma menjadi IGD dan IBS, Pembangunan ruang rawat inap maternal neonatal dan ICU terpadu serta pembelian alat kedokteran sesuai dengan kebutuhan RSU kelas B
- 7) Rekrutmen tenaga BLUD dan Peningkatan kompetensi SDM rumah sakit untuk tenaga medik, paramedik dan non kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan baik internal maupun external secara rutin.
- 8) Efisiensi penggunaan dana fungsional

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. The Best Reliable Hospital In Service Excellent Of The Year dalam Hospital Patient Satisfaction Award



Gambar 4.12 The Best Reliable Hospital In Service Excellent Of the Year

2. Best Medical Treatment & Service dalam Indonesia Business & Company Award

5. Rumah Sakit Terbaik Dalam Kinerja & Pelayanan Memuaskan dalam Anugrah Terbaik Rumah Sakit IAC, Desember 2017



Gambar 4.16 Rumah Sakit Terbaik Dalam Kinerja & Pelayanan Memuaskan

2.8 RUMAS SAKIT PARU JEMBER

a. Tujuan

➤ Umum

Menyediakan pelayanan kesehatan perorangan rujukan secara paripurna penyakit paru, jantung, bedah serta pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung kekhususannya dan atau kebutuhan Jawa Timur bagian Timur.

➤ Khusus

- 1) Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan
- 2) Melaksanakan *health promotion hospital* sebagai pusat informasi dan jejaring pelayanan kesehatan paru, bedah dan jantung serta menyelenggarakan penelitian pengembangan teknologi kesehatan tepat guna
- 3) Mewujudkan sarana prasarana, teknologi dan kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi rumah sakit khusus tipe B
- 4) Meningkatkan kesejahteraan pasien dengan melaksanakan pelayanan kesehatan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara paripurna berstandar International

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
1. Mewujudkan sarana prasarana, teknologi dan kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi rumah sakit khusus tipe B	Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai standar pelayanan (baru di tahun 2017)	90%	90%	100%
➤ Program Peningkatan	Prosentase responden yang puas	83%	87,89%	105,89%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	terhadap fasilitas/ sarana prasarana RS yang tersedia			
2. <i>Meningkatnya kuantitas dan pelayanan kesehatan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif dan paripurna berstandar internasional</i>	1. BOR (%)	72,26	49,52	68,53
	2. GDR (‰)	42,31	39,23	92,72
	3. NDR (‰)	24,6	24,96	101,46
	4. Prosentase elemen akreditasi yang memenuhi standar internasional (lembaga yang diakui ASQUA) (%)	100	93,33	93,33
	6. Angka kesembuhan pasien TB (%)	80	95	118,75
	7. Terakreditasi paripurna KARS versi 2017 (baru)	100	100	100
➤ Pogram Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Tingkat kebutuhan kegiatan operasional Rumah Sakit (bln)	12	12	100
	2. Cost Recovery Rate / CRR (%)	43,60	72,8	166,97
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (%)	82,88	78,01	94,12
	4. Indikator SPM yang mencapai target	88	74	84,09
	5. Capaian institusi yang terakreditasi	100	100	100

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 RS Paru Jember adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Mewujudkan sarana prasarana, teknologi dan kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi rumah sakit khusus tipe B

- Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai standar pelayanan (indikator sasaran baru) RS Paru Jember pada tahun 2017 sebesar 90% dan dalam hal ini sesuai dengan target pencapaian yaitu 90%. Tidak ada

pembandingan di tahun sebelumnya karena adanya perubahan indikator sasaran di tahun 2017 mengikuti perubahan Renstra.

Sasaran 2 : *Meningkatnya kuantitas dan pelayanan kesehatan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif dan paripurna berstandar internasional*

- *BOR (Bed Occupancy Ratio)* RS dan pada tahun 2017 sebesar 49,52%. Hal ini dikarenakan rumus perhitungan BOR pada tahun 2017 rumus perhitungan *BOR* menggunakan 88 (peningkatan jumlah TT RS) sehingga mempengaruhi hasil prosentase capaian/ prosentase capaian tidak mencapai target.
- *GDR (Gross Death Rate)* RS Paru Jember pada tahun 2017 sebesar 39,23 permil dengan capaian target 42,31 per mil. Dalam hal ini masuk dalam kriteria baik karena terkait dengan jumlah angka kematian yang terjadi di RS dalam kurun waktu 1 tahun.
- *NDR (Nett Death Rate)* Paru Jember pada tahun 2017 sebesar 24,96 permil dengan capaian target 24,6 per mil. Dalam hal ini masuk dalam kriteria baik karena terkait dengan jumlah angka kematian yang terjadi di RS saat dirawat di RS (kematian >48 jam)
- Prosentase elemen akreditasi yang memenuhi standar internasional (lembaga yang diakui ASQUA) pada tahun 2017 terdapat perubahan indikator sasaran sehingga pada realisasi elemen akreditasi 93,33% dengan target capaian 100%. Hal ini dikarenakan RS Paru Jember sudah mulai melengkapi kebutuhan baik secara dokumentasi maupun sarana prasarana dalam rangka akreditasi RS tipe B untuk tahun 2017.
- Angka kesembuhan pasien TB pada tahun 2017 sebesar 95% dengan target capaian melebihi target standar nasional yaitu 80%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pencegahan TB baik dari penyuluhan, *screening*, hingga membantu akses untuk upaya penyembuhan pasien TB semakin gencar. Dengan adanya tim PEKA TB beserta kader-kader penggerak yang sudah terlatih di masing-masing titik sasaran kegiatan, rumah sakit sangat terbantu untuk melacak orang yang teridentifikasi TB. Dengan begitu tim promosi kesehatan RS beserta tenaga medis terkait dapat segera

memberikan arahan, memberikan upaya pengobatan yang didampingi oleh kader/ Tim PEKA TB hingga tuntas (sembuh).

- Prosentase terakreditasi paripurna versi KARS 2017 di RS Paru Jember mencapai 80% dengan target capaian 100% karena belum mencapai tahap paripurna (tahap utama). Namun ditahun 2018 akan dilaksanakan upaya perbaikan untuk penilaian akreditasi demi mencapai tahap paripurna untuk RS Paru Jember.

Adanya penambahan indikator sasaran berdasarkan perubahan Renstra RS.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 47.802.581.540,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.926.468.780,- atau 68,88% (dari segi penyerapan anggaran) untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 25.134.023.499,90 dengan realisasi Rp. 23.645.835.677,- atau 94,08% dari segi penyerapan anggaran) untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Tidak tercapainya target PAD (pendapatan) disebabkan adanya pembayaran klaim BPJS yang masih belum bisa terbayar seluruhnya . Hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi target capaian pendapatan RS di tahun 2017
- Masih adanya responden yang belum puas terhadap fasilitas/ sarana prasarana yang telah tersedia di rumah sakit

Solusi :

- Perlunya tindak lanjut/ evaluasi terkait klaim BPJS dengan pihak BPJS itu sendiri
- Lebih memprioritaskan kebutuhan sarana prasarana RS baik dalam hal pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana yang lebih berhubungan langsung dengan pengguna fasilitas sarana prasarana (*customer*), dan evaluasi jenis pelayanan kesehatan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
- Rapat tindak lanjut dengan pihak manajemen

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Penghargaan untuk RS Paru Jember kategori "Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Kategori B".
- 2) Penghargaan untuk RS Paru Jember Kategori "Penyusunan SAKIP dengan Nilai B (Baik)".

2.9 RUMAH SAKIT PARU DUNGUS

a. Tujuan

- Meningkatkan kepuasan konsumen.
- Meningkatkan capaian upaya pengendalian penyakit TB.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	REALISASI		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Rumah Sakit	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS	85%	93,37%	109,85%
	2. Persentase capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus Madiun	85%	86,08%	101,27%
	3. CRR (Cost Recovery Rate)	60%	42,41%	70,68%
	4. Capaian UPT yang terakreditasi sesuai standar	100%	100%	100%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	I. Persentase capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus Madiun	85%	86,08%	101,27%
2. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS	85%	93,37%	109,85%
II. Meningkatnya Capaian Upaya Pengendalian Penyakit TB	1. Persentase Capaian Keberhasilan pengobatan	85%	89,83%	105,68%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	REALISASI		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
	Semua Kasus TB			
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Capaian Keberhasilan pengobatan Semua Kasus TB	85%	89,83%	105,68%

Pada Tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Paru Dungus yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Rumah Sakit

➤ Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus.

Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus pada Tahun 2017 adalah sebesar 86,08%. Dengan hasil ini berarti dari indikator dalam SPM sebagian besar sudah mencapai target tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa dari indikator yang ada di Rumah Sakit Paru Dungus sebanyak 79 indikator, tercapai sebanyak 68 indikator. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan layanan baru berupa kamar operasi dan penambahan dokter spesialis anastesi, spesialis syaraf dan dokter spesialis radiologi, serta terdapat penambahan sarana penunjang pelayanan.

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS;

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RS pada Tahun 2017 adalah sebesar 93,37%. Dengan hasil ini berarti rumah sakit telah dapat meningkatkan indeks kepuasan konsumen dalam kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam bentuk penambahan pengetahuan baik dalam bentuk inhouse traing maupun mengikutsertakan SDM RS dalam kursus dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pihak ketiga diluar rumah sakit, serta pembinaan manajerial rumah sakit yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur selaku SKPD dari UPT Rumah Sakit Paru Dungus.

➤ CRR (Cost Recovery Rate)

CRR (Cost Recovery Rate) merupakan salah satu indikator efisiensi dengan mengukur tingkat kemampuan menutup biaya dalam periode waktu tertentu. CRR Rumah Sakit Paru Dungus Madiun tahun 2017 adalah sebesar 42,41%. Data tersebut diambil dari hasil pembagian antara pendapatan dengan biaya operasional rumah sakit non belanja modal rumah sakit dikalikan 100%. Capaian CRR RS Paru Dungus adalah sebesar 70,68% dari target. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pembiayaan terhadap pelayanan di rumah sakit masih belum optimal dalam menutup biaya operasional. Penyebab dari belum tercapainya CRR RS Paru Dungus adalah karena sebagian besar pendanaan Rumah Sakit Paru Dungus merupakan subsidi dari Pemerintah. Jika dilihat dari aspek biaya disebabkan oleh besarnya biaya operasional rumah sakit.

➤ Capaian UPT yang terakreditasi sesuai standar

Akreditasi merupakan suatu pengakuan yang diberikan pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Rumah Sakit Paru Dungus telah melaksanakan akreditasi rumah sakit versi 2012 pada tahun 2017 pada bulan Mei dan dinyatakan lulus perdana. Hal tersebut didukung oleh pemenuhan sarana prasarana, peningkatan pelayanan, kejelasan tindakan pelayanan yang tertulis dalam SPO (Standar Prosedur Operasional) masing-masing unit serta kesiapan RS Paru Dungus dalam pelaksanaan akreditasi.

Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Upaya Pengendalian Penyakit TB, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu :

➤ Persentase Capaian Keberhasilan pengobatan Semua Kasus TB

Indikator kinerja Persentase Capaian Keberhasilan pengobatan Semua Kasus TB pada Tahun 2017 sebesar 89,83%. Hal ini menggambarkan bahwa program pengendalian penyakit TBC di Rumah Sakit Paru Dungus cukup baik. Pasien TBC yang ditemukan selama tahun 2017 sebanyak 390 pasien, yang diobati di Rumah Sakit Paru Dungus sebanyak 321 pasien dan sebanyak 65 pasien pengobatannya dilakukan di puskesmas. Dari seluruh pasien yang diobati di RS Paru Dungus Madiun, yang dinyatakan sembuh dan dengan pengobatan lengkap adalah sebanyak 159 pasien, 212 pasien masih dalam masa pengobatan dan pasien meninggal sebanyak 27 pasien. Dalam kurun waktu tahun 2017 tidak ada pasien Drop Out (Putus Berobat). Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan RS Paru Dungus Madiun di masyarakat, diantaranya penyuluhan rutin di RS dan di masyarakat, sosialisasi program RS di masyarakat, deteksi dini penyakit TB dan penyakit tidak menular, home visit pasien positif TB, pelacakan pasien mangkir (pasien yang berhenti berobat), pelatihan petugas promosi kesehatan, serta monitoring dan evaluasi program secara berkala.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp 3.500.000.000,- Realisasi sebesar Rp 3.237.281.767,- atau 92,49% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 10.054.416.200,51 Realisasi sebesar Rp 9.138.321.390,- atau 90,89% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp 274.719.991,- Realisasi sebesar Rp 207.162.674,- atau 75,41% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Sistem rujukan berjenjang yang diterapkan saat ini mengakibatkan capaian jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap tidak optimal.

Solusi:

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas lainnya dalam peningkatan pelayanan Kesehatan di RS
2. Mempertahankan Brand RS Paru serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Penghargaan Lulus Akreditasi Tingkat Perdana oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)



Gambar 4.17 Penghargaan Lulus Akreditasi Tingkat Perdana

2.10 RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI

a. Tujuan

Tercapainya derajat kesehatan secara optimal melalui penyelenggaraan kesehatan meliputi upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang didukung upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan serta sebagai pusat rujukan di wilayah Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %	80,14 %	93,18
	2. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM)	88 %	73,10 %	83,06
	3. Persentase Release Form Treatment (RFT) di Rumah Sakit Kusta Kediri	75 %	51,6 %	68,8
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase yang dilakukan skrining di wilayah binaan	85 %	100 %	117,64
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %	80,14 %	93,18
3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Bed Occupancy Rate (BOR)	53.6	9.04	16,86

Pada Tahun 2017 kinerja UPT Rumah Sakit Kusta Kediri yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri yang berkualitas, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu :

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 dengan target sebesar 86 % dan terealisasi sebesar 80,14 %. Belum mencapai target dikarenakan fasilitas ruang tunggu pasien umum kurang memadai, hal ini disebabkan Rumah Sakit Kusta Kediri dalam proses renovasi sarana pelayanan kesehatan (gedung).

➤ Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Persentase Standar pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2017 dengan target sebesar 88 % dan terealisasi sebesar 73,10 %. Belum mencapai target dikarenakan penilaian indeks kepuasan masyarakat tiap unit belum semua dilaksanakan.

➤ Persentase Release Form Treatment (RFT) di Rumah Sakit Kusta Kediri

Persentase Release Form Treatment (RFT) di Rumah Sakit Kusta Kediri pada tahun 2017 dengan target sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 51,6 %. Belum mencapai target dikarenakan pasien kusta semakin banyak yang default (berhenti pengobatan) dan pindah pengobatan ke fasilitas kesehatan tingkat satu yang terdekat.

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp 564.265.200,- dan terealisasi sebesar Rp 516.771.850,- atau 91,58 %, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp 2.330.146.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.258.110.779,- atau 96,91 %, untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp 7.989.737.248,75 atau 80,32 %, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, Rumah Sakit Kusta Kediri menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugasnya baik permasalahan internal maupun eksternal, yang dijabarkan sebagai berikut :

Permasalahan

- 1) Stigma masyarakat terhadap identitas Rumah Sakit Kusta
- 2) Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai
- 3) Kurangnya tenaga SDM Kesehatan (dokter spesialis)
- 4) Pelayanan kesehatan bagi penderita kusta bisa dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) sehingga mempengaruhi prevalensi (penurunan) pasien yang RFT di Rumah Sakit

Solusi

- 1) Perubahan Nomenklatur Rumah Sakit Kusta menjadi Rumah Sakit Umum Tipe D.
- 2) Penambahan gedung pelayanan untuk pasien umum, pembangunan gedung OK (bedah central) dan gedung CSSD.
- 3) Kerja sama (MOU) dengan dokter spesialis
- 4) Peningkatan promosi kesehatan (media cetak maupun elektronik) atas fasilitas layanan rumah sakit terbaru.

2.11. RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH MOJOKERTO**a. Tujuan**

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang terakreditasi paripurna.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang berkualitas.	1. Cost Recovery Rate (CRR)	75 %	75,06 %	100 %
	2. Indek Kepuasan masyarakat(IKM)	75 %	78,5 %	104,6 %
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	1. Terlaksananya evaluasi serologi didaerah endemis kusta.	300 anak	151anak	50,3 %
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tingkat pemenuhan sarana prasarana untuk meningkatkan BLUD	85 %	100%	117,6 %
3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Sarana prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi .	85%	95,93 %	112,8 %

Pada Tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang berkualitas ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :

➤ **Cost Recovery Rate (CRR)**

Persentase peningkatan Tahun 2017 dengan target sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 75,06 %, Hal ini menggambarkan bahwa Cost recovery Rate di Rumah Sakit Sumberglagah telah mencapai target yang diharapkan dengan

hasil seperti itu berarti bahwa dana yang beredar di Rumah sakit masih dalam batas nilai yang aman seiring pendapatan Rumah Sakit mengalami peningkatan dari tahun 2017 meningkat dengan dasar sebagai berikut :

CRR : Pendapatan operasional
Biaya Operasional

Tahun 2017 : $\frac{29.146.789.280,99}{38.831.893.792} \times 100\%$
: 75,06 %

➤ **Indek Kepuasan Masyarakat**

Survey indek kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 dengan target sebesar 75 % dan terealisasi sebesar 78.5 % , hal ini menggambarkan bahwa index kepuasan masyarakat telah mencapai target yang diharapkan, Hal ini dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh tenaga layanan di 9 unit layanan Rumah Sakit Sumberglagah kepada masyarakat.

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp 762.286.372,00,- dan realisasi sebesar Rp 652.210.656,00,- atau 85,56 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp 1.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 907.070.826 atau 90,71% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 31.606.443.873,13,- Realisasi sebesar Rp 29.211.044.014,- atau 92,42% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi

kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan : Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dari hasil kegiatan pemeriksaan serology kusta subklinik yang dilakukan di Kabupaten Sumenep ,Kepulauan RAAS dan Kabupaten Pasuruhan ,Kecamatan Nguling ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, karena dari 300 sampel anak yang terkena sub klinis kusta harus dievaluasi dari tahun 2011 sebesar 192 anak, tahun 2012 sebesar 190 anak, tahun 2013 sebesar 172 anak, tahun 2014 sebesar 138 anak, tahun 2015 sebesar 109 anak, mengalami penurunan dikarenakan antara lain :

- a) Anak mengikuti pindah domisili orang tua
- b) Pindah sekolah ketingkat lebih atas diluar daerah.
- c) Pindah karena bekerja di Lain daerah
- d) Menikah mengikuti suami diluar daerah

2) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum daerah.

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/ BP4Permasalahan yang masih dihadapi sampai triwulan keempat adalah pendapatan fungsional belum terealisasi sesuai target, salah satunya disebabkan karena klaim BPJS bulan November dan desember 2017 tidak bisa realisasi dari BPJS akibatnya pendapatan fungsional tidak mencapai target .

Solusi

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan : Peningkatan Aksesibilitas pelayanan Kepada masyarakat.Solusi kegiatan pemeriksaan serology kusta subklinik yang dilakukan di Kabupaten sumenep, Kepulauan RAAS dan Kabupaten

Pasuruhan, Kecamatan Nguling dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- a) Untuk mendapatkan hasil yang maksimal masih perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang ada di Kabupaten/Kota
 - b) Kegiatan Screning dan aktif melakukan monitoring Evaluasi di kabupaten/Kota.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum daerah.
- Kegiatan : Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait agar bisa terealisasi klaim BPJS tersebut.

2.12. RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagai pemberi pelayanan kesehatan mata yang bermutu, efektif dan efisien secara paripurna (Promotif, Preventif, Kurative dan Rehabilitatif).
- 2) Mewujudkan sistem manajemen Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang, transparan dan akuntabel.
- 3) Mewujudkan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang mempunyai Jejaring kemitraan, koordinasi, pendidikan dan penelitian dengan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan mata seluruh Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatkan mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	80%	82,36%	104,63%
	2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	82%	85,88%	104,73%
	3. Persentase Operasi Katarak	8,3%	9,6%	121,20%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Service Area, beserta kebutuhan Alkes dan Penunjangnya termasuk Mesin LASIK)	30%	20%	66,67%
2. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik	100%	100%	100%
III. Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi	1. Persentase Kabupaten – Kota yang terbina dalam	30%	34,21%	114,03%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
Kesehatan Mata di Jawa Timur	melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat 2. Screening Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK)	70%	76,14%	108,77%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur	20%	20%	100%

Pada Tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 82,36% atau 104,63% persen. Adanya peningkatan indeks IKM dari tahun-tahun sebelumnya ini sejalan dengan adanya perbaikan mutu pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik serta terakreditasi paripurna KARS versi 2012 pada Tahun 2017 ini.

➤ Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target Tahun 2017 dengan target sebesar 82% dan terealisasi sebesar 85,88% atau 104,73%. Berdasarkan capaian hasil maka RSMM Jatim pada tahun 2017 telah mencapai target SPM yang ditetapkan. Pencapaian target tersebut terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan baik dari sarana dan prasarana seperti ruang bedah, IGD, tiap-tiap poli maupun SDM seperti dokter sub-spesialis retina dan glaucoma. Pada tahun 2018 target

ditetapkan lebih tinggi sehingga butuh kerja keras yang lebih untuk memenuhi target tersebut.

➤ **Persentase Operasi Katarak**

Persentase Operasi Katarak pada Tahun 2017 dengan target sebesar 8,3% dan terealisasi sebesar 9,6% atau 121,20%. Terdapat peningkatan jumlah pasien operasi, sebanyak 3.461 pasien pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.729 pasien pada tahun 2016 serta meningkat menjadi 3.910 pasien pada Tahun 2017. Persentase Operasi Katarak ini juga berperan untuk mengurangi jumlah backlog katarak di Jawa Timur.

Sasaran 3: Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi Kesehatan Mata di Jawa Timur, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ **Persentase Kabupaten-Kota yang terbina dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat**

Persentase Kabupaten-Kota yang terbina dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat pada Tahun 2017 dengan target sebesar 30% dan terealisasi sebesar 34,21% atau 114,03%. RSMM Jawa Timur telah memenuhi target yang ditetapkan dengan sangat baik. Dibuktikan dengan jumlah kabupaten/kota terbina dan terdapat MoU di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.

➤ **Screening Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK)**

Persentase *Screening* Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 70% dan terealisasi sebesar 76,14% atau 108,77%. Dibuktikan dengan terdapatnya 76 puskesmas yang telah terbina dan proses screening yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp 12.000.000.000. Realisasi sebesar Rp 11.027.936.000 atau 91.90%. Untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp 48.724.051.165. Realisasi sebesar Rp 42.319.527.944 atau 86.86%. Untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.
- 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp 999.298.000. Realisasi sebesar Rp. 752.360.295 atau 75.29%. Untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Kegiatan koordinasi puskesmas se Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dalam tingkatan pencapaian menunjukkan hasil kurang optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan puskesmas dan dinas kesehatan kota/kab terkait.
- 2) Pembelian tanah masih proses akta jual-beli ditambah dengan penerusan hak belum sampai tahap sertifikasi tanah dikarenakan terbatasnya waktu untuk pengurusan.
- 3) Adanya survey Akreditasi Rumah Sakit yang menyita cukup banyak sumberdaya Rumah Sakit untuk fokus pada masalah tersebut, sehingga sumber daya untuk urusan rutin sedikit mengalami tantangan.

Solusi:

- 1) Meningkatkan koordinasi lintas program.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah terkait, terutama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam penyelesaian proses serah terima sertifikat tanah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
- 3) Berkoordinasi dengan BPKAD untuk dapat merealisasikan kebutuhan sesuai rekomendasi hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.13. RUMAH SAKIT PARU SURABAYA

a. Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya penyakit paru yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan penyakit lainnya.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	Tahun 2017		PERSENTASE (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada khususnya penyakit paru yang berkualitas	a. Persentase capaian SPM sesuai standard	85%	75%	88,24
	b. Cost Recovery Rate (CRR)	32,23%	60,05%	186,32
	c. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	77,30	96,63
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD)	a. Persentase capaian SPM sesuai standard	85%	75%	88,24
	b. Cost Recovery Rate (CRR)	32,23%	60,05%	186,32
	c. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	77,30	96,63
II. Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standard	85%	86%	101
1. Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standard	85%	86%	101

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	Tahun 2017		PERSENTASE (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
III. Meningkatnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya	a. Angka keberhasilan pengobatan TB (success rate)	81%	75,8%	93,58
	b. Angka keberhasilan rujukan TB (succes reveral rate)	80%	84,50%	105,63
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Angka keberhasilan pengobatan TB (success rate)	81%	75,8%	93,58
	b. Angka keberhasilan rujukan TB (succes reveral rate)	80%	84,50%	105,63

Pada tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Paru Surabaya yang telah dicapai masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada khususnya penyakit paru yang berkualitas

➤ Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Persentase capaian SPM sesuai standard pada Tahun 2017 dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 75% atau 88,24% (belum mencapai target). Hal ini disebabkan karena capaian 3 indikator KPT Rekam Medis masih belum memenuhi SPM.

- Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yang jelas dengan capaian 27,03% (belum memenuhi SPM). Hal ini disebabkan masih banyak lembar inform concent pada bagian informasi tidak diisi lengkap oleh DPJP.

- Waktu tunggu di Instalasi Rawat Jalan sesuai standar SPM ≤ 60 menit tetapi pada capaian 100% menit, dikarenakan dokter yang bertugas pada poli rata-rata memulai pelayanan lebih dari jam 09.00 sehingga menyebabkan panjangnya waktu tunggu.

➤ Cost Recovery Rate (CRR)

Cost Recovery Rate (CRR) pada tahun 2017 dengan target sebesar 32,23% dan terealisasi sebesar 60,05% atau 186,32% (sudah mencapai target) bukan berarti tingkat kemandirian RS Paru Surabaya tinggi, tetapi hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Persentase biaya operasional di luar belanja modal sebesar 84,21% (Rp.28.490.489.615,-) jauh lebih besar bila dibandingkan dengan belanja modal yaitu 15,79% (Rp. 5.333.718.681,-) dari total belanja yaitu Rp.33.824.208.296,-
- Pendapatan operasional tahun 2017 adalah sebesar Rp.17.109.084.756,88 atau 60.05% lebih besar dari nilai biaya operasional.

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 77,30% atau 96,63% (belum mencapai target). Hal ini disebabkan karena :

- Unsur kepastian jadwal pelayanan (dalam hal ini kedatangan dokter yang melayani tidak sesuai jadwal yang ditetapkan) yaitu didapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat (2,9 = 73,50%).
- Unsur kenyamanan lingkungan didapatkan nilai 2,99 (=74,83%). Dalam hal ini pasien mengeluh air tidak lancar dan kebersihan serta bising disebabkan penunggu pasien membawa anak-anak dalam ruangan.
- Standar IKM kategori baik : 62,51 – 81,25

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit

Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standard pada tahun 2017 dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 86% atau 101% (sudah mencapai target). Hal ini dikarenakan bertambahnya beberapa alat kedokteran pada pengadaan tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Sasaran 3 : Meningkatkan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya

- Tingkat kemajuan angka keberhasilan pengobatan penyakit TB (*success rate*) pada tahun 2017 dengan target sebesar 81% dan terealisasi 75,8% atau 93,58% (belum mencapai target). Hal ini disebabkan tingginya angka drop out
- Tingkat kemajuan angka keberhasilan rujukan TB (*success reveral rate*) pada tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi 84,50% atau 105,63% (sudah mencapai target), dikarenakan pada tahun 2017 koordinasi dengan kabupaten dan kota binaan telah berjalan dengan baik;

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 193.682.700,- Realisasi sebesar Rp.160.767.876,- atau 83.01% untuk mendukung satu kegiatan yang secara rinci capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp.5.737.610.480,- Realisasi sebesar Rp.4.768.702.281,- atau 83.11% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD) dengan anggaran Rp.16.772.663.533.04,- Realisasi sebesar Rp.16.570.268.431,- atau

98.79% untuk mendukung satu kegiatan yang secara rinci capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Tingkat kemajuan Capaian SPM menurun 1,32%.
- 2) Tingkat capaian indeks Kepuasan Masyarakat menurun 16,88%.
 - Jadwal pelayanan oleh dokter tidak sesuai jadwal
 - Air tidak lancar
 - Kebisingan oleh keluarga pasien di ruang tunggu
 - Kebersihan kurang
- 3) Tingkat kemajuan Angka keberhasilan pengobatan TB (*success rate*) menurun 9,87%.

Solusi:

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan khususnya DPJP pada pengisian inform concent rekam medis.
- 2) - Evaluasi oleh Komite Medik
 - Ketersediaan air dipenuhi dengan pembelian air tangki;
 - petugas siap setiap ada permasalahan dengan jaringan air
 - Ada petugas yang mengatur ketertiban keluarga pasien yang berkunjung
 - Evaluasi oleh pihak manajemen terkait kebersihan
- 3) Menekan angka drop out pasien yang berobat TB dengan meningkatkan promosi kepada pasien dan keluarga pasien

2.14. RS MOHAMMAD NOER PAMEKASAN**a. Tujuan**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya dalam rangka keselamatan dan kepuasan pasien;
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS di bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya;
- 3) Meningkatkan kualitas manajemen RS yang akuntabel dan transparan.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya	Persentase IKM atas pelayanan kesehatan	85	80	91.95
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase evaluasi SPM yang mencapai target	85	85	100.00
II. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya	Persentase <i>success rate</i> TB	85	85	100.00
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase keberhasilan pengobatan kasus TB	85	85	100.00

Pada tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya.

➤ Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kesehatan pada tahun 2017 dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 80%. Penyebab dari belum tercapainya target dikarenakan dari hasil penyebaran hasil survey masih di masing-masing pelayanan rata-rata sebesar 80%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya.

➤ Persentase keberhasilan pengobatan TB;

Persentase keberhasilan pengobatan TB pada tahun 2017 dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% sehingga persentase dari target dan realisasi sebesar 100,00%.

c. Program

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), didukung dengan 2 (dua) kegiatan, antara lain ;

- a) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.071.516.000,00 terealisasi sebesar 85,82 % atau Rp. 919.611.900,00. Dengan target indikator kinerja jumlah jenis pengadaan alat modal kantor yakni mesin Generator Set 400 kVA sebanyak 1 unit yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan gedung OK (paru dan jantung) 3 lantai dalam melakukan operasi bedah pasien yang direncanakan akan dioperasikan pada tahun 2018. Dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom untuk mengetahui realisasi anggaran dan capaian kinerja.
- b) penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.500.000.000,00 terealisasi sebesar

97,81% atau Rp. 13.203.917.684,00. Dengan target indikator kinerja jumlah gedung yang dibangun sebanyak 1 gedung yakni gedung OK (paru dan jantung) 3 lantai, jumlah pengadaan alat kedokteran sebanyak 1 unit yakni pendant circle medical sebesar Rp. 610.000.000,00. Selain itu, indikator kegiatan yang lain adalah jumlah gedung yang diperbaiki sebanyak 1 gedung yakni perbaikan gedung pelayanan rawat inap. Dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom untuk mengetahui realisasi anggaran dan capaian kinerja.

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, didukung dengan 1 (satu) kegiatan yakni;

- a) Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 173.284.426,00 terealisasi sebesar 95,92% atau Rp. 166.211.500,00. Dengan target indikator kinerja pencapaian target persentase keberhasilan pengobatan kasus TB sebesar 85% dan terealisasi sebesar 75% sehingga persentase dari target dan realisasi sebesar 88,8%.. Dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom untuk mengetahui realisasi anggaran dan capaian kinerja

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Tingkat kemajuan capaian SPM menurun 6%;
- 2) Tingkat capaian indeks kepuasan masyarakat menurun 0,5% dikarenakan jadwal pelayanan oleh dokter tidak sesuai jadwal dan kebisingan oleh keluarga pasien di ruang tunggu;
- 3) Tingkat kemajuan angka keberhasilan pengobatan TB (success rate) menurun 0,85%.

Solusi

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan khususnya DPJP pada pengisian informed consent rekam medis;

- 2) Melakukan evaluasi oleh komite medic dan adanya petugas yang mengatur ketertiban keluarga pasien yang berkunjung;
- 3) Menekan angka drop out pasien yang berobat TB dengan meningkatkan promosi kepada pasien dan keluarga pasien.

2.15. RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN (RSPM)**a. Tujuan**

- 1) Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang bermutu, efektif, efisien dan berkeadilan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).
- 2) Mewujudkan sistem manajemen Rumah Sakit yang transparan dan akuntabel.
- 3) Mewujudkan jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan paru.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 *100)
I. Meningkatnya Jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan daerah dampingan dan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan paru	1.Persentase Laboratorium Intermediate yang mempunyai kinerja baik	100%	100%	100
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	1954	2225	113
II.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif,efisien dan berkeadilan secara paripurna (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif)	1.Indeks Kepuasan Masyarakat	90	81	90
	2.BOR (Bed Occupancy Ratio)	55%	41%	75
	3. TOI (Turn Over Internal)	3 hari	6 hari	200
	4. BTO (Bed Turn Over)	20 kali	35 kali	175
	5. ALOS (Average Length of Stay)	4 hari	3 hari	75
	6. Persentase keberhasilan program P2TB yang sesuai dengan indikator kinerja (angka konversi, angka kesembuhan, angka keberhasilan pengobatan, drop out)	80%	85%	106,25
	7.CRR (Cost Recovery Rate)	80%	39%	48,75

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 *100)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5th)	100	100	100
3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Pasien	9680	8837	91

Pada Tahun 2017 kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo (RSPM) Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan daerah dampingan dan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan paru

➤ Persentase Laboratorium intermediate yang mempunyai kinerja baik

Persentase lab intermediate yang mempunyai kinerja baik pada tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau 100%. Program Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan Program Prioritas Gubernur Jawa Timur yang digunakan untuk membiayai kegiatan Deteksi Dini Kasus TB di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Pertemuan Koordinasi Laboratorium Rujukan Uji Silang (RUS) I Mikroskopis TB Provinsi Jawa Timur dan Survey Kepuasan Pelanggan. Capaian Program yang diharapkan adalah Jumlah Masyarakat yang mendapatkan edukasi Program TB dengan Target 1954 orang dan tercapai sebanyak 2225 orang. Masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan paru masih cukup tinggi. Khususnya penderita TBC yang sekarang menjadi salah satu penyakit program RPJMD yang harus diperhatikan. Masalah TBC semakin tinggi dengan adanya kasus TB MDR dan TB HIV. Apabila hal ini tidak segera diatasi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus Kejadian Luar Biasa atau KLB.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan berkeadilan secara paripurna (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif)

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 dengan target sebesar 90 dan terealisasi sebesar 81 atau 90%. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan dan masih kurang dari target yang ditetapkan, tetapi hal ini menunjukkan bahwa kinerja di RSPM meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016. Dengan penambahan sarana dan prasarana yang di adakan pada tahun 2017 serta penambahan jenis pelayanan seperti beroperasinya Ruang VIP, masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan paru semakin merasa nyaman dengan fasilitas maupun pelayanan yang diberikan oleh RSPM Madiun.

➤ BOR (Bed Occupancy Ratio)

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu yang didefinisikan sebagai rasio jumlah hari perawatan RS terhadap jumlah tempat tidur dikalikan dengan jumlah hari dalam satuan waktu. BOR pada tahun 2017 dengan target sebesar 55% dan terealisasi sebesar 41% atau 75%. Meskipun peningkatan BOR di RSPM pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 tidak terlalu berarti dan masih sangat jauh dari target Kemenkes sebesar 60% tapi itu termasuk salah satu tolok ukur bahwa kinerja pelayanan meningkat. Penambahan unit layanan baru seperti Rawat Inap, VIP & ICU yang otomatis menambah jumlah tempat tidur mempengaruhi perhitungan BOR.

➤ TOI (Turn Over Interval)

TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. TOI pada tahun 2017 dengan target sebesar 3 hari dan terealisasi sebesar 6 hari atau 200%. Hal ini dikarenakan beberapa hal:

1. Jumlah tempat tidur bertambah dengan dibukanya VIP dan ICU sehingga pasien yang biasanya di Kelas I, ditawarkan untuk menjalani perawatan di VIP
2. Pasien yang lebih 3 hari dirawat belum ada perbaikan yang signifikan dirujuk, sehingga tempat tidur bisa langsung digunakan oleh pasien yang baru.

➤ BTO (Bed Turn Over)

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. BTO pada tahun 2017 dengan target sebesar 20 kali dan terealisasi sebesar 35 kali atau 175%. Hal ini disebabkan karena penambahan unit layanan di RSPM Madiun yang otomatis akan mempengaruhi pemakaian tempat tidur dalam satu kurun waktu. Pasien yang biasanya menggunakan ruang perawatan kelas 1 ditawarkan untuk melakukan perawatan di VIP. Hal ini akan mempengaruhi perhitungan pada BTO.

➤ ALOS (Average Length of Stay)

ALOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. ALOS pada tahun 2017 dengan target sebesar 4 hari dan terealisasi sebesar 3 hari atau 75%. Peningkatan ALOS disebabkan karena standart pelayanan di Unit Rawat Inap meningkat. Apabila dalam waktu 3 hari pasien belum ada perbaikan yang signifikan, maka akan dirujuk ke RS yang lebih tinggi kelasnya sehingga pasien diharapkan akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan penyakit yang dideritanya.

➤ Persentase keberhasilan Program P2TB yang sesuai dengan Indikator Kinerja (Angka Konversi, Angka Kesembuhan, Angka Keberhasilan Pengobatan, Drop Out)

Persentase keberhasilan Program P2TB yang sesuai dengan Indikator Kinerja (Angka Konversi, Angka Kesembuhan, Angka

Keberhasilan Pengobatan, Drop Out) pada tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 85% atau 106,25%. Dalam hal ini setiap tahunnya selalu dapat mencapai target. Hal ini dikarenakan RSPM merupakan Rumah Sakit khusus paru yang mana mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ke wilayah dampingan/binaan yang mana setiap tahunnya memiliki target capaian.

➤ CRR (Cost Recovery Rate)

CRR (Cost Recovery Rate) pada tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 39% atau 48,75%. Hal ini dikarenakan target PAD tahun 2017 mengalami peningkatan.

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp 450.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 436.831.208,- atau 97% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp 8.981.090.576,- dan terealisasi sebesar Rp 8.601.930.708,- atau 96% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran sebesar Rp 5.398.156.248,51,- dan terealisasi sebesar Rp 5.499.624.439,- atau 101,88% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) belum bisa mencapai target dikarenakan pada tahun 2017 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) mempunyai target sebesar 90 dan baru dapat terealisasi sebesar 81.
- 2) BOR belum bisa mencapai target dikarenakan pada tahun 2017, target BOR sebesar 55% dan terealisasi sebesar 41%.
- 3) TOI pada tahun 2017 dengan target sebesar 3 hari dan baru dapat terealisasi sebesar 6 hari.
- 4) BTO pada tahun 2017 dengan target sebesar 20 kali dan baru dapat terealisasi sebesar 35 kali.
- 5) ALOS pada tahun 2017 masih kurang dari target yang ditetapkan, dimana target sebesar 4 hari dan terealisasi sebesar 3 hari.
- 6) Persentase keberhasilan Program P2TB yang sesuai dengan Indikator Kinerja (Angka Konversi, Angka Kesembuhan, Angka Keberhasilan Pengobatan, Drop Out) pada tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 85%.
- 7) CRR belum bisa tercapai target dikarenakan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun bukan hanya berfungsi untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang berarti akan meningkatkan pendapatan tetapi juga merupakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Dimana kegiatan ini murni untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam usaha promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan tanpa adanya peningkatan pendapatan

Solusi :

- 1) Dengan penambahan sarana dan prasarana serta penambahan jenis pelayanan, maka masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan paru semakin merasa nyaman dengan fasilitas maupun pelayanan yang diberikan oleh RSPM Madiun.

- 2) Penambahan unit layanan baru seperti Rawat Inap, VIP & ICU yang otomatis menambah jumlah tempat tidur mempengaruhi perhitungan BOR.
- 3) Jumlah tempat tidur ditambah dengan dibukanya VIP dan ICU sehingga pasien yang biasanya di Kelas I, ditawarkan untuk menjalani perawatan di VIP
- 4) Pasien yang lebih 3 hari dirawat belum ada perbaikan yang signifikan dirujuk, sehingga tempat tidur bisa langsung digunakan oleh pasien yang baru.
- 5) Penambahan unit layanan di RSPM Madiun yang otomatis akan mempengaruhi pemakaian tempat tidur dalam satu kurun waktu. Pasien yang biasanya menggunakan ruang perawatan kelas 1 ditawarkan untuk melakukan perawatan di VIP. Hal ini akan mempengaruhi perhitungan pada BTO.
- 6) Apabila dalam waktu 3 hari pasien belum ada perbaikan yang signifikan, maka akan dirujuk ke RS yang lebih tinggi kelasnya sehingga pasien diharapkan akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan penyakit yang dideritanya
- 7) Melakukan pembinaan ke wilayah dampingan/binaan yang mana setiap tahunnya memiliki target capaian

2.16 UPT AKADEMI KEPERAWATAN MADIUN

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan proses belajar mengajar yang sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- 2) Meningkatkan tata kelola organisasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 3) Meningkatkan kualitas kerjasama dan penelitian yang inovatif.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya status kelembagaan, mutu dosen dan kualitas lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif dan profesional	1. Hasil Akreditasi Program Studi	301	301	100
	2. Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3.00	80%	93,5%	116,9%
	3. Rerata Masa Studi Mahasiswa 6 semester	90%	98,3%	109,2%
	4. Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1 : 25	1:25	1:13	208%
	5. Persentase Kelulusan Uji Kompetensi	90%	100%	111%
	6. Persentase Linearitas pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu	100%	100%	100%
	7. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti			
	8. Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja	100%	94%	94%
1. Program Peningkatan	Persentase pelayanan pendidikan yang	100%	85,31%	85,31%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal			
II. Meningkatnya tata kelola organisasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	1. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	100%	100%	100%
	2. Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap unit minimal	1:100	1:100	100%
	3. Pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	100%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase sarana prasarana untuk pelayanan sesuai standar	100%	93,38%	93,38%

Pada tahun 2017 kinerja UPT Akademi Keperawatan Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya status kelembagaan, mutu dosen dan kualitas lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif dan profesional

➤ Hasil Akreditasi Program Studi

Hasil akreditasi program studi pada tahun 2017 dengan target B yaitu B, hal ini sudah sesuai dengan hasil yang ingin dicapai;

➤ Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3.00

Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3.00 pada tahun 2017 dengan target 80% dan terealisasi pada tahun 2017 sebesar 93,5%. Hasil yang dicapai lebih baik daripada hasil yang ditargetkan;

- **Rerata Masa Studi Mahasiswa 6 semester**
Rerata masa studi mahasiswa 6 semester pada tahun 2017 dengan target 90% adalah sebesar 98,3%. Hasil yang dicapai lebih baik daripada hasil yang ditargetkan;
- **Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1 : 25**
Rasio dosen dengan mahasiswa pada tahun 2017 sudah mencapai 1:13 dengan target 1:25, hal ini sudah mengalami peningkatan dan sudah sesuai dengan SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi);
- **Persentase Kelulusan Uji Kompetensi**
Persentase kelulusan uji kompetensi pada tahun 2017 dengan target 90% adalah sebesar 100%. Hasil yang dicapai lebih baik daripada hasil yang ditargetkan;
- **Persentase Linearitas pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu**
Persentase Linearitas pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu pada tahun 2017 dengan target 100% adalah sebesar 100%. Hal ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan;
- **Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti**
Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti pada tahun 2017 dengan target 100% adalah sebanyak 94%, hal ini dikarenakan kesempatan untuk mengikuti pelatihan belum ada;
- **Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja**
Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja pada tahun 2017 sudah 100% sesuai dengan target yang diharapkan, karena semua mahasiswa yang telah lulus mendapatkan pembekalan kompetensi pra kerja.

Sasaran 2: Meningkatnya tata kelola organisasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

- Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.
Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar pada tahun 2017 dengan target 100% adalah sebesar 100%. Hal ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan.
- Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap unit minimal.
Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap semester pada tahun 2017 dengan target 100% adalah sebanyak 100%, hal ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan dan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa setiap tahunnya.
- Pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
Persentase pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2017 dengan target 100% adalah sebanyak 100%, hal ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 2.408.001.641,30 realisasi Rp. 2.054.036.388,- atau 85,31%. Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp.676.527.000,- dan realisasi Rp. 631.731.441,- atau 93,38%. Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kerangka landasan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan keperawatan berdasar Perubahan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan pendidikan

tinggi khususnya pendidikan keperawatan sebagai konsekuensi Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah belum mendukung/ belum ada;

- 2) Budaya riset masih lemah sehingga publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi nasional dan internasional belum ada dan Produk riset yang berhasil dipasarkan secara institusional belum ada;
- 3) Jaringan kerjasama institusi pendidikan dan sponsor dengan institusi pengguna lulusan belum dikembangkan secara optimal;
- 4) Banyak berdirinya Institusi kesehatan di Karisidenan Madiun;
- 5) Terbukanya tenaga perawat asing yang meningkatkan persaingan di dunia kerja.

Solusi

- 1) Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemilik;
- 2) Secara bertahap bersedia melangkah menuju profesionalisme melalui bentuk-bentuk evaluasi diri;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan, sumberdaya dan kemahasiswaan dengan melakukan penelitian-penelitian kesehatan termasuk penelitian yang berorientasi pangsa pasar;
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan pihak pengguna jasa lulusan baik pemerintah dan non pemerintah;
- 5) Meningkatkan kapasitas sumberdaya;
- 6) Membekali calon lulusan dengan kompetensi PPGD dan bahasa asing.

2.17 UPT AKADEMI GIZI SURABAYA

a. Tujuan

- Meningkatkan proses belajar dan mengajar yang bermutu dan inovatif sesuai dengan standar yang ditetapkan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan
- Meningkatkan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel
- Meningkatkan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk pendayagunaan lulusan

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan edukasi dengan media informasi sadar hidup sehat di wilayah binaan	60%	60%	100%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan edukasi dengan media informasi sadar hidup sehat di wilayah binaan	60%	60%	100%
II. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan BLUD sesuai standar BAN-PT	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD	80%	80%	100%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD	80%	80%	100%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
III. Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan	Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan	80%	80%	100%
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan	80%	80%	100%

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran UPT Akademi Gizi Surabaya tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan ditetapkan dengan indikator Prosentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan edukasi dengan media informasi sadar hidup sehat di wilayah binaan ditargetkan sebesar 60% dan telah terealisasi sebesar 60% atau mencapai target sebesar 100%.

Keadaan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, ditambah dengan semakin bervariasinya metode dan materi atau pesannya yang disesuaikan dengan keadaan sasaran, serta semakin meningkatnya kemampuan pendidik atau petugas dalam memberikan pelayanan gizi dan kesehatan

Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan BLUD sesuai standar BAN-PT ditetapkan dengan indikator prosentase penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD dengan target 80,0% dan telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai target sebesar 100%.

Keadaan tersebut terjadi karena pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana didasarkan atas skala prioritas yang

dibutuhkan oleh mahasiswa Akademi Gizi Surabaya dan masyarakat sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Sasaran 3 : Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan indikator persentase pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan yang ditargetkan sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 80% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Kadaan tersebut terjadi karena dalam masa transisi terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat, Akademi Gizi Surabaya masih mendapatkan dukungan dana dan sumberdaya yang diperlukan, sehingga tidak mengalami kendala dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp 263.718.922,00 dan Realisasi sebesar Rp 245.446.859,00 atau 93,07%. Program ini didukung dengan 1 kegiatan, yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan anggaran sebesar Rp 344.160.000,00 Realisasi Rp 333.300.500,00 atau 96,84%. Program ini didukung dengan 3 kegiatan, yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 3) Program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD) didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.537.852.110.84 Realisasi Rp 2.317.998.083,00 atau 91,34%. Program ini didukung dengan 1 kegiatan, yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya masalah-masalah yang timbul akibat transisi epidemiologi di bidang gizi, pesatnya pertumbuhan industri pangan, jumlah dan tuntutan mutu institusi pelayanan gizi dan makanan disamping peningkatan prevalensi penyakit baik infeksi maupun degeneratif yang berakar pada kurang gizi sejak masa kehamilan, dan timbulnya masalah obesitas sejak usia dini dan masih tingginya angka balita stunting akan meningkatkan beragam problematika gizi kini dan akan datang sehingga memerlukan penanganan yang professional kurang dibarengi dengan jumlah anggaran yang cukup.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, dll) dibandingkan dengan standar BAN-PT sudah mencapai 80% dan belum dapat diberdayakan dengan baik untuk meningkatkan kegiatan kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3) Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 yang isinya salah satunya menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti dengan adanya Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 15 Mei 2017 Nomor 061/9085/031.1/2017, yang isinya antara lain tentang penutupan AKZI Surabaya dan AKPER Madiun milik Prov, dukungan dana selama masa transisi dan mengalihkan fungsi UPT Pendidikan tinggi kesehatan menjadi UPT yang berkaitan dengan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keadaan tersebut maka sejak tahun 2017

Akademi Gizi Surabaya sudah tidak menerima mahasiswa baru, sehingga berdampak pada penurunan PAD sejak tahun 2017

Solusi:

- 1) Akademi Gizi Surabaya dapat mengembangkan diri menjadi Penyelenggara Pelatihan dan Konseling Penanganan berbagai Masalah Gizi baik bagi praktisi di bidang kesehatan maupun masyarakat umum.
- 2) Akademi Gizi Surabaya dapat melakukan pengembangan dengan menghasilkan berbagai produk gizi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Sarana dan rasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, dll) dapat diberdayakan melalui kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat.
- 4) SDM yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya dapat berperan dalam kerjasama dengan lintas sektor untuk berbagai kegiatan, antara lain : pelatihan, seminar, workshop, dll.
- 5) Diharapkan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bappeda, BPKAD, dan seluruh instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat memperhatikan keberlangsungan Akademi Gizi Surabaya sampai dengan tahun 2019, dan selanjutnya diharapkan keterlibatnya dalam rangka menyusun UPT baru yang dapat membantu peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan gizi dan meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur.

e. Penghargaan yang diperoleh

- 1) Penilaian Akreditasi oleh LAM PTKes dengan Predikat B pada Tahun 2016
- 2) Penilaian SAKIP Tahun 2017 dengan Predikat B

2.18 UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI LAWANG

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
I. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelatihan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan	1. Persentase rata-rata capaian utilitas	81%	92%	113,58%
	2. Persentase Pelatihan yang terakreditasi	100%	100%	100%
	3. Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur	91%	100%	109,89%
	4. Persentase Kerjasama dengan mitra strategis	60%	61%	101,67%
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Persentase capaian SPM sesuai target	85%	95%	111,76%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD	1. Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan	80%	86%	107,5%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	100%
II. Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efisien dan efektif	1. Skor Akreditasi Institusi	4,4	4,54	103.18%
	2. Cost Recovery Rate (CRR)	66%	70,83%	107,32%
	3. Persentase Standar pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai	89%	95%	106,74%

Pada Tahun 2017 kinerja UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pelatihan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung Program Kesehatan. Ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu :

➤ Persentase rata-rata capaian utilitas ideal.

Persentase rata-rata capaian utilitas ideal dinilai dari rata-rata capaian 4 (empat) hal, yaitu :

- a) Persentase Kegiatan Diklat
- b) *Bed Occupancy rate* (BOR)
- c) *Seat Occupancy Rate* (SOR)
- d) Persentase kegiatan diklat

Persentase rata-rata capaian utilitas ideal pada Tahun 2017 dengan target sebesar 81% terealisasi sebesar 92% atau 113,58%. Capaian indikator ini telah mencapai target dikarenakan kegiatan yang diselenggarakan di UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati lebih banyak pelatihan

daripada pertemuan sehingga pemanfaatannya telah sesuai dengan tupoksi, selain itu capaian ini juga meningkat dari tahun 2016;

➤ Persentase pelatihan yang terakreditasi

Persentase pelatihan yang terakreditasi pada Tahun 2017 dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Ini merupakan capaian tertinggi karena semua Pelatihan yang diselenggarakan di UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati telah melalui proses pengajuan akreditasi sehingga peserta dapat memperoleh sertifikat pelatihan;

➤ Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur

Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur pada Tahun 2017 dengan target 91% terealisasi sebesar 100% atau 109,89%. Capaian persentase pelatihan sudah mendukung semua program kesehatan begitu juga dengan capaian tahun sebelumnya;

➤ Persentase kerjasama dengan mitra strategis

Persentase Kerjasama dengan mitra strategis pada Tahun 2017 dengan target sebesar 60% dan terealisasi sebesar 61% atau 101,67%. Capaian indikator ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya target mitra strategis yang menggunakan layanan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efektif dan efisien, terdapat 3 indikator sebagai berikut :

➤ Skor Akreditasi Institusi

Skor Akreditasi UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 4.4 dan

teralisasi sebesar 4.54 atau 103,18%. Hasil penilaian skor akreditasi institusi diperoleh pada awal Tahun 2017 dan meningkat dari penilaian akreditasi institusi periode sebelumnya;

➤ Cost Recovery Rate (CRR)

Cost Recovery Rate (CRR) pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 66% dan terealisasi sebesar 70,83% atau 107,32%. Nilai CRR meningkat dari tahun sebelumnya dan melebihi target dikarenakan realisasi pendapatan juga melebihi target;

➤ Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai

Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 89% dan terealisasi sebesar 95%.

c. Program

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp.297.648.564,- terserap sebesar Rp. 191.623.360,- atau 64,38% untuk mendukung 1 kegiatan yang rincian realisasi kegiatannya terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp.176.600.398,- terserap sebesar Rp.172.752.000,- atau 97,82% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp.12.011.783.307,44,- terserap sebesar Rp.12.775.615.055,00,- atau 106,36% untuk mendukung 1 kegiatan yang rincian realisasi kegiatannya terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Pada PAPBD pagu anggaran untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat bertambah sebesar Rp. 297.648.564,00, program ini penyerapan tidak maksimal dikarenakan pelaksanaannya pada akhir tahun yang bersamaan dengan jadwal kegiatan lain yang sudah direncanakan sebelumnya.

Solusi:

- 1) Tahun depan akan menyiapkan antisipasi dengan membuat daftar rencana kegiatan apabila mendapat tambahan anggaran saat PAPBD.

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.
- 2) Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 * 100)
I. Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. 1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 2. Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	I.1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	95,16 %	90,31 %	94,90 %
	I.1.1 Panjang jalan dalam kondisi mantap (KM)	1.352,22 Km	1.283,32 Km	94,90 %
	I.1.2 Panjang jembatan dalam kondisi baik (M)	10.905,03 M	10.291,45 M	94,37 %
	I.2.1 Persentase Kantor dalam kondisi layak pakai dan memadai	75,00 %	75,00 %	100,00 %
	I.2.2 Persentase ketersediaan alat berat dalam kondisi layak pakai dan memadai	85,00 %	85,00 %	100,00 %
II. Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat 1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	II.1 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.	61,86 %	59,16 %	95,64 %
	II.1.1 Panjang jalan dalam kondisi mantap (KM)	1.352,22 Km	1.283,32 Km	94,90 %
	II.1.2 Panjang jembatan dalam kondisi baik (M)	10.905,03M	10.291,45M	94,37 %

Pada tahun 2017 kinerja penyelenggaraan jalan yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

➤ Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) pada tahun 2017 dengan target sebesar 95,16 % dan terealisasi sebesar 90,31 %, atau 94,90 %. Hal ini dikarenakan adanya penurunan kualitas jalan akibat umur jalan sudah melampaui yang direncanakan meskipun sudah dilakukan penanganan pemeliharaan berkala jalan sepanjang 129,962 Km serta peningkatan struktur dan kapasitas jalan sepanjang 72,08 Km. Untuk mempertahankan agar pelayanan jalan tersebut tetap fungsional maka dilakukan penanganan dengan pemeliharaan rutin sepanjang jalan Provinsi.

Sasaran 2 : Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara denganselamat, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

➤ Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer pada tahun 2017 dengan target sebesar 61,86 % dan terealisasi sebesar 59,16 % atau 95,64 %. Tidak tercapainya target dikarenakan belum terpenuhinya anggaran untuk peningkatan kapasitas jalan sesuai dengan kebutuhan (hampir 50% jalan provinsi belum memenuhi persyaratan teknis jalan / lebar jalan < 7m).

c. Program

- 1) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp 959.137.461.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.834.437.096.723,00 atau 87 % untuk mendukung 14 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format Matrik 16 kolom.
- 2) Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp 37.302.252.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.35.667.889.343,92 atau 95,62 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan:**

- Tuntutan kebutuhan masyarakat jauh lebih tinggi dari kondisi kemantapan jalan provinsi serta anggaran untuk penanganan jalan.
- Hampir 50% jalan provinsi belum memenuhi persyaratan teknis jalan (lebar jalan < 7m).
- Ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan kendaraan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan.
- Kondisi kerusakan jalan karena umur rencana telah terlampaui.
- Pada puncak musim hujan terjadi kerusakan permukaan jalan secara serentak.

Solusi:

- Pelebaran jalan provinsi yang belum standar menjadi standar 7m.
- Peningkatan struktur untuk ruas jalan dengan kondisi rusak.
- Pemeliharaan jalan provinsi baik rutin maupun berkala/rehabilitasi.

3.2 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

a. Tujuan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis di Bidang Sumber Daya Air.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATO R PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan (pertanian, domestik, industri, perikanan dan peternakan)	Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku	87,90	87,84	99,93
1. Program Konservasi Sumber Daya Air	Volume resapan air (m3)	14.400.000	13.449.600	93,40
II. Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	68,60	69,32	101,05
1. Pendayagunaan Sumber Daya Air	Ketersediaan air baku (m3)	19.538.400.000	19.499.691.142	99,80
III. Tercapainya penurunan dampak atau kerugian di daerah rawan bencana banjir	Persentase penanganan luas daerah genangan banjir	61,66	67,62	109,67
1. Pengendalian Daya Rusak Air	Luas genangan pada daerah rawan banjir (Ha)	1.250	1.522	121,76

Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 kinerjaBidangPekerjaan Umum Sumber Daya Air yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan (pertanian, domestik, industri, perikanan dan peternakan), ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

- Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku pada Tahun 2017 dengan target sebesar 87,90 dan terealisasi sebesar 87,84 atau 99,93 persen (mengalami penurunan). Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pembangunan waduk yang masih berjalan (*on going*). Diantaranya, Waduk Tugu Trenggalek (9,3 juta m³), Waduk Bendo Ponorogo (43,11 juta m³), Waduk Tukul Pacitan (8,68 juta m³), Waduk Gongseng Bojonegoro (22,43 juta m³), dan Jabung Ring Dyke Lamongan (30 juta m³).

Sasaran2: Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 dengan target sebesar 68,60 dan terealisasi sebesar 69,32 atau 101,05 persen (mengalami peningkatan). Peningkatan tersebut disebabkan karena dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi. Dengan kondisi saluran baik sepanjang 1.210 km dari 1.748 km total panjang saluran dan kondisi bangunan baik sebanyak 3.656 unit dari 5.267 unit total jumlah bangunan.

Sasaran3: Tercapainya penurunan dampak atau kerugian di daerah rawanbencana banjir, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

- Persentase penanganan luas daerah genangan banjir pada tahun 2017 dengan target sebesar 61,66 dan terealisasi sebesar 67,62 atau 109,67 persen (mengalami peningkatan). Dengan melaksanakan pembangunan

instalasi pompa banjir sungai kemuning (Pompa Dag Bukor, Pompa Pandian, Pompa Jagalan, Pompa Jragon dan Pompa Kajuk) di Kabupaten Sampang serta melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai untuk mengurangi resiko banjir.

c. Program

- 1) Program Konservasi Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp. 18.873.668.480 dan realisasi sebesar Rp. 17.458.860.634 atau 92,50 persen, untuk mendukung 12 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom;
- 2) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air dengan anggaran Rp. 93.355.040.111 dan realisasi sebesar Rp. 86.304.951.231 atau 92,45 persen, untuk mendukung 62 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom;
- 3) Program Pengendalian Daya Rusak Air dengan anggaran Rp.72.619.312.830 dan realisasi sebesar Rp. 70.230.921.146 atau 96,71 persen, untuk mendukung 14 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- 2) Saluran dan bangunan irigasi pada jaringan irigasi teknis mengalami kerusakan berat;
- 3) Terjadi alih fungsi lahan sehingga berkurangnya areal irigasi dan mengakibatkan meningkatnya koefisien aliran;

- 4) Peningkatan layanan air baku untuk keperluan domestic;
- 5) Permasalahan sedimentasi waduk yang mengakibatkan turunnya kapasitas tampungan waduk menjadi 60%;
- 6) Meningkatnya kebutuhan layanan air baku untuk berbagai keperluan;
- 7) Tidak optimalnya operasional waduk-waduk yang sudah terbangun;
- 8) Penurunan kapasitas tampung sungai akibat sedimentasi sehingga meningkatkan resiko banjir;
- 9) Banjir ekstrim di wilayah sungai Bengawan Solo;
- 10) Banjir rutin di sungai kewenangan Provinsi yang mengganggu kegiatan ekonomi tingkat nasional;
- 11) Tidak berfungsinya dan kurangnya infrastruktur SDA untuk pengendalian banjir pada sungai-sungai yang menyebabkan banjir.

Solusi:

- 1) Pemenuhan pembiayaan SDM pelayanan irigasi teknis (Juru, PPA, Pekarya) pada irigasi teknis kewenangan Provinsi karena sebagian SDM masih dipenuhi tenaga dari UPTD Kab/Kota;
- 2) Rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi;
- 3) Pembangunan areal sawah tadah hujan menjadi irigasi teknis di Sembayat Barrage (10.000 ha), Bojonegoro Barrage (10.000 ha), Waduk Bajulmati (1.800 ha), Waduk Nipah (1.100 ha), pembangunan dan perbaikan pompa air irigasi air tanah seluas 4.000 ha serta diperlukan bangunan checkdam pada wilayah hulu DAS;
- 4) Pembangunan embung-embung kapasitas sedang mengingat adanya dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan embung kecil;
- 5) Normalisasi/revitalisasi pada waduk-waduk yang tersedimentasi;
- 6) Pembangunan waduk-waduk besar 47 buah waduk di Bojonegoro, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, Lamongan, Probolinggo, Banyuwangi, Jember dll dengan kapasitas layanan air baku hampir 0,5 milyar m³;
- 7) Diperlukan operasi dan pemeliharaan waduk-waduk secara rutin dan berkala;

- 8) Normalisasi sungai dan perbaikan tangkis sungai;
- 9) Peningkatan kapasitas floodway Plangwot Sedayu Lawas serta penyelesaian masalah sosial pembebasan lahan pada banjir Kali Lamong di Kab. Gresik;
- 10) Pembangunan infrastruktur pengendali banjir Kali Welang Pasuruan, Pembangunan Sudetan Kali Kemuning dan Sudetan Kali Tanggul Jember, serta pembangunan pompa banjir di hilir Kali Kemuning;
- 11) Diperlukannya perbaikan, re-modeling, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada sungai-sungai.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Pemenang Kedua pada Lomba/Pemilihan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi (Permukaan) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2017;
- 2) Pemenang Pertama Lomba Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Partisipatif Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tingkat Nasional Tahun 2017;
- 3) Pemenang Pertama Lomba Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Permukaan Teladan, Unit Pelaksana teknis Daerah/Pengamat Jaringan Irigasi Permukaan Tingkat Nasional Tahun 2017;
- 4) Pemenang Kedua Lomba Petugas Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Permukaan Teladan, Juru/Mantri Jaringan Irigasi Permukaan Tingkat Nasional Tahun 2017;
- 5) Pemenang Kedua Lomba Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional Tahun 2017.

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA****a. Tujuan**

Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih & sanitasi yang layak, antara lain :

- 1) Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih / minum.
- 2) Meningkatkan pelayanan air bersih.
- 3) Memenuhi hak dasar masyarakat atas sanitasi yang layak.
- 4) Meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan.
- 5) Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu.
- 6) Meningkatkan pelayanan air limbah.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase Capaian (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3*100
I. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Persentase KK yang dapat layanan air bersih yang layak	63,44%	73,44%	115,76%
1. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	Persentase tingkat pelayanan air bersih	63,44%	73,44%	115,76%
II. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah	Persentase KK rumah tangga dengan layanan sanitasi yang aman	74,79%	65,95%	88,18%
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase tingkat pelayanan air limbah	74,79%	65,95%	88,18%

Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Pekerjaan Umum yang telah dicapai berdasarkan masing - masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih, memiliki indikator sasaran:

- Persentase KK yang dapat layanan air bersih yang layak;

Persentase KK yang dapat layanan air bersih yang layak pada Tahun 2017 dengan target sebesar 63,44% dan terealisasi sebesar 73,44% atau dengan persentase capaian sebesar 115,76%. Realisasi tersebut dicapai dengan adanya pembangunan perpipaian air bersih sepanjang 30.549 meter, bangunan produksi sebanyak 23 unit, bangunan pelengkap sebanyak 20 unit, dan hidran umum sebanyak 12 unit serta peran 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah, memiliki indikator sasaran:

- Persentase KK rumah tangga dengan layanan sanitasi yang aman;

Indikator kinerja Persentase KK rumah tangga dengan layanan sanitasi yang aman pada Tahun 2017 dengan target sebesar 74,79% dan terealisasi sebesar 65,95% atau dengan persentase capaian sebesar 88,18% Realisasi tersebut dicapai dengan adanya pembangunan saluran drainase sepanjang 1.281,8 meter dan 9 unit MCK serta peran 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Target yang ditetapkan tahun 2017 belum dapat terpenuhi, hal ini dikarenakan beberapa kegiatan pembangunan belum dapat terlaksana di tahun 2017 karena masalah ketersediaan lahan.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum, dengan anggaran Rp. 22.031.575.000,- Realisasi sebesar Rp. 17.052.072.633,- atau 77,40% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi, dengan anggaran Rp. 3.152.975.000,- Realisasi sebesar Rp. 2.528.809.240,- atau 80,20% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan

terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
- 2) Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan.
- 3) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (system sewerage).
- 4) Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan.

Solusi

- 1) Meningkatkan peran serta seluruh stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah diperkotaan dan perdesaan.
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat.
- 3) Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (air baku).
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan.

BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tujuan :

Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain :

- 1) Mengurangi backlog rumah.
- 2) Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR).
- 3) Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan / permukiman yang lebih baik.
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi perdagangan bebas (AFTA 2015) dibidang konstruksi.
- 6) Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 7) Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase Capaian (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3*100
I. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Persentase Kepala Keluarga/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah Layak Huni	96,03%	95,92%	99,89%
	Persentase Rusunawa yang dihuni oleh Kepala Keluarga yang berhak	100%	100%	100%
1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase rusun terbangun	54,85%	100%	182,32%
	Jumlah PSU Perumahan Permukiman	10 Kawasan	10 Kawasan	100%
	Dokumen Monev RTLH	10 Dok	25 Dok	250%

**Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017
adalah sebagai berikut :**

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Perumahan yang telah dicapai berdasarkan masing - masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, memiliki indikator sasaran :

- Persentase Kepala Keluarga/Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah Layak Huni;

Persentase Kepala Keluarga/ Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah Layak Huni pada Tahun 2017 dengan target sebesar 96,03% dan terealisasi sebesar 95,92% atau dengan persentase capaian sebesar 99,89%. Realisasi tersebut dicapai dengan terlaksananya renovasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 17.084 unit yaitu masing-masing 8.759 unit oleh Kodam V Brawijaya, 1.825 unit oleh Lantamal V serta 6.500 unit melalui kegiatan BSPS. Target yang ditetapkan tahun 2017 belum dapat terpenuhi, hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat yang membutuhkan fasilitas perumahan layak huni menjadi faktor belum tercapainya target pada tahun 2017.

- Persentase Rusunawa yang dihuni oleh Kepala Keluarga yang berhak;

Persentase Rusunawa yang dihuni oleh Kepala Keluarga yang berhak pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tersebut dicapai dengan terlaksananya pengelolaan 10 TB Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yaitu Rusunawa Sumur Welut, Rusunawa Gunung Anyar, Rusunawa Gunungsari, Rusunawa SIER, dan Rusunawa Jemundo. Target yang ditetapkan tahun 2017 dapat terpenuhi, hal ini

dikarenakan pengelolaan Rusunawa yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur telah terselenggara dengan baik selama tahun 2017.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan anggaran Rp. 42.369.251.000,- Realisasi sebesar Rp. 37.614.885.924,- atau 88,78% untuk mendukung 12 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- 2) Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
- 3) Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan.

Solusi:

- 1) Merealisasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa, serta menyediakan prasarana dan sarana permukiman dengan melibatkan semua stake holder.
- 2) Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan / pembangunan gedung negara.
- 3) Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pembangunan bidang perumahan permukiman.

BIDANG URUSAN TATA RUANG**a. Tujuan :**

- Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase Capaian (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3*100
I. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai Tata Ruang	56,06%	48,00%	85,62%
1. Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	79,4%	62,16%	78,29%
	2. Jumlah rencana rinci Tata Ruang Kab/Kota	7	4	57,14%
3. Program Pemanfaatan Ruang	Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	45%	62%	137,78%
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	75%	100%	133,33%

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Tata Ruang yang telah dicapai berdasarkan masing - masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang, memiliki indikator sasaran :

- Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai Tata Ruang;

Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai Tata Ruang pada Tahun 2017 dengan target sebesar 56,06% dan terealisasi sebesar 48,00% atau dengan persentase

capaian sebesar 85,62%. Realisasi tersebut dicapai dengan tersusunnya 3 RTR KSP pada tahun 2017, sejumlah 4 persetujuan substansi (persub) Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota dikeluarkan ditahun 2017, 2 NSPK dalam bentuk Raperbup, dan terselesaikannya 12 kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di tahun 2017.

c. Program

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan anggaran Rp. 1.774.346.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.683.702.365,- atau 94,89% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 1.669.587.500,- Realisasi sebesar Rp. 1.603.721.059,- atau 96,05% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 1.383.678.500,- Realisasi sebesar Rp. 1.190.054.535,- atau 86,01% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum tersedianya rencana rinci tata ruang (kawasan strategis dan rencana detail tata ruang).
- 2) Belum optimalnya RTRW sebagai acuan pembangunan di daerah.
- 3) Belum optimalnya perwujudan NSPK bidang penataan ruang.
- 4) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Solusi

- 1) Fasilitasi kerjasama tata ruang lintas Kabupaten / Kota.
- 2) Perlu dilakukannya pelatihan – pelatihan dan bimbingan teknis terhadap aparat Kabupaten / Kota.
- 3) Perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan ruang.

5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

5.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dalam Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tentram dan kondusif.
- 3) Meningkatkan potensi dan peran Satlinmas.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	Tahun 2017		Persentase
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan kasus penyelenggaraan Tibumtranmas yang telah diselesaikan	100%	83,33 %	83,33 %
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	97,28 %	97,28%
Meningkatnya kualitas ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya	5 %	270,4%	5.408 %
1. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan Perda yang ditangani	100 %	97,98 %	97,98 %
Meningkatnya kualitas ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase Pertumbuhan anggota Satlinmas yang terlatih atau bersertifikat	5 %	100 %	2000 %
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	100 %	80 %	80 %

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur.

➤ Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penanganan penyelenggaraan ketertibanan umum dan ketentraman masyarakat tahun 2016 dengan target 246 penanganan Tibumtranmas, terlaksana 102 penanganan Tibumtranmas, kegiatan pada tahun 2017 dengan target 236 penanganan Tibumtranmas, terlaksana 197 penanganan Tibumtranmas, dengan terget 100% terhadap program kegiatan dengan capaian 83,47 %, sedangkan capaian berdasarkan sasaran indikator 83,33 % dengan terget 100 % berdasarkan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 disebabkan efisiensi sarana prasarana penunjang terpenuhi.

➤ Persentase Penegakan Perda yang ditangani

Pelaksanaan penangan penegakan perda yang ditangani tahun 2016 sebanyak 11 kegiatan di 21 titik lokasi dengan ditemukan pelanggaran sebanyak 67 pelanggar, ditangani 54 pelanggar, pada tahun 2017 sebanyak 24 kegiatan di 28 lokasi dengan ditemukan sebanyak 226 pelanggaran dengan diselesaikan sebanyak 200, capaian berdasasarkan program kegiatan sebesar 97,98 % , sehingga capaian Indikator sasaran sebesar 88,49 %, mengalami penurunan 5.408 % dari Target 5%, diselesaikan dengan cara ditertibkan, penyitaan barang bukti serta pemusnahan barang bukti pada lokasi penertiban.

➤ Persentase anggota Satlinmas yang terlatih

Pelaksanaan simulasi Pertumbuhan anggota Satlinmas yang terlatih atau bersertifikat dengan target tahun 2016 sebanyak 200 dengan target 300 orang dengan capaian 66,6 % serta Jumlah peserta simulasi PAM Swakarsa dan Pelatihan Satlinmas dan masyarakat, sedangkan di tahun 2017 Jumlah peserta simulasi PAM

Swakarsa dan Pelatihan Satlinmas dan masyarakat sebanyak 400 dengan target sebanyak 500 orang dengan capaian 80 % mengalami pertumbuhan 2000 % dari Target 5 % dengan memberikan pemahaman berupa simulasi dan pelatihan.

c. Program

- 1) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan anggaran sebesar Rp. 829.006.750,- realisasi sebesar Rp. 811.018.706,- atau 98 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.
- 2) Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terdiri dari dengan anggaran sebesar Rp. 930.993.250,- realisasi sebesar Rp.914.770.692 atau 98 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- realisasi sebesar Rp. 433.949.703,- atau 99 % untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Operasional dan patroli ketertiban umum, ketentraman masyarakat dalam Penegakan Perda serta perlindungan masyarakat terlaksana tidak didukung anggaran yang ada;
- 2) Sejauh ini dirasakan bahwa upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Terkesan bahwa upaya yang dilakukan

selama masih bersifat parsial, bahkan lembaga Satpol-PP seolah berjalan sendiri untuk melaksanakan tugas yang relatif berat tersebut. Oleh sebab itu diharapkan di masa yang akan datang forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.

- 3) Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi Satpol-PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit, tatkala di masyarakat sendiri ternyata pengetahuan tentang hal ini masih nol atau kurang karena sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal dan menjangkau masyarakat luas.

Solusi :

- 1) Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui pembentukan "pemolisian masyarakat" (community policing).
- 3) Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik sosial maupun politik, termasuk konflik sumber daya ekonomi dan alam, serta menangani persoalan pasca-konflik di lingkungan lokal.

- 4) Mendorong dan fasilitasi upaya-upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.
- 5) Peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

6.1 BIDANG URUSAN SOSIAL**6.1 DINAS SOSIAL****a. Tujuan**

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Sasaran dan Program**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Presentase PMKS Keluarga Fakir Miskin penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat	8,30	8,30	100%
	2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya	0,20	0,20	100%
	3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program Bantuan dan Perlindungan Sosial yang terlindungi, terpenuhi kebutuhan dasarnya meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya	1,78	1,78	100%
	4. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya di	4,41	4,41	100%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	TAHUN2017		Persentase (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
	masyarakat			
	5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat kemampuan keberfungsian sosialnya di masyarakat	0,75	0,75	100%
a. Program Pemberdayaan Sosial	a. PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial	397,607 KK	397,607 KK	100%
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	b. PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial	1.138 jiwa	1.138 jiwa	100%
c. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	c. PMKS penerima manfaat program bantuan dan perlindungan sosial	2.392 jiwa	2.392 jiwa	100%
d. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	d. PMKS penerima manfaat program penanggulangan bencana berbasis	860 jiwa	860 jiwa	100%
e. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	e. PMKS penerima manfaat program pengembangan kesejahteraan sosial	76 jiwa	76 jiwa	100%
f. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial	f. PMKS penerima manfaat program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial	4.880 jiwa	4.880 jiwa	100%
2. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,35 %	15,35 %	100%
a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	a. PSKS penerima manfaat program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	2.454 PSKS	2.454 PSKS	100%

Pada tahun 2017 kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditetapkan dengan 5 indikator yaitu

- Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya ;
 - PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya pada tahun 2017 dengan target 397,607 KK miskin atau 8,30 % dari populasi penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4. 789.120 jiwa, dan terealisasi sebesar 397,607 KK miskin atau 8,30 %. Capaian indikator pada tahun 2017 mencapai target didukung dengan program percepatan dan perluasan penanganan kemiskinan.
 - Persentase PMKS penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya, pada tahun 2017 dengan target sebanyak 1.138 jiwa atau 0,20 % dari populasi PMKS sebanyak 567.903 jiwa, dan terealisasi sebesar 1.138 jiwa atau 0,20 %, yang dicapai melalui implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - Persentase PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya, pada tahun 2017 dengan target sebesar 2.392 orang atau 1,78 % dan terealisasi sebesar 2.392 orang atau 1,78 %, hal ini disebabkan karena dukungan anggaran yang tersedia pada program tersebut dan adanya peningkatan penanganan PMKS yang menjadi sasaran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya penanganan orang terlantar.

- Persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya, pada tahun 2017 dengan target sebesar 76 orang atau 4,41 % dari jumlah eks klien UPT dan Bidang sebanyak 1.724 orang, dan terealisasi sebesar 76 orang atau 4,41 %, Hal ini karena dukungan anggaran yang tersedia pada program tersebut dan adanya dukungan dari stake holder seperti UPT, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pilar sosial di daerah.
- Persentase PMKS penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya, pada tahun 2017 dengan target sebesar 4.880 jiwa atau 0,75 % dari total populasi PMKS sebanyak 650.873 jiwa dan terealisasi sebesar 4.880 jiwa atau 0,75 % Hal ini terjadi karena adanya penambahan sasaran dari pelimpahan 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah (Kab. Ngawi dan Kab. Pacitan).

Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu

- Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pada tahun 2017 dengan target sebesar 15,35 % (5.055 PSKS) dari populasi PSKS sebanyak 16.033 (PSM, TKSK, TAGANA, Karang Taruna, WKSBM, LKS, dan CSR), dan terealisasi sebesar 15,35 % Hal ini karena ketersediaan anggaran pendukung program tersebut dapat mencukupi untuk pembinaan bagi 5.055 PSKS.

c. Program

Adapun program penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp.5.031.620.960,- Realisasi sebesar Rp. 4.776.403.677,- atau 94,93 % untuk

mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 8.875.447.470,- Realisasi sebesar Rp. 8.158.277.307,- atau 91,92 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.319.569.290,- Realisasi sebesar Rp. 7.406.079.285,- atau 89,02 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.206.188.180,- Realisasi sebesar Rp. 1.116.723.934,- atau 92,58 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 2.360.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 2.264.232.925,- atau 95,94 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 6) Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 9.210.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 7.502.902.898,- atau 81,46 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 4.775.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 4.760.406.600,- atau 99,69 % untuk

mendukung 7 (tujuh) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

- 8) Program Bantuan dan Perlindungan sosial dengan angga Rp. 1.330.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 1.321.807.595,- atau 99,38 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 9) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan anggaran Rp. 3.325.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.290.035.405,- atau 98,95 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 10) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 4.023.340.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.947.774.965,- atau 98,12 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 11) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial dengan anggaran Rp. 53.301.341.000,- Realisasi sebesar Rp. 50.273.025.921,- atau 94,32 % untuk mendukung 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masih perlu dioptimalkan khususnya dalam mendukung pelaksanaan monev dan pembinaan lanjut terhadap penerima manfaat program.

- 2) Daya tampung UPT untuk menangani PMKS yang memerlukan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan di UPT.

Solusi

- 1) Mendorong Dinas Sosial Kabupaten / Kota untuk memberikan dukungan anggaran monitoring dan evaluasi serta pembinaan lanjut terhadap penerima manfaat program kesejahteraan sosial di daerah.
- 2) Dialokasikan dukungan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana di UPT dengan harapan UPT mampu menambah daya tampung untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS dalam panti.

e. Penghargaan Yang diterima

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Penghargaan kepada Gubernur Jatim sebagai **Pembina Tagana Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2017** oleh Menteri Sosial RI
- 2) Menteri Sosial RI : Penghargaan Juara Umum Jambore TAGANA tingkat Nasional Tahun 2017

7.1 BIDANG URUSAN TENAGA KERJA

7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.
- 2) Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.
- 3) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		PROSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja	1. % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	91,00%	95,53%	104,98%
	2. % peningkatan tenaga kerja yang dimagang-kerjakan :			
	- % peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri.	10,00%	(-) 7,37%	(-)73,70%
	- % tenaga kerja magang ke luar negeri.	24,00%	34,49%	143,71%
	3. % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas	39,00%	44,42%	113,90%
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	91,00 %	93,30%	102,53 %
	2. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	47,00 %	62, 50%	132,98%
	3. % tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	80,00 %	80,90 %	101,13%
II. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	1. % pencari kerja yang ditempatkan	67,50%	68,56%	101,57%
	2. % peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir	86,00%	76,98%	89,51%

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		PROSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
	Terpadu) 3. % Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal 4. Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal	44,00%	29,32%	66,64%
		1:5	1:5	100,00%
1. Program Perluasan dan Penempatan Kerja	1. % pencari kerja yang ditempatkan. 2. % tenaga kerja indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal. 3. Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal	65,00 %	68,56%	105,48 %
		41,00 %	29,32%	71,51 %
		1 : 6	1:5	83,33%
III. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	1. % kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama 2. % upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL)	53,00%	50,90%	96,04%
		11,75% (tanpa KHL)	11,5%	97,87%
1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	1. % penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama 2. % upah minimum	53,00%	50,90%	96,04%
		11,75% (tanpa KHL)	11,5%	97,87%
IV. Meningkatnya pengawasan ketenaga-kerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh	1. % pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani 2. % penurunan kasus kecelakaan kerja	89,00%	100%	112,36%
		13,00%	15,49%	119.15%
1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	3. % kasus pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan 4. % pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif	89,00%	100%	112,36%
		50,00%	50,19 %	100,38 %

Pada tahun 2017 kinerja Bidang Ketenagakerjaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja

- **Prosentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi**

Prosentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi pada Tahun 2016 adalah sebesar 94,90 persen dan pada tahun 2017 sebesar 95,53 persen dari target pada tahun 2017 sebesar 91,00 % (***mencapai target***). Peningkatan tersebut diperoleh dari jumlah lulusan pelatihan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi sebanyak 3.056 orang untuk tahun 2017 lebih banyak dari tahun 2016 yang hanya sebesar 2.629, sedangkan yang mengikuti sertifikasi kompetensi untuk tahun 2017 sebanyak 3.199 orang. Adapun sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) atau BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

➤ **Prosentase peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri ;**

Prosentase peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri pada tahun 2017 sebesar (-) 7,37 persen dari target sebesar 10 persen (***belum mencapai target***). Jumlah tenaga kerja magang dalam negeri pada tahun 2017 sebesar 880 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 950. Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas untuk mendorong perusahaan agar melakukan pemagangan secara mandiri sehingga diharapkan kedepannya perusahaanlah yang akan memegang peran aktif dalam program magang kerja. Jumlah magang kerja dalam negeri secara mandiri pada tahun 2017 adalah sebesar 640 orang. Sehingga total tenaga kerja magang dalam negeri pada tahun 2017 berjumlah 1520 orang.

➤ **Prosentase tenaga kerja magang keluar negeri ;**

Prosentase tenaga kerja magang keluar negeri pada tahun 2017 sebesar 34,49 persen dari target 24,00 persen (***mencapai target***). Jumlah calon tenaga kerja yang lulus dimagangkerjakan ke luar negeri (Jepang) pada tahun 2017 sebanyak 99 orang dari total 287 yang mengikuti tes magang kerja luar negeri (Jepang). Selain itu ada 202 orang yang di magangkerjakan ke Jepang oleh Pihak lain yaitu Pondok

pesantren Ma'arif Jombang dari 662 orang yang mengikuti tes magang kerja ke Jepang. Pencapaian ini dikarenakan semakin meningkatnya peran serta dan kepedulian masyarakat / pihak swasta dalam melaksanakan program pemagangan luar negeri. Selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur juga melakukan kerjasama dengan LPK Sending Organisation.

➤ **Prosentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas ;**

Prosentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas tahun 2017 sebesar 64,38 persen dari target tahun 2017 sebesar 39,00 persen (*mencapai target*). Untuk tahun 2017, Produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan sebesar 47 (omset penjualan Rp.550.000.000,-) dan sesudah bimbingan konsultasi sebesar 73 (omset penjualan Rp.794.320.000,-). Kenaikan tersebut dikarenakan peserta yang telah mampu melakukan efisiensi terhadap proses kerja yang dilakukan.

Sasaran 2 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.

➤ **Prosentase pencari kerja yang ditempatkan ;**

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2016 sebesar 67,23 persen sedangkan pada tahun 2017 sebesar 68,56 persen dari target sebesar 67,50 persen (*mencapai target*). Hal ini disebabkan antara lain penempatan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 11,53 persen atau sebesar 53.035 orang yang diperoleh dari penempatan AKAN, AKL dan sektor informal dengan selalu melakukan koordinasi dengan kab/kota, Bursa Kerja Khusus (BKK) di UPT Pelatihan Kerja Disnakertrans, BKK SMK dan BKK Perguruan tinggi di Jawa Timur serta Komitmen Stakeholder Kab/Kota/Prov untuk memberikan pelayanan secara optimal di Bidang

Ketenagakerjaan serta adanya icon program/kegiatan unggulan yang mendorong penempatan dan penyerapan tenaga kerja.

➤ **Prosentase peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota yang aktif menginformasikan lowongan kerja di PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu);**

Prosentase Peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota yang aktif menginformasikan lowongan kerja di PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu) pada tahun 2017 sebesar 76,98 dari target sebesar 86 persen (*tidak mencapai target*). Walaupun secara prosentase mengalami penurunan, tetapi kalau dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Pusat Pelayanan Karir Terpadu (PLKT) tahun 2017 sebesar 1.212 perusahaan mengalami kenaikan sebesar 12,29 persen atau 149 perusahaan dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 1.063 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang aktif menginformasikan lowongan kerja pada tahun 2017 sebesar 933 juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 904. Pusat Layanan Karir Terpadu merupakan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja (*Public Employment Service*) yang memfasilitasi pencari kerja, perusahaan pemberi kerja/pengguna tenaga kerja, maupun kalangan pendidikan dan mitra kerja lainnya. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan hubungan antara dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, terutama dari angkatan kerja muda terdidik yang mencari pekerjaan di sektor formal.

➤ **Prosentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal ;**

Prosentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal pada tahun 2016 sebesar 30,88 persen, sedangkan pada tahun 2017 tercapai sebesar 29,32 persen dari target sebesar

44,00 persen (***tidak mencapai target***). Berdasarkan data yang tercatat, dari 36.426 orang TKI yang terdata melalui UPT P3TKI Surabaya, baru 10.679 orang TKI yang ditempatkan pada jabatan formal. Tidak tercapainya sasaran penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor formal dipengaruhi beberapa faktor antara lain terbatasnya kesempatan kerja sektor formal pada negara tujuan penempatan. Jabatan yang tersedia untuk Negara penempatan khususnya wilayah Asia Pasific (Taiwan, Hongkong) masih didominasi sektor informal. Taiwan dan Hongkong merupakan negara dengan jumlah penempatan TKI terbesar. Sedangkan jabatan untuk sektor formal selama ini banyak berasal dari Negara Malaysia (Konstruksi dan Industri). Jabatan untuk sektor Formal di Malaysia terbanyak di sektor perkebunan kelapa sawit dimana 80 % pekerjaanya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan untuk sektor industri banyak diisi dari lulusan SMK. Selain itu Kompetensi yang dimiliki oleh Calon TKI masih rendah sehingga tidak dapat mengoptimalkan kesempatan kerja di sektor formal. Adanya Kebijakan Pusat berupa Moratorium atau peninjauan ulang khusus seperti di negara-negara Arab, Korea, Taiwan dan Hongkong.

➤ **Rasio Penyerapan Tenaga Kerja dari Binaan di Sektor Informal ;**

Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal, pada tahun tahun 2017 realisasi sebesar 1:5 dari target 1:5 (***mencapai target***). Setelah dilakukan pembinaan, dari 1 orang peserta binaan usaha di sektor informal dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 5 orang. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan bagi peserta mulai dari pelatihan, pasca pelatihan dan terobosan kemitraan dengan SKPD / Institusi lainnya, serta adanya tenaga kerja sarjana (TKS) sebagai pendamping untuk membantu pengembangan disektor informal. Penyerapan tenaga kerja disektor informal banyak dipengaruhi karena keterbatasan modal, bentuk usaha masih skala kecil, kurangnya inovasi, kurangnya manajemen usaha kecil dan terkendala dengan

pemasaran, sehingga pelaku usaha kurang bisa berkembang dengan optimal.

Sasaran 3 : Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja.

➤ **Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama;**

Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama pada tahun 2016 sebesar 50,37 persen dan pada tahun 2017 sebesar 50,90 persen dari target 53,00 persen (***tidak mencapai target***). Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha / gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan HI melibatkan 3 unsur yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. Untuk mencapai Perjanjian Bersama perlu adanya kesadaran dari pihak pekerja dan pengusaha untuk menurunkan ego masing-masing demi mencapai win-win solution, kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama. Selain itu penyelesaian melalui Perjanjian bersama juga memerlukan kecakapan / kelihaian unsur Pemerintah dalam hal ini Mediator HI untuk mendamaikan para pihak (pekerja vs pengusaha) yang tengah berselisih.

➤ **Prosentase upah minimum ;**

Prosentase upah minimum tahun 2016 sebesar 8,25 persen. Sedangkan untuk tahun 2017 prosentase upah minimum sebesar 11,5 persen dari target sebesar 11,75 persen (***tidak mencapai target***). Rata-rata UMK Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp. 1.729.157 sedangkan

rata-rata UMK Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp. 1.817.813,-. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan di Pasal 44 ayat 2 sudah ditetapkan formula penghitungan upah minimum yang bersifat sederhana sehingga mudah dipahami oleh pekerja dan pengusaha dimana satu rumus berlaku untuk semua daerah. Dengan demikian diharapkan variasi kenaikan upah minimum antar wilayah akan dapat dijelaskan sehingga rasa ketidakadilan antar wilayah dapat dihilangkan karena penetapan upah minimum dengan formulasi bersifat transparan, akuntabel dan adil.

“Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : $U_{mn} + U_{mt} + \{U_{mt} \times (\text{inflasi} + \%APBDt)\}$

Dimana data inflasi nasional yang digunakan untuk formula penetapan upah minimum 2017 sebesar 3,07 persen, dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,18 persen. Jadi indikator prosentase upah minimum pada tahun 2018 tidak dipergunakan lagi karena sudah tidak relevan dan akan diganti dengan **“prosentase perusahaan yang membayar melebihi UMK”**

Sasaran 4 : Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh.

➤ **Prosentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani ;**

Prosentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dengan capaian tahun 2016 sebesar 80 persen sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan 89 persen (**mencapai target**). Jumlah pengaduan atas pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang masuk sebanyak 398 kasus, dan yang ditangani sebanyak 398 kasus. Penanganan terhadap pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya untuk menegakkan

hukum dibidang ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan hak-hak pekerja/buruh. Penanganan kasus ketenagakerjaan dilakukan dengan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ ***Prosentase Penurunan Kasus kecelakaan kerja ;***

Untuk indikator penurunan kasus kecelakaan kerja, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 15,49 persen. ***(tidak mencapai target)*** Kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 14.452 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 sebesar 12.514 kasus. Kecelakaan ini adalah kecelakaan kerja yang terjadi didalam tempat kerja atau di lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dimana pada tahun 2016 sebesar 1.663.031 peserta. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah peserta ,menjadi 1.823.906 peserta atau terdapat kenaikan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 160.875 peserta. Berbagai upaya penurunan kecelakaan kerja terus dilakukan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten oleh perusahaan maupun oleh tenaga kerja sehingga dapat meminimalisir terjadinya Unsafe Condition dan Unsafe Action yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

c. Program

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp. 80.965.194.859,- realisasi sebesar Rp. 79.762.886.465,- atau 98,52 persen untuk mendukung 71 kegiatan yang secara rinci masing-

masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

2) Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja

Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp. 7.500.000.000,- realisasi sebesar Rp. 7.024.174.803,- atau 93,66 persen untuk mendukung 9 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dengan anggaran Rp. 3.915.280.000,- realisasi sebesar Rp. 3.890.198.959,- atau 99,36 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan tenaga kerja

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan tenaga kerja, dengan anggaran Rp. 6.586.526.000,- realisasi sebesar Rp. 6.375.876.130,- atau (96,80) % untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kondisi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya memadai sehingga masih harus terus dilakukan revitalisasi.
- 2) Makin terbatasnya jumlah Instruktur pada UPT Pelatihan Kerja.

- 3) Alokasi sertifikasi kompetensi yang belum memadai dibandingkan jumlah siswa yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi. Idealnya, lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi diikuti dengan uji kompetensi untuk menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar kompeten.
- 4) Peran dan fungsi kabupaten/kota terhadap pembinaan pemagangan di wilayahnya belum optimal dan data pemagangan mandiri tidak terdata dengan baik di Kab./Kota.
- 5) Masih minimnya penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena adanya disparitas Upah Minimum antar Propinsi. Tingkat upah di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan provinsi lain sehingga calon tenaga kerja enggan untuk bekerja di luar Jawa Timur.
- 6) Turunnya kontribusi penempatan tenaga kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara) akibat masih diberlakukannya moratorium di beberapa Negara tujuan penempatan, dan pengetatan seleksi calon TKI khususnya untuk kemampuan bahasa dan budaya Negara tujuan.
- 7) Kebijakan pengetatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur ke luar negeri, khususnya pada jabatan informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) sebagai upaya perlindungan TKI, sehingga angka penempatan TKI melalui program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) berkurang.
- 8) Belum optimalnya pendataan penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan perluasan kesempatan kerja di sektor informal di kabupaten/kota.
- 9) Upah Minimum Kab/Kota (UMK) menunjukkan kenaikan yang positif, namun perlu diperhatikan dampak kenaikan UMK terhadap iklim investasi di Jawa Timur dan Implikasinya terhadap keberadaan dunia usaha sehingga berpotensi menyebabkan tingginya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial.
- 10) Masyarakat makin sadar hukum sehingga makin banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu

melalui mekanisme Perjanjian Bersama, berpotensi diajukan melalui jalur hukum.

- 11) Keterbatasan jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial di Jawa Timur.
- 12) Kendala komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, akibat penerapan Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Provinsi.
- 13) Kecepatan penyelesaian kasus tidak hanya tergantung pada kemampuan penanganan oleh Pengawas Ketenagakerjaan akan tetapi sangat tergantung pula pada masing-masing Perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan menyelesaikan kasus yang ada secepat mungkin.
- 14) Kebanyakan kasus ketenagakerjaan yang terjadi, posisi pekerja masih proses pemutusan hubungan kerja / tidak bekerja di Perusahaan sehingga Perusahaan bersikukuh untuk penyelesaian kasus tersebut menunggu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Solusi:

Alternatif solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelesaikan target revitalisasi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 UPT PK pada saat bersamaan secara bertahap. Dengan makin memadainya sarana-prasarana pelatihan, maka *output* pelatihan berupa tenaga kerja dengan *skill*/kompetensi memadai akan meningkat secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendorong peningkatan jumlah sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- 3) Mengintensifkan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk mencetak tenaga kerja yang terampil/kompeten.
- 4) Peningkatan koordinasi dan membangun mitra kerja melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) di setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemagangan mandiri, dengan melibatkan unsur asosiasi

perusahaan, industri, lembaga pelatihan kerja, dinas yang menangani ketenagakerjaan

- 5) Mendorong Komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan perusahaan untuk mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja sebagai layanan wajib kepada masyarakat.
- 6) Peningkatan layanan publik melalui inovasi pelayanan penempatan “Ayo Kerja Jatim” yang dilakukan baik secara konvensional melalui pelayanan langsung, maupun melalui website infokerja-jatim.com. Yang terbaru, dilakukan terobosan pelayanan informasi lowongan kerja melalui smartphone (berbasis android) untuk memperluas cakupan pelayanan informasi lowongan kerja di seluruh strata masyarakat.
- 7) Memperluas jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja.
- 8) Meningkatkan pembinaan kepada Kab./Kota untuk lebih mengefektifkan pelayanan dan pendataan penempatan tenaga kerja dari pencari kerja umum maupun alumni dari dunia pendidikan/alumni pelatihan.
- 9) Bursa Kerja Bulanan, Pekan Pasar Kerja di bulan September (2 bulan pasca kelulusan), serta Bursa Kerja Bersama dengan Provinsi lain.
- 10) Menggerakkan dan mendorong sektor-sektor lapangan usaha dan keterlibatan SKPD lainnya untuk berkontribusi dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja di Jawa Timur.
- 11) Koordinasi dan peningkatan kemampuan SDM petugas antar kerja di Kab./Kota untuk memperkuat upaya penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal.
- 12) Pembinaan dan optimalisasi fungsi Tenaga Kerja Sarjana sebagai pendamping dan motivator masyarakat dalam pengembangan kesempatan kerja di sektor informal.

- 13) Untuk memperluas kesempatan kerja di sektor informal, dilakukan program bimbingan usaha, bantuan stimulan sarana usaha, serta dampingan teknis pengembangan usaha di lapangan.
- 14) Calon peserta usaha mandiri di sektor informal wajib memiliki embrio usaha untuk menjamin agar usahanya semakin berkembang dan tidak berhenti beroperasi di tengah jalan.
- 15) Pembinaan lebih intensif kepada unsur pekerja dan pengusaha secara langsung ataupun melalui forum komunikasi dan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis yang melibatkan 3 unsur hubungan industrial (pengusaha, pekerja, pemerintah).
- 16) Mendorong Kab./Kota untuk berperan lebih aktif dalam proses penetapan UMK.
- 17) Mengusulkan pegawai di bidang Hubungan Industrial Provinsi maupun Kab./Kota untuk mengikuti Diklat Mediator Hubungan Industrial, dalam rangka menambah tenaga Mediator Hubungan Industrial.
- 18) Mengoptimalkan komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan yang lebih intensif ke Kab./Kota berkenaan dengan permasalahan Hubungan Industrial.
- 19) Pembinaan dan pemeriksaan perusahaan secara berkala untuk mengurangi kasus ketenagakerjaan.
- 20) Peningkatan efektivitas dan fungsi HRD Perusahaan untuk mengikuti Diklat Kader Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan sehingga norma-norma ketenagakerjaan dapat dipahami dan diaplikasikan di Perusahaan yang akan mengurangi terjadinya kasus ketenagakerjaan.
- 21) Peningkatan efektifitas P2K3 sebagai wadahkerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 22) Peningkatan pembinaan dan pengawasan K3 oleh Pengawas Ketenagakerjaan

BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI

a. Tujuan

Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		PROSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran	1. % penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (kepala keluarga)	68,00%	80,00%	117,65%
	2. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)	66,00%	72,00%	109,10%
Program Ketransmigrasian	1. % penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala Keluarga)	66,00%	80,00%	121,21%
	2. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala keluarga)	63%	72,00%	114,29%
	3. % Penduduk potensial yang mendapatkan pelatihan	45,00%	32,25 %	78,50%

Sasaran 1 : Meningkatkan penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran.

➤ ***Prosentase penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala Keluarga) ;***

Prosentase penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan pada tahun 2017 sebesar 80 persen dari target sebesar 68 % (***mencapai target***). Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bagi calon transmigran untuk bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas / Pemerintah Pusat melalui Balai Latihan Transmigrasi atau Balai Besar Latihan Transmigrasi. Selain itu koordinasi yang baik dari Dinas Kab/Kota dalam mendorong calon transmigran

untuk mengikuti pelatihan sebagai bekal ketrampilan bagi Kepala Keluarga maupun Istrinya (gender). Transmigran yang ditempatkan berjumlah 80 KK (241 jiwa), dan dari jumlah tersebut transmigran yang telah dilatih sebanyak 64 KK.

➤ **Prosentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya ;**

Prosentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya pada tahun 2017 sebesar 72 persen dari target sebesar 66 persen (***mencapai target***). Pada tahun 2017, jumlah Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya sebanyak 36 KK dari 50 KK transmigran yang ditempatkan pada lokasi tersebut. Sebagai perbandingan pada tahun 2016 Jumlah Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya sebanyak 120 KK dengan jumlah pendapatan Rp. 5.000.000/KK/bulan. Sedangkan jumlah transmigran yang ditempatkan pada lokasi tersebut sebanyak 147 KK.

c. Program

Program Ketransmigrasian, dengan anggaran Rp. 4.025.000.000,- dan realisasi Rp. 3.876.169.089,- (96,30 persen) untuk mendukung 4 kegiatan. yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi.

- 2) Kuota penempatan transmigran asal Jawa Timur yang diberikan oleh Pemerintah Pusat relatif terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan transmigrasi yang telah siap. Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah penempatan, antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung tuntas.
- 3) Semangat dan kerja keras para transmigran, ditunjang dengan adanya lingkungan masyarakat dan kondisi alam yang mendukung berakibat pada keberhasilan para transmigran dalam bercocok taman / berkebun. Hal ini menjadikan para transmigran memiliki kemampuan daya beli yang cukup.

Solusi:

- 1) Melakukan monitoring dan pembinaan kepada calon transmigran yang masih memiliki kemauan untuk diberangkatkan mengikuti program transmigrasi.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak angkutan kapal terkait dengan jadwal keberangkatan para transmigran.
- 3) Dilakukan terobosan pelatihan calon transmigran ke depan, dimana tidak hanya Pelatihan Dasar Umum (PDU), namun juga dilakukan pelatihan berbasis kemasyarakatan sehingga bukan hanya calon transmigran terdaftar/terseleksi yang dilatih tetapi juga animo calon transmigran bisa mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah tujuan, sehingga diperoleh calon transmigran yang lebih berkualitas dan mandiri.
- 4) Pasca penempatan transmigran, dilakukan monitoring dan pembinaan terpadu dari provinsi daerah penempatan, provinsi daerah asal dan pemerintah pusat. Monitoring dan pembinaan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan dinas/instansi terkait di lokasi penempatan, misalnya untuk menambah ketrampilan para transmigran sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Aspek Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik Tahun 2017

**8 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA; ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

8.1 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN

BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Tujuan

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

b. Sasaran dan Program

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
I. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71,62 22%	69,06* 33,24%	96,43% 151,09%
I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA)	15%	50%	333,33%
	2. Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja-PUG)	15%	100%	666,67%
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan didalam lembaga pemerintah	20%	18%	90%
II. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim	15%	30,51%	203,4%
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Perempuan dan Anak	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	200%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan korban KDRT, non KDRT dan Trafficking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu	100%	100% (321 Kasus)	100%

Catatan : Data IDG Tahun 2017 menggunakan Tahun 2016

Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :

➤ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2017 dengan target sebesar 71,62 dan terealisasi sebesar 69,06 atau 96,43 persen. Belum mencapai target dikarenakan adanya tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut) , PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi. Namun nilai IDG tahun 2016 meningkat 0,65 poin dari Tahun 2015 yaitu

sebesar 68,41. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi ekonomi/pendapatan bagi perempuan.

➤ **Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2017 dengan target sebesar 22% dan terealisasi sebesar 33,24% atau 151,09 persen. Mencapai target dikarenakan jumlah Anggaran Belanja Langsung APBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 yang telah di ARG kan sebesar Rp. 3.184.627.130.636,- dari Total Anggaran Belanja Langsung APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebesar Rp. 9.579.802.573.951,- Hal tersebut tak lepas dari komitmen Tim Driver Provinsi Jawa Timur dalam mendukung OPD untuk melakukan analisis terhadap anggaran OPD melalui Desk Anggaran ARG dengan melibatkan Fasilitator PPRG.

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

➤ **Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur**

Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur dengan target sebesar 15% dan terealisasi sebesar 30,51% atau 203,4 persen. Mencapai target dikarenakan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 321 kasus, menurun sebesar 30,51% jika dibandingkan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2016 sebanyak 462 kasus. Pencapaian target ini disebabkan karena :

- 1) Sudah dilaksanakannya Sosialisasi tentang Undang-undang/peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.
- 2) Adanya kecenderungan korban masih malu untuk melaporkan kasus tindak kekerasan dan trafficking yang dialami.

c. Program

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan anggaran Rp. 740.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 729.854.070,- atau 98,63% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan anggaran Rp. 960.337.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 873.695.414,- atau 90,98% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan anggaran Rp. 1.755.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.710.454.550,- atau 97,46% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan anggaran Rp. 1.110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.098.474.469,- atau 98,96% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan :**

- 1) Belum semua OPD Provinsi mendukung pelaksanaan PUG melalui Kelembagaannya dan ARG.
- 2) Belum semua Kab/Kota melaksanakan PUG dan PUA dengan seluruh komponen OPDnya.
- 3) Belum seluruh OPD menyusun data gender dan anak karena pemegang kebijakan belum menempatkan data gender dan anak sebagai komponen penting yang mendukung dalam mengambil kebijakan.

- 4) Belum semua koordinator klaster dalam gugus tugas KLA optimal menjalankan tugasnya.
- 5) Banyaknya perempuan kepala keluarga yang belum bisa mengembangkan usahanya.
- 6) Kurangnya perempuan yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang politik.
- 7) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 38 Kab/Kota belum semuanya berfungsi secara optimal. Penyebabnya adalah : (1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan korban, (2) SDM pengelola PPT banyak yang belum dilatih, (3) Alokasi anggaran terhadap penanganan kasus kekerasan dan trafiking di Kabupaten/Kota masih minim.

Solusi :

- 1) Mengoptimalkan koordinasi dengan melalui tim Pokja serta pendampingan OPD.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan pada kab/kota.
- 3) Menyepakati, mengumpulkan data–data spesifik gender dan terpilah gender yang ada di OPD maupun di lintas bidang.
- 4) Memperkuat tim Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA melalui koordinasi, komunikasi intensif dan penyusunan rencana kerja.
- 5) Diadakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dan pembinaan bersama lintas sektor baik Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Sosial.
- 6) Pelatihan dan Sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang politik perempuan.
- 7) Mengadakan rapat koordinasi penanganan korban kepada P2TP2A Kabupaten/Kota agar bisa bersinergi dalam layanan korban serta meningkatkan intensitas pertemuan antar P2TP2A dengan para jejaring.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pekanbaru Riau pada tanggal 22 Juli 2017.

BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**a. Tujuan**

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
I. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Persentase Data Kependudukan yang Akurat	99,39%	99,39%	100
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kelahiran	80%	83,89%	104,86%
	2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Akta Kematian	30%	50,66%	168,9%
	3. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP-EI	96%	98,36%	102,46%

Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

➤ **Persentase Data Kependudukan yang Akurat**

Persentase Data Kependudukan yang Akurat dengan target sebesar 99,39% dan terealisasi sebesar 99,39% atau 100 persen. Mencapai target disebabkan karena ada beberapa upaya yang sudah dilaksanakan, antara lain :

- 1) Peningkatan cakupan perekaman penduduk wajib KTP elektronik.
- 2) Forum komunikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

- 3) Peningkatan SDM petugas administrasi data base kependudukan.

c. Program

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 2.801.577.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.794.900.900,- atau 99,76% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Data penduduk ganda.
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia petugas dari Kabupaten/kota.
- 3) Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya dokumen kependudukan terutama di daerah pelosok.
- 4) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

Solusi :

- 1) Melaksanakan sentralisasi database dengan melakukan penunggalan NIK.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Kabupaten/Kota dengan melakukan bimbingan teknis.
- 3) Memberikan sosialisasi secara kontinyu khususnya ke penduduk yang terpencil.
- 4) Meningkatkan kerjasama relasi dan koordinasi ke instansi yang terkait.

BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**a. Tujuan**

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
I. Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan KB aktif	70%	76,21%	108,87%
1. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase kelompok yang mendapatkan Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar	100%	100%	100%
2. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kader Taman Posyandu yang dilatih tentang Perlindungan Anak	500 Kelompok	510 Kelompok	102%
3. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan KB aktif	70%	76,21%	108,87%

Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

➤ **Cakupan KB aktif**

Cakupan KB aktif dengan target sebesar 70% dan terealisasi sebesar 76,21% atau 108,87 persen. Mencapai target, hal ini disebabkan ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Cakupan Peserta KB Aktif, antara lain melalui :

- 1) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

- 2) Sosialisasi Program KB oleh Kader di Posyandu.
- 3) Dilakukannya pembinaan pada petugas tentang Program KB dan Ketahanan Keluarga.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan anggaran Rp. 188.385.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 188.084.370,- atau 99,84% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU, dengan anggaran Rp. 126.615.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 125.414.250,- atau 99,05% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan anggaran Rp. 667.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 646.746.868,- atau 96,96% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Tingginya ego sektor dan ego program yang membuat kurang maksimalnya koordinasi.
- 2) Kurangnya pemahaman dari SDM yang ada di tingkat Kabupaten/Kota sehingga program tidak berjalan dengan maksimal.
- 3) Kurangnya dukungan politis dari para pemangku kebijakan, sehingga kurangnya pembinaan, monitoring dan evaluasi program.

- 4) Kegiatan yang sudah dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur tidak dapat ditindaklanjuti sampai ke Kabupaten/Kota karena minimnya dana yang ada, hal ini disebabkan karena dana hanya bersumber dari APBD saja.

Solusi :

- 1) Perlu adanya advokasi dan sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu baik ke Lintas Sektor maupun Lintas Program agar mendapat dukungan dari para pemangku kebijakan.
- 2) Meningkatkan pemahaman kepada petugas dan penanggung jawab program tentang pelaksanaan program di Kabupaten/Kota.
- 3) Perlu ada inovasi dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan evaluasi program.
- 4) Advokasi untuk mendapatkan dukungan dana terutama yang bersumber dana APBN.

9. BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**9.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP****a. Tujuan**

- 1) Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup;
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
I. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta kelestarian ketersediaan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Air (IKA)	54	52.77	97.72
	2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,35	85.49	103.37
	3 Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTLH)	60	62.02	103.37
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Prosentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air (menggunakan metode STORET atau metode indeks pencemaran air) (%)	34	43,64	128.36
	2 Prosentase titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (menggunakan metode indeks pencemaran udara) (%)	12	20	144.47
	3 Prosentase pengawasan industry dan usahadan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi (%)	86	102	118,60

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 * 100)
	4 Prosentase penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi (%)	100	100	100
	5 Prosentase penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan sanksi administrasi (%)	60	100	166.66
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1 Prosentase wilayah sumbermata air yang terkonservasi (titik)	5	0	0
	2 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	100	95,92	95,90
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1 Jumlah lokasi lahan kritis terehabilitasi (lokasi)	5	1	20
4. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah penurunan emisi GRK (juta ton eq. CO2)	4,289	11,954	278,7

Pada tahun 2017 kinerja Bidang Lingkungan Hidup yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta kelestarian ketersediaan sumberdayaalam dan fungsi lingkungan hidup, ditetapkan 3 (tiga) indikator, yaitu:

➤ Indeks Kualitas Air (IKA);

Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2017 dengan target sebesar 54, dan terealisasi sebesar 52,77 atau 97,72 persen (Belum

mencapai target).Belum tercapainya target IKA pada tahun 2017 ini disebabkan oleh:

- 1) Pertumbuhan permukiman dan pusat-pusat kegiatan/ tempat umum disepanjang wilayah sungai yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan pembangunan sarana pengolahan limbah yang memadai sehingga limbah yang dihasilkan berpotensi mencemari sungai;
 - 2) Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan diikuti oleh pertumbuhan industri terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada disekitari wilayah sungai. Pada saat ini terdapat ± 1.004 industri dengan jumlah industri yang berpotensi sumber pencemar ± 483 buah, di Kali Surabaya terdapat 65 industri dan di DAS Brantas terdapat 33 industri. Dengan proporsi limbah yang bersumber dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, dan dari limbah pertanian, peternakan dan perkebunan sebesar 10%;
 - 3) Terjadinya alih fungsi lahan, terutama di wilayah tangkapan air yang menyebabkan debit air yang masuk kebeberapa sungai berkurang. Alih fungsi lahan juga berpengaruh terhadap kemampuan permukaan tanah untuk menahan air sehingga terjadi erosi tanah permukaan yang menyebabkan padatan yang masuk kedalam sungai meningkat.
- Indeks Kualitas Udara (IKU);
- Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2017 dengan target sebesar 89.35 dan terealisasi sebesar 85.49 atau 95.68 persen.
- Belum tercapainya target IKU pada tahun 2017 ini disebabkan oleh:
- 1) Meningkatnya kegiatan sektor industri, permukiman penduduk dan sektor energi terutama energi listrik (sebagai sumber pencemar tidak bergerak) yang tidak diimbangi dengan upaya untuk mengurangi emisi udara yang dihasilkan;

- 2) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor (sumber bergerak) yang tidak terkendali terutama diwilayah perkotaan;
- 3) Masih marak pembakaran langsung terhadap sampah dan sisa pertanian/ perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat.

➤ Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLTH) pada tahun 2017 dengan target sebesar 60 dan terealisasi sebesar 62.02 atau 103.37 persen. Tercapainya target IKTLH pada tahun 2017 ini disebabkan oleh:

- 1) Terjaganya hutan dari kegiatan alih fungsi lahan terutama di wilayah kabupaten/ kota;
- 2) Meningkatnya luasan RTH terutama yang terdapat di wilayah ibukota kabupaten/ kota.

c. Program

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan anggaran sebesar Rp. 22.834.687.800,- dan terealisasi Rp. 13.741.378.438,- atau 60,18 % untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom;
- 2) Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam, dengan anggaran Rp. 2.950.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.870.442.615,- atau sebesar 97,30 % untuk mendukung3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom;
- 3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan anggaran program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.458.799.250,00,- atau sebesar 97,25 % untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom;

- 4) Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, dengan anggaran sebesar Rp. 1.225.000.000,- dan realisasi Rp. 1.141.296.450,- atau sebesar 93,17%. Untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Pengetahuan masyarakat relatif rendah terutama mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang berdampak kepada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk turut serta didalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- 2) Lahan kritis yang akan direhabilitasi tidak berada pada satu lokasi sehingga kurang efektif didalam proses monitoring dan evaluasi;
- 3) Minimnya data terbaru profil sumber mata air akibat adanya tumpang tindih permasalahan antara pemangku kepentingan dan pemangku wilayah sumber mata air;
- 4) Semakin maraknya pengaduan masyarakat mengenai limbah B3 tanpa izin dan minimnya tanggapan KLHK dan Dinas LH kab/kota dalam menindaklanjuti pengaduan yang dilimpahkan;
- 5) Berkurangnya anggaran dalam pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan, serta pembinaan lingkungan;
- 6) Kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap usahadan/ atau industry lainnya;
- 7) Aksi mitigasi telah banyak dilakukan di daerah tetapi tidak tercatat secara detail setiap aktivitas yang dilakukan karena minimnya jumlah data yang diperoleh menyebabkan banyak dilakukan asumsi dalam perhitungan emisi.

Solusi:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat didalam pengeleloaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memberikan edukasi dan pelatihan;
- 2) Untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi hasil kegiatan, maka kegiatan ini akan ditempatkan di satu lokasi;
- 3) Peningkatan peran aktif daerah untuk memperbaharui data profil sumber mata air serta regulasi ditingkat nasional harus dapat melihat kepentingan di daerah terkait sinergitas antara pemangku kepentingan dan pemangku wilayah;
- 4) Peningkatan kapasitas kepegawaian teknis bidang LH, pengawasan terhadap industri, transporter dan pemanfaat limbah B3 serta Peningkatan koordinasi dengan KLHK dan Dinas LHkab/ kota dalam penanganan pengaduan;
- 5) Perlunya peningkatan anggaran dalam pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan, serta pembinaan lingkungan;
- 6) Menambah jumlah tenaga PPLHD agar pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik;
- 7) Peningkatan kapasitas perhitungan emisi GRK (keg. Inventarisasi maupun PEP) sehingga meningkatkan jumlah dan kualitas data aktifitas yang diperlukan dalam perhitungan emisi GRK serta melakukan asumsi dalam perhitungan dengan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan (metada data).

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan Nirwasita Tantra Tingkat Provinsi. Penghargaan Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari Pemerintah Pusat terhadap Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota) yang dinilai memiliki kepemimpinan yang mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja berbasis pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Penilaian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas dokumen informasi

kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD). Penghargaan ini pertama kali diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebagai dokumen IKPLHD nasional terbaik. Penghargaan Nirwasita Tantra Tingkat Provinsi tahun 2017 diserahkan langsung oleh Presiden RI kepada Wakil Gubernur Jawa Timur.

10. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

10.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel dan pemerintahan desa.

b. Sasaran dan program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa/kel.	1 Jumlah UEM yang berdaya	31.816	31.748	99,79 %
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	1 Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbentuk	180	180	100 %
		2 Jumlah RTS yang memiliki usaha	31.600	31.532	99,78 %
2.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif	1 Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kel. yang aktif	4,5 %	5,09 %	113,21 %
	Program Peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan desa/kel.	1 Persentase lembaga kemasyarakatan (LPMD/K, TP PKK desa/kel.) yang aktif	75 %	75, 20 %	100,27 %
		2 Persentase KPM yang aktif	7%	7,27%	103,46 %
3.	Meningkatnya kemandirian pengelolaan	Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur.	3 %	5,70 %	189,88%

No.	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	pemerintahan desa				
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Persentase peningkatan aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes	7 %	7 %	100 %
		2 Persentase desa yang telah menyusun RPJMDes, RKPDDes dan APBDes yang tepat waktu	13 %	13 %	100 %
		3 Persentase desa yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahunan	13 %	13 %	100 %
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA	1 Jumlah kerjasama desa di Jawa Timur dalam pembangunan kawasan perdesaaan	11	11	100 %
		2 Jumlah kerjasama pendayagunaan sarana prasarana desa	11	11	100 %
		3 Jumlah kerjasama pemanfaatan dan pendayagunaan TTG	6	6	100 %

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 :** Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat, desa/kel. dan pemberdayaan masyarakat miskin. ditetapkan Indikator Kinerja, yaitu:
Jumlah UEM yang berdaya, pada Tahun 2017 pada indikator sasaran dari target 31.816 dan teralisasi 31.748 atau tingkat pencapaian sebesar 99,79 % Realisasi capaian yang kurang 0,2 % untuk mencapai optimal ini disebabkan karena realisasi sasaran dengan kendala APBDesa belum disahkan dan diundangkan, dan juga Kepala Desanya sedang menghadapi proses hukum sehingga sampai batas waktu terakhir proses pengajuan permohonan pencairan berkas pencairan tidak diajukan yang berakibat pada tidak realisasinya sasaran di Desa Glagah Arum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (68 RTSM).
- Sasaran 2:** Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kel. Yang aktif, ditetapkan Indikator Kinerja, yaitu :
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif, pada Tahun 2017 pada indikator sasaran dari target 4,5 % dan teralisasi 5,09 % atau tingkat pencapaian sebesar 113,21 %. Pencapaian kinerja ini melampaui target kinerja, hal ini didukung oleh pembinaan dan bimbingan secara intens dari Dinas PMD Prov. Jatim dan Kabupaten/Kota melalui LPMD/LPMK di desa/kelurahan dalam proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam Musrenbang desa/kelurahan untuk kemajuan desa.
- Sasaran 3:** Meningkatnya kemandirian pengelolaan pemerintahan desa, ditetapkan Indikator Kinerja, yaitu :
Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur pada Tahun 2017 pada indikator sasaran dari target 3 % dan teralisasi 5,70 % atau tingkat pencapaian sebesar 189,88 %. Pencapaian kinerja ini melampaui target kinerja, hal ini didukung oleh Pencapaian kinerja sasaran tahun 2017 untuk indikator kinerja Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur merupakan indikator yang baru diukur pada tahun 2017 sehingga akan dapat diperbandingkan di tahun berikutnya, walaupun demikian akan

tetap membandingkan untuk persentase pencapaiannya. Persentase pencapaian indikator kinerja Persentase desa cepat berkembang di Jawa Timur mencapai 189,88 % pada tahun 2017. Hal ini didukung pembinaan intens dari Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja profil desa/kelurahan untuk melakukan update pengukuran tingkat perkembangan desa. Respon Kabupaten/Kota terhadap pembinaan desa/kelurahan lebih baik karena koordinasi yang intens dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.242.002.698,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.189.644.381,- (97,66%). Program ini didukung oleh pelaksanaan 7 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Formaat Matriks 16 kolom.
- 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.574.286.800,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.209.700.354,- (89,80%), Program ini didukung oleh pelaksanaan 5 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Formaat Matriks 16 kolom.
- 3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.608.300.102,- telah terealisasi sebesar Rp. 17.979.158.868,- (96,62%). Program ini didukung oleh pelaksanaan 6 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Formaat Matriks 16 kolom.

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.266.903.800,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.979.181.321,- (96,52%) Program ini didukung oleh pelaksanaan 6 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Saat ini persentase Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur berdasarkan data BPS per September 2017 adalah sebesar 11,20 %, masih berada diatas nasional, persentase penduduk miskin terus menurun walaupun kecil, hal tersebut sulit dihindari pada saat persentase penduduk miskin mulai mendekati angka 10%, karena berhadapan dengan *hardcore poverty*, atau ada pula yang menyebutnya, *ultra-poor*, atau *extreme poor*, yakni kelompok paling miskin di antara orang miskin (*The poorest of the poor*), paling tidak berdaya, dan sulit dijangkau, kebijakan - kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, akan dapat semakin berdampak antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, yang dapat memicu inflasi yang cukup tinggi, akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup tinggi dan sangat rentan terhadap guncangan yang dapat mengakibatkan ketidakberdayaan yang memungkinkan masyarakat miskin jatuh pada kemiskinan yang lebih dalam, membutuhkan program penanggulangan yang mampu menahan dan memberikan penguatan untuk masyarakat miskin lebih dapat survive.

Solusi:

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain

dengan kebijakan yang *pro poor*, sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan di desa/kel., pengambilan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian. Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel. Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang miskin yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang dan secara bertahap, akan langsung terdampak oleh kebijakan - kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, yang dapat memicu inflasi yang cukup tinggi, akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

- 1) Pemenang I tingkat Nasional Perlombaan Desa dan Kelurahan Nasional Tahun 2017, Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang wilayah Jawa Bali;
- 2) Juara I Tingkat Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun 2017 Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- 3) Juara Harapan 3 Tingkat Nasional untuk kategori Stand Terbaik Gelar TTG Tahun 2017 di Sulawesi Tengah.

11. BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

11.1. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan sektor transportasi
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peranan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan bidang transportasi

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi	• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan	70	71,53	102,19
	• Kapasitas Pelayanan kendaraan umum AKDP per 1000 jumlah penduduk	7,5	8,06	107,47
	• Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan)	10	23,28	232,80
	• prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api	10	-50	-500,00
	• Prosentase kendaraan tidak melanggar	80	83,57	104,46
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan	70	71,53	102,19

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi	1	1,5	102,19
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	• Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan)	10	23,28	232,80
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	• prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api	10	-50	-500,00
Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta	• Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan	49	51,64	105,39
	• prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan di Jawa Timur	5	17,84	356,80
	• Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan Utama di Jawa Timur	2	2,61	130,50
	• Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang	10	27,05	270,50
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas terpelihara dibandingkan Jumlah Prasarana dan Fasilitas yang dimiliki	54	54	100
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan	49	51,64	105,39

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan di Jawa Timur	5	17,84	356,80
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama di Jawa Timur	4,89	5	102,25
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang	10	27,05	270,50
- Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	Prosentase jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	71,05	76,32	7,41

Evaluasi kinerja terhadap realisasi indikator kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2017 kinerja Dinas Perhubungan yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi

SDM petugas sektor transportasi, ditetapkan dengan 5 indikator kinerja yaitu :

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 70 dan terealisasi sebesar 71,53 atau 102,19 persen (mencapai target) Sesuai UU 23 tahun 2014, disebutkan bahwa Terminal Tipe B di Jawa Timur kewenangannya dilimpahkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana sebelumnya pengelolaan ada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu pelayanan penimbangan kendaraan

angkutan barang di Jembatan Timbang tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melainkan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini mengakibatkan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tidak lagi dilakukan terhadap jembatan Timbang melainkan terhadap pelayanan Terminal Tipe B di Jawa Timur. Selain pelayanan di Terminal Tipe B, survey kepuasan juga dilaksanakan pada pengguna kendaraan umum AKDP untuk memperoleh gambaran kepuasan masyarakat terhadap layanan bus AKDP di Jawa Timur terkait dengan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh penyedia jasa transportasi angkutan umum/operator khususnya bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), pengukuran dilaksanakan pada 11 koridor Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Pada tahun 2016 dicapai nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang adalah sebesar 77,91 dari target yang ditetapkan sebesar 81 sedangkan pada tahun 2017 nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe B telah mencapai realisasi sebesar 65,79 dari target yang ditetapkan sebesar 70 yang merupakan target gabungan nilai SKP pelayanan Terminal Tipe dan SKP pengguna angkutan umum AKDP. Nilai target realisasi Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Perhubungan diubah dari 81 menjadi 70 karena item yang dinilai berbeda dan tidak dapat dibandingkan.

Variabel penelitian sebanyak 9 unsur variabel mengacu pada Permenpan No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel terdiri dari Persyaratan pelayanan (U1), Prosedur pelayanan (U2), Waktu pelayanan (U3), Biaya/Tarif pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9). Sedangkan metode Analisa berpedoman pada SK Menpan: Kep. Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Kep.Menpan No 25/KEP/M.PAN/2/2004 dan Kepmenpan No 38/2012

secara umum, penilaian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	74,41	77,91	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe B			65,79
3	Surabaya-Ponorogo-Pacitan	68,56	78,62	69,35
4	Surabaya-Tulungagung-Kediri-Trenggalek	71,88	79,34	68,66
5	Surabaya-Madiun-Magetan	64,6	77,93	74,03
6	Surabaya-Lamongan-Bojonegoro	61,25	70,27	77,67
7	Surabaya-Sumenep	67,51	76,01	74,75
8	Surabaya-Situbondo-Banyuwangi	64,84	72,99	75,82
9	Surabaya-Malang-Blitar	72,43	76,82	69,86
10	Surabaya-Bondowoso	70,76	69,54	70,15
11	Surabaya-Lamongan-Tuban	69,42	72	70,32
12	Surabaya-Madiun	66,97	76,47	76
13	Surabaya-Jember-Banyuwangi	63,18	74,85	66,05
RATA2 SKM		67,98	75,22	71,53

Sumber Data : Hasil SKM Dinas Perhubungan Prov. Jatim

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan nilai SKM pelayanan Terminal Tipe B dengan melengkapi prasarana dan kinerja terminal melalui kegiatan pemenuhan sarana Terminal Tipe B sesuai ISO 9001 dan pembinaan SDM yang terlibat di dalam terminal.

➤ **Kapasitas pelayanan kendaraan umum AKDP per 1000 jumlah penduduk**

Kapasitas pelayanan kendaraan umum AKDP per 1000 jumlah penduduk pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 7,5 dan terealisasi sebesar 8,06 atau 107,47 persen (mencapai target). Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengetahui ketersediaan jumlah *seat* (tempat duduk) pada kendaraan umum AKDP yang tersedia untuk melayani penduduk

di Jawa Timur. Ketersediaan jumlah bus/kendaraan angkutan umum AKDP di Jawa Timur yang terdiri dari Bus AKDP reguler boemel, bus AKDP cadangan, bus reguler PATAS, bus kota PATAS dan bus pemadu moda dengan kapasitas seat masing-masing 55 (lima puluh lima) *seat* pada tahun 2017 sebanyak 4.360 unit ditambah dengan jumlah MPU/Mikrolet/Mikro bus dengan kapasitas *seat* masing-masing 12 (dua belas) *seat* pada tahun 2016 sebanyak 6.112 unit dengan total *seat* keseluruhan tersedia sebanyak 313.144 *seat* yang dipergunakan untuk melayani 38.847.561 penduduk Jawa Timur. Dengan data tersebut ditargetkan seat yang tersedia untuk melayani per 1000 jumlah penduduk jatim sebesar 7,5 seat terealisasi sebesar 8,06 seat atau tercapai sebesar 107,47% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.9 Kapasitas Seat Kendaraan Angkutan Umum Di Jawa Timur

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2015	2016	2017
1	Jumlah Bus AKDP reguler Boemel	Kendaraan	3.846	3.359	3.343
2	Jumlah Bus AKDP Cadangan	Kendaraan	488	487	377
3	Jumlah Bus Reguler PATAS	Kendaraan	642	579	583
4	Jumlah Bus Kota PATAS	Kendaraan	29	28	28
5	Jumlah Bus Pemadu Moda	Kendaraan	29	29	29
Jumlah			5.034	4.482	4.360
A. jumlah seat (55)			276.870	246.510	239.800
1.	Jumlah MPU/Mikrolet/Mikrobus	Kendaraan	6.017	6.082	6.112
B. jumlah seat (12)			72.204	72.984	73.344
Jumlah seat A + B			349.074	319.494	313.144
JUMLAH PENDUDUK JATIM (DATA BPS)		Orang	38.847.561	38.847.561	38.847.561
JUMLAH SEAT / JUMLAH PENDUDUK JATIM			0,00899	0,00822	0,00806
(JUMLAH SEAT / JUMLAH PENDUDUK JATIM) x 1000			8,99	8,22	8,06

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Jatim

➤ **Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan)**

Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan) pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 10% dan

teralisasi sebesar 23,28% atau 232,80 persen. Indikator Kinerja Utama persentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum, merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum.

Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum merupakan salah satu tupoksi Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam bidang bimbingan, pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan.

Dari upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam pembinaan pengemudi tersebut terwujud kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum. Sehingga diharapkan tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum di Jawa Timur dapat berkurang dari tahun ke tahun. namun sebagaimana data yang di peroleh dari Polda Jatim jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2017 menurun sebesar 23,28% dari tahun 2016 sebagaimana data dibawah ini:

Tabel 4.10 Data Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Umum

NO	KENDARAAN TERLIBAT LAKA	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Bus	Unit	526	494	471	524	402
% Penurunan Laka		%	3,84%	6,08%	4,66%	-11,25%	23,28%

Sumber Data : Polda Jatim

Sebagai upaya untuk menurunkan jumlah kejadian kecelakaan di Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur meningkatkan kegiatan Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan kabupaten / kota se Jawa Timur, Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor, Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur serta melaksanakan Evaluasi dan Manajemen Rekayasa LLAJ

➤ **Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api**

Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar -50% atau -500 persen. Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api, merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dampak pembangunan Alarm Early Warning System (AEWS) yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada perlintasan resmi antara jalan dan jalur kereta api yang belum memiliki fasilitas palang pintu perlintasan. Pemasangan AEWS ditujukan untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dengan cara memperingatkan pengguna jalan saat melintas pada perlintasan sebidang kereta api.

Untuk menghitung prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dilakukan dengan mendata jumlah kecelakaan yang terjadi pada perlintasan sebidang yang tidak memiliki palang pintu saja, karena pemasangan AEWS hanya memberikan dampak pada penurunan kecelakaan di perlintasan sebidang yang semula belum memiliki palang pintu. Formulasi prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api berupa perbandingan selisih jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api tahun 2017 dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.11 Data Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Kereta Api

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	BERPALANG	kejadian	9	5	6	3	10
2	TIDAK BERPALANG TANPA EWS	Kejadian	7	3	10	15	19
3	TIDAK BERPALANG DENGAN EWS	Kejadian	3	4	4	6	9
JUMLAH LAKA PADA PERLINTASAN SEBIDANG		Kejadian	19	12	20	24	38
% PENURUNAN KECELAKAAN DI PERLINTASAN TIDAK BERPALANG DENGAN EWS		%		-33%	0%	-50%	-50%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Jatim

Berdasarkan data diatas, kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api pada tahun 2017 meningkat sebesar 50% dari tahun sebelumnya, sehingga target yang telah ditetapkan untuk menurunkan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang Kereta Api belum tercapai. Meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api karena telah dioperasikan jaringan jalan kereta api *Double Track* lintas Surabaya – Semarang (wilayah kerja DAOP VIII) yang berdampak pada meningkatnya frekuensi lalu lintas kereta api, meningkatnya kecepatan kereta api dan semakin lebarnya bidang perlintasan. Sedangkan untuk lintas Surabaya – Solo (wilayah kerja DAOP VII) saat ini sedang dilaksanakan pembangunan konstruksi *Double Track* dimana masyarakat sekitar masih belum terbiasa dengan kondisi tersebut.

Untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api maka Dinas Perhubungan akan meningkatkan sosialisasi tentang keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api. Disamping itu juga akan meningkatkan prasarana pengamanan perjalanan kereta api dengan memasang AEWS dan rambu-rambu perkeretaapian pada perlintasan sebidang kereta api serta melakukan peningkatan prasarana pengamanan pada perlintasan sebidang yang telah berjalur ganda.

➤ **Prosentase kendaraan tidak melanggar**

Prosentase kendaraan tidak melanggar pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 88,75% atau 83,57 persen. Indikator Kinerja persentase tingkat pelanggaran angkutan umum di Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan kinerja pelayanan kendaraan angkutan umum dalam mematuhi pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan umum terhadap perizinan angkutan, kelaikan teknis kendaraan bermotor guna mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur.

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 11 Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas. Pelaksanaan operasi tersebut melibatkan instansi terkait, antara lain Satlantas Polres/Polresta Kab/Kota, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Dinas Perhubungan Kab/Kota. Diharapkan melalui operasi tersebut dapat mengeliminasi kejadian dan korban jiwa akibat kecelakaan angkutan serta menciptakan efek jera agar pengusaha dan awak angkutan lebih peduli terhadap keselamatan dan ketertiban penyelenggaraan angkutan.

Dalam perhitungan persentase tingkat pelanggaran angkutan umum di Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan data hasil Operasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jawa Timur, dengan formulasi perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan umum yang tidak melanggar pada tahun 2017 terhadap jumlah kendaraan angkutan umum total yang di periksa selama tahun 2017 tersebut.

Data hasil pemeriksaan kendaraan angkutan umum yang dilakukan oleh UPT LLAJ di Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12 Data Kendaraan Tidak Melanggar

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2016	2017
1	Jumlah Kendaraan yang diperiksa	Kendaraan	9.544	10.591
2	Jumlah Pelanggaran	Kendaraan	1.074	1.740
3	Jumlah Tidak Melanggar	Kendaraan	8.470	8.851
% kendaraan tidak melanggar (jumlah kendaraan tidak melanggar/Jumlah kendaraan diperiksa)		%	88,75%	83,57%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Jatim

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta

➤ Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan

Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 49 dan terealisasi sebesar 51,64 atau 105,39 persen. Indikator Kinerja Utama

rata-rata persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan yang seharusnya tersedia sebagaimana kebutuhan.

Perhitungan rata-rata prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.13 Data Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan

NO	URAIAN	SAT	KEBUTUHAN	TAHUN				
				2016		2017		
				Akumulasi	%	terpasang	Akumulasi	%
1	RPPJ	unit	711	469	65,96%	114	583	82,00%
2	PakuMarka	unit	80.000	14.075	17,59%	3.110	17185	21,48%
3	Traffic Light	unit	242	125	51,65%	17	142	58,68%
4	warning Light	unit	1000	142	14,20%	42	184	18,40%
5	MarkaJalan	meter lari	2.503.039	737.170	29,45%	203.600	940770	37,59%
6	Pagar Pengaman Jalan/ guardrail	meter lari	71.726	32.164	44,84%	7.824	39988	55,75%
7	RambuLaluLintas	unit	23.000	17.754	77,19%	3.126	20880	90,78%
8	PapanHimbauan	unit	1.081	543	50,23%	96	639	59,11%
9	PatokTikungan	unit	13.672	5.281	38,63%	1.450	6731	49,23%
10	Lampu Penerangan Jalan Umum	unit	9.791	3.280	33,50%	966	4246	43,37%
RATA-RATA					42,33%			51,64%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Jatim

➤ Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur

Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 5% dan terealisasi sebesar 17,84% atau 356,8 persen. Indikator Kinerja Utama Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan

pelabuhan penyeberangan terhadap masyarakat Jawa Timur. melalui pemantauan pada 3 lintasan penyeberangan utama di Jawa Timur yaitu lintas Jangkar – Kalianget; lintas Ketapang – Gilimanuk dan lintas Ujung – Kamal.

Tabel 4.14 Data Pertumbuhan Penumpang Pada Lintas Penyeberangan

NO	LINTASAN	SAT	JUMLAH PENUMPANG			
			2014	2015	2016	2017
1	Jangkar - Kalianget	Orang	36.802	32.699	25.717	31.797
2	Ketapang - Gilimanuk	Orang	11.725.382	11.245.022	10.740.994	12.815.564
3	Ujung - Kamal	Orang	1.715.375	1.383.890	959.222	970.641
JUMLAH PENUMPANG		Orang	13.559.194	12.661.611	11.725.933	13.818.002
% PENINGKATAN		%		-6,62%	-7,39%	17,84%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Jatim

Berdasarkan data jumlah penumpang pada 3 lintasan penyeberangan tersebut di atas, capaian peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 17,84% dibandingkan tahun 2016. Peningkatan jumlah penumpang di lintasan Ketapang – Gilimanuk disebabkan efek letusan gunung agung yang mengakibatkan penutupan Bandara Ngurah Rai.

➤ **Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur**

Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 2% dan terealisasi sebesar 2,61 atau 130,5 persen. Pelabuhan merupakan akses utama dalam keluar masuk komoditi sektor perdagangan yang keberadaannya memiliki pengaruh besar dalam mendukung sektor perekonomian Jawa Timur. Pada saat ini, arus bongkar muat masih tersentral di Pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan mengembangkan beberapa Lokasi Pelabuhan di Jawa Timur yang diharapkan dapat memperlancar proses distribusi barang dengan mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru (mengurangi disparitas wilayah), mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan

mengurangi tingkat kerusakan jalan. Beberapa pelabuhan yang dikembangkan antara lain pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, Pelabuhan Brondong di Lamongan dan beberapa pelabuhan lain yang dapat melayani zona – zona pelayanan transportasi.

Tabel 4.15 Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Utama Jawa Timur

No	Pelabuhan	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
DALAM NEGERI					
BONGKAR					
1.	Tanjung Perak	4.225.821	4.810.985	4.221.761	4.557.822
2.	Gresik	4.590.418	4.721.116	4.230.432	4.309.225
3.	Probolinggo	419.995	407.548	208.952	664.969
4.	Tanjungwangi	1.821.938	1.728.856	1.100.485	1.339.505
	JUMLAH	11.058.172	11.668.505	9.761.630	10.871.521
MUAT					
1.	Tanjung Perak	1.384.977	1.461.228	1.292.506	1.381.663
2.	Gresik	1.102.566	1.204.612	1.553.705	1.665.025
3.	Probolinggo	144.699	132.494	494.518	84.664
4.	Tanjungwangi	390.112	188.536	818.074	562.145
	JUMLAH	3.022.354	2.986.870	4.158.803	3.693.497
TOTAL DALAM NEGERI		14.080.526	14.655.375	13.920.433	14.565.018
LUAR NEGERI					
1.	Tanjung Perak				
	Export (ton)	726.708	393.177	499.687	512.882
	Import (ton)	7.171.253	7.930.292	8.192.205	8.351.061
2.	Gresik				
	Export (ton)	49.954	53.991	71.520	83.955
	Import (ton)	155.659	190.015	245.446	301.558
3.	Tg Wangi				
	Export (ton)	23.673	25.057	667.240	337.520
	Import (ton)	318.994	379.660	218.838	301.275
TOTAL LUAR NEGERI		8.446.241	8.972.192	9.894.936	9.888.251
TOTAL BONGKAR MUAT		21.724.461	22.526.767	23.627.567	24.453.269
PERTUMBUHAN		3,69%	4,89%	0,79%	2,61%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Jatim

Berdasarkan data kinerja pelabuhan utama di Jawa Timur, bongkar muat di pelabuhan mengalami peningkatan sebesar 2,61% dari tahun 2016. Namun mencapai target yang ditetapkan sebesar 2%. Peningkatan ini belum termasuk data operasional Terminal Teluk Lamong yang merupakan Terminal Umum bagian dari pelabuhan sesuai keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 901 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

➤ **Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang**

Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang pada tahun 2017 ditetapkan dengan target sebesar 10 dan terealisasi sebesar 1,91 atau 19,10 persen. Indikator Kinerja Utama prosentase pertumbuhan jumlah penumpang transportasi udara di Bandara Udara ABD Saleh Malang dan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan Bandara Abdulrachman Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi terkait dengan program-program pembangunan dan pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Bandara Abdulrachman Saleh Malang merupakan satu-satunya Bandar udara di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang yang berada di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Mengacu pada Kesepakatan bersama antara TNI AU, Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 120.1/125/012/2013 tentang penggunaan bersama pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Malang untuk Bandar Udara tanggal 18 Desember 2013, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara selama digunakan untuk mendukung kegiatan penerbangan sipil. Diharapkan dengan terbangunnya sarana dan prasana secara optimal di bandara Abdulrachman Saleh akan mampu meningkatkan jumlah maskapai

penerbangan yang beroperasi dan secara umum akan meningkatkan jumlah masyarakat pengguna jasa layanan di Bandara Abdulrachman Saleh

Data jumlah penumpang pada Bandara Abdulrachman Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.16 Pertumbuhan Penumpang di Bandara Abd. Saleh

JUMLAH PENUMPANG	SATUAN	TAHUN			
		2014	2015	2016	2017
ABD. SALEH	orang	626.638	732.051	859.842	1.092.461
% PENINGKATAN	%	19,12%	16.82%	17,46%	27,05%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Jatim

c. Program

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan anggaran Rp. 28.425.651.600,- realisasi sebesar Rp. 27.617.109.941,- atau 97,16 % untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan anggaran Rp. 55.376.863.400,- realisasi sebesar Rp. 54.878.636.216,- atau 99,10% untuk mendukung 9 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutandengan anggaran Rp. 29.402.408.500,- realisasi sebesar Rp. 28.246.999.530,- atau 96,07% untuk mendukung 13 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintasdengan anggaran Rp. 146.675.025.000,- realisasi sebesar Rp. 144.453.790.944,- atau 98,49% untuk mendukung 16 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

- 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp. 5.275.000.000,-realisasi sebesar Rp. 4.719.987.360,- atau 89,48% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 6) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian dengan anggaran Rp. 58.406.482.000,-realisasi sebesar Rp. 58.174.543.267,- atau 99,60 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 7) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangandengan anggaran Rp. 129.495.587.800,- realisasi sebesar Rp. 127.290.726.075,- atau 98,3% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 8) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut dengan anggaran Rp. 174.279.352.100,- realisasi sebesar Rp. 171.108.375.546,- atau 98,18% % untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 9) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara dengan anggaran Rp. 68.850.000.000,- realisasi sebesar Rp. 63.545.610.544,- atau 92,30% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 10) Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasidengan anggaran Rp. 149.660.540.500,- realisasi sebesar Rp. 146.117.298.764,- atau 97,63% untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api tidak dijaga mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan. kecelakaan umumnya terjadi akibat masyarakat yang kurang berhati – hati dalam melintas jalur Kereta Api.

Solusi:

Meningkatkan sosialisasi keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat, melakukan pembinaan kepada sukarelawan penjaga perlintasan kereta api, pembinaan pelajar pelopor keselamatan perkeretaapian dan meningkatkan prasarana pengamanan perjalanan kereta api dengan memasang AEWS (Alarm Early Warning System) dan rambu-rambu perkeretaapian pada perlintasan sebidang kereta api serta melakukan peningkatan prasarana pengamanan pada perlintasan sebidang yang telah berjalur ganda.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Juara terbaik III pelayanan bandara kelas II

Bandara Abdulrachman Saleh yang dikelola oleh pemerintah provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 memperoleh juara III dalam pelayanan Bandara kelas II, penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada pengelola bandara yang telah memberikan pelayanan terbaik terhadap pengguna jasa bandara. Utamanya dalam hal kualitas pelayanan dan kenyamanan, keamanan dan keselamatan.



Gambar 4.18 Penghargaan Bandara Terbaik ke III Bandara kelas II

12. BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**12.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****a. Tujuan**

- 1) Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- 2) Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realiasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	➤ Persentase tindaklanjut layanan informasi	16%	16%	100%
	➤ Persentase tindaklanjut sengketa informasi	87%	87%	100%
1. Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi	1. Jumlah layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat	6 jenis	6 jenis	100%
2. Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi	2. Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap sengketa informasi	100%	100%	100%
II. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	➤ Persentase peserta workshop yang lulus ujian	87%	87%	100%
1. Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi	1. Jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan	150 kelompok	150 kelompok	100%
2. Program Pemberdayaan	2. Jumlah telecenter yang terbangun	8 telecenter	8 telecenter	100%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realiasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				
III. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur serta layanan public	➤ Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	71%	71%	100%
	➤ Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan kab/kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	60%	60%	100%
1. Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. Jumlah pengembangan jaringan internet dan intranet SKPD Prov Jatim	46 SKPD	46 SKPD	100%
2. Program Pengembangan Teknologi Informasi	2. Persentase layanan aplikasi di lingkungan Pemprov Jatim	50%	50%	100%
IV. Meningkatnya layanan penyelenggara pos dan telekomunikasi	➤ Persentase izin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	64%	64%	100%
1. Program Pos dan Telekomunikasi	1. Jumlah ijin penyelenggaraan pos	10 izin	10 izin	100%

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik,
ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :

- **Persentase tindaklanjut layanan informasi**

Persentase tindaklanjut layanan informasi pada tahun 2017 dengan target sebesar 16% dan terealisasi sebesar 16% atau 100%. Mencapai target capaian kinerja kegiatan tindaklanjut layanan informasi tersebut mengalami kenaikan, berupa penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media luar ruang dan layanan informasi. Dengan capaian itu maka diharapkan terjadi pemahaman pada masyarakat terhadap program kegiatan Pemerintah Provinsi Jatim dalam rangka melek informasi pada masyarakat Jawa Timur.

➤ **Persentase tindaklanjut sengketa informasi**

Persentase tindaklanjut sengketa informasi pada tahun 2017 dengan target sebesar 87% dan terealisasi sebesar 87% atau 100%. Mencapai target capaian kinerja terkait tindaklanjut sengketa informasi tersebut mengalami kenaikan, yaitu dengan banyaknya permohonan informasi karena meningkatnya keterbukaan informasi publik yang mendorong kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak-haknya sebagai pemohon informasi, sehingga Badan Publik sebagai termohon dituntut selalu berupaya melakukan pembenahan lembaganya dalam pelayanan informasi publik.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu

➤ **Persentase peserta workshop yang lulus ujian**

Persentase peserta workshop yang lulus ujian pada tahun 2017 dengan target sebesar 87% dan terealisasi sebesar 87% atau 100%. Mencapai target capaian kinerja terkait peserta workshop yang lulus ujian mengalami kenaikan, yaitu dengan adanya Pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi dan pelaksanaan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ke sembilan di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatannya meliputi sarasehan KIM, Workshop KIM melalui sarana TIK dalam membuat blog, festival pertunjukan rakyat, Grand Final Lomba Cerdik Cermat Komunikatif KIM serta Pameran Produk Unggulan dari KIM kabupaten/kota.

Selain itu, kegiatan tersebut bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang TIK sebagai pemberdayaan masyarakat melalui workshop dan pemanfaatan telecenter, sehingga memudahkan akses informasi dan komunikasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, pemasaran produk unggulan, transaksi ekonomi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 3 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :

➤ **Persentase pemanfaatan hosting dan collocation**

Persentase pemanfaatan hosting dan collocation pada tahun 2017 dengan target sebesar 71% dan terealisasi sebesar 71% atau 100%. Mencapai target capaian kinerja terkait kegiatan pengembangan dan pengoptimalan pemanfaatan datacenter untuk melayani kebutuhan hosting dan collocation perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan ada pengembangan Datacenter yang telah terbangun pada tahun 2015 sebagai sarana dan jaringan TIK yang terintegrasi di Datacenter Provinsi Jawa Timur.

➤ **Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan kab/kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK**

Persentase SKPD, UPT, Lembaga Non Struktural dan kab/kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK pada tahun 2017 dengan target sebesar 60% dan terealisasi sebesar 60% atau 100%. Mencapai target capaian kinerja terkait dengan kegiatan pengembangan dan penerapan aplikasi Pemerintah bagi OPD Pemprov Jatim dalam rangka mendukung terkoneksi dan terintegrasinya data dan informasi dalam intranet Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain mengoptimalkan pada jumlah bandwidth juga dalam rangka dapat mendukung kinerja OPD.

Sasaran 4 : Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi,

ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

- Persentase izin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi pada tahun 2017 dengan target sebesar 64% dan terealisasi sebesar 64% atau 100%. Mencapai target capaian kinerja karena adanya pengawasan dan penertiban, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos kantor cabang di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya hal diatas diharapkan adanya penurunan pelanggaran penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Jawa Timur. Guna tertib administrasi dan persaingan yang sehat di antara penyelenggara pos di Jawa Timur.

c. Program

- 1) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan anggaran Rp. 639.000.000,-. Dan terealisasi sebesar Rp 553.058.785,- atau 86.55% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 2) Program Pengembangan Teknologi Informasi, dengan anggaran Rp. 4.699.806.000,-. Realisasi sebesar Rp 4.518.347.199,- atau 96.14% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 3) Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK), dengan anggaran Rp. 8.222.500.000,-Realisasi sebesar Rp 8.118.359.064,- atau 98.73% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 4) Program Pos dan Telekomunikasi, dengan anggaran Rp. 400.000.000,-. Realisasi sebesar Rp 282.544.022,- atau 70.64% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

- 5) Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi, dengan anggaran Rp. 2.920.000.000,-. Realisasi sebesar Rp 2.894.896.461,- atau 99.14% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 6) Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi, dengan anggaran Rp. 1.100.000.000,-. Realisasi sebesar Rp 1.068.082.300,- atau 97.10% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 7) Program Pengelolaan jaringan Komunikasi, dengan anggaran Rp. 2.777.200.000,-. Realisasi sebesar Rp 2.180.524.992,- atau 95.75% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Terbatasnya SDM Pengelola website SKPD, kab/kota (belum ada staf khusus yang menangani atau bertanggung jawab khusus untuk menangani website)
- 2) Website SKPD Pemprov Jatim masih kurang memanfaatkan fitur-fitur interaktif, fasilitasi pencarian, hypelink dan multi media
- 3) Dalam hal fitur website kab/kota sebagian besar sudah memanfaatkan fitur interaktif, fasilitasi pencarian, hypelink dan multi media
- 4) Aspek perencanaan dan pengendalian penggunaan TIK untuk lembaga pemerintahan dan berbagai tantangan ke depan di bidang e-Government kurang optimal
- 5) Ketrampilan penanggung jawab TIK untuk lembaga pemerintahan agar dapat bergerak secara serentak dan selaras sesuai dengan tujuan pembangunan belum optimal.

Solusi

- 1) Melaksanakan rapat teknis dengan pengelola website SKPD prov, dan kab kota untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola dan meningkatkan kualitas website
- 2) Melakukan re-desain website
- 3) Melaksanakan FGD
- 4) Menyelenggarakan bimtek/asistensi pengelola website
- 5) Bekerjasama dengan sejumlah stake holder di bidang TIK untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan kesadaran aparatur terhadap teknologi informasi, sekaligus menyerap aspirasi untuk memperkuat kebijakan TIK.
- 6) Berkolaborasi dengan komunitas TIK antara pemerintah, akademisi dan dunia usaha untuk sinergi dalam mencari solusi permasalahan di bidang TIK sehingga timbul rekomendasi kepada pemerintah terhadap permasalahan, strategi dan solusi dalam mengatasi problematika TIK di Jawa Timur.
- 7) Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang CIO (*Chief Information Officer*).

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

- 1) Penghargaan atas dukungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan Edukasi UMKM : *UMKM Go Online Road To One Million* dari Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo RI Tahun 2017, tanggal 25 Juli 2017 di Surabaya.
- 2) Penghargaan Anugerah Digital Marketing (ADM) Award Tahun 2017 *Great Performing Website* untuk Kategori Pemda Tingkat I tanggal 31 Oktober 2017 di Hotel Mulia Jl. Asia Afrika Senayan Jakarta.
- 3) Penghargaan Stand Peserta Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 di Gelora Joko Samudro Kabupaten Gresik.

- 4) Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dengan Nilai “A” (Predikat Memuaskan), tanggal 6 Desember 2017 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

13. BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**13.1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH****a. Tujuan**

Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan indikator pertumbuhan omset Koperasi dan UKM yang ditargetkan sebesar 8,2 persen dan dapat direalisasikan sebesar 8,97 persen.

b. Sasaran dan Program**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/Program	Tahun 2017		Persentase %
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Koperasi Aktif	4%	4,09%	102,25%
	Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi	5 produk	5 produk	100%
	Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi	50%	61%	122%
	Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya	5%	40,19%	803,80%
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang mendapatkan Legalisasi Usaha	200 UMKM	200 UMKM	100%
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Wirausaha Baru	10%	10%	100%
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Perputaran Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	2,3 kali	2,3 kali	100%

Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/Program	Tahun 2017		Persentase %
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	80,43%	80,43%	100%
5. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro di Sentra	4,5%	4,5%	100%
6. Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	Return SHU Koperasi terhadap Volume	10%	10%	100%

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Koperasi dan UMKM yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM, yang ditetapkan dengan indikator sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Koperasi Aktif.

Pertumbuhan koperasi aktif di Tahun 2017 dengan target sebesar 4% dan terealisasi sebesar 4,09% atau tercapai 102,25%. Artinya terdapat pertumbuhan koperasi aktif skala provinsi (lintas kab kota) sebanyak 24 koperasi dari jumlah koperasi aktif di Tahun 2016 sebanyak 586 koperasi menjadi 610 koperasi koperasi di Tahun 2017.

2) Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi.

Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi pada Tahun 2017 dengan target sebesar 5 produk dan terealisasi sebesar 5 produk atau tercapai 100%. Standarisasi yang difasilitasi pada Tahun 2017 adalah pemberian sertifikasi halal bagi produk mamin melalui pendampingan. Dengan adanya sertifikasi tersebut diharapkan memberikan nilai tambah bagi UKM sehingga dapat naik kelas.

3) Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi.

Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi pada Tahun 2017 dengan target 50% dan terealisasi sebesar 61% atau tercapai 122%. Artinya terdapat pengajuan kredit baik dana bergulir maupun KUR yang lulus verifikasi sebesar 43 KUKM dari total seluruh pengajuan 71 KUKM. Hal ini memberikan dampak pada perluasan akses permodalan bagi KUKM sehingga dapat meningkatkan nilai produksi serta volume usahanya.

- 4) Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya.

Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya pada Tahun 2017 dengan target sebesar 5% dan terealisasi sebesar 40,19% atau tercapai 803,8%. Artinya terdapat kenaikan yang sangat signifikan dalam fasilitasi pemasaran. Hal ini karena terdapat beberapa fasilitas yang diberikan antara lain gedung galeri batik dan galeri cinderamata serta pavilion Jawa Timur di SME Tower Jakarta, Cooperative Trading House (CTH), serta fasilitasi Business to Business bagi KUKM.

c. Program

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) kegiatan, dengan rincian 4 (empat) program ex rutin yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan yang tersebar di sepuluh program dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Total anggaran pada program ini adalah Rp 3.296.685.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.275.237.296,- atau 99,35%, untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Total anggaran pada program ini adalah Rp 14.314.716.989,- dan terealisasi sebesar Rp 13.599.233.308,- atau 95%, untuk mendukung 8 (delapan) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Total anggaran pada program ini adalah Rp 23.462.679.550,- dan terealisasi sebesar Rp 23.181.508.338,- atau 98,8% untuk mendukung 9 (sembilan) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Total anggaran pada program ini adalah Rp 21.165.549.890,- dan terealisasi sebesar Rp 20.587.768.127,- atau 97,27% untuk mendukung 12 (dua belas) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Total anggaran pada program ini adalah Rp 2.773.825.800,- dan terealisasi sebesar Rp 2.688.332.668,- atau 96,92% untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

6) Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

Total anggaran pada program ini adalah Rp 9.353.277.950,- dan terealisasi sebesar Rp 8.914.083.753,- atau tercapai 95,30% untuk mendukung 10 (sepuluh) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan**

- 1) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi yang diindikasikan dari jumlah koperasi yang melaksanakan RAT masih sedikit hanya 48,40%.
- 2) Masih rendahnya produk Koperasi dan UKM yang memenuhi persyaratan dalam pengajuan standarisasi.
- 3) Akses pembiayaan yang masih rendah. Hal ini karena skema pembiayaan yang masih belum bisa diakses oleh semua koperasi dan UKM terutama bagi koperasi dan UKM yang memiliki modal dan asset terbatas karena lembaga penjamin hanya menjamin maksimal sampai dengan 50% untuk pinjaman dibawah 100 juta dan maksimal 25% untuk pinjaman di atas 100 juta.
- 4) Tuntutan pengelolaan usaha koperasi dan UMKM secara kreatif dan inovatif melalui Teknologi informasi.
- 5) Desain dan kemasan UKM yang kurang menarik.
- 6) Jiwa marketer di kalangan pelaku koperasi dan UKM masih minim sehingga diperlukan penumbuhn jiwa wirausaha dan peningkatan kemampuan UKM.
- 7) Kurangnya akses pemasaran hanya terbatas pada beberapa UKM sehingga diperlukan cara yang lebih efektif dalam melakukan pemasaran misalnya melalui pemasaran online.

Solusi

- 1) Merevitalisasi gerakan koperasi menuju penguatan kelembagaan yang meliputi visi, misi, kapasitas, sumber daya, jaringan kerjasama, tatalaksana, dan organisasi koperasi melalui penataan organisasi, badan hukum, dan tata laksana koperasi.
- 2) Peningkatan kompetensi pengelola koperasi dan kualitas RAT.
- 3) Melakukan pengawasan koperasi melalui bedah koperasi serta penilaian kesehatan KSP/ USP untuk mendapatkan grade/ tingkatan dalam pembinaan koperasi.

- 4) Penguatan usaha koperasi sektor riil melalui restrukturisasi usaha koperasi.
- 5) Peningkatan akses permodalan melalui pemupukan modal sendiri, dana perbankan dan nonperbankan.
- 6) Perluasan akses pasar dan akses produk pemasaran online bagi pelaku koperasi dan UKM serta optimalisasi peran Cooperative Trading House (CTH) Diskop.
- 7) Pelatihan peningkatan kualitas UKM menuju tahapan standarisasi usaha.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Provinsi penggerak koperasi terbaik dan penumbuhan kewirausahaan terbaik tingkat provinsi tahun 2017.

14. BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL**14.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****a. Tujuan**

- 1) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
- 2) Mewujudkan peningkatan minat dan realisasi penanaman modal

b. Sasaran dan Program**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Prima	a. IKM atas Pelayanan Perizinan b. IKM atas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	85 85	85,10 85,18	100,11% 100,12%
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	100%	100%	100%
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Diselesaikan	100%	90,23%	90,23%
2. Meningkatkan Minat Penanam Modal Berdasarkan Izin Prinsip	a. Persentase Peningkatan Kepeminatan untuk Kerjasama	10%	10%	100%
	b. Persentase Peningkatan Nilai Izin Prinsip PMA dan PMDN	10%	27,09%	270,90%
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Minat Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Izin Prinsip	Rp. 121,06 T	Rp. 328,15 T	271,06%
2. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Potensi Dan Peluang Investasi (peluang)	2 project prospektus	2 project prospektus	100%
3. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal yang Inklusif melalui Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal	100%	100%	100%
	b. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN	3,5%	2,81%	80,29
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan LKPM	Rp. 82,76 T	Rp. 66,53T	80,39%

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Penanaman Modal yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan yang prima, ditetapkan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

- 1) IKM atas Pelayanan Perizinan pada tahun 2017 dengan target sebesar 85 dan terealisasi sebesar 85,10 atau 100,11%. Mencapai target disebabkan masyarakat semakin mudah untuk mengakses pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan handal yang didukung aplikasi perizinan secara online.
- 2) IKM atas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2017 dengan target sebesar 85 dan terealisasi sebesar 85,18 atau 100,12%. Mencapai target disebabkan penyedia barang/jasa dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin mudah untuk mengakses pelayanan pengadaan barang/jasa yang cepat, transparan dan handal yang didukung aplikasi pengadaan barang/jasa secara online.

Sasaran 2 : Meningkatnya Minat Penanam Modal Berdasarkan Izin Prinsip, ditetapkan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

- 1) Persentase Peningkatan Kepeminatan untuk Kerjasama pada tahun 2017 dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 10% atau 100%. Kepeminatan untuk kerjasama antar dunia usaha pada Tahun 2017, antara lain:
 - a. CV. LAA ISMA FIIH dengan Koperasi Anugerah Warga Utama tentang Kerjasama Pemasaran.
 - b. Koperasi Peternak Sapi Indonesia (KPSI) Jawa Timur dengan Banten House tentang Kerjasama Bahan Baku.
 - c. CV. BAGUS AGRISETA MANDIRI dengan Sate Bandeng Ratu tentang Kerjasama Pemasaran.
 - d. CV. BAGUS AGRISETA MANDIRI dengan Koperasi Mandiri Sejahtera tentang Kerjasama Pemasaran

Mencapai target disebabkan kepeminatan antar dunia usaha berupa MoU dan Lol yang menandakan semakin berkembang dan

dipercayanya UMKM di Jawa Timur untuk menjadi mitra PMA/PMDN dalam menyediakan kebutuhan sesuai standar yang ditentukan.

- 2) Persentase Peningkatan Nilai Izin Prinsip PMA dan PMDN, Persentase Peningkatan Nilai Izin Prinsip PMA dan PMDN pada Tahun 2017 dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 27,09% atau 270,90%.

Capaian minat Penanaman Modal di Jawa Timur berdasarkan Izin Prinsip pada Tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 328,15 Trilyun, terdiri dari PMA sebesar Rp. 269,87 Trilyun dan PMDN sebesar Rp. 58,28 Trilyun.

Mencapai target disebabkan adanya 1 mega proyek PMA yang berminat untuk berinvestasi di Jawa Timur yaitu PT. PERTAMINA ROSNEFT PENGOLAHAN DAN PETROKIMIA.

Sasaran 3 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Inklusif melalui Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, ditetapkan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

- 1) Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau 100%. Dari 11 permasalahan penanaman modal yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, 11 permasalahan penanaman modal yang dapat diselesaikan, terdiri dari:
 - 1) PT. MOTASA INDONESIA, 2) PT. PERWIRA SMELTER INTERNATIONAL, 3) PT. KEBON AGUNG, 4) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PASURUAN, 5) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA JOMBANG, 6) PT. OLAM SUMBER MANIS, 7) PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO, TBK, 8) PT. CAHAYA MAS MAKMUR, 9) PT. THEA UNIVERSAL TRADE, 10) PT. PAKUWON PERMAI SURABAYA, 11) PT. AGRINDO, dan 12) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA JOMBANG.

Mencapai target disebabkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur selalu memberikan pelayanan dan memfasilitasi permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN yang sudah

beroperasi/belum dengan melakukan koordinasi lintas sektoral/ stake holder yang terkait.

- 2) Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN dengan target sebesar 3,5% dan terealisasi sebesar 2,81%, atau 80,29%.

Capaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar Rp. 66,53 Trilyun terdiri dari PMA sebesar Rp. 21,49 Trilyun dan PMDN sebesar Rp. 45,04 Trilyun. Kinerja tersebut tidak mencapai target sebesar Rp. 82,76 Trilyun.

Belum mencapai target disebabkan masih terbatasnya lahan untuk kawasan industri dan regulasi perizinan yang masih terlalu panjang.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan anggaran sebesar Rp. 10.350.918.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.707.562.264,00 atau 74,46%. Untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan anggaran sebesar Rp. 2.689.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.474.936.172,00 atau 92,04%. Untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 578.872.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 557.788.326,00 atau 96,36%. Untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 9.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.923.543.470,00 atau 94,93% dengan capaian kinerja program sebesar 90,23%. Untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-

masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan anggaran sebesar Rp. 9.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.915.539.830,00 atau 96,91%. Untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih terbatasnya penyediaan lahan dikawasan industri dalam rangka menampung baralihnya perusahaan diluar Kawasan Industri dan Perusahaan baru (Industri);
- 2) Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah (Kabupaten/Kota);
- 3) Kurangnya Koordinasi PDKPM Kabupaten/Kota Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan inventarisasi realisasi Penanaman Modal Daerah (PMA dan PMDN) sebagai realisasi kinerja Penanaman Modal di Jawa Timur;
- 4) Kurang memadainya infrastruktur penunjang penanaman modal antara lain jalan tol, bandara, pelabuhan, jalan kereta api, jalan arteri dan kawasan industri;
- 5) Kurang maksimalnya sinergitas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemberian pelayanan perizinan, Pengembangan potensi dan peluang investasi serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- 6) Kurang patuhnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) dan belum terintegrasinya sistem pelaporan LKPM melalui SPIPISE;
- 7) Kurang memadainya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.

Solusi

- 1) Mendorong Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan di sektor Kawasan Industri dan pembentukan KEK pariwisata SITC (Singhasari Integrated Tourism Complex) di Kabupaten Malang;
- 2) Meningkatkan pelayanan dan konsultasi permasalahan– permasalahan di Bidang Penanaman Modal melalui helpdesk;
- 3) Menambah SDM yang kompeten di bidang penanaman modal dan mengikutsertakan SDM yang ada untuk mengikuti Diklat dan Workshop yang terkait dengan penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang ada di bidang penanaman modal.
- 4) Membentuk satgas percepatan pelaksanaan berusaha untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha;
- 5) Penyederhanaan proses pengajuan dan penyelesaian perizinan;
- 6) Regulasi (perubahan) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
- 7) Optimalisasi EJISC sebagai sarana promosi bagi calon investor.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Tingkat Nasional Tahun 2017, Manajemen Resiko, Sanggahan dan Pengaduan (Mr. SAHDU).

15. BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

15.1 DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan.
- 2) Meningkatkan prestasi olahragawan melalui pembibitan dan pembinaan atlet serta pembudayaan olahraga di masyarakat.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan.	Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam Pembangunan	15,03%	14,43%	96,03
1. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.	Prosentase Pemuda berprestasi yang dibina	15,03%	14,43%	96,03
II. Meningkatnya Olahragawan Berprestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat	Prosentase pembibitan olahragawan berbakat	24,63%	23,73%	96.54
1. Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.	Prosentase jumlah atlet pelajar berprestasi yang dibina	10,50%	10,54%	100,38

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut;

Sasaran 1: Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan, ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam Pembangunan.

- Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam Pembangunan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 15,03% dan terealisasi sebesar 14,43% atau capaian sebesar 96,03%.

Pencapaian nilai realisasi sebesar 14.43% ini diukur dari prosentase pemuda kader tingkat provinsi Jawa Timur yang berperan aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan dibanding dengan jumlah pemuda yang berorganisasi di Jawa Timur. Nilai tersebut didapat dari hasil formulasi perhitungan sebagai berikut;

Jumlah Pemuda kader Provinsi Jawa Timur	2.172 orang	
Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi ditingkat Provinsi	15.048 orang	$\times 100\% = 14,43\%$

Keterangan: Pemuda kader adalah pemuda yang berpartisipasi pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda

Sasaran 2: Prosentase pembibitan olahragawan berbakat, ditetapkan 1 indikator kinerja, yaitu Prosentase pembibitan olahragawan berbakat.

- Prosentase pembibitan olahragawan berbakat pada Tahun 2017 dengan target 24,63% dan terealisasi sebesar 23,73% atau capaian sebesar 96,54%.

Pencapaian nilai realisasi sebesar 23.73% dihasilkan dari

prosenstase atlet pelajar Jawa Timur yang berprestasi ditingkat Nasional (POPNAS dan PEPARPENAS), dengan formulasi perhitungan sebagai berikut;

Jumlah atlet pelajar Jatim yang meraih Prestasi Nasional	178 orang
Jumlah atlet pelajar yang dibina	750 orang

$\times 100\% = 23,78\%$

Keterangan: Atlet berprestasi adalah atlet peraih peringkat 1, 2 dan 3.

c. Program dan Kegiatan

- 1) Program peningkatan peran serta Kepemudaan, dengan anggaran Rp. 6.393.833.450,-, dan terealisasi sebesar Rp. 6.020.304.860,- atau 94.16% untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran formast Matrik 16 kolom.
- 2) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan anggaran Rp.18.090.531.300,-, dan terealisasi sebesar Rp. 17.516.869.402,- atau 96.83% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran formast Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Permasalahan Bidang Kepemudaan;
 - Banyaknya pemuda terjebak dalam dekadensi moral, kriminalitas dan Narkoba.
 - Terbatasnya pemuda yg bergerak di bidang Kewirausahaan.
 - Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan masih rendah
 - Banyak OKP belum patuh terhadap Undang-Undang Kepemudaan.

- Munculnya orientasi yang berlebihan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kepeloporan dibidang pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif serta olahraga.
- 2) Permasalahan Bidang Keolahragaan;
- Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bina prestasi olahraga.
 - Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (PPLPD) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
 - Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian Jawa Timur.
 - Belum terkoneksi antara olahraga rekreasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi dalam pembinaan olahraga di Jawa Timur.

Solusi

Solusi Permasalahan Kepemudaan dan Keolahragaan;

- 1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, melalui:
 - bela negara;
 - kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - pendampingan pemuda;
- 2) Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui:

- perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
 - peningkatan potensi pemuda dalam kepemimpinan kepeloporan, dan kewirausahaan.
 - perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:
- peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;
 - pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus;
 - pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; dan
 - peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa.
- 4) Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional, melalui:
- pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
 - pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;

- pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi;
 - pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
 - peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
 - peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;
 - peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
 - peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; dan
 - Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- 5) Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan melalui;
- terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan Pengembangan kepemudaan;
 - terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
 - terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Pasukan 8 pada Paskibraka Nasional, yaitu Pembawa bendera pusaka atas nama Fariza Putri Salsabilah dari Kota Blitar;

- 2) Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Nasional bidang Pangan atas nama Ami Yoga Prajati;
- 3) Peringkat III Pekan Paralympian Pelajar Nasional ke VIII/2017 di Surakarta, dengan perolehan medali 15 Emas, 8 Perak dan 1 Perunggu;
- 4) Peringkat IV Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2017 di Jawa Tengah, dengan perolehan medali 33 emas, 29 perak dan 48 perunggu.

16. BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

16.1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN

a. Tujuan

Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran, dan berakhlak mulia.

b. Sasaran dan Program

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya	1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	80%	80,10%	100,13
	2 Jumlah pengharagaan karya kreativitas seni di tingkat nasional	20 penghargaan / kategori	26 penghargaan / kategori	130,00
1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni yang mendapatkan penghargaan	515 orang	510 orang	99,30
2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah fasilitasi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	215 kali	272 kali	126,51
II Meningkatnya pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur	1 Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan	261	261	100
	2 Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi	83%	91%	109,64
1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, cagar budaya / situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh Museum	1.848 benda	1.848 benda	100

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang kebudayaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya

- Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur;

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur pada Tahun 2017 dengan target 80% dan terealisasi sebesar 80,10% (mengalami peningkatan sebesar 100,13%) hal tersebut karena meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

- Jumlah penghargaan karya kreativitas seni di tingkat nasional;

Jumlah pengharagaan karya kreativitas seni di tingkat nasional pada tahun 2017 dengan target 20 penghargaan / kategori dan terealisasi sebesar sebanyak 26 penghargaan / kategori (mengalami peningkatan sebesar 130,00%) hal tersebut karena meningkatnya kreatifitas seniman melalui pembinaan serta alokasi anggaran yang memadai.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemeliharaan / pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

- Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan;

Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan pada Tahun 2017 dengan target 261 buah dan terealisasi sebesar 261 buah (tercapai 100%) hal tersebut merupakan target yang telah ditetapkan dalam penemuan benda, struktur, situs, kawasan.

- Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi;

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi pada Tahun 2017 dengan target 83% dan terealisasi 83% (tercapai 100%) hal tersebut karena meningkatnya apresiasi

masyarakat terhadap Museum Mpu Tantular sebagai sarana edukasi serta rekreasi yang mendidik.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan anggaran Rp. 2.464.595.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.444.552.620,- atau 99,19%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan anggaran Rp. 51.597.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.879.932.314,- atau 98,61%, untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan anggaran Rp. 11.226.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.120.500.205,- atau 99,06%, untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih belum optimalnya kegiatan dokumentasi dan inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.
- 2) Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat budaya lokal.
- 3) Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya masih belum berkembang.

Solusi :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota dan Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi dan budaya lokal.
- 2) Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan budaya lokal dengan menjalin kerja sama dengan pelaku/usaha pariwisata.
- 3) Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibatkan masyarakat sekitar dan generasi muda secara berkesinambungan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Parade Teater Tradisi pada tanggal 20 Mei 2017 di Panggung Candi Bentar TMII Jakarta dengan judul **“Bantengan Geger” dari Kota Mojokerto** meraih penghargaan **Juara Umum**, memperoleh piagam, piala dan uang pembinaan dari Dirut TMII untuk beberapa kategori : **Penulis Cerita dan Skenario Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Putra Terbaik dan Penyaji Terbaik;**
- 2) Parade Tari Nusantara pada tanggal 19 Agustus 2017 di Gedung Sasono Langen Budoyo menampilkan **Tari “Ombyak Suran” dengan 9 penari dari Kab. Ponorogo** yang merupakan Penyaji Terbaik dari Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2017 dengan hasil capaian Penghargaan yang diraih : **Penyaji Terbaik se Jawa Bali, Penata Tari Unggulan, Penata Musik Unggulan, Penata Rias & Busana Terbaik dan Penyaji Unggulan;**
- 3) Pawai Budaya dalam rangka HUT TMII ke 42 pada tanggal 16 April 2017, penampilan dari Kab. Blitar memperoleh penghargaan **Penyaji Unggulan;**
- 4) Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional pada tanggal 21-23 September 2017 di TMII Jakarta dengan penghargaan sebagai berikut :

No	Nama	Kab/Kota	Nominasi	Lakon	Gaya/Gagrak
1	Hazel Abirawa Araffi	Tulungagung	Dalang Mumpuni	Temurune Wahyu Panca Mulya	Wayang Kulit Surakarta
2	Wahyu Yoga Aris Respati	Ngawi	5 (lima) Penyaji Terbaik	Pandawa Labuh	Wayang Kulit Surakarta
3	Dwi Asfina Wahyu Praja	Ponorogo	5 (lima) Penyaji	Sumantri Ngeger	Wayang Kulit Surakarta

No	Nama	Kab/Kota	Nominasi	Lakon	Gaya/Gagrak
			Terbaik		
4	Daiva Kamajaya	Kota Madiun	5 (lima) Penyaji Terbaik	Babad Wanamarta	Wayang Kulit Surakarta

- 5) Peningkatan Kreatifitas Seni dalam rangka Konser Karawitan Muda Indonesia meraih penghargaan sebagai **Kelompok Musik Terbaik**, delegasi Jatim juga masuk dalam pemenang **Kategori Penyaji Musik Terbaik** dengan menyajikan musik Hangudi Ilmu pada ajang yang digelar di Banten . Sajian karya Hangudi Ilmu itu merupakan sebuah garapan yang mengeksplorasi musik tradisi Banyuwangi dan mengartikannya sebagai upaya menuntut ilmu.
- 6) Parade Lagu Daerah pada tanggal 10 Desember 2017 di Sasono langen Budoyo TMII Jakarta, menampilkan Lagu "Kuwung Gandrung" dari Kab. Banyuwangi meraih penghargaan : **Pencipta Lagu Unggulan, Penyanyi Unggulan, Penata Musik Unggulan, Penyaji Unggulan**
- 7) Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2017 di Gedung Kesenian Jakarta

No	Warisan Budaya Tak Benda	Kab/Kota
1	Upacara Ceprotan	Kab. Pacitan
2	Upacara Adat Nyadher	Kab. Sumenep
3	Damar Kurung	Kab. Gresik
4	Upacara Jamasan Gong Kyai Pradah	Kab. Blitar
5	Pertunjukan Sandhur Manduro	Kab. Jombang

BIDANG URUSAN PARIWISATA**a. Tujuan**

Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global, karena dengan meningkatnya daya saing, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; meningkatkan perolehan devisa dari wisatawan mancanegara; meningkatkan pengeluaran wisatawan nusantara, meningkatkan kontribusi PDRB pariwisata; meningkatkan persentase kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

b. Sasaran dan Program**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Jawa Timur	1 Jumlah wisatawan mancanegara	624.721 orang	625.729 orang	100,16
	2 Jumlah wisatawan nusantara	53.571.220 orang	58.649.178 orang	109,48
II Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan nusantara di Jawa Timur	1 Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara	US\$ 518,97 Juta	US\$ 519.417.643	100,09
	2 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	Rp. 22,262 T	Rp. 23, 838 T	107,08
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	624.721 orang	625.729 orang	101,16
III Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur	1 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur	5,8%	5,82% (seri 2010)	100,34
1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara	US\$ 518,97 Juta	US\$ 519.417.643	100,09
	Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Jatim	5,8%	5,82%	100,34

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
IV Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata	1 Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata	201.375 orang	237.402 orang	117,89
	2 Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi	896 orang	775 orang	86,50
1 Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata	Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih di sektor formal dan non formal kepariwisataan	1.047 orang	1.621 orang	154,82

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Pariwisata yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Jawa Timur

➤ Jumlah wisatawan mancanegara;

Jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2017 dengan target 624.721 orang dan terealisasi sebesar 625.729 orang (mengalami peningkatan sebesar 100,16%) hal tersebut karena adanya promosi melalui digitalisasi dan diversifikasi paket wisata, Famtrip sebagai endoser pariwisata.

➤ Jumlah wisatawan nusantara;

Jumlah wisatawan nusantara pada Tahun 2017 dengan target 53.571.220 orang dan terealisasi 58.649.178 orang (mengalami peningkatan sebesar 109,48%) hal tersebut karena adanya promosi melalui digitalisasi dan diversifikasi paket wisata, Famtrip sebagai endoser pariwisata.

Sasaran 2 : Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan nusantara di Jawa Timur

➤ Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara;

Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara pada Tahun 2017 dengan target US\$ 518.97 Juta dan

teralisasi US\$ 519.417.643. (mengalami peningkatan sebesar 100,09%) hal tersebut jumlah wisatawan meningkat diikuti dengan pengeluaran wisatawan yang meningkat pula.

- Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara pada Tahun 2017 dengan target Rp. 22.262 Trilyun dan terealisasi Rp. 23.838 (mengalami peningkatan sebesar 107,08%) hal tersebut jumlah wisatawan meningkat diikuti dengan pengeluaran wisatawan yang meningkat pula.

Sasaran 3 : Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur

- Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur;

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur pada Tahun 2017 dengan target 5,8% dan terealisasi 5,82% (seri 2010) (mengalami kenaikan sebesar 100,34%) hal tersebut karena seimbang dengan kunjungan wisman wisnus yang meningkat berdampak pada konsumsi, kebutuhan jasa dan produksi industri pariwisata yang menggeser komponen-komponen yang lainnya, pariwisata saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan pada pilar pariwisata yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat dan swasta sudah berjalan.

Sasaran 4 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata

- Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata;

Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata pada Tahun 2017 dengan target sebesar 201.375 orang dan terealisasi 237.402 orang (mengalami peningkatan sebesar 117,89%) hal tersebut karena pertumbuhan industri meningkat.

- Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih disektor formal dan non formal kepariwisataan;

Jumlah tenaga kerja yang telah dilatih disektor formal dan non formal kepariwisataan pada Tahun 2017 dengan target 1.047 orang dan terealisasi 1.621 orang (mengalami Peningkatan sebesar 154,82%) hal tersebut pertumbuhan industri meningkat yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan akomodasi.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan anggaran Rp. 11.949.094.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.914.139.491,- atau 99,71% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan anggaran Rp.14.063.494.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.657.092.785,- atau 97,11% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata, dengan anggaran Rp. 6.455.505.500,- dan terealisasi sebesar Rp.6.389.105.917,- atau 98,97% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus perlu dijaga.
- 2) Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.
- 3) Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan.

- 4) Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi masih kurang.

Solusi

- 1) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas.
- 2) Peningkatkan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju standarisasi usaha.
- 3) Meningkatkan fasilitasi uji kompetensi melalui sertifikasi profesi bidang pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- 4) Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Desa Wisata Award di Bukit Tinggi
 - Desa Wisata Pujon Kidul merebut kategori **penghargaan Desa Wisata Agro**.
 - Desa Tamansari, Kec. Licin, Banyuwangi yang terletak di lereng Gunung Ijen meraih Penghargaan **desa wisata terbaik dalam kategori pemanfaatan jejaring bisnis**.
- 2) Green Hotel Award dari Kementerian Pariwisata : Tanggal 28 September 2017 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara : **Peringkat 6 Hotel Mercure Surabaya**
- 3) Lomba Pokdarwis Tingkat Nasional dari Kementerian Pariwisata pada tanggal 27-29 September 2017 di Hotel Ibis Harmoni Jakarta :
 - Juara Harapan I : Pokdarwis Bonpring Kab. Malang
 - Juara Harapan II : Pokdarwis Bangsring Kab. Banyuwangi
- 4) Duta Wisata Indonesia Favorit tahun 2017 : Raka Raki Jawa Timur

17. BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

17.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat.
- 2) Meningkatkan sistem tertib administrasi kearsipan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur				
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Indeks Minat dan Budaya Baca	70	72	103
	- IKM	83	82,65	99,57
II. Meningkatnya system tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan				
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	- Jumlah SDM pengelola kearsipan	220 (orang)	225 (orang)	116
	- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku	10 (SKPD)	10	100
III. Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip				
1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	- Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi	4 (daftar Inventaris)	4 (daftar Inventaris)	100
IV. Meningkatnya masyarakat sadar arsip				
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	- IKM layanan kearsipan	81	80,25	99

Pada Tahun 2017 kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur, ditetapkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indeks Minat dan Budaya Baca Masyarakat Jawa Timur
- IKM

Indikator Indeks Minat Baca Masyarakat Jawa Timur pada tahun 2017 ditargetkan 70, dapat terealisasi 72 atau capaian kinerjanya sebesar 103 %. Untuk Indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan ditargetkan 83 dapat terealisasi 82,65 atau capaian kinerja 99,57 %. Sasaran ke 1 ini dapat tercapai/tidak tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antar bidang, program dan kegiatan semua diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan minat baca masyarakat di Jawa Timur. Yang perlu dibenahi antara lain peningkatan sarana dan prasarana, selalu memperbarui koleksi perpustakaan dan memenuhi kebutuhan pemustaka, SDM yang mumpuni dan selalu berinovasi. Yang lebih penting kerjasama yang baik dengan banyak pihak mulai dari kabupaten/kota, perpustakaan desa/kelurahan, TBM, pojok baca sampai dengan kerjasama dengan pihak swasta yang bersedia ikut membangun dan mengembangkan perpustakaan di Jawa Timur sehingga diharapkan minat baca kedepan semakin maju dan tinggi.

Sasaran ke 2 : Meningkatnya sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM

- Jumlah SDM Pengelola Kearsipan
- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku

Indikator Jumlah SDM Pengelola Kearsipan ditargetkan 220 orang, realisasinya 225 orang atau capaiannya 116 %, sedangkan indikator Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku ditargetkan 10 OPD,

realisasinya 10 OPD atau capaian kinerjanya 100 %. Ke-2 indikator diatas dapat dikatakan berhasil berkat dukungan dana yang mencukupi dan SDM kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mampu mengkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tindak lanjut dari hasil capaian ini adalah perlu peningkatan hasil OPD yang tertib arsip karena OPD sejak 2017 berjumlah 47 OPD namun yang dapat dinyatakan baik/cukup hanya 10 OPD ke depan perlu pembinaan, pendampingan dan yang lebih penting adalah komitmen pimpinan yang menganggap arsip itu penting dan perlu diselamatkan guna mendukung program pemerintah menjadi good goverment.

Sasaran ke 3 : Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip

➤ Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi

Indikator Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi ditargetkan 4 daftar inventaris dan realisasinya 4 daftar inventaris atau capaian kinerja 100 %. Capaian 4 daftar inventaris ini sangat berguna untuk penelusuran arsip yang bernilai guna tinggi. Proses ini sangat panjang karena arsip yang diterima perlu diakuisisi, ada arsip yang direstorasi, arsip yang sudah alih mediakan dan fumigasi arsip yang pada akhirnya hasilnya menjadi daftar inventarisasi arsip sebagai jalan masuk pencarian arsip. Tahun depan perlu ditingkatkan hasil capaiannya berupa daftar inventarisasi asalnya didukung oleh semua pihak dan tidak terkecuali OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus siap menyerah arsipnya.

Sasaran ke 4 : Meningkatkan masyarakat sadar arsip

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan ditargetkan 81 namun realisasinya 80,25 atau capaian kinerjanya 99 %. Tidak tercapainya indikator ini karena sarana dan prasarana arsip yang kurang lengkap salah satu contohnya adalah alat penelusuran arsip

dengan internet belum ada. Salah satu unsur yang dinilai tinggi dalam penilaian IKM adalah apabila dapat memberikan pelayanan yang tepat dan cepat.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp. 14.025.600.000 terealisasi sebesar Rp. 13.637.395.262 atau 97,23 %, untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom
- 2) Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp. 1.475.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.468.262.973 atau 99,54 %, untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom
- 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.021.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.020.623.650 atau 99,96 %, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) dengan anggaran sebesar Rp. 479.000.000 terealisasi sebesar Rp. 477.178.700 atau 99,62 %, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Perubahan SOTK

Dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur dan pejabat bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di kabupaten/kota. Mayoritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat baru yang belum banyak mengetahui urusan wajib tentang perpustakaan dan kearsipan. Hal ini sedikit banyak menyebabkan terhambatnya program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di kabupaten/kota;

➤ **Sarana Prasarana Perpustakaan**

Terhambatnya penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan perpustakaan yang dikarenakan tertundanya proses pengadaan belanja barang terutama yang melalui proses lelang umum sehingga dengan sendirinya menjadi penghambat bagi lembaga perpustakaan dalam mengemban amanat turut mengembangkan minat dan budaya baca serta meningkatkan indeks minat baca masyarakat.

➤ **Pengembangan Koleksi**

Di era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi, peran perpustakaan mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya perpustakaan mengharuskan pemustakanya untuk datang ke perpustakaan mengikuti prosedur yang dipersyaratkan secara konvensional, dengan mengikuti panduan pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan. Mungkin di kemudian hari, lembaga perpustakaan harus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam pemenuhan buku koleksi yang harus dipersiapkan, sistem pelayanan, teknologi yang digunakan dan lain-lain.

Solusi

- Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, terutama mengenai program dan kegiatan pada tahun 2017 serta rencana program dan kegiatan pada tahun 2018 sehingga ada sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

- Meningkatkan Koordinasi dengan Pokja Panitia Lelang Pengadaan Barang Jasa, dalam hal ini P2BJ, agar proses pengadaan barang atau jasa terutama yang melalui proses lelang umum dapat berjalan dengan lancar.
- Meningkatkan Layanan Ekstensi melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah/Desa agar bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan dimana biasanya tempat perpustakaan umum berada.
- Peningkatan dan pemenuhan SDM terdidik dan terlatih bagi Pustakawan dan Tenaga Pengelola Perpustakaan dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan perpustakaan secara berkala, rapat koordinasi, bimbingan teknis, pendampingan maupun sosialisasi minat dan budaya baca. Bagi ASN yang memenuhi syarat direkomendasikan untuk mengikuti *Impassing* fungsional Pustakawan. Diharapkan dengan pembinaan terus menerus terhadap SDM maupun lembaga perpustakaan, akan mendorong tercapainya indeks minat dan budaya baca seperti yang diharapkan.
- Koleksi buku perpustakaan adalah sarana utama dalam penyelenggaraan perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah berupaya meningkatkan koleksi buku melalui hasil penyerahan karya cetak karya rekam dari penerbit sebagaimana amanat UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam, donasi perseorangan/korporasi, pembelian dan hasil alih media. Dan saat ini juga sudah mulai dikembangkan E Library dan E Book. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Permasalahan bidang Kearsipan

- Kebijakan
Minimnya pedoman / standar / peraturan kearsipan yang ada membuat penyelenggaraan kearsipan berjalan tanpa arah. Hal ini membuat unit kearsipan yang seharusnya melaksanakan fungsi penyelenggaraan kearsipan dinamis, melepaskan tanggungjawab sehingga banyak arsip yang tidak terkelola

dengan baik karena banyak faktor. Selain itu, proses pengesahan Jadwal Retensi Arsip yang menjadi dasar bagi pengelolaan arsip memerlukan waktu yang lama sehingga mengakibatkan banyak arsip bernilai yang hilang, rusak dan tidak terselamatkan.

➤ **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Tenaga Pengelola Kearsipan dan Fungsional Arsiparis adalah SDM yang diharapkan dapat mengelola arsip sejak diciptakan hingga disajikan kembali sebagai referensi. Sayangnya profesi ini kurang mendapat perhatian dari ASN karena berbagai alasan. Berdasarkan data, jumlah fungsional arsiparis di seluruh Jawa Timur berkisar 100 orang. Jika setiap unit kearsipan ada 1 (satu) orang arsiparis dan 2 (dua) orang tenaga pengelola kearsipan, sudah tentu Jawa Timur sangat kekurangan fungsional arsiparis dan tenaga pengelola arsip.

➤ **Rendahnya Apresiasi**

Rendahnya apresiasi pimpinan dan staf lembaga terhadap kearsipan makin memperparah terpuruknya penyelenggaraan kearsipan. Dampak dari sikap tidak peduli adalah hilangnya arsip maupun asset bernilai. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan karena di era reformasi birokrasi, indikasi pemerintahan yang baik adalah tertib arsip dan administrasi.

Solusi bidang Kearsipan

- Penyusunan peraturan/pedoman/standar kearsipan yang dimulai dari Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, kemudian diikuti dengan Pergub-pergub tentang penyelenggaraan kearsipan. Meskipun belum memenuhi semua peraturan kearsipan, tetapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk memenuhi 4 (empat) pilar penyelenggaraan kearsipan, yaitu : Pedoman Tata Naskah Dinas, Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip (JRA). Khusus untuk JRA saat ini sedang berupaya untuk menyusun JRA setiap OPD Provinsi Jawa Timur.
- Sebagaimana perpustakaan, bidang kearsipan tidak diminati oleh ASN karena dianggap tidak member keuntungan financial. Itu sebabnya keberadaan tenaga

pengelola kearsipan maupun fungsional arsiparis sulit untuk berkembang. Mengantisipasi kekurangan SDM kearsipan, pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB mengadakan inpassing bagi ASN yang memenuhi syarat untuk direkomendasi sebagai arsiparis. Pembinaan, pelatihan maupun pendampingan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme SDM kearsipan.

- Sosialisasi kearsipan telah dilakukan terutama kepada para pemangku kepentingan. Upaya pemasyarakatan kearsipan dilakukan di kalangan murid sekolah melalui pameran, Layanan Wisata Arsip Anak Sekolah (WARAS), penyusunan Naskah Sumber Arsip, penyelenggaraan Hari Kunjung Arsip dan talk show kearsipan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima :

- 1) TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 “Waras” (Wisata Arsip Anak Sekolah) versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan).
- 2) TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 “Waras” (Wisata Arsip Anak Sekolah) versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan).
- 3) Pelayanan Perpustakaan “Darling” Dongeng Anak Remaja Keliling menjadi inovasi unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dalam rangka Jawa Timur menjadi nominator penghargaan “Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

2. URUSAN PILIHAN

1. BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor kelautan dan perikanan;
- 3) Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
- 4) Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1.Meningkatnya kualitas kelas kelompok kelautan dan perikanan	1. Persentase kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas (%)	0,2 %	0,3 %	150 %
Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok yang terakses (kelompok)	1.722 kelompok	1.076 kelompok	62,49 %
2.Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan	1. Persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan (%)	3,5 %	2,81%*	80,29 %*
	2. Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)	10 %	343,63 %*	3.436,3 %*
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	1.147.800 Ton	1.164.313, 913 Ton*	101,44 %*
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	417.000 Ton	417.485,04 Ton*	100,12 %*
c. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Jumlah produksi garam rakyat (Ton)	1.100.000 Ton	436.930 Ton*	39,72 %*

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase %
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
3.Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan	3. Nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan (Rp.)	Rp. 10,4 Triliun	Rp. 10,91 Triliun	104,90 %*
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase nilai tambah produk perikanan (%)	50 %	103,85 %	207,7 %*
4.Terwujudnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	4. Persentase peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	1,5 %	0,1 %	6.67 %
	5. Persentase penanganan kegiatan IUU fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan (%)	75 %	96,3 %	128,4 %
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan	a. Jumlah rehabilitasi mangrove (Ha)	150 Ha	150,56 Ha	100,37 %
	b. Jumlah rehabilitasi terumbu karang (Ha)	15 Ha	15,40 Ha	102,67 %

Ket : *) Angka sementara

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Adapun penjelasan mengenai capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kelas kelompok kelautan dan perikanan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kelompok kelautan dan perikanan

yang naik kelas di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan. Indikator persentase kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas merupakan penghitungan dari banyaknya kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas yaitu dari kelas pemula menjadi kelas madya dan kelas madya menjadi kelas utama dalam satu tahun dibandingkan dengan seluruh kelompok kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2017 kelompok kelautan dan perikanan yang naik kelas adalah sebanyak 29 kelompok dari total kelompok usaha kelautan dan perikanan sebesar 10.440 kelompok atau sebesar 0,3 %. Dari target peningkatan kelas kelompok sebesar 0,2 % dan realisasi 0,3 % maka pada tahun 2017 telah mencapai 150 %.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja didukung dengan Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan dimana program tersebut berisikan kegiatan pelatihan/bimtek kepada Pokdakan, KUB nelayan, Poklahsar, Pokmaswas dan Kugar.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain sifat usaha kelompok kelautan dan perikanan sebagian besar masih tradisional sehingga manajemen usaha belum tertata dengan baik, kemampuan bersaing yang masih lemah, keterbatasan bahan baku, keterbatasan modal dan sulit menambah aset.

Sasaran 2 : Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan dan persentase peningkatan produksi garam rakyat di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program

Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Indikator persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya dan indikator persentase peningkatan produksi garam rakyat merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi garam rakyat Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya.

Persentase peningkatan produksi kelautan dan perikanan pada tahun 2017 adalah 2,81 % dari target 3,5% atau mencapai 80,29 %.

Produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 417.485,04 ton telah meningkat 2,73 % dari produksi perikanan tangkap tahun 2016 yakni 407.815,41 ton. Data tersebut masih sementara dan dapat meningkat atau menurun setelah dilaksanakan validasi data statistik perikanan tangkap.

Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah perairan Laut Jawa (WPP-712) dengan potensi sebesar 1.341.632 ton, tingkat pemanfaatannya dikategorikan sudah penuh yakni ± 90 persen atau sebesar 1.207.468,8 ton dan wilayah perairan Samudera Hindia (WPP-573) dengan potensi 1.267.540 ton, tingkat pemanfaatannya telah mencapai ± 60 persen atau sebesar 760.524 ton. Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi banyak faktor salah satunya faktor cuaca. Beberapa hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan, pemulihan

sumber daya ikan di laut dengan *underwater restocking* dan penebaran benih ikan di perairan umum daratan (PUD), perbaikan sumberdaya habitat ikan di laut melalui pembangunan rumah ikan (*Fish apartment*) guna mendukung reproduksi ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut serta memberikan bantuan pelayanan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan agar nelayan dapat beroperasi secara maksimal terkait sarana yang digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya sehingga dapat mengurangi tindak *illegal fishing*.

Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pemulihan SDI dengan membangun rumah ikan dan pengkayaan stok dengan *under water restocking* dan penebaran benih ikan di Perairan Umum Darat (PUD), merestrukturisasi alat penangkap ikan dengan memberikan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan dengan memberikan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan untuk mendukung kesejahteraan nelayan, tidak hanya berorientasi terhadap peningkatan kuantitas namun juga terhadap peningkatan mutu/kualitas hasil tangkapan agar mendapatkan nilai jual yang tinggi di pasaran. Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan adalah dengan menerapkan sistim rantai dingin (*Cold Chain System/CCS*), yaitu melengkapi palka yang berinsulasi di kapal nelayan dan penggunaan es batu pada hasil tangkapan serta pembangunan *cold storage* di pelabuhan-pelabuhan perikanan.

Sebagai upaya untuk mengembangkan sektor perikanan tangkap telah dilakukan kegiatan antara lain pemberlakuan sertifikasi hasil tangkapan ikan (*catch certificate*), pembangunan dan penyempurnaan fasilitas di Pelabuhan Perikanan, pemberdayaan kelompok nelayan melalui kegiatan pelatihan, bimtek serta

pemberian paket hibah alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan (jaring, GPS, mesin tempel, *fish finder*, pancing).

Kendala yang dihadapi adalah dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi nelayan sehingga sebagian nelayan yang tidak dapat melaut.

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah sebesar 0,44 %. Produksi perikanan budidaya tahun 2017 sebesar 1.164.313,9 ton telah meningkat 0,44 % dari produksi perikanan budidaya tahun 2016 yakni 1.159.168,6 ton. Data tersebut masih sementara dan dapat meningkat atau menurun setelah dilaksanakan validasi data statistik perikanan budidaya.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pengembangan kawasan budidaya dengan melalui pemberian paket-paket budidaya (benih, pakan, peralatan, obat-obatan), pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor, fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan berupa sarana budidaya perikanan, pengembangan induk dan benih unggul, fasilitasi program pakan mandiri, monitoring HPI, sosialisasi dan pelatihan/bimtek.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah adanya alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur yang berdampak pada penurunan luasan fungsi lahan perikanan budidaya, pengaruh cuaca (kematian pada budidaya ikan patin) yang berpengaruh pada kualitas air dan harga pakan ikan yang mahal.

Persentase peningkatan produksi garam rakyat pada tahun 2017 adalah sebesar 343,63 %. Produksi garam rakyat pada tahun

2017 sebesar 436,930 ton telah meningkat 343,63 % dari produksi garam rakyat tahun 2016 yakni 98.489,59 ton. Data tersebut masih sementara dan dapat meningkat atau menurun setelah dilaksanakan validasi data produksi garam rakyat.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah memberikan bantuan teknologi berupa geomembran, rumah garam, rumah tandon air tua dan peralatan produksi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksi garam rakyat. Sebagai upaya peningkatan prasarana maka dilaksanakan pembangunan jalan produksi tambak garam dan normalisasi saluran. Selain itu dilakukan pula pelatihan teknologi usaha garam rakyat bagi petambak garam rakyat, sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir khususnya bagi wanita pengolah garam, monitoring dan evaluasi serta pengawasan hasil produksi garam. Menjalin kemitraan antara petani produsen garam rakyat dengan Bank UMKM serta lembaga pendamping dalam fasilitasi dukungan permodalan, mempercepat pembentukan koperasi garam serta memfasilitasi lembaga koperasi garam yang sudah ada agar dapat difasilitasi permodalannya dalam rangka membeli dan membantu pemasaran hasil produksi garam rakyat, mengembangkan sistem resi gudang garam seperti halnya resi gudang untuk tebu dan lain-lain, meningkatkan sistem pendataan garam di lapangan terkait produksi, penyerapan dan stok garam.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain 90 % luasan tambak garam masih bersifat tradisional yaitu menggunakan cara produksi tradisional karena sarana produksi yang terbatas. Terjadi penurunan luas tambak garam akibat alih fungsi lahan menjadi *property*/pemukiman dan tambak udang, selain itu terdapat kendala pada kelembagaan petambak garam yang belum terbentuk seluruhnya di setiap daerah dan belum berjalan dengan baik dan kelompok belum membentuk koperasi.

Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan merupakan penghitungan selisih nilai produk kelautan dan perikanan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk kelautan dan perikanan segar.

Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 10,91 Triliun atau mencapai 104,90 % dari target Rp.10,4 Triliun.

Peningkatan nilai tambah produk sangat dipengaruhi oleh mutu, kemasan dan variasi ragam produk dengan demikian diharapkan harga produk olahan hasil kelautan dan perikanan menjadi lebih tinggi dan secara langsung akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan baik skala kecil, menengah dan besar melalui bimtek pengembangan produk nilai tambah, inovasi teknologi pengolahan dan peningkatan kualitas kemasan, memberikan legalitas penerapan sistem jaminan mutu dengan sertifikasi kelayakan pengolahan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Disamping itu juga memberi paket bantuan hibah berupa peralatan pengolahan kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala UKM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah keterbatasan bahan baku ikan, kapasitas kelembagaan usaha skala kecil kurang memadai sehingga upaya peningkatan daya saing

produknya masih rendah, keterbatasan penguasaan teknologi pada pelaku usaha skala kecil.

Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dan persentase penanganan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan. Indikator persentase peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan penghitungan rata-rata realisasi 3 (tiga) variabel pendukung sebagai berikut : (1) Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem mangrove yang pulih kembali; (2) Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem terumbu karang yang pulih kembali dan (3) Persentase peningkatan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir. Sedangkan indikator persentase penanganan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan merupakan penghitungan dari jumlah kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan yang ditangani dibandingkan dengan total kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan yang terjadi di Jawa Timur.

Persentase peningkatan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tahun 2017 sebesar 0,1 % atau mencapai 6,67 % dari target 1,5 %.

Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem mangrove yang pulih kembali tahun 2017 sebesar 0,3 %; Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem terumbu karang yang pulih kembali sebesar 0,004 % dan Persentase peningkatan penetapan

kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir sebesar 0 %. Peningkatan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir sebesar 0 % dikarenakan penetapan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut merupakan indikator baru di tahun 2017 sehingga tidak dapat dihitung peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, luasan ekosistem mangrove yang direhabilitasi seluas 150,56 Ha; luasan ekosistem terumbu karang yang direhabilitasi seluas 15,40 Ha dan luasan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir seluas 8.363.991 Ha

Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem mangrove yang direhabilitasi sebesar 0,3 % pada tahun 2017 diperoleh dari kegiatan rehabilitasi mangrove di 17 lokasi yaitu di Kabupaten Tuban, Kota Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar.

Keberhasilan dalam pencapaian target juga didukung dengan pelaksanaan yang dikerjakan tepat waktu sesuai dengan musim tanam serta kesesuaian bibit mangrove dengan tekstur kondisi lahan tanam. Selanjutnya juga karena adanya kesadaran masyarakat untuk ikut membantu menjaga dan memelihara hasil rehabilitasi mangrove dari kegiatan yang merusak.

Kendala yang dihadapi adalah masih terjadi tindakan perusakan ekosistem mangrove (pertambakan, penebangan, pepohonan, reklamasi serta pencemaran lingkungan).

Persentase peningkatan luas wilayah ekosistem terumbu karang yang direhabilitasi sebesar 0,004 % pada tahun 2017 diperoleh dari kegiatan rehabilitasi terumbu karang di 14 (empat belas) lokasi yaitu di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek,

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kota Probolinggo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.

Selain itu juga adanya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang dalam memelihara hasil rehabilitasi serta mengelola kawasan perairan yang direhabilitasi dan adanya penerapan teknologi transplantasi yang tepat lokasi sesuai dengan persyaratan teknis. Kegiatan ini sangat terbantu oleh masyarakat sekitar yang sebelumnya telah menerima sosialisasi dan pelatihan tentang upaya rehabilitasi terumbu karang sehingga pemeliharaan hasil rehabilitasi terumbu karang didukung oleh masyarakat pesisir yang terampil dan terlatih.

Kendala yang dihadapi adalah dampak dari pembangunan fisik daerah pesisir; polusi laut, sedimentasi dan masih maraknya tindakan pencemaran dari darat, *overfishing* (penangkapan sumberdaya berlebih), destruktif fishing (penangkapan ikan dengan cara merusak), dan pemutihan karang (*coral bleaching*) akibat pemanasan global.

Luasan kawasan zonasi pengelolaan ruang laut dan pesisir pada tahun 2017 seluas 8.363.991 Ha. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah sosialisasi dan konsultasi public mengenai dokumen RZWP3K Provinsi Jawa Timur; Melaksanakan integrasi lintas sector dalam pengelolaan potensi desa pesisir sebagai sarana pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan dan koordinasi dengan organisasi pemerintahan di lingkup Provinsi Jawa Timur perihal SOP perizinan dalam pengelolaan ruang laut khususnya UPT P2T, BPM dan Bappeda.

Kendala yang masih terjadi adalah masyarakat belum seluruhnya memahami bahwa pengelolaan ruang laut saat ini telah

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan belum adanya pemahaman di lingkungan Pemerintah mengenai SOP perizinan dalam pengelolaan ruang laut.

Persentase penanganan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan tahun 2017 sebesar 96,3 % atau mencapai 128,4 % dari target 75%. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah melaksanakan sosialisasi / penyuluhan / pembinaan bersama dengan instansi terkait serta melakukan patrol/pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masyarakat khususnya nelayan belum seluruhnya memahami dan melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku; Luas wilayah pengawasan laut yang semakin luas terkait dengan kewenangan 12 Mill tidak berimbang dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan yang ada dan Terdapat beberapa laporan kasus yang belum ditangani karena pada saat itu belum ada peraturan yang dapat dijadikan acuan.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan dengan anggaran Rp.15.853.240.000,00 dan realisasi sebesar Rp.12.063.118.278,00 atau 76,09 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan anggaran Rp.346.345.779.000,00 dan realisasi sebesar Rp.332.640.254.521,00 atau 96,04 % untuk mendukung 15 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran Rp.122.611.760.000,00 realisasi sebesar Rp.116.270.596.779,00 atau 94,83 % untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dengan anggaran Rp. 10.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp.9.556.881.198,00 atau 95,57 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 5) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran Rp.51.897.000.000,00 realisasi sebesar Rp.48.506.611.179,00 atau 93,47 % untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 6) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan dengan anggaran Rp.74.611.224.000,00 realisasi sebesar Rp.69.460.105.414,00 atau 93,10% untuk mendukung 13 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang terbatas.
- 2) Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal.
- 3) Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya ikan air tawar.
- 4) Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non - perikanan.

- 5) Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidayanya.
- 6) Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bahan peledak yang merusak lingkungan.
- 7) Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar.
- 8) Produktivitas garam belum optimal.
- 9) Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur.
- 10) Kompetensi pelaku industri perikanan belum memadai untuk menghadapi persaingan di pasar global.
- 11) masyarakat belum seluruhnya memahami bahwa pengelolaan ruang laut saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan belum adanya pemahaman di lingkungan Pemerintah mengenai SOP perizinan dalam pengelolaan ruang laut.
- 12) masyarakat khususnya nelayan belum seluruhnya memahami dan melaksanakan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 13) Luas wilayah pengawasan laut yang semakin luas terkait dengan kewenangan 12 Mill tidak berimbang dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan yang ada.

Solusi:

- 1) Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan stok sumberdaya ikan melalui pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan di laut dan

perairan umum darat (PUD) yang telah padat tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi Pantai Selatan Jawa Timur yang masih relatif rendah tingkat eksploitasinya.

- 2) Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa GPS untuk mempermudah mencari lokasi penangkapan (fishing ground), penyediaan modal usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan.
- 3) Intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pemberian paket hibah perikanan budidaya, pakan mandiri dan obat ikan; pelatihan teknis perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan); perbaikan mutu induk dan benih, alih teknologi (adopsi teknologi hasil penelitian); Intensifikasi, pemanfaatan lahan terbatas budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan di pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Bioflok, pemanfaatan tambak porous dengan pemlastikan HDPE.
- 4) Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok.
- 5) Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan provinsi, kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan.
- 6) Selain melaksanakan kegiatan rehabilitasi juga dilakukan upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan.
- 7) Peningkatan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui pembuatan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran.

- 8) Lebih mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) untuk mencari bahan baku ikan ke provinsi lain di luar Jawa dan menjalin kerjasama dengan provinsi lain.
- 9) Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia.
- 10) Secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi dan konsultasi public mengenai dokumen RZWP3K Provinsi Jawa Timur, melaksanakan integrasi lintas sector dalam pengelolaan potensi desa pesisir sebagai sarana pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan serta berkoordinasi dengan organisasi pemerintahan di lingkup Provinsi Jawa Timur perihal SOP perizinan dalam pengelolaan ruang laut khususnya UPT P2T, BPM dan Bappeda.
- 11) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan bersama dengan instansi terkait serta melakukan patrol/pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan.
- 12) Menyediakan sarana dan prasarana pengawasan baik untuk petugas maupun Pokmaswas serta mengusulkan penambahan petugas untuk pengawasan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Juara Pelaksana Kegiatan SeHAT Nelayan dan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terbaik, Makassar 10 Nopember 2017.
- 2) Penghargaan Kinerja Provinsi Terbaik ke-2 Lingkup Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Tangerang 22 Oktober 2017.

URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN URUSAN PERTANIAN

2.1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

URUSAN KETAHANAN PANGAN

a. Tujuan

- 1) Peningkatan Ketahanan Pangan;
- 2) Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 5/4 * 100)
I	Meningkatkan ketersediaan pangan (<i>food availability</i>) dan akses pangan masyarakat (<i>food acces</i>)	1 Ketersediaan Pangan Masyarakat (Ton)			
		- Beras	8.151.306	7.975.352	97,84
		- Jagung	7.383.933	5.638.374	76,36
		- Kedelai	518.311	268.142	51,73
		2 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	200	171,23	85,62
		3 Stabilisasi Harga Pangan di tingkat Produsen (Rp/kg)			
		- Gabah GKG	4.600	5.630	122,39
		- Beras Medium	7.300	8.788	120,38
		4 Stabilisasi Harga di tingkat Konsumen (CV < 10 persen)	8,0	1,73	21,63
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Ketersediaan Pangan Masyarakat (Ton)			
		- Beras	8.151.306	7.975.352	97,84
		- Jagung	7.383.933	5.638.374	76,36
		- Kedelai	518.311	268.142	51,73
		2 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	200	171,23	85,62
		3 Stabilisasi Harga Pangan di tingkat Produsen (Rp/kg)			
		- Gabah GKG	4.600	5.630	122,39
		- Beras Medium	7.300	8.788	120,38
		4 Stabilisasi Harga di tingkat Konsumen (CV) < 10 persen	8,0	1,73	21,63
II	Peningkatan kualitas konsumsi Pangan (<i>Food Utilization</i>) dan Keamanan Pangan (<i>Food Security</i>)	1. Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,5	84,8	99,18
		2. Prosentase (persen) pangan yang aman dikonsumsi	81,0	85,0	104,94

NO	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
			TARGET	REALISASI	
1	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	1. Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Prosentase (persen) pangan yang aman dikonsumsi	85,5 81,0	84,8 85,0	99,18 104,94
III	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan	Prosentase (persen) Penyuluh yang bersertifikat - Jumlah Penyuluh (Orang) - Jumlah Kelompok Tani (Kelompok)	4,3 409 449	4,0 263 450	93,02 64,30 100,22
1	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.	- Jumlah Penyuluh (Orang) - Jumlah Kelompok Tani (Kelompok)	409 449	263 450	64,30 100,22

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018

Pada Tahun 2017 kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan (Food Availability) dan Aksesibilitas Pangan (Food Acces)

Jawa Timur merupakan daerah sentra pangan di Indonesia, bahkan secara umum merupakan provinsi yang terbesar kontribusinya dalam penyediaan pangan nasional. Oleh karena itu pembangunan dalam peningkatan produksi pangan di Jawa Timur sekaligus merupakan suatu penyediaan pangan secara nasional. Perkembangan ketersediaan pangan sampai tahun 2017 khususnya padi di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan rata-rata 2 persen.

Kebutuhan pangan di Jawa Timur memang hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas kedelai yang masih mengalami defisit. Sedangkan untuk beras, jagung, kacang maupun ubi mengalami surplus. Surplus pangan di Jawa Timur selain didukung sumberdaya alam yang sesuai, juga potensi sumberdaya manusia dan adanya dukungan infrastruktur ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA), Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Timur mengutamakan penanganan Daerah Rawan Pangan pada prioritas 1 s.d. 3 (sangat rentan, rentan, cukup rentan). Kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh beberapa hal : angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus *underweight* pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi *normative* perkapita terhadap ketersediaan sereal meningkat.

Hal ini, terutama sebagai dampak dari perbaikan pada beberapa indikator ketahanan pangan dan gizi. Hasil ini menggembirakan, namun kemajuan tersebut dapat mengalami hambatan jika tantangan-tantangan utama yang ada tidak ditangani dengan baik. Tantangan utama yang memerlukan perhatian yang serius antara lain:

1. Meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, termasuk investasi pada infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Akselerasi intervensi untuk pencegahan dan penurunan angka kekurangan gizi; dan
3. Mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Sementara terdapat kendala dalam penanganan kerawanan pangan, yaitu kurang tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik. Oleh karena itu, melalui penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan informasi keberadaan lokasi/wilayah yang rentan terhadap rawan pangan.

1) Ketersediaan Pangan.

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM), realisasi Ketersediaan bahan pangan Jawa Timur Tahun 2017, untuk beras tercapai 7.975.352 ton dari sasaran 8.151.306 ton atau 97,84 persen dan konsumsi mencapai 3.601.324 ton dari sasaran 3.546.866 ton atau 101,5 persen, sedangkan capaian surplus

untuk beras mencapai 4.374.028 ton. Ketersediaan Jagung mencapai 5.638.374 ton dan konsumsi mencapai 174.357 ton sehingga surplus 5.464.017 Ton. Untuk kedelai ketersediaan mencapai 268.142 dari sasaran 518.311 ton atau 51,73 persen, dan konsumsi mencapai 365.912 ton sehingga untuk kedelai mengalami defisit sebesar 97.770 ton.

Tabel 4.17
Perkembangan Ketersediaan dan konsumsi pangan strategis di Jawa Timur
Tahun 2016-2017

NO.	KOMODITAS/PANGAN		2016	2017	PERTUMBUHAN (%)
1.	Beras	- Ketersediaan	8.495.592	7.975.352	93,88
		- Konsumsi	3.574.641	3.601.324	100,75
		- Surplus	4.920.951	4.374.028	88,89
2.	Jagung	- Ketersediaan	5.749.634	5.638.374	98,06
		- Konsumsi	169.681	174.357	102,76
		- Surplus	5.579.953	5.464.017	97,92
3.	Kedelai	- Ketersediaan	298.121	268.142	89,94
		- Konsumsi	367.105	365.912	99,68
		- Surplus	-68.984	-97.770	141,73
4.	Daging	- Ketersediaan	424.171	304.781	71,85
		- Konsumsi	276.206	322.012	116,58
		- Surplus	101.014	-17.231	-17,06
5.	Telur	- Ketersediaan	509.229	388.653	76,32
		- Konsumsi	261.056	326.353	125,01
		- Surplus	106.119	62.300	58,71
6.	Susu	- Ketersediaan	496.266	400.649	80,73
		- Konsumsi	414.428	418.300	100,93
		- Surplus	81.838	-17.651	-21,57
7.	Ikan	- Ketersediaan	1.566.983	1.293.936	82,58
		- Konsumsi	1.192.459	1.211.491	101,60
		- Surplus	374.524	82.446	22,01
8.	Gula	- Ketersediaan	1.133.744	1.147.590	101,22
		- Konsumsi	394.904	398.593	100,93
		- Surplus	738.840	748.997	101,37
	Jumlah Penduduk		39.097.028	39.462.242	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018

Ketersediaan energi penduduk Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 3.193 kkal/kap/hr atau 133 persen dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi tahun 2017 didominasi oleh pangan nabati 89,1 persen sedangkan pangan hewani 10,9 persen. Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2016 terjadi

kenaikan sebesar 107,96 kkal/kap/hr (3,51 persen). Demikian juga total ketersediaan protein untuk penduduk Jawa Timur sebesar 92,42 gram/kap/hari atau 146,69 persen dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan protein tahun 2017 masih didominasi oleh pangan nabati 90,4 persen sedangkan pangan hewani 9,6 persen. Apabila dibandingkan dengan AKP tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,69 gr/kap/hr (6,1 persen). Ketersediaan dan Konsumsi pangan penduduk untuk proporsi Nabati dan Hewani Jawa Timur tahun 2016–2017 seperti pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Ketersediaan dan Konsumsi Energi, Protein Penduduk Jawa Timur Tahun 2016-2017

No.	Uraian	2016				2017			
		Energi		Protein		Energi		Protein	
		Kkal/kap/hr	%	Gr/kap/hr	%	Kkal/kap/hr	%	Gr/kap/hr	%
Ketersediaan									
1	Proporsi Nabati	2.783	90,2	83,63	89,8	2.845	89,1	83,56	90,4
2	Proporsi Hewani	302	9,8	9,49	10,2	348	10,9	8,87	9,6
Total		3.085	100	93,12	100	3.193	100	92,43	100
Konsumsi									
1	Proporsi Nabati	1.720	93,1	46,5	87,8	1.938	90,5	55,68	89,9
2	Proporsi Hewani	127	6,9	6,4	12,2	203	9,5	6,25	10,1
Total		1.847	100	52,9	100	2.141	100	61,93	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018

Sedangkan untuk Konsumsi energi penduduk Jawa Timur Tahun 2017 sebesar 2.141 Kkal/Kap/hari atau mencapai 107,05 persen dari anjuran AKE berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.000 Kkal/kap/hr. Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa wilayah perkotaan konsumsi energi sebesar 2.095,86 Kkal/kap/hr, sedangkan untuk pedesaan konsumsi energi mencapai 2.187,03 Kkal/kap/hr, ini artinya bahwa konsumsi energi masih terarah ke karbohidrat. Berbeda dengan konsumsi protein, tahun 2017 mencapai 61,93 Gram/kap/hr atau 119,1 persen

dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan sebesar 52 Gram/kap/hr. Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa perkotaan konsumsi protein mencapai 62,31 gram/kap/hr atau 119,8 persen sedangkan pedesaan mencapai 61,53 gram/kap/hr atau 118,3 persen dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan.

2) Tersedianya cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 13 tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah Provinsi Jawa Timur, maka CPP Provinsi dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan beras dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat. CPP Provinsi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran CPP Provinsi adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami : (1) Kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat; (2) Gejolak harga pokok (beras);(3) Rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; (4) Rawan pangan kronis karena kemiskinan. CPP Provinsi sebanyak 200 ton beras dari alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2014 pengadaan beras sebanyak 186.375 kg, untuk

memenuhi CPP Provinsi 200 ton maka pada tahun 2015 ditambah pengadaan beras sebanyak 17.400 kg, sehingga total terdapat 203.775 kg. Pengelolaan CPP Provinsi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Perum BULOG.

Mekanisme penyaluran CPP Provinsi dilakukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan Perintah Gubernur (Top Down) dan usulan Kabupaten/Kota (Bottom Up). Pada tahun 2016, CPP disalurkan ke Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Sampang yang terkena bencana banjir dan longsor, sebesar 29.649 ton. Dan sampai akhir tahun 2017 setelah disalurkan ke beberapa kabupaten yang mengalami bencana CPP Jawa Timur tinggal 171,23 ton.

3) Stabilitasnya harga pangan (gabah/beras).

Kondisi harga beras tahun 2017 tingkat konsumen di Jawa Timur cukup stabil hal ini ditunjukkan dengan koefisien variasi (CV) kurang dari 5 persen yaitu : beras premium 2,98 persen, beras medium 3,49 persen, dan beras termurah 3,50 persen hal ini disebabkan selain sentra produksi, kondisi pasokan ke daerah-daerah di Jatim cukup stabil.

Sedangkan harga bawang merah dan cabai merah keriting sangat fluktuatif dengan CV masing-masing 25,98 persen dan 23,71 persen hal ini disebabkan permintaan cabai merah dan bawang merah segar cukup banyak sedangkan produksinya tergantung cuaca dan iklim daerah.

Tabel 4.19
Tingkat kestabilan Harga Pangan Strategis Jawa Timur Tahun 2017

No.	Komoditas	Max	Min	Rata2	Stdev	CV
1	Beras Premium	10.850	9.937	10.420	310,33	2,98
2	Beras Medium	9.792	8.706	9.179	319,99	3,49
3	Beras Termurah	8.810	7.923	8.318	290,89	3,5
4	Jagung pipilan kering	5.625	3.764	4.432	668,75	15,09
5	Biji Kedelai Kering	11.000	7.121	8.538	1.077,25	12,62
6	Bawang Merah	24.942	12.200	17.663	4.588,42	25,98
7	Cabe merah keriting	27.092	12.200	17.838	4.229,39	23,71
8	Daging sapi	102.500	87.500	96.195	4.709,64	4,9
9	Daging ayam ras	29.600	24.331	27.343	1.654,97	6,05
10	Telur ayam ras	21.824	16.311	18.388	1.686,67	9,17

No.	Komoditas	Max	Min	Rata2	Stdev	CV
11	Gula Pasir Lokal	11.112	9.400	10.461	688,68	6,58
13	Minyak goreng	10.939	9.204	10.264	473,11	4,61

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018

4) Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu kerawanan pangan transien dan kerawanan pangan kronis.

Alat analisis yang dipakai untuk mendeteksi persoalan kerawanan pangan adalah sebagai berikut :

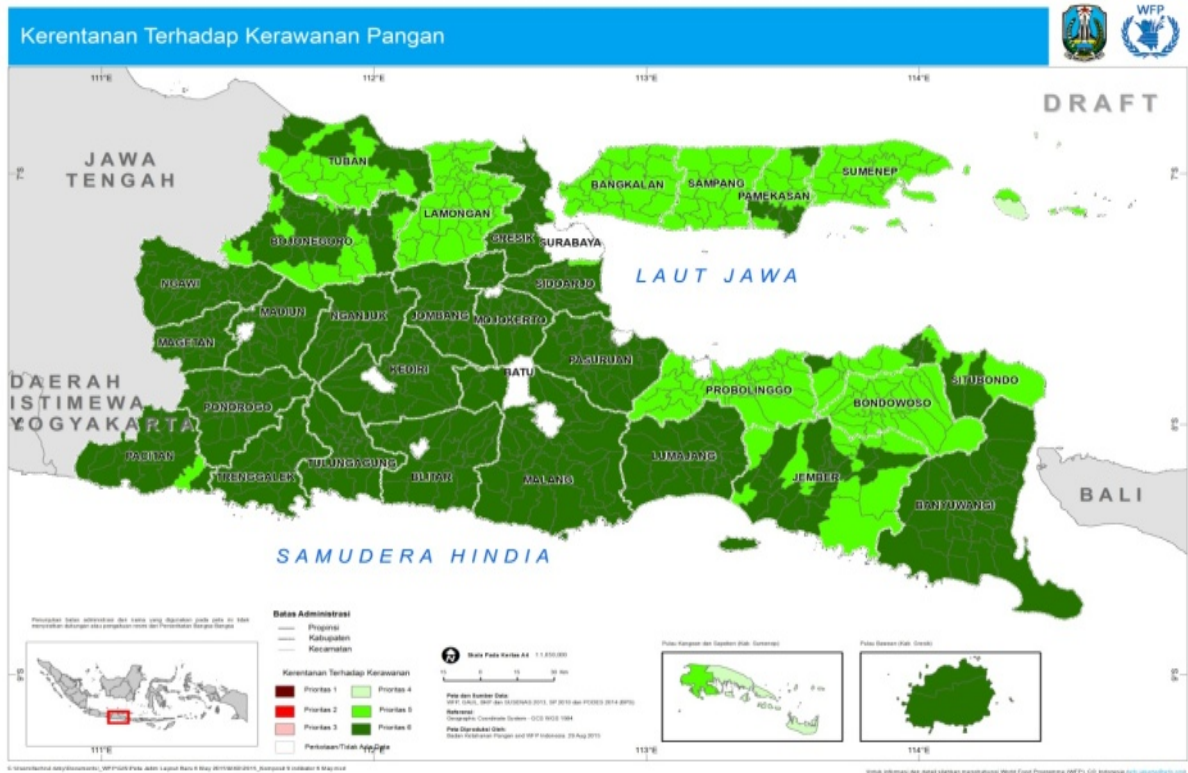
- Kerawanan pangan transien dideteksi menggunakan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- Kerawanan pangan kronis ditunjukkan oleh gambaran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

Penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2017, dari hasil pemetaan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Jawa Timur sebanyak 605 kecamatan berada dalam kondisi tahan pangan, sebagaimana pada gambar dibawah. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari konsistensi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan, pengawalan dan pelaksanaan program kegiatan

yang secara langsung mempengaruhi pencapaian penurunan wilayah rawan pangan.

Gambar 4.19
Peta Rawan Pangan Jawa Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018

Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan (*Food Utilization*) dan Keamanan Pangan (*Food Security*)

Tingkat konsumsi dan kualitas pangan ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola Pangan Harapan (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dicerminkan dengan nilai skor PPH ideal 100 yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2025.

Skor PPH Jawa Timur mencapai 84,8 atau 99,18 persen dari target 2017 sebesar 85,5 meskipun demikian telah melampaui skor PPH tahun 2016 sebesar 83,4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan

pengenekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

Tabel 4.20

Rata-Rata Konsumsi Pangan Tingkat RumahTangga Penduduk Jawa TimurTahun 2017

No.	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk					
		Berat Pangan/g/ kap/hr	Energi (KKal)	persen AKE *).	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	291,7	1.138	56,9	28,5	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	33,7	100	5,0	2,5	2,5	2,5
3.	Pangan Hewani	73,9	169	8,5	16,9	24	16,9
4.	Lemak & Minyak	24,3	207	10,4	5,2	5,0	5
5.	Buah/Biji Minyak	7,8	161	8,1	4,0	1,0	1
6.	Kacang-kacangan	33,0	93	4,6	9,3	10,0	9,3
7.	Gula	32,3	119	5,9	3,0	2,5	2,5
8.	Sayur & Buah	248,2	100	5,0	25,1	30,0	25,1
9.	Lainnya	57,6	53	2,6	0,0	0	0
	Jumlah	2.000	2.141	107,0	-	100	84,8

Sumber :Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganProvinsi Jawa Timur, 2018

Ket : *). Angka Kecukupan Energi

Keragaman ketersediaan pangan yang dikonsumsi penduduk Jawa Timur berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2017 skor Pola Pangan Harapan yang dicapai sebesar 84,8 yang berasal dari kelompok pangan yang telah mencapai target yaitu pada kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, buah dan biji berminyak, gula sayur dan buah – buahan sudah berlebih, sedang yang belum mencapai target adalah pada kelompok pangan hewani sehingga perlu ada peningkatan.

Permasalahan pangan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan kompleks, perkembangan lingkungan yang global, seperti global climate change, meningkatnya harga minyak dunia, telah mendorong kompetisi

penggunaan hasil petanian untuk pangan (food), bahan energy (fuel) dan pakan ternak (feed) yang semakin tajam, disamping itu terjadi pengabaian terhadap good agricultural practices dan sumber pangan lokal (biodiversitif) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan regional maupun nasional.

Salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dapat dilakukan dengan pengembangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu. Sumber karbohidrat non beras dan non terigu ini mempunyai potensi dikembangkan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memanfaatkan umbi-umbian.

Mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76 persen), menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sementara kapasitas produksi pangan pertumbuhannya masih lambat dan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air serta stagnannya pertumbuhan produktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian.

Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Pangan, kegiatan Pengembangan Karangkitri, kegiatan Pengembangan Teknologi Pangan Olahan dan kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan B2SA. Konsumsi pangan penduduk Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok pangan serealial terutama beras, maka perlu dilakukan diversifikasi pangan alternatif masyarakat Jawa Timur, denganharapan dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian, mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.Sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi lainnya cenderung mengalami fluktuasi.

Upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian dengan penggunaan teknologi tepat guna dan mensosialisasikan program diversifikasi pangan dan

gizi guna masyarakat tidak bergantung pada beras dan terigu, serta untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk pangan olahan guna menumbuhkan minat dan kecintaan untuk mengkonsumsi pangan lokal.

Pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) akan dapat meningkatkan kualitas SDM. Selain pentingnya keanekaragaman pangan, Keamanan pangan juga menjadi isu hangat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen dan konsumen, karena itu upaya penyebarluasan informasi tentang keamanan pangan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Melalui kegiatan peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangandilaksanakan proses edukasi yang secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat agar informasi tentang keamanan pangan ini bisa tersebar ke seluruh pelosok tanah air.

Hasil uji laboratorium keamanan pangan, dari 2500 sample pangan segar dan olahan yang diuji terdapat 412 sampel pangan segar dan olahan tercemar bahaya kimia dan biologi.

Capaian persentase keamanan pangan untuk pangan segar pada tahun 2017 sebesar 83,5 persen telah mencapai target (80,5 persen) dan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pangan aman tahun 2016 yakni sebesar 82,76 persen.

Sasaran 3 : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan

Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani secara berkelanjutan dan terpadu merupakan strategi untuk mencapai sasaran dalam meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan. Upaya optimasilisasi dan pemberdayaan

kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

Melalui Penyuluhan Pertanian yang merupakan rangkaian kegiatan pengembangan kemampuan pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha diharapkan pemberdayaan kelembagaan petani dapat terfasilitasi. Penyuluhan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera serta merupakan bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan penyuluhan ini diselenggarakan melalui koordinasi kelembagaan penyuluhan yang tertata dan terkoordinasi dengan baik agar produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan meningkat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian khususnya di wilayah Jawa Timur.

Strategi penyuluhan Pertanian Jawa Timur yang dilaksanakan saat ini adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang penyelenggaraan penyuluhan, sehingga mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyelenggaraan penyuluhan;
4. Memberikan peningkatan dinamika kelembagaan masyarakat dan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan,

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan revitalisasi penyuluhan tahun 2017 dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan yakni meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan petani yang didukung dengan peningkatan kemampuan penyuluh dengan banyaknya penyuluh yang memperoleh sertifikasi penyuluhan sebagai tanda bahwa kemampuan penyuluh yang kompeten.

Masih kurangnya tenaga penyuluh yang bersertifikat serta masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh yang idealnya 1 desa 1 penyuluh, maka kedepan perlu dilaksanakan peningkatan kualitas SDM Penyuluh dan perlu menambah jumlah tenaga penyuluh dilapangan.

Evaluasi capaian kinerja tahun 2017 untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi :

- a) Jumlah penyuluh pertanian target 4.358 orang terealisasi 4.115 orang yang terdiri dari 1.770 orang penyuluh pertanian PNS, 2.345 orang THL-TBPP
- b) Jumlah penyuluh pertanian yg bersertifikat target 409 orang terealisasi 263 orang
- c) Jumlah kenaikan kelas kelompok tani target 449 kelompok tani terealisasi 450 kelompok tani.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp 9.425.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.606.134.772,00 atau 80,70%, Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan ketersediaan pangan dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan ekspor non migas maka Program Peningkatan Ketahanan Pangan didukung 4 (empat) kegiatan, yaitu a) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat; b) Pembelian Gabah / Bahan Pangan Lainnya; c) Penanganan Daerah Rawan Pangan; dan d) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

- 2) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.334.321.100,00 atau 74,11 persen. Program ini ditujukan bertujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui pemberdayaan penyuluhan dengan sasaran meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan pada kegiatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dengan anggaran sebesar Rp 10.125.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.503.199.677,00 atau 93,86 persen. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan (Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan; Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; Pengembangan Teknologi Pangan Olahan; dan Pengembangan Karangkitri) yang

secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Optimalisasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terkendala dari kemampuan manajemen kelompok dan pemasaran
- 2) Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya, ada 8 gapoktan/poktan penerima bantuan hibah tidak terealisasi setelah diverifikasi gapoktan/poktan tersebut sudah pernah mendapat bantuan yang sama pada tahun sebelumnya.
- 3) Belum diterapkan analisa SKPG dalam Penanganan Daerah Rawan Pangan
- 4) Calon penerima bantuan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari tidak terealisasi karena proposal tidak sesuai dan BHI nya kurang dari 3 tahun.
- 5) Masih banyak makanan yang beredar di masyarakat yang menggunakan bahan tambahan Boraks, Formalin, Pestisida, Pewarna, Pemanis
- 6) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, ada 23 Kantin Sekolah penerima bantuan hibah tidak terealisasi setelah diverifikasi Kantin Sekolah tersebut BHI nya kurang dari 3 tahun.
- 7) Kurang berkembangnya kreasi dan inovasi Teknologi Pangan Olahan
- 8) Kurangnya ketersediaan obat-obatan herbal
- 9) Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 10) Tenaga penyuluh terbatas
- 11) Pengorganisasian penyuluhan belum tertata dengan baik

Solusi:

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 2) Dalam rangka Optimalisasi Lumbung Pangan kedepan diperlukan pelatihan-pelatihan peningkatan manajemen kelompok dan pelaksanaan temu usaha.

- 3) Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya, gapoktan/poktan calon penerima bantuan hibah yang sudah pernah mendapat bantuan yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 8 gapoktan/poktan tidak direalisasikan dan alokasi anggarannya dikembalikan ke Kas Daerah.
- 4) Perlu dilaksanakan pelatihan SKPG untuk peningkatan kemampuan analisa petugas dalam penanganan daerah rawan pangan.
- 5) 22 TP-PKK dan Ponpes yang tidak realisasi, alokasi anggarannya tidak diserap.
- 6) Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan agar lebih ditingkatkan pada 38 kab/kota melalui Pengujian Kualitatif Boraks, Formalin, Pestisida, Pewarna, Pemanis.
- 7) Pada Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, 23 Kantin Sekolah penerima bantuan hibah yang tidak terealisasi dan alokasi anggarannya dikembalikan ke Kas Negara.
- 8) Perlu dilaksanakan Gelar Kreasi dan Inovasi Teknologi Pangan Olahan sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat
- 9) Melalui pengembangan karangkitri diharapkan selain tercukupinya kebutuhan pangan keluarga juga tersedianya obat-obatan herbal sebagai tanaman obat keluarga (Toga).
- 10) Jumlah Penyuluh perlu ditambah dan kualitas SDM penyuluh ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan
- 11) Perlu merevitalisasi penataan penyuluhan yang diawali dengan pembenahan pada payung hukum atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan.

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

URUSAN PERTANIAN

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri pengolahan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		PROSENTASE (persen)
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
I	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan	Produksi			
		1. Padi (ton)	13.700.000	13.060.464	95,33
		2. Jagung (ton)	6.300.000	6.335.252	100,56
		3. Kedelai (ton)	340.000	200.916	59,09
		4. Sayuran (ton)	2.135.351	2.035.415	95,32
		5. Buah-buahan (ton)	4.019.645	5.776.451	143,71
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi			
		1. Padi (ton)	13.700.000	13.060.464	95,33
		2. Jagung (ton)	6.300.000	6.335.252	100,56
		3. Kedelai (ton)	340.000	200.916	59,09
		4. Sayuran (ton)	2.135.351	2.035.415	95,32
		5. Buah-buahan (ton)	4.019.645	5.776.451	143,71
II	Peningkatan Efisiensi, Kualitas dan Jumlah Olahan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur	1. Persentase nilai tambah usahatani tanaman pangan:			
		- Padi	64,72	34,00	52,53
		- Jagung	44,58	52,00	116,64
	1. Program Pengembangan	1. Persentase nilai tambah usahatani tanaman pangan:			

No	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		PROSENTASE (persen)
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Agribisnis Pertanian	- Padi - Jagung	64,72 44,58	34,00 52,00	52,53 116,64
III	Peningkatan Kapasitas Petani	1. Presentase Petani yang meningkat kapasitas SDM nya	11,92	87,89	737,35
1.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian	1. Presentase Petani yang meningkat kapasitas SDM nya	11,92	87,89	737,35

Sumber: Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2018

Pada Tahun 2017 kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan

Komoditas Tanaman Pangan yang dimaksud adalah komoditas tanaman pangan utama, yaitu Padi, Jagung dan Kedelai, sedangkan untuk hortikultura terdiri Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias dan Biofarmaka. Dalam Indikator Kinerja Utama dicantumkan sayuran meliputi seluruh komoditas Sayuran dan Buah Semusim termasuk komoditas utama Cabai Merah, Cabai Rawit dan Bawang Merah, yang termasuk komoditas Buah-buahan meliputi seluruh komoditas Buah-buahan dan Sayuran Tahunan termasuk komoditas Buah Utama Jeruk keprok/siam, Mangga dan Pisang, demikian pula untuk komoditas Tanaman Hias meliputi seluruh komoditas tanaman hias dengan satuan tangkai termasuk komoditas Tanaman Hias Utama Mawar dan Krisan. Sedangkan untuk komoditas Tanaman Biofarmaka meliputi seluruh komoditas Biofarmaka dengan satuan produksi kilogram termasuk komoditas Jahe dan Temulawak. Pada Tahun 2017

perkembangan produksi tanaman pangan menggunakan Angka Sementara BPS Provinsi Jawa Timur sedangkan perkembangan Hortikultura menggunakan angka Triwulan I – IV 2017 BPS Provinsi Jawa Timur dan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian (RPSP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Sasaran Strategis Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan di Jawa Timur ditetapkan 5 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017 realisasi produksi tanaman pangan menggunakan Angka Sementara. Realisasi produksi Padi sebesar 13.060.464 ton atau tercapai 95,33 persen dari target sebesar 13.700.000 ton dengan luas panen 2.285.232 hektar dan produktivitas sebesar 57,15 ku/ha;
2. Produksi Jagung sebesar 6.335.252 ton atau 100,56 persen dari target 6.300.000 ton dari luas panen 1.257.111 hektar dengan tingkat produktivitas Jagung sebesar 50,04 ku/ha;
3. Produksi Kedelai sebesar 200.916 ton atau 59,09 persen dari target 340.000 ton yang diperoleh dari luas panen Kedelai 133.593 hektar dan tingkat produktivitas Kedelai sebesar 15,04 ku/ha;
4. Capaian produksi Sayuran sebesar 2.035.415 ton atau 95,32 persen dari target 2.135.351 ton dari realisasi luas panen 386.845 hektar dan produktivitas Sayuran tahun 2017 sebesar 52,62 ku/ha. Capaian produksi beberapa komoditas sayuran utama Cabai Besar sebesar 111.892 ton atau 114,34 persen dari target 97.860 ton, capaian produksi Cabai Rawit sebesar 377.747 ton atau 142,32 persen dari target 265.421 ton, produksi Bawang Merah mencapai 301.469 ton atau 98,53 persen dari target 306.162 ton;
5. Produksi Buah – buahan sebesar 5.776.451 ton atau 143,71 persen dari target 4.019.645 ton dengan luas panen Buah–buahan telah

terrealisasi 98.047.168 pohon/rumpun dengan tingkat produktivitas Buah – buahan sebesar 58,92 kg/pohon, rumpun. Kinerja beberapa komoditas buah-buahan utama, yaitu produksi Mangga sebesar 946.718 ton atau 88,27 persen dari target 1.072.480 ton, produksi Jeruk Keprok / Siam sebesar 690.096 ton atau 149,09 persen dari target 462.882 ton.

Capaian dari sasaran 1 tersebut merupakan kinerja dari : a) terkendalinya Serangan OPT dan DPI pada areal tanam tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2017 tercapai 96,88 persen dari areal pertanaman atau 100,92 persen dari target; b) Index Pertanaman Lahan Sawah tahun 2017 tercapai 2,16 persen.

Sasaran 2: Peningkatan Efisiensi, Kualitas dan Jumlah Olahan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur

Indikator Sasaran Strategis Peningkatan Efisiensi, Kualitas dan Jumlah Olahan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur adalah : Presentase Nilai tambah usahatani tanaman pangan padi dengan asumsi HET pupuk dan HPP gabah tetap pada tahun 2017 tercapai 34,00 persen atau 52,53 persen dari target 64,72 persen. Tidak tercapainya target nilai tambah padi dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi diawal tahun 2017, yaitu bulan Januari – Maret 2017 serta munculnya serangan wereng batang coklat yang menyebabkan turunnya harga beras karena raw material dengan kualitas rendah. Harga beras meningkat naik pada bulan Agustus 2017.

Sedangkan pada komoditas Jagung tercapai 52,00 persen atau 116,64 persen dari target 44,58 persen. Peningkatan persentase nilai tambah terjadi karena petani mulai menjual produknya tidak lagi berupa hasil panen padi dalam bentuk GKP demikian pula dengan jagung tetapi melakukan

pengolahan hasil panen dengan fasilitasi bantuan alat dan mesin pertanian panen dan pasca panen.

Upaya peningkatan nilai tambah sekaligus untuk meningkatkan daya saing komoditas tidak hanya dilakukan pada tanaman pangan tetapi juga untuk komoditas hortikultura melalui:

1. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) yang terukur dari jumlah kebun/lahan usaha yang terregistrasi melalui penerapan GAP (sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Biofarmaka) dengan target sesuai review renstra sebesar 385 kebun/lahan usaha tercapai 185 kebun / lahan usaha dan menunjukkan penerapan GAP belum optimal karena petani belum banyak tertarik menerapkan GAP dan melakukan registrasi lahan usaha secara mandiri dan masih tergantung pada fasilitasi pemerintah;
2. Jumlah produk hasil pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) bersertifikat tercapai 588 produk bersertifikat atau mencapai 1.069 persen dari target sebanyak 55 produk bersertifikat. Capaian tersebut disebabkan pelaku usaha agribisnis telah menerapkan uji sertifikasi untuk produk pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) secara mandiri.

Sasaran 3 : Peningkatan Kapasitas Petani

Indikator Sasaran Strategis ke 3, yaitu Peningkatan Kapasitas Petani adalah: Prosentase Petani yang meningkat kapasitas SDM melalui upaya peningkatan kapasitas petani terukur dari prosentase a) kelompok yang menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) tercapai 87,89 persen pada tahun 2017 atau 737,35 persen dari target 11,92 persen. Capaian tersebut meskipun mengalami peningkatan dan melampaui terget akan tetapi

disebabkan karena fasilitasi pemerintah. Disisi lain, petani belum memiliki kesadaran menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara mandiri; b)Prosentase Kelompok yang menerapkan Good Agriculture Practices tercapai 40,92 persen pada tahun 2017 atau 431,60 persen dari target 9,48 persen. Hal ini disebabkan petani belum banyak tertarik menerapkan GAP melalui sekolah lapang secara mandiri dan masih tergantung pada fasilitasi pemerintah.

c. Program

1) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 57.876.848.343,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.113.146.063,00 atau 86,59,00 persen. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan ekspor non migas dengan 19 (sembilan belas) pelaksanaan kegiatan (Pengembangan Produksi Benih Hortikultura; Pengembangan Produksi Benih Padi; Pengembangan Produksi Benih Palawija; Pengembangan Pupuk Organik; Pengembangan Usaha Tani Pertanian; Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura; Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian; Pembangunan / Renovasi UPTD / Balai Perbenihan Dan Balai Proteksi Tanaman Pangan; Hortikultura; Perkebunan Dan Balai Mekanisme Pertanian Dan Penyedia Sarana Pendukungnya; Pembinaan Irigasi Pertanian Dan Adaptasi Perubahan Iklim (Water Resource And Irrigation Sector Management Program) WISMP II; Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan Dan Hortikultura; Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian; Pengembangan Tanaman Serealia; Pengembangan Tanaman Aneka Kacang Dan Umbi; Pembinaan Dan Pengembangan Tanaman Buah

Dan Tanaman Hias; Pembinaan Dan Pengembangan Tanaman Sayur Dan Tanaman Obat; Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Dan Air Irigasi Pertanian; Pembinaan Dan Pengawasan Pupuk; Pestisida Dan Alsintan; Pembinaan Dan Pembiayaan Pertanian; Pembinaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

2) Program Pengembangan Agribisnis Pertanian

Upaya peningkatan efisiensi, kualitas dan jumlah olahan produk tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan melalui Program Pengembangan Agribisnis dengan tujuan memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budi daya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu.

Program Pengembangan Agribisnis Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 58.722.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 53.717.472.835,00 atau 91,48 persen. Program ini diarahkan untuk memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budidaya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu. Agrobisnis lebih ditekankan pada kegiatan perdagangan, sedangkan agroindustri merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian dengan pelaksanaan melalui 11 (sebelas) kegiatan (Pengembangan Sistem Agribisnis Melalui Kooperatif Farming; Pengawasan Mutu Hasil Pertanian; Pengembangan Kerjasama Antar Daerah; Pengembangan Kawasan Agropolitan; Pengembangan Kebun Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura; Pengembangan Kualitas dan Mutu Produk melalui Sistem Good Agriculture Practice (GAP) dan Organik Tanaman Buah dan Tanaman Hias; Pengembangan Kualitas dan Mutu Produk Melalui Sistem Good Agriculture

Practice (GAP) dan Organik Tanaman Sayur dan Tanaman Obat; Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan; Peningkatan Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Hortikultura; Peningkatan Pemasaran Produk – Produk Komoditas Tanaman Pangan; Peningkatan Pemasaran Produk – Produk Komoditas Hortikultura) yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

3) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 3.835.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.529.297.126,00 atau 92,00 persen. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan (Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis; Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan) yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Pada kegiatan ini Pembinaan dan Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Alsintan hanya teralokasikan Handtraktor sebanyak 26 unit, Pompa Air

sebanyak 22 unit, Cultivator sebanyak 12 unit dan Transplanter sebanyak 165 unit dari target Handtraktor sebanyak 26 unit, Pompa Air sebanyak 22 unit, Cultivator sebanyak 12 unit dan Transplanter sebanyak 175 unit karena lokasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat nama pengganti hingga batas akhir lelang;

2) Program Pengembangan Agribisnis

- a. Pada kegiatan ini Peningkatan Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan hanya teralokasikan Combine Harvester Padi sebanyak 243 unit dan Combine Harvester Jagung sebanyak 23 unit, dari target Handtraktor Combine Harvester Padi sebanyak 261 unit dan Combine Harvester Jagung sebanyak 25 unit karena dilakukan pemindahan poktan/gapoktan karena persyaratan lokasi secara teknis tidak memenuhi. Dilakukan pengajuan perubahan melalui P-APBD, namun poktan/gapoktan yang diajukan tidak lolos verifikasi administrasi;
- b. Pada kegiatan ini Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Pasca Panen Hortikultura, bantuan Penggorengan vacum frying dari 3 unit terealisasi 2 unit saja karena Kelompok merupakan UP3HP berbentuk koperasi (Koperasi UP3HP Putri Sekartaji) Kabupaten Kediri.

Solusi:

Dana yang ada dikembalikan ke Kas Negara.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Pada Tahun 2017, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menyelenggarakan Lomba Kelompok Tani Tanaman Tingkat Nasional. Provinsi Jawa Timur mengirimkan Juara I Pemenang Lomba Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 untuk mengikuti lomba tersebut. Setelah

melalui seleksi lomba tersebut, maka sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 84/HK.310/C/10/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penerima Penghargaan Kepada Kelompok tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan Sebagai Penggerak/Pemrakarsa/Pelopor Tahun 2017, maka Jawa Timur mendapat Juara II Kelompok tani Suka Maju (Pamekasan, Jawa Timur).

2.2 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
- 2) Meningkatkan mutu produk perkebunan;
- 3) Meningkatkan kemampuan SDM petani perkebunan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Persentase (%) peningkatan produksi tanaman perkebunan:			
	1. Tanaman Semusim	1,40%	1,19%	85
	2. Tanaman Tahunan	1,07%	1,11%	103,74
1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase (%) peningkatan produktivitas tanaman perkebunan:			
	1. Tebu	0,35%	0,35%	100
	2. Tembakau	1,29%	1,39%	107,75
	3. Kopi	4,91%	3,81%	77,59
	4. Kakao	1,90%	1,54%	81,05
	5. Cengkeh	4,64%	4,50%	96,98
	6. Kelapa	1,10%	1,10%	100
II. Meningkatnya Mutu Produk Tanaman Perkebunan				
1. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	prosentase (%) peningkatan mutu produk perkebunan			
	1. Kopi Arabika	4,57%	4,65%	101,75
	2. Kakao	3,85%	3,92%	101,82
III. Meningkatnya Kemampuan SDM Petani Perkebunan				

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan	Persentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan	5%	5%	100

Pada Tahun 2017 kinerja Dinas Perkebunan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ Persentase (%) peningkatan produksi tanaman perkebunan;

Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan pada tahun 2017 dengan target produksi tanaman semusim sebesar 1,40 persen dan terealisasi sebesar negatif 1,19 persen atau 85 persen; dan target produksi tanaman tahunan sebesar 1,07 persen dan terealisasi sebesar 1,11 persen atau sebesar 103,74 persen. Untuk komoditi tanaman semusim khususnya untuk tebu dan tembakau, untuk tebu mengalami penurunan yang cukup besar akibat penurunan areal tebu dari imbas penurunan produksi di tahun 2016 karenan terjadi kemarau basah, sehingga dengan keadaan tersebut menyebabkan banyak petani tebu di tahun 2017 mengganti lahan tebunya ke komoditi lain. Namun demikian beda halnya dengan komoditi tembakau, dimana pada tahun 2017 mengalami peningkatan produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan indikasi yang positif atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program kegiatan intensifikasi tembakau seluas 7.000 hektar yang tersebar di 18 Kabupaten se Jawa Timur.

Untuk komoditi tanaman tahunan yaitu kopi dan kakao, kedua komoditi tersebut tercapai sedikit diatas target, hal tersebut selaras dari hasil kegiatan pengembangan, intensifikasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2010. Kedepan potensi produksi sangat menjanjikan apabila tanaman sudah menghasilkan. Untuk kelapa dan cengkeh di tahun 2017 mengalami peningkatan yang mendukung capaian total produksi tanaman tahunan.

➤ Persentase (%) peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan pada Tahun 2017 dengan target produktivitas tanaman Tebu sebesar 0,35 persen dan terealisasi sebesar 0,35 persen atau 100 persen; target produktivitas tanaman Tembakau sebesar 1,29 persen dan terealisasi sebesar 1,39 persen atau 107,75 persen; target produktivitas tanaman Kopi sebesar 4,91 persen dan terealisasi sebesar 3,81 persen atau 77,59 persen; target produktivitas tanaman Kakao sebesar 1,90 persen dan terealisasi sebesar 1,54 persen atau 81,05 persen; target produktivitas tanaman Cengkeh sebesar 4,64 persen dan terealisasi sebesar 4,50 persen atau 96,98 persen; target produktivitas tanaman Kelapa sebesar 1,10 persen dan terealisasi sebesar 1,10 persen atau 100 persen. Untuk komoditi tanaman tahunan khususnya untuk komoditi unggulan Jawa Timur yaitu kopi dan kakao, kedua komoditi tersebut tidak tercapai sesuai target, namun masih mengalami peningkatan dari tahun dasar. Dari hasil evaluasi dan monitoring lapang untuk dua komoditi ini di tahun 2017 existing lapang untuk komposisi tanaman masih didominasi oleh tanaman muda atau Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Sedangkan untuk tanaman semusim yang tidak tercapai targetnya adalah komoditi tebu, hal tersebut diindikasikan akibat masih belum optimalnya penataan varietas untuk memenuhi kebutuhan tebu giling Pabrik Gula yang sesuai dengan tingkat kematangan tebu, yang

secara nyata menurunkan tingkat produktivitasnya. Untuk komoditi lainnya tembakau, cengkeh dan kelapa mengalami peningkatan.

Sasaran 2: Meningkatnya Mutu Produk Tanaman Perkebunan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- prosentase (%) peningkatan mutu produk perkebunan.

Persentase peningkatan mutu produk perkebunan pada Tahun 2017 dengan target peningkatan mutu Kopi Arabika sebesar 4,57 persen dan terealisasi sebesar 4,65 persen atau 101,75 persen; dan target peningkatan mutu Kakao sebesar 3,85 persen dan terealisasi sebesar 3,92 persen atau 101,82 persen. Pada komoditi kopi arabika rakyat untuk peningkatan nilai tambahnya sudah tercapai sedikit diatas target, hal tersebut mengindikasikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tepat sasaran dengan memberikan fasilitasi sarana pengolahan dari olah kering menjadi olah basah. Penanganan olah basah dapat meningkatkan mutu hasil yang berimbas secara langsung ke peningkatan nilai produksinya. Hal demikian juga pada komoditi kakao, nilai tambah produksinya tercapai sedikit diatas target. Pencapaian target tersebut juga mengindikasikan bahwa fasilitasi sarana pengolahan dan sarana on farm tepat sasaran.

Sasaran 3: Meningkatnya Kemampuan SDM Petani Perkebunan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Persentase (%) rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan.

Persentase rata-rata peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan pada Tahun 2017 dengan target peningkatan produktivitas per kelompok tani hasil dari pelatihan sebesar 2 persen dan terealisasi sebesar 2 persen atau 100 persen. Pada tahun 2017

untuk meningkatkan produktivitas kelompok perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perkebunan melaksanakan pelatihan baik berupa sekolah lapang agribis, sekolah lapang pengendalian OPT dan pelatihan kelembagaan. Sesuai data pelaksanaan di lapangan hasil realisasi target secara kuantitatif terealisasi 100 persen dari target.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan, dengan anggaran sebesarRp. 50.578.627.756,-dan terealisasi sebesarRp. 40.257.710.474,-atau79,59 %, untuk mendukung 21kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 2) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunandengananggaran sebesarRp. 9.783.365.000,- dan terealisasisebesarRp. 8.030.913.386,-atau82,09 %, untuk mendukung11 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp1.230.000.000,- dan terealisasi sebesarRp. 954.632.635,- atau 77,61 %,untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya realisasi kegiatan khususnya di kegiatan pengembangan komoditi perkebunan, selain jadwal pelaksanaannya menyesuaikan musim, juga dipengaruhi oleh komponen pendukung pengembangan yaitu ketersediaan benih/bibit, dimana untuk memperolehnya melalui proses

pengadaan lelang yang mempunyai resiko gagal lelang maupun keterbatasan waktu.

Solusi

- 1) Diperlukan penjadwalan awal pelaksanaan dilapangan dan koordinasi lebih intens dengan pihak terkait.

e. Penghargaan Nasional

Penghargaan 35 Besar Nasional Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Dengan judul “PLANET KAKAO”.

2.3 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan produksi peternakan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah produk peternakan;
- 3) Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3*100)
I. Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Jumlah Produksi Daging (ton)	386.990	437.113*	112,95
	2. Jumlah Produksi Telur (ton)	379.984	532.846*	140,23
	3. Jumlah Produksi Susu (ton)	454.492	517.097*	113,77
1. Program Peningkatan Produksi Peternakan	1. Jumlah Produksi Daging (ton)	386.990	437.113*	112,95
	2. Jumlah Produksi Telur (ton)	379.984	532.846*	140,23
	3. Jumlah Produksi Susu (ton)	454.492	517.097*	113,77
II. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Peternakan	Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi) (%)	26	30	115,38
1. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi) (%)	26	30	115,38
III. Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Peternak	Jumlah Kelompok Peternak yang Mengalami Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok (kelompok)	74	74	100
1. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan	Jumlah Kelompok Peternak yang Mengalami Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok (kelompok)	74	74	100

Ket.: * = angka sementara Tahun 2017

Pada Tahun 2017 kinerja Dinas Peternakan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi peternakan, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Produksi Daging (ton);
Jumlah Produksi Daging pada Tahun 2017 dengan target sebesar 386.990 ton dan terealisasi sebesar 437.113 ton atau 112,95 persen (mencapai target). Hal ini merupakan hasil dari kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun 2017 yaitu:
 - 1) Meningkatkan angka kelahiran sapi potong diutamakan melalui optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur, meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB, sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
 - 2) Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak;
 - 3) Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini (SIKHNAS), peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
 - 4) Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif, revitalisasi RPH, pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.
- Jumlah Produksi Telur (ton);
Jumlah Produksi Telur pada Tahun 2017 dengan target sebesar 379.984 ton dan terealisasi sebesar 532.846 ton atau 140,23 persen (mencapai target). Hal ini merupakan hasil dari kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun 2017 yaitu:

- 1) Mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur (ayam buras dan bebek mojosari), meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
- 2) Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan Pengawasan mutu pakan yang beredar;
- 3) Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini (ISIKHNAS), peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- 4) Pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

➤ Jumlah Produksi Susu (ton).

Jumlah Produksi Susu pada Tahun 2017 dengan target sebesar 454.492 ton dan terealisasi sebesar 517.097 ton atau 113,77 persen (mencapai target). Hal ini merupakan hasil dari kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun 2017 yaitu:

- 1) Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
- 2) Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak;
- 3) Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini (ISIKHNAS), peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- 4) Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif dan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Peternakan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

➤ Persentase Nilai Tambah Produk Peternakan (daging sapi) (%).

Persentase Nilai Tambah Produk Peternakan daging sapi pada Tahun 2017 dengan target sebesar 26 persen dan terealisasi sebesar 30 persen atau 115,38 persen (Mencapai target) Hal ini merupakan hasil dari kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun 2017 yaitu:

- 1) Pembinaan pasca panen kepada kelompok;
- 2) Pemberian bantuan alat pasca panen;
- 3) Fasilitasi Promosi produk peternakan;
- 4) Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Peternak, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

➤ Jumlah Kelompok Peternak yang Mengalami Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok (kelompok).

Jumlah Kelompok Peternak yang Mengalami Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok pada Tahun 2017 dengan target sebesar 74 kelompok dan terealisasi sebesar 74 kelompok atau 100 persen (mencapai target). Hal ini merupakan hasil dari kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun 2017 yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan manajemen kelompok agar dapat memenuhi syarat penerima kredit perbankan serta memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan oleh perbankan dengan bunga rendah kepada kelompok peternak;
- 2) Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- 3) Fasilitasi Promosi produk peternakan;

- 4) Pembinaan terhadap kelompok untuk mencapai prestasi tingkat regional maupun nasional.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Produksi Peternakan, dengan anggaran sebesar Rp 47.093.513.020,- dan terealisasi sebesar Rp 42.773.965.639,50,- atau 90,83%, untuk mendukung 33 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 2) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 470.128.600,- atau 94,03%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan, dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.850.711.343,- atau 95,02%, untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil dengan skala usaha terbatas dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian, kecuali pada komoditas usaha ternak sapi perah dan ayam ras yang sudah dijadikan usaha pokok keluarga;
- 2) Terbatasnya bibit serta rendahnya penguasaan teknologi dan informasi peternakan;
- 3) Belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga mengakibatkan mata rantai tataniaga peternakan panjang dan kurang efisien;

- 4) Masih tingginya prevalensi gangguan reproduksi pada ternak betina produktif sehingga memperlama waktu hewan ternak betina untuk bereproduksi;
- 5) Masih adanya pengeluaran hewan ternak secara ilegal.

Solusi:

- 1) Melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas dalam upaya meningkatkan kualitas bibit, permodalan, diversifikasi produk dan pemasaran hasil peternakan sehingga diharapkan adanya perubahan pola pikir dan gairah masyarakat untuk menjadi petani ternak yang berdaya saing;
- 2) Melakukan penanganan gangguan reproduksi dan pembinaan kepada peternak tentang pencegahan gangguan reproduksi pada ternak betina produktif.
- 3) Melakukan penguatan di kawasan check point melalui kerjasama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya ternak melalui jalur-jalur ilegal.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional 10 besar kelompok ternak berprestasi kategori “Komoditas Sapi Potong” pada Tahun 2017;
- 2) Mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional 10 besar kelompok ternak berprestasi kategori “Komoditas Kambing/Domba” pada Tahun 2017.

3. BIDANG URUSAN KEHUTANAN**3.1 DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR****a. Tujuan**

- 1) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan;
- 2) Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan.

b. Sasaran dan Program**Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4/3*100
1. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan	– Prosentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin (%)	6	7,74	129
	– Luas pengembangan hutan rakyat (Ha).	2.500	2.500	100
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	– Produksi kayu hutan negara (m3)	400.000	326.131,72	81,53
	– Produksi gerah pinus (ton)	30.000	32.531	108,44
	– Produksi getah damar (ton)	200	170	85
	– Produksi daun kayu putih (ton)	14.000	20.158	143,99
	– Produksi porang (ton)	2.000	2.868	143,4
2. Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan	– Prosentase penurunan luas kebakaran hutan (%)	5	-88,11	-100
	– Prosentase penurunan pencurian hasil hutan (%)	15	17,12	114,13
	– Luas kawasan hutan yang dikonservasi (Ha)	10.000	10.300	103
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	15	15	100
Program Rehabilitasi Sumber Daya Hut	Rehabilitasi kawasan hutan (Ha)	10.000	10.300	103

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Kehutanan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan

- Prosentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin.

Persentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin pada tahun 2017 dengan target sebesar 6% dan terealisasi sebesar 7,74% (capaian 129%).

Realisasi indikator prosentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin Tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut berkat kesadaran para pelaku industri untuk mengurus ijin usaha industri kayu. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan bimbingan teknis kebijakan peraturan industri hasil hutan. Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Jawa Timur, sebagai berikut :

- a) Tahun 2016, Jumlah IPHHK sebanyak 956 unit
 - b) Tahun 2017, jumlah IPHHK sebanyak 1.030 unit meningkat 74 unit (7,74%) dibanding tahun 2016.
- Luas pengembangan hutan rakyat

Luas pengembangan hutan rakyat pada tahun 2017 dengan target sebesar 2.500 Ha dan terealisasi sebesar 2.500 Ha (capaian 100%).

Realisasi indikator luas pengembangan hutan rakyat Tahun 2017 sesuai target yang ditetapkan. Tercapainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku IPHHK. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan bahan baku IPHHK sebelumnya dipenuhi dari kayu hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani dan dari kayu luar Jawa. Namun dalam kegiatan operasionalnya, IPHHK masih membutuhkan bahan baku kayu bulat dan kondisi tersebut ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu peluang untuk mengembangkan hutan rakyat. Masyarakat pada umumnya memilih jenis pohon yang memiliki daur pendek seperti sengon.

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan**➤ Prosentase penurunan luas kebakaran hutan**

Prosentase penurunan luas kebakaran hutan pada tahun 2017 dengan target sebesar 5% dan terealisasi sebesar -88,11% (capaian - 100%).

Realisasi indikator prosentase penurunan luas kebakaran hutan Tahun 2017 dibawah target yang ditetapkan. Faktor kebakaran yang terjadi di tahun 2017 disebabkan karena faktor alam dan manusia. Namun demikian upaya-upaya untuk menekan angka kebakaran tetap dilaksanakan seperti peningkatan kapasitas petugas pengamanan hutan, koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla), dan kampanye Perlindungan Hutan. Luas kebakaran yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Tahun 2016 terjadi kebakaran seluas 1.013,9 Ha yang tersebar di beberapa lokasi :
 - Perhutani Divre Jatim seluas 236,4 Ha
 - Balai Taman Nasional (BTN) Baluran seluas 777,5 Ha
- 2) Tahun 2017 terjadi kebakaran seluas 1.907,22 Ha meningkat 893,32 Ha (-100%) dibanding tahun 2016. Kebakaran hutan terjadi dibeberapa lokasi, sebagai berikut:
 - Perhutani Divre Jatim seluas 1.090 Ha
 - Tahura R. Soerjo seluas 410,4 Ha
 - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jatim seluas 42 Ha
 - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 76 Ha
 - Balai Taman Nasional Baluran seluas 283 Ha
 - Balai Taman Nasional Meru Betiri seluas 5,37 Ha

- Balai Taman Nasional Alas Purwo seluas 0,45 Ha

➤ Prosentase penurunan pencurian hasil hutan

Prosentase penurunan pencurian hasil hutan pada tahun 2017 dengan target sebesar 15% dan terealisasi sebesar 17,12 (capaian 114,13%)

Realisasi indikator prosentase penurunan pencurian hasil hutan Tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan dalam menurunkan angka pencurian hasil hutan berkat kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan dan meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang kehutanan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur seperti : operasi gabungan dan operasi rutin, peningkatan kapasitas petugas pengamanan hutan, apel siaga penegakan hukum kehutanan, dan penyuluhan kepada masyarakat penyangga kawasan konservasi.

Kasus pencurian hasil hutan yang terjadi di Jawa Timur, sebagai berikut :

- Tahun 2016, pencurian hasil hutan sebanyak 590 kasus.
- Tahun 2017, pencurian hasil hutan sebanyak 489 kasus menurun 101 kasus (17,12%) dibanding tahun 2016.

➤ Luas kawasan hutan yang dikonservasi

Luas kawasan hutan yang dikonservasi pada tahun 2017 dengan target sebesar 10.000 Ha dan terealisasi sebesar 10.300 Ha (capaian 103%).

Realisasi indikator luas kawasan hutan yang dikonservasi Tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan. Luas kawasan hutan yang dikonservasi pada Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan luas lahan hutan yang mengalami penurunan fungsi/terdegradasi yang umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan, pencurian kayu dll.

c. Program

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 19,161,676,882,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18,446,741,180,00 atau 96,27% untuk mendukung 25 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 6,066,183,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,988,247,696,00 atau 98,72% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 3) Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 586,803,118,00 dan terealisasi sebesar Rp. 532,516,362,00 atau 90,75% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi :**Permasalahan:**

- 1) Pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga keberadaan hutan khususnya kawasan konservasi cukup baik namun kondisi tersebut berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi hidupnya sehingga mendorong mereka melakukan pencurian hasil hutan
- 2) Jumlah petugas pelayanan pada obyek wisata alam Tahura R. Soerjo kurang memadai dibanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut sehingga berimplikasi pada layanan yang kurang optimal.

- 3) Kegiatan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh musim hujan sehingga proses pengadaan benih/bibit untuk kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.
- 4) Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal.
- 5) Masih banyak pengolah kayu bulat yang belum memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
- 6) Banyak pemegang IUIPHHK dengan kapasitas ijin di bawah 6.000 m³/th yang belum memiliki SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
- 7) Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun belum seluruhnya tertib administrasi pelaporan.
- 8) Sulitnya memberikan pemahaman kepada petani hutan rakyat terkait kewajiban mendapatkan SVLK/ PHBML bagi hutan rakyat yang akan menjual bahan baku ke Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah memiliki SVLK.
- 9) Kelembagaan Forest Management Unit (FMU) belum kuat.
- 10) Bagi pengelola hutan rakyat yang sudah mendapatkan SVLK/ PHBML masih belum merasakan manfaat langsung atas produk kayu tersebut (kayu yang bersertifikat seharusnya memiliki nilai lebih namun pada kenyataannya sama dengan kayu yang belum bersertifikat).
- 11) Kebijakan penilikan setiap 2 (dua) tahun bagi pengelola hutan rakyat yang mendapatkan SVLK sangat memberatkan dalam hal pembiayaan.
- 12) Harga kayu di tingkat petani masih rendah, harga optimal masih dikuasai tengkulak/ pedagang lokal.
- 13) Kelompok pengelola hutan rakyat belum seluruhnya memiliki jejaring usaha dalam memasarkan produk kayu.
- 14) Harga patokan sebagai dasar pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan belum menggambarkan kondisi riil harga kayu di petak hutan.

- 15) Jumlah Satuan Pengamanan Hutan dirasa masih minim untuk melakukan pengamanan kawasan Tahura R. Soerjo yang mencakup 43 desa penyangga yang tersebar di 6 kabupaten/kota.

Solusi:

- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan secara rutin pada masing-masing desa penyangga dan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya keberadaan kawasan konservasi. Khusus kepada masyarakat desa penyangga, perlu diberikan stimulan dalam bentuk hibah dan pendampingan untuk meningkatkan taraf hidup.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM petugas pelayanan obyek wisata alam yang dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap para pengunjung.
- 3) Kegiatan reboisasi yang dipengaruhi oleh faktor alam sulit untuk dialihkan ke waktu lainnya sehingga pelaksanaan reboisasi tetap seperti semula
- 4) Untuk medan yang cukup jauh dan sulit dijangkau menggunakan teknik reboisasi yang berbeda dengan medan yang mudah dijangkau, seperti menabur benih secara manual.
- 5) Menyelenggarakan sosialisasi perizinan secara simultan bagi IPHHK yang belum berizin.
- 6) Melakukan pendampingan SVLK industri secara berkelompok.
- 7) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara lebih intensif terhadap industri pemegang IUIPHHK yang belum tertib melaporkan kemajuan kegiatannya secara berkala.
- 8) Bekerjasama dengan Penyuluh Kehutanan lapangan, Dinas terkait dan tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman pentingnya SVLK/ PHBML bagi pengelola hutan rakyat.
- 9) Pentingnya dilakukan kegiatan yang mampu menguatkan kelembagaan FMU seperti pelatihan keterampilan manajerial bagi pengurus FMU agar

mampu menjalankan organisasi dan bisnis kelompok. Oleh karena itu, perlu dibentuk koperasi yang bertujuan menyejahterakan anggotanya.

- 10) Mengusulkan di setiap diskusi/FGD/seminar/rapat tingkat pusat/ daerah terkait SVLK, kepada instansi yang membidangi untuk membuat kebijakan penggunaan kayu yang bersertifikat dalam pengadaan barang konstruksi untuk pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah; meningkatkan keterampilan bagi pengelola hutan rakyat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) maupun PHBML agar bisa menciptakan produk yang berdaya saing, unik, memiliki kekhasan lokal untuk kebutuhan ekspor; memberikan modal bergulir berupa hibah sesuai kebutuhan masyarakat diantaranya pengolahan lahan di bawah tegakan dengan sistem *Agroforestry* dan proses pengolahannya, alat penggergajian kayu dll.
- 11) Pemerintah Pusat (Kementerian LHK) seyogyanya menyederhanakan peraturan terkait penilikan/ *survilient* bagi pengelola hutan rakyat ber-SLK; Mengusulkan biaya ke Kementerian LHK untuk biaya penilikan/ *survilient*. Mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk biaya penilikan/ *survilient* bagi kelompok yang kelembagaan usahanya belum terbentuk/ belum kuat.
- 12) Memberikan keterampilan bagi FMU terkait tata cara penaksiran volume, pembacaan tabel volume lokal, tata cara pembagian batang yang benar dan taksiran harga kayu.
- 13) Setiap tahun melakukan temu usaha antara kelompok yang memiliki SLK dengan pelaku usaha baik pelaku usaha hasil hutan kayu maupun non kayu (empon-empon, getah pinus, dsb); membentuk forum komunikasi FMU untuk jejaring usaha.
- 14) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya setiap semester melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan wajib bayar dalam penyusunan harga patokan sebagai dasar pengenaan PSDH/ DR (Provisi Sumber Daya Hutan/ Dana Reboisasi) sebagaimana diamanatkan dalam PP No 12 Tahun 2014.

- 15) Minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan dapat diselesaikan salah satunya dengan membentuk/ merekrut Satuan Pengamanan Hutan Swakarsa pada Desa Penyangga yang belum mempunyai Satuan Pengamanan Hutan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Terbaik I Penyuluh Kehutanan PNS yang dianugerahkan kepada HERY PRAMUDYA WIJAYA, S.Hut UPT PHW II Ponorogo.
- 2) Terbaik II Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dianugerahkan kepada KTH MARGO MULYO, Ds. Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang.
- 3) Terbaik III Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang dianugerahkan kepada NANANG ADI WIJAYA, SE, Ds. Gedangan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo.
- 4) Terbaik II Kader Konservasi Alam yang dianugerahkan kepada SUHARIYONO, S. Ap. Ds. Oro-Oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang
- 5) Terbaik II Kelompok Pecinta Alam yang dianugerahkan kepada RESACITA, Kab. Pamekasan.

4. BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

4.1 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Tujuan

- 1) Meningkatnya Ketersediaan dan Pengusahaan ketenagalistrikan;
- 2) Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang baik guna pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan pembangunan;
- 3) Terwujudnya pemanfaatan data kegeologian dan pengelolaan air tanah yang berkesinambungan;
- 4) Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang baik dan terwujudnya pelayanan Aparatur yang professional di sektor energy dan sumber daya mineral.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Terpenuhinya pasokan listrik dan energi khususnya bagi masyarakat tidak mampu, pedesaan dan terpencil	Rasio Elektrifikasi	89,00%	91,58%	102,90
1. Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	Peningkatan ketersediaan listrik dan energi	4000 KVA	4000 KVA	100,00
II. Meningkatkan pengusahaan pertambangan dan produksi mineral dan batuan, serta terjaminnya pengelolaan lingkungan pertambangan	Persentase Penyelesaian rekomendasi izin pertambangan	75%	74%	98,67
1. Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)	800 rekom	353 rekom	44,13
2. Meningkatkan pemanfaatan dan konservasi air tanah	1. Persentase pengusahaan air tanah yang berizin	80%	70,91 %	88,64
	2. Persentase desa sulit air yang mendapat bantuan sumur bor	2,5%	7,2%	288,00

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
3. Program Pengelolaan Air Tanah	Jumlah daerah sulit air yang mendapat fasilitas pemanfaatan air tanah	2 desa	2 desa	100,00

Pada tahun 2017 kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terpenuhinya pasokan listrik dan energi khususnya bagi masyarakat tidak mampu, pedesaan dan terpencil yaitu:

➤ Rasio Elektrifikasi (RE).

Rasio Elektrifikasi Jawa Timur pada tahun 2017 dengan target 89 % dan terealisasi sebesar 91,58 % dengan capaian kinerja 102,90 %. Hal ini dapat dicapai karena adanya sinergitas antara program Listrik Pedesaan yang dikelola oleh PLN dan program bantuan pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah dari Pemerintah provinsi Jawa Timur. Namun masih terdapat ketimpangan capaian RE antar kabupaten terutama kabupaten di Pulau Madura dan Kabupaten di Wilayah Tapal Kuda (Kabupaten Probolinggo, kabupaten Bondowoso dan kabupaten Situbondo).

Sasaran 2 : Meningkatkan pengusahaan pertambangan dan produksi mineral dan batuan, serta terjaminnya pengelolaan lingkungan pertambangan, yaitu :

➤ Persentase penyelesaian rekomendasi izin pertambangan.

Indikator persentase penyelesaian rekomendasi izin pertambangan pada tahun 2017 dengan target 75% dan terealisasi sebesar 74 % dengan capaian kinerja 98,67 %,

hal ini dikarenakan banyaknya permohonan WIUP yang dikembalikan karena terjadi tumpang tindih, kecepatan pemohon dalam melengkapi persyaratan dokumen yang dipersyaratkan dalam perizinan serta rekomendasi kesesuaian tata ruang dari kabupaten kota.

Sasaran 3 : Meningkatkan pemanfaatan konservasi air tanah, yaitu :

- Persentase pengusahaan air tanah yang berizin;
Indikator persentase pengusahaan air tanah yang berizin pada tahun 2017 dengan target 80,00 % dan terealisasi sebesar 70,91 % dengan capaian kinerja 88,64 %, hal ini dikarenakan pengusahaan air tanah belum semuanya melengkapi izin pengusahaan air tanah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Persentase desa sulit air yang mendapat bantuan sumur bor.
Indikator persentase desa sulit air yang mendapat bantuan sumur bor pada tahun 2017 dengan target 2,5 % dan terealisasi sebesar 7,2 % dengan capaian kinerja 288 %, melebihi target karena adanya koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM RI yang memiliki program pelayanan air bersih untuk masyarakat di daerah sulit air melalui pembangunan sumur bor air tanah yang sebagian diperuntukkan untuk daerah endemis kusta.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 3.619.731.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.289.656.228,00 atau 90,88 % didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom;

- 2) Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas dengan anggaran Rp 2.857.957.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.541.227.188,00 atau 88,92 %. didukung oleh 6 (enam) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom;
- 3) Program Pengelolaan Air Tanah dengan anggaran Rp. 1.880.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.806.242.315,00 atau 96,08 % didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pada Program Pengembangan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan: masih terdapat sebagian masyarakat di Jawa Timur yang belum terjangkau listrik terutama di daerah terpencil dan kurang mampu;
- 2) Pada Program Pengembangan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan: masih banyak masyarakat Jawa Timur yang tergolong dalam Rumah tidak layak huni yang belum tersambung listrik;
- 3) Pada Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas terdapat Keterbatasan sumber daya manusia yang menangani bidang pertambangan;
- 4) Pada Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas masih ada para pelaku usaha tambang kurang memahani peraturan perundangan dan kurang peduli terhadap teknik dan tata cara penambangan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya sehingga menyebabkan kegiatan usaha tambang sering menyebabkan kerusakan lingkungan;
- 5) Pada Program Pengelolaan Air Tanah adanya peningkatan intensitas pengambilan air tanah yang tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi secara memadai, serta kesadaran masyarakat terhadap pelestarian air tanah masih sangat rendah;

- 6) Pada Program Pengelolaan Air Tanah adanya penambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan bertambah kebutuhan air baku, maka pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan kegiatan pengendalian yang memadai dapat berdampak negatif pada lingkungan dan penurunan muka air tanah;
- 7) Pada Program Pengelolaan Air Tanah terjadi alih fungsi lahan daerah imbuhan air tanah, sehingga mengurangi daerah resapan air tanah;
- 8) Pada Program Pengelolaan Air Tanah masih terdapat masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih.

Solusi

- 1) Pada Program Pengembangan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan dengan meningkatkan rasioelektrifikasi (RE) di kabupaten kota yang memiliki RE di bawah rata-rata Jawa Timur dengan berkoordinasi dengan *stakeholder* kelistrikan dan memberikan bantuan pemasangan SR/IR bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan infrastruktur listrik di daerah yang belum terjangkau listrik;
- 2) Pada Program Pengembangan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan dengan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan sesuai dengan potensi energi dan karakteristik di masing- masing wilayah;
- 3) Pada Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan pertambangan;
- 4) Pada Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku pertambangan;
- 5) Pada Program Pengelolaan Air Tanah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi teknis dan pengambilan air tanah bersama-sama instansi terkait di Kabupaten/ Kota yang intensitas pengambilan air tanah tinggi;

- 6) Pada Program Pengelolaan Air Tanah dengan melaksanakan pemantauan muka air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Jawa Timur;
- 7) Pada Program Pengelolaan Air Tanah dengan meningkatkan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah di Jawa Timur sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dalam penerbitan SIPA.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Pada tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan “Efisiensi Energi”, tingkat Nasional ke-6 terpilih sebagai Juara II (dua).

5. BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN

a. Tujuan

Meningkatkan daya saing industri manufaktur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 x 100)
I. Meningkatnya kontribusi sektor industri, Standardisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	1. Prosentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	6,80%	5,69%	83,67%
	2. Prosentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	27,75%	29,03%	104,61%
	3. Prosentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Jawa Timur	84,50%	91%	107,69%
	4. Prosentase IKM yang telah menerapkan standardisasi dan HKI	8,00%	6,74%	84,25
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi untuk peningkatan daya saing.	1.317	1.294	98,25%
2. Program Penataan Struktur Industri.	Luas Kawasan Industri yang terpakai (Ha).	2.137	1.952,5	91,36%
3. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri.	Jumlah Jasa Pelayanan Teknis	3.250	4.741	145,87%
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah IKM yang mendapatkan Pembinaan dan pelatihan.	500	460	92,00%
5. Program Peningkatan Standardisasi Industri.	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standardisasi industri (unit)	2.420	2.264	93,55%
6. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam.	Nilai Produksi Industri Agro (Rp Trilyun)	240.22	258.42	107,57%

Pada tahun 2017 kinerja Bidang Perindustrian yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor industri, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

➤ Prosentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Prosentase pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2017 dengan target sebesar 6,8% dan terealisasi sebesar 5,69% atau 83,67 persen. Sedang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2017 (*c-to-c*) tumbuh 5,45 persen, sesuai dengan harapan bahwa pertumbuhan sektor industri masih diatas pertumbuhan ekonomi. Sedang industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi sebesar 29,03% dalam struktur PDRB Jawa Timur tahun 2017.

➤ Prosentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim

Prosentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB tahun 2017 dengan target sebesar 27,75% dan terealisasi sebesar 29,03% atau 104,61% persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 7,91 persen. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan 2017 terdorong oleh pertumbuhan sub sektor industri makanan dan minuman (31,69%) yang secara konsisten mencatat pertumbuhan tertinggi pada struktur industri pengolahan dari tahun ke tahun.

➤ Prosentase Kontribusi Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan terhadap Total Ekspor non-Migas Jatim

Prosentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non-migas Jatim pada tahun 2017 dengan target sebesar 84,50% dan terealisasi sebesar 91% atau 107,69 persen. Ekspor produk industri pengolahan selama tahun 2017 didominasi oleh ekspor golongan perhiasan/permata (16,8%) dan golongan lemak &

minyak hewan/nabati (7,57%). Dan diikuti oleh golongan kayu, barang dari kayu (7,06%).

➤ Prosentase IKM yang telah Menerapkan Standardisasi dan HKI

Prosentase IKM yang telah menerapkan standarisasi dan HKI pada tahun 2017 dengan target sebesar 8,00% dan terealisasi sebesar 6,74% atau 84,25 persen. Masa berlaku standarisasi dan HKI masih ada, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur melalui Program prioritas Peningkatan Standarisasi Industri berkomitmen kuat untuk terus memperluas standarisasi industri dalam rangka peningkatan daya saing industri Jawa Timur.

c. Program

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 8.512.197.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.997.007.442,- atau 93,95% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Penataan Struktur Industri, dengan anggaran sebesar Rp. 1.920.824.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.781.510.465,- atau 92,75% untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri, dengan anggaran sebesar Rp. 30.897.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.987.818,254,- atau 93,82% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan anggaran sebesar Rp. 1.187.949.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.043.780.655,- atau 87,86% untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-

masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 5) Program Peningkatan Standardisasi Industri, dengan anggaran sebesar Rp. 11.375.171.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.655.147.467,- atau 93,67% untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 6) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam, dengan anggaran sebesar Rp. 9.987.032.841,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.439.666.906,- atau 84,51% untuk mendukung 7 (tujuh) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pengembangan industri di Jawa Timur sehingga masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku impor serta pertumbuhan industri yang masih dibawah pertumbuhan ekonomi.
- 2) Data jumlah IKM agro dan non-agro belum akurat antara Provinsi dengan yang ada di daerah kabupaten/ kota.
- 3) Kebijakan Pemerintah tentang Pemberian Hibah Barang/Uang dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat , melalui UU Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2016, menjadi permasalahan karena Kelompok (KUB) yang sudah terseleksi untuk mendapatkan bantuan hibah mesin dan peralatan industri belum siap secara legalitas.
- 4) Pengembangan industri melalui pendekatan Klaster, OVOP, Komoditi Potensial/Kompetensi Inti Daerah dan Industri Kreatif belum sepenuhnya didukung oleh kabupaten/ kota. Peta Panduan atau *Roadmap* untuk Klaster

Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi belum optimal.

- 5) Adanya mutasi pejabat/staf baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program pengembangan terhadap IKM.
- 6) Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM pasca kegiatan secara menyeluruh.
- 7) Masih terbatasnya IKM yang dapat menggunakan program komputer untuk transfer teknologi seperti pembuatan gambar teknik/desain produk logam (Autocad dan Cadcam), sehingga produk yang dihasilkan tidak seluruhnya sesuai dengan permintaan/pesanan.
- 8) Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki IKM untuk mendapatkan SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri.
- 9) Terbatasnya kemampuan IKM dalam pengembangan/rekayasa teknologi dan desain produk terutama dalam pembuatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- 10) Masih banyak IKM yang melakukan produksi dengan tanpa memperhatikan masalah lingkungan (*green industry*) terutama pengrajin batik dan kulit.
- 11) Kurangnya pengembangan industri yang dikembangkan oleh IKM terhadap produk yang dihasilkan khususnya pada komoditi makanan minuman.
- 12) Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai bidang teknis sehingga pendampingan yang dilakukan kurang optimal.

Solusi :

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala berupaya meningkatkan substitusi bahan baku impor dan terus mengupayakan pengembangan industri primer (hulu) melalui pengembangan produktivitas agroindustri dan pengembangan IKM.
- 2) Proses pendataan tahun 2017 dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui pendataan industri oleh kabupaten/kota, kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan melalui pemanfaatan Tenaga Penyuluh Lapangan Kementerian Perindustrian. Agregasi data yang difasilitasi oleh Biro Administrasi

Pemerintahan dan Otonomi Daerah sangat membantu meskipun data industry dari Kab./Kota masih ada yang berbeda. Data ekspor impor Kab./Kota bisa diperoleh dari BPS pada tiap Kab./Kota.

- 3) Melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2016 kepada para Kelompok (KUB) penerima bantuan hibah mesin dan peralatan industri serta memfasilitasi mereka untuk mendapatkan legalitas.
- 4) Temu bisnis harus terus dilaksanakan agar terjadi kesamaan visi dan pandangan dalam pengembangan Klaster, OVOP, Kompetensi Inti Daerah serta industri kreatif. Industri Alas Kaki, Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Perkapalan, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi dan lainnya tertuang dalam RPIP (Rencana Pengembangan Industri Provinsi). Sehingga pihak yang terkait dapat mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengembangan klaster di Jawa Timur.
- 5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/aparatur terkait guna meningkatkan kemampuan dibidang teknis untuk pengembangan IKM.
- 6) Aparatur pada tingkat Kab./Kota serta pendamping dari Kementrian dapat dioptimalkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan. Serta perlunya koordinasi yang baik dengan Kab./Kota sehingga memiliki persepsi yang sama dalam pembinaan IKM.
- 7) Mensosialisasikan pelayanan PPSH dan Klinik Desain sebagai tempat konsultasi di bidang standardisasi & desain yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, baik oleh IKM maupun disperindag kabupaten/kota.
- 8) Sosialisasi dan pendampingan ISO dan SNI kepada IKM masih perlu selalu dilakukan. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak – pihak lain yang dapat memberikan fasilitasi SNI dan ISO kepada IKM. Termasuk HKI, HACCP, SOP, penerapan Gugus Kendali Mutu, 5S dan sejenisnya untuk mendukung proses produksi agar menghasilkan produk yang bermutu dan dapat diterima oleh konsumen.

- 9) Perlu terus dilakukan peningkatan pemahaman tentang pentingnya proses produksi dengan penggunaan pendekatan teknologi, baik teknologi terkini maupun teknologi tepat guna.
- 10) Pelatihan produksi dengan pendekatan *green industry* bagi pengrajin, mulai dari pemanfaatan limbah, seperti potongan kulit yang dimanfaatkan menjadi aksesoris sampai dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan, seperti pada batik yang menggunakan pewarna alam.
- 11) Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah – daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi. Terutama di sentra-sentra hasil pertanian. Perlu adanya dorongan investasi untuk membangun *industry intermediate* di Indonesia yang memproduksi bahan baku industri untuk menekan impor bahan baku industri serta adanya pemberian insentif terhadap ongkos angkut antar pulau yang dapat menekan *cost* produksi.
- 12) Perlunya kerjasama dengan instansi akademis/pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri. Selain itu perlu memaksimalkan keberadaan tenaga pendamping dari Kementerian atau Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil Menengah (TPL-IKM).

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Penghargaan Bidang Perindustrian yang diterima pada tahun 2017 yakni KREASI PRIMA MUTU TAHUN 2017, yang telah menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

- 1) CV. Esbas Toy's dari Pasuruan dengan produk Mainan anak-anak.
- 2) UD. Riga Bintang Cenderawasih dari Magetan dengan produk Kopi bubuk dan kopi sangrai.

BIDANG URUSAN PERDAGANGAN**a. Tujuan**

- 1) Meningkatkan kinerja ekspor non migas
- 2) Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 3) Meningkatkan tertib perdagangan

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3 x 100)
I. Meningkatnya net Ekspor non-migas Perdagangan Luar Negeri.	1. Nilai Net Ekspor non-Migas (Milyar US\$).	2,92	0,53	18,1%
	2. Persentase Pertumbuhan Ekspor non-Migas.	9%	2,43%	0,27
1. Program peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor.	Net Ekspor non-Migas.	2,92	0,53	18,1%
II. Meningkatnya net-Ekspor Perdagangan Dalam Negeri.	1. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan.	10,08%	6,26%	62%
	2. Persentase Kontribusi Sub-Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim.	24,75%	18,18%	73%
	3. Nilai Net-Ekspor Perdagangan Dalam Negeri (Rp. Triliun)	123,17	162,49	131,92%
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri (Rp. Triliun)	123,17	162,49	131,92%
III. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	1. Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk.	1,00%	0,25%	0,25%
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	1. Jumlah Standardisasi Mutu Barang dan Alat Ukur.	9.770	9.188	0,94%
	2. Jumlah barang yang diawasi	750	1.937	2,58%

Sasaran 1 : Meningkatnya Net Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ Nilai Net Ekspor Non-Migas

Nilai net ekspor non-migas pada tahun 2017 dengan target sebesar USD 2,92 Milyar dan terealisasi sebesar 0,53 Milyar atau 18,1 persen. Jumlah nilai ekspor non-migas tahun 2017 di Jawa Timur menyumbang sebesar 91,37% dari total ekspor. Meski nilai ekspor non-migas meningkat dari tahun sebelumnya namun nilai impor non-migas mengalami perubahan di tahun 2017 yakni meningkat sebesar 14,05% terhadap tahun 2016. Sehingga nilai ekspor non-migas tidak bisa mengimbangi nilai impor non-migas yang menyebabkan nilai net ekspor non-migas tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

➤ Persentase Pertumbuhan Ekspor non-Migas.

Persentase pertumbuhan ekspor non-migas pada tahun 2017 dengan target sebesar 9% dan terealisasi sebesar 2,43% atau 0,27 persen. Kelompok barang permata/perhiasan masih menjadi komoditi andalan dari Jawa Timur namun selama tahun 2017 mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 25,79%. Secara umum jumlah ekspor non-migas di Jawa Timur selama tahun 2017 (1,83 Milyar US\$) mengalami peningkatan sebesar 2,43% jika dibandingkan pada tahun 2016 (1,79 Milyar US\$).

Sasaran 2 : Meningkatnya net-Ekspor Perdagangan Dalam Negeri, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

➤ Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan pada tahun 2017 dengan target sebesar 10,08% dan terealisasi sebesar 6,26% atau 62 persen. Sub sector perdagangan selama tahun 2017 telah tumbuh cukup baik, meski masih di bawah angka target. Pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun ini masih lebih baik bila dibanding pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 5,81%.

- Persentase Kontribusi Sub-Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim

Persentase kontribusi sub-sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Jawa Timur di pada tahun 2017 dengan target sebesar 24,75% dan terealisasi sebesar 18,18% atau 0,73 persen. Sub sektor perdagangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Jawa Timur dengan memberikan kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Jawa Timur dari tahun ke tahun (rata-rata 17-18%).

- Nilai Net-Ekspor Perdagangan Dalam Negeri

Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri tahun 2017 dengan target sebesar Rp.123,17 triliun dan terealisasi sebesar Rp.162,49 triliun atau 131,92 persen. Dengan posisinya yang strategis sebagai poros/penghubung (*hub*) perekonomian kawasan Indonesia bagian timur dengan kawasan Indonesia bagian barat, komoditi seperti semen, minyak mentah, beras, sapi, rokok, gasoline, pakan ternak, telur dan lain sebagainya menjadi andalan Jawa Timur. Sehingga perdagangan dalam negeri Jawa Timur selalu mencatatkan nilai surplus setiap tahun, nilai yang masuk Jawa Timur lebih rendah (Rp.525,64 triliun), sedang yang keluar lebih tinggi (Rp.688,13 triliun).

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu:

- Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk

Pertumbuhan Sertifikasi Komoditi/Produk tahun 2017 dengan target sebesar 1,00% dan terealisasi sebesar 0,25% atau 0,25 persen. Di tahun 2016 ada 9.676 sertifikat yang dikeluarkan dan pada tahun 2017 terdapat 7.241 sertifikat. Kesadaran pelaku usaha industri terhadap pentingnya sertifikasi komoditi/produk sudah cukup baik. Terutama perusahaan yang bergerak di bidang produksi pangan (*consumer goods*) apabila ingin memiliki keunggulan dalam skala global diperlukan kemampuan dalam mewujudkan produk pangan yang bermutu, memiliki sifat aman, tidak membahayakan, sehat, higienis,

serta bermanfaat dan dapat diterima oleh konsumen guna mendukung besarnya sub sektor industri makanan dan minuman (31,69%). Termasuk barang-barang seperti pupuk, tembakau, kopi, karet serta kalibrasi suhu, dimensi, tekanan, massa, optik dan sejenisnya.

c. Program

- 1) Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor, dengan anggaran Rp. 12.135.519.000,- Realisasi sebesar Rp. 10.782.774.002,- atau 88,85% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan anggaran Rp. 19.819.547.000,- Realisasi sebesar Rp. 17.044.511.923,- atau 86,00% untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
- 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan anggaran Rp. 44.018.756.700,- Realisasi sebesar Rp. 36.718.956.828,- atau 83,42% untuk mendukung 14 (Empat Belas) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa hanya dilakukan monitoring B2 dan minol saja. Yg lain dilakukan oleh UPT-Perlindungan Konsumen pada tiap wilayah.
- 2) Menurunnya ekspor tembakau sehingga berdampak pada pelayanan UPT PSMB-LT Jember.
- 3) Belum terintegrasinya data perdagangan antar provinsi di Jawa Timur.

- 4) Kegiatan Standarisasi kualitas bahan baku di UPT PSMB-LT Surabaya terkendala pada jadwal akreditasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (KAN, Komite Akreditasi Nasional) sehingga harus menunggu jadwal dari pihak ketiga tersebut sebagai penyelenggara standarisasi.
- 5) Kegiatan penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian di UPT PSMB-LT Jember kurang optimal terkendala pada proses pengadaan mesin LCM-SMS.
- 6) Kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran baru bisa dilaksanakan kunjungan ke lapangan dan waktu pengumpulan hasil informasi pada bulan Oktober-Desember 2017.
- 7) Impor masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini dikarenakan kualitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, jikapun tersedia harga pada umumnya tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa kontinyu.
- 8) Kebutuhan akan hasil-hasil pertanian belum sepenuhnya tercukupi oleh produksi dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih dan lainnya.
- 9) Kurangnya daya saing produk dalam negeri menyebabkan semakin meningkatnya permintaan barang luar negeri yang mempunyai kualitas lebih baik, mengingat semakin membaiknya ekonomi masyarakat Jawa Timur.
- 10) Sumber Daya Manusia (SDM) belum mampu melaksanakan penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di tingkat perusahaan sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing.
- 11) Mahalnya biaya angkut antar pulau dibandingkan dengan biaya angkut luar negeri ikut mempengaruhi harga produksi dalam negeri sehingga masyarakat cenderung mengkonsumsi produk-produk luar negeri.
- 12) Sulitnya mengendalikan laju impor, dimana impor masih dominan pada bahan baku, bahan penolong, komponen industri, dan komoditi pertanian.
- 13) Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor

penyumbang inflasi diluar kendali Disperindag Prov. Jatim seperti tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan harga bahan bakar minyak.

- 14) Pelaksanaan temu usaha dagang dengan provinsi mitra dirasa belum optimal dikarenakan kurang siapnya provinsi mitra dalam melaksanakan temu usaha dengan kita.
- 15) Data bongkar dan muat di pelabuhan – pelabuhan laut di Jawa Timur belum dapat diketahui secara detail dikarenakan tidak adanya kerjasama informasi dengan pihak – pihak yang berwenang.
- 16) Sistem Resi Gudang belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh para petani Jawa Timur, dan komoditi yang dapat disimpan juga masih terbatas.
- 17) Perusahaan besar dan menengah sudah memiliki kesadaran untuk menjaga standardisasi alat ukurnya. Namun perusahaan kecil yang langsung berinteraksi dengan konsumen belum memiliki kesadaran untuk menera alat ukurnya.
- 18) Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporankan.
- 19) Belum adanya partisipasi dari dinas Perindustrian Kabupaten/Kota karena keterbatasan dana, sarana dan SDM. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap barang – barang beredar menjadi terbatas.
- 20) Masih banyaknya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai, karena harganya murah.
- 21) Penerapan standardisasi mutu produk masih terkendali oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang informasi standardisasi produk.
- 22) Masih banyaknya barang produksi China yang beredar. Masih banyaknya komoditi lokal maupun impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Termasuk banyaknya barang tiruan/palsu yang beredar di Pasar.

Solusi

- 1) Perlu koordinasi antar Bidang dan UPT terkait pengawasan barang dan jasa sehingga pelaksanaan dapat lebih optimal. Dan semua pihak dapat melaksanakan

tugasnya masing-masing. Sehingga koordinasi wajib dilaksanakan untuk mendukung program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

- 2) Kegiatan standarisasi kualitas bahan baku di UPT PSMB-LT Jember terkendala dengan menurunnya ekspor tembakau sehingga berdampak pada pelayanan UPT PSMB-LT Jember. Sisa anggaran merupakan efisiensi yang harus dikembalikan kepada negara.
- 3) Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP) yang melibatkan banyak stake holder mulai dari BPS hingga otoritas pelabuhan masih on progress. Keterkaitan kebijakan dengan pusat terutama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan masih menjadi kendala dilaksanakannya sistem tersebut. Saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar sistem dapat berjalan dengan baik.
- 4) Terus berkoordinasi dengan pihak ketiga (KAN, Komite Akreditasi Nasional) agar bisa diperoleh jadwal yang sesuai. Sehingga pengalihan anggaran digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana UPT PSMB-LT Surabaya.
- 5) Pengajuan lelang agar dipersiapkan dan dilengkapi lebih awal. Sehingga pada tahun berjalan bisa digunakan sebagai pelayanan UPT PSMB-LT Jember.
- 6) Melakukan sinergisitas program kegiatan dengan pemerintah kabupaten/kota lebih intensif dan dilakukan pada awal – awal tahun anggaran, bila perlu dilakukan dalam periode waktu tahun sebelumnya;
- 7) Meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan pelatihan atau magang pada institusi yang lain.
- 8) Perlu upaya strategis untuk meningkatkan nilai ekspor, berupa pembukaan pasar ekspor baru di daerah Afrika dan Amerika Selatan, maupun peningkatan daya saing komoditi industri potensial untuk diekspor.
- 9) Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan.
- 10) Melakukan temu bisnis dengan provinsi lain guna menekan impor bahan baku, bahan penolong, dan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
- 11) Mengembangkan industri intermediate guna menekan impor bahan baku industri yang permintaannya masih cukup tinggi.

- 12) Tim Pengendali Inflasi Jawa Timur perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi.
- 13) Guna menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan temu usaha dengan provinsi mitra, diharapkan pelaksanaannya dilakukan setelah data mitra usaha di kedua provinsi tersedia.
- 14) Perlu adanya koordinasi yang sifatnya vertikal antar pemangku kepentingan guna mendapatkan data yang detail dan akurat seperti BPS, Bank Indonesia, Bea Cukai, PT. Pelindo, Dinas Perhubungan, dan Disperindag.
- 15) Agar resi gudang benar-benar bermanfaat bagi petani dalam menyimpan barang dan bermanfaat dalam menjaga keseimbangan stock barang, maka selain sosialisasi, kemauan petani dalam pemanfaatan Sistim Resi Gudang perlu ditumbuhkan.
- 16) Sosialisasi terhadap standardisasi masih akan dilakukan sampai timbul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukur dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
- 17) Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan penertiban alat takar dan ukur sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang takar dan ukur serta dapat melaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika terjadi kecurangan pengukuran.
- 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar melalui penyediaan dana pengawasan maupun peningkatan SDM pengawasan.
- 19) Perlunya dilakukan pembatasan dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran rokok tanpa cukai.
- 20) Perlunya sosialisasi tentang standardisasi mutu produk sesuai Standar Nasional Indonesia bagi beberapa produk terutama produk-produk elektronik, sehingga ada jaminan bagi konsumen agar tetap aman dalam menggunakan produk dari luar negeri.
- 21) Sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI), perlu terus dilakukan kepada para pelajar. Selain itu Pengawasan terhadap peredaran komoditi impor China akan terus

dilakukan untuk menjamin bahwa barang yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

- 22) Meningkatkan pengawasan dan pengamanan barang beredar dan jasa melalui kinerja perlindungan konsumen serta pelaksanaan standarisasi mutu barang.

3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1 BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum, daerah dan desa.
- 2) Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa	Urusan pemerintahan dalam LPPD Prov. Jatim yang capaian kinerjanya berpredikat Sangat Tinggi	10 Urusan	11 Urusan	110
	Kabupaten/Kota se-Jatim yang capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpredikat Sangat Tinggi	18 Kab/Kota	20 Kab/kota	90
	Prosentase penyelesaian masalah tanah kas desa yang terfasilitasi	100	100	100
	Prosentase desa yang menerima Bantuan Keuangan Desa (BKD) Prov. Jatim	100	93,42	93,42
Program Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Prosentase tersedianya dokumen tata kelola pemerintahan yang baik	95,01	96	96

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.	Presentase pilkada yang terfasilitasi	100	100	100
	Presentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi/Kab/Kota di Jawa Timur yang terfasilitasi	100	94,82	94,82
Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi	Jumlah fasilitasi pilkada dan wakil kepala daerah di provinsi jawa timur	1 pilkada	1 pilkada	100

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa

- Urusan pemerintahan dalam LPPD Prov. Jatim yang capaian kinerjanya berpredikat Sangat Tinggi dengan target sebesar 10 urusan dan terealisasi sebesar 11 urusan atau 110 % (mencapai target). Pencapaian target dimaksud dikarenakan pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah urusan pemerintahan dalam LPPD tahun 2016 yang berpredikat kinerja sangat tinggi sebanyak 1 urusan dari tahun sebelumnya yakni urusan KB & KS.
- Kabupaten/Kota se-Jatim yang capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpredikat Sangat Tinggi dengan target sebesar 18 Kabupaten/kota dan terealisasi sebesar 20 kabupaten/kota atau 90 % (melebihi target). Peningkatan jumlah kabupaten/kota tersebut dikarenakan fasilitasi

yang intens terhadap kabupaten/kota yang pada tahun kemarin berkinerja Tinggi” sebanyak 2 kabupaten yakni Kab. Sumenep dan Kab. Gresik.

- Prosentase penyelesaian masalah tanah kas desa yang terfasilitasi dari target 100% dan terealisasi 100% atau 100% dikarenakan selama kurun waktu Tahun 2017, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan sebanyak 2 (dua) Surat Gubernur tentang Persetujuan Pelepasan dan/atau Tukar Menukar Tanah Milik Desa dari 2 usulan pelepasan tanah kas desa (100 % terfasilitasi).
- Prosentase desa yang menerima Bantuan Keuangan Desa (BKD) Prov. Jatim dari target sebesar 100% dan terealisasi 93,42% (tidak memenuhi target) dikarenakan terdapat 21 desa yang tidak mencairkan BKD Prov. Jatim dari target penerima sebanyak 315 desa. Hal tersebut dikarenakan :
 - 1) Terjadi doublename sehingga diproses salah satu;
 - 2) Calon penerima BKD atas nama kelurahan
 - 3) Tidak jelas lembaganya
 - 4) Tidak hadir pada saat verifikasi data sampai dengan undangan ke 3 (terakhir)
 - 5) Tidak memenuhi berkas kelengkapan persyaratan pencairan sampai dengan surat tagihan yang terakhir tanggal 31 agustus 2017
 - 6) Tidak mengajukan pencairan disebabkan kepala desanya tersangkut masalah hukum

Sasaran 2 : Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

- Prosentase usulan Pelantikan kepala daerah yang terfasilitasi dengan target sebanyak 100% dan terealisasi 100 % dikarenakan

dari usulan pelantikan kepala daerah sebanyak 1 usulan telah terfasilitasi semua antara lain :

- 1) Pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2017 di Kota Batu pada tanggal 15 Pebruari 2017 (Pemilihan Walikota / Wakil Walikota Batu).
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan 7 Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan pengambilan sumpah/jabatan dan pelantikan serta penunjukkan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah.
- 3) Pengambilan Sumpah / Jabatan dan Pelantikan Walikota/ Wakil Walikota Batu masa jabatan 2017 – 2022 terpilih pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Gedung Negara Grahadi berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.35-3173 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.35-3174 Tahun 2017 Tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Batu Provinsi Jawa Timur;
- 4) Pengambilan Sumpah / Jabatan dan Pelantikan Bupati Sampang sisa masa jabatan Tahun 2013 – 2018 pada tanggal 6 Juli 2017 bertempat di Gedung Negara Grahadi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.35-3303 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Sampang Provinsi Jawa Timur.
- 5) Pengambilan Sumpah / Jabatan dan Pelantikan Walikota Madiun sisa masa jabatan tahun 2014 – 2019 pada tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Gedung Negara Grahadi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.35-3514 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur.
- 6) Pengambilan Sumpah / Jabatan dan Pelantikan Wakil Walikota Madiun sisa masa jabatan tahun 2014 – 2019 pada tanggal 26

- Oktober 2017 bertempat di Gedung Negara Grahadi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.35-8146 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur .
- 7) Penunjukan Wakil Bupati Sampang untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sampang berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur No.131/616/011.2/2017 Tanggal 21 April 2017 yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi pada Tanggal 21 April 2017.
- 8) Penunjukan Wakil Walikota Batu untuk melaksanakan tugas dan wewenang Walikota Batu berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur No.131/1056/011.2/2017 Tanggal 18 September 2017 yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi pada Tanggal 18 September 2017.
- 9) Penunjukan Wakil Bupati Pamekasan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pamekasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur No.131/1373/011.2/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 yang dilaksanakan di Ruang Kerja Gubernur Jawa Timur pada Tanggal 11 Agustus 2017.
- 10) Penunjukan Wakil Bupati Nganjuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur No.131/512/011.2/2017 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi pada Tanggal 27 Oktober 2017.
- 11) Melaksanakan fasilitasi usulan pensiun mantan Walikota Madiun masa jabatan 2014 – 2019 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No: 131.35-8671 Tahun 2017 Tanggal 3 Desember 2017 tentang Pensiun Pokok H.Bambang Irianto, SH,MM (Mantan Walikota Madiun), Mantan Bupati Sampang masa jabatan 2013 – 2018 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No: 131.35-8530 Tahun 2017 Tanggal 7 November 2017 tentang Pensiun Pokok Drs.A.Fanan Hasib (Mantan Bupati Sampang).

- 12) Memfasilitasi izin keluar negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 34.
 - 13) Memfasilitasi izin Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017 bagi 18 Bupati/Walikota yang terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015.
 - 14) Melaksanakan rapat koordinasi sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
- Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang terfasilitasi sebanyak 55 SK PAW sudah terselesaikan atau 94,82 % antara lain :
- a. Prosentase peningkatan Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah terfasilitasi sebanyak 58 usulan anggota DPRD Kabupaten/Kota telah diterbitkan 55 SK Gubernur Jawa Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu dari 57 usulan yang masuk ke Provinsi, masih terdapat 3 usulan yang belum dapat diproses dikarenakan masih terjadi sengketa di internal partai sehingga ada gugatan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. SK Gubernur Jawa Timur tentang :
 - 1) Pemberhentian Pimpinan DPRD Kab/Kota sebanyak : 4 orang
 - 2) Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota sebanyak : 21 orang
 - 3) Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kab/Kota sebanyak : 5 orang
 - 4) Pengangkatan Pegganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota sebanyak : 25 orang

- b. Prosentase terfasilitasinya izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak sebesar 95 % (20 usulan) terfasilitasi 19 hanya 1 usulan yang tidak dapat diproses karena usulan yang dikirim telah terlambat.
- c. Melaksanakan rapat koordinasi tentang terkait pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu, pencalonan anggota DPRD menjadi Bupati/Walikota pada pilkada serentak 2018, tata tertib DPRD dari 23 kunjungan kerja DPRD telah terfasilitasi semua.
- d. Melaksanakan rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

c. Program

- 1) Program penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan anggaran sebesar Rp. 14.193.343.500,- dan terealisasi sebesar Rp12.698.642.624,- Atau 89,47 % untuk mendukung 12 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom
- 2) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi , dengan anggaran Rp 1.703.204.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.674.897.176,- atau 98,34 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

I. Program penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Kegiatan terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan peringatan hari jadi

Pada Tahun 2017 penyelenggaraan peringatan Hari Jadi ke 72 Provinsi Jawa Timur dilaksanakan kegiatan rutin dan kegiatan yang berhubungan dengan budaya dan kegiatan yang mengeksplorasi pengetahuan dan ilmu pengetahuan sesuai tema Hari Jadi ke 72 Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, dengan diselenggarakannya Upacara Hari Jadi, Pasar Seni Lukis, Festival Seni Barongan, Jalan Sehat, dan Pagelaran Wayang Kulit.

2) Pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Masih terdapat 5 Aset Asing Milik Tiongkok (ABMA/T) di wilayah Jawa Timur yang belum ditegaskan statusnya menjadi Barang Milik Daerah (BMD).

3) Pengembangan kapasitas kecamatan

Baru 15 Kabupaten/Kota dari total 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang sudah menerapkan kebijakan Pelayanan Adm. Terpadu Kecamatan (PATEN); Masih banyak Kecamatan yang belum memenuhi syarat administrative PATEN sesuai Permendagri No. 4 Tahun 2010 ttg Pedoman PATEN Pelayanan administrasi pembebasan tanah untuk kepentingan umum

4) Pengembangan administrasi pemerintah desa

Kemampuan sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Desa masih kurang dalam mengikuti perkembangan IT.

Kurangnya anggaran dalam mencukupi kebutuhan peralatan informasi dan teknologi berbasis teknologi.

5) Pembekalan/Bimtek Kades/BPD se-Jatim

Perlu adanya penyamaan pemahaman kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, menghimpun informasi dan data –data peningkatan kapasitas Kades, Perangkat Desa pada RPJM dan RPJMKDesa.

Sehubungan dengan meningkatnya dana desa, maka SDM Aparatur Pemerintahan Desa harus ditingkatkan melalui SISKEUDES (Sistem pengelolaan keuangan desa) yang didalamnya terdapat pengelolaan keuangan desa termasuk pengadaan barang dan jasa dengan rapat koordinasi 1 kali rapat.

6) Pembinaan dan Monitoring pembangunan desa/kel

Masih diperlukan peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU Nomor: 6 Tahun 2014.

7) Penyusunan data administrasi wilayah, kode daerah dan toponimi

Masih terdapat 18 kabupaten/kota yang belum melakukan update data pembakuan nama rupabumi buatan di wilayahnya dikarenakan minimnya anggaran di kabupaten dan terkendala pemahaman tentang perlunya toponimi kepada Legislatif.

8) Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah

9) Monitoring dan evaluasi P3D

Pada penyelesaian P3D di 38 Kabupaten/Kota ternyata ada perubahan data yang tidak sesuai sehingga dilakukan konsolidasi di 38 Kabupaten/Kota terutama pada dinas pendidikan di kab/kota.

10) Penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan.

➤ Ketidakjelasan Undang-Undang Pembentukan:

Salah satu penyebab yang menonjol terdapat pada UU pembentukan Pemda, klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan daerah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah B dst. (sehingga muncullah perbedaan penafsiran antar UU, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidakjelasan peta lampiran).

➤ Perebutan SDA:

Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa.

➤ Pelayanan Publik:

Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan.

11) Penyusunan LPPD

Dari target 18 kabupaten/kota yang terealisasi ada 20 kabupaten/kota jadi masih terdapat 18 kabupaten/kota yang capaian kinerja laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) masih “Tinggi” sehingga perlu didorong untuk ditingkatkan capaian kinerjanya;

Belum ada suatu sistem informasi yang memudahkan penyusunan LPPD Provinsi Jawa Timur dan terpadu dengan sistem informasi LPPD milik Kabupaten/kota;

II. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi dengan 2 kegiatan antara lain :

1) Monitoring dan Evaluasi Pilkada Provinsi, Kabupaten/Kota

- Untuk pengajuan ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui gubernur seringkali mendekati tanggal keberangkatan. Padahal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2003, pasal 4 huruf d menegaskan bahwa permohonan ijin disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI selambat-lambatnya 14 hari sebelum keberangkatan.

2) Penyelenggaraan PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

- Masih adanya sengketa internal di partai politik mengakibatkan usulan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur belum dapat diproses.
- Masih ada anggota/pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang mengajukan ijin ke luar negeri dengan alasan penting kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Jawa Timur seringkali terlambat karena usulan yang dikirim ke Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah selalu mendekati tanggal keberangkatan. Hal ini tidak sesuai dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 116 tahun 2003 pasal 4 huruf d ditegaskan 14 hari sebelum keberangkatan.

Solusi

- 1) Pelaksanaan peringatan hari jadi
- 2) Pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Jawa Timur melalui monev terpadu dalam mempercepat penyelesaian ABMA/T menjadi BMD di Kabupaten/Kota.
- 3) Pengembangan kapasitas kecamatan
 - Meningkatkan fasilitasi terhadap kabupaten/kota yang belum memenuhi persyaratan PATEN serta mendorong percepatan PATEN melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Melaksanakan pelatihan kepada aparatur kecamatan untuk membuat item-item yang dipersyaratkan dalam
- 4) Pelayanan administrasi pembebasan tanah untuk kepentingan umum
- 5) Pengembangan administrasi pemerintah desa
 - Meningkatkan motivasi aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi dan Informasi

- 6) Pembekalan/Bimtek Kades/BPD se-Jatim
- 7) Pembinaan dan Monitoring pembangunan desa/kel
- 8) Penyusunan data administrasi wilayah, kode daerah dan toponomi
 - Mendorong Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur untuk menganggarkan dalam APBD TA 2018 terkait Menindaklanjuti SE Mendagri No.125.4/3619/SJ tanggal 11-8-2017 terkait Sinergi Program dan Kegiatan Bidang Pembakuan dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - Mendorong percepatan Kabupaten/Kota untuk membakukan nama rupabumi melalui kebijakan Gubernur Jawa Timur dan pedoman / petunjuk teknis penamaan rupabumi unsur alami dan buatan
- 9) Monitoring dan evaluasi P3D
 - Telah diselesaikan 24 kabupaten/kota yang terealisasi pada P3D yang telah mengalami perubahan.
- 10) Penyusunan LPPD
 - Perlunya peningkatan Pembinaan kepada Kab/Kota dalam penyusunan LPPD sehingga tersaji data yang menggambarkan Kinerja Pemda sesungguhnya bukan berdasarkan Data dari BPS.
 - Perlu membuat sistem informasi LPPD yng terintegrasi dengan Kabupaten/Kota;
 - Mengintensifkan pembinaan kepada Pemda agar dapatnya meningkatkan kinerja pemerintahan sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja LPPD;

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha ke-dua atas capaian kinerja LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara 3 tahun berturut (2013 s.d 2015) menempati posisi teratas secara nasional. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri RI kepada

Gubernur Jawa Timur pada saat puncak peringatan hari otoda XXI Tahun 2017 di Kab. Sidoarjo;

- 2) Penghargaan Menteri Dalam Negeri RI kepada Pemprov Jatim atas percepatan penegasan batas daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur secara nasional. Penghargaan dimaksud diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 bertempat di The Sultan Hotel Dan Residence Jakarta pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2017.

3.2 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial

b. Sasaran dan Program

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJASASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	1. Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial	100 %	98,77%	98,77%
	2. Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kemasyarakatan	100 %	91,47 %	91,47 %
1. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase pelaksanaan kegiatan hari besar	100 %	102,57%	102,57%
	2. Persentase pelaksanaan kegiatan Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan	100 %	69,17%	69,17%
	3. Persentase pelaksanaan kegiatan Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum	100 %	81,54%	81,54%
	4. Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan bencana	100 %	92,51%	92,51%
	5. Persentase pelaksanaan kegiatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	100 %	89,77%	89,77%
	6. Persentase pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi	100%	92,33%	92,33%
2 Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan kegiatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah	100%	94,42%.	94,42%.
	2. Persentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan	100%	95,31%.	95,31%.

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJASASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
	3. Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	100%	94,59%.	94,59%.
	4. Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga	100%	90,64%.	90,64%.
	5. Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	102,63%.	102,63%.
	6. Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	100%	91,65%.	91,65%.
	7. Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	100%	90,77%.	90,77%.
	8. Presentase pelaksanaan kegiatan Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Masyarakat	100%	85,61%.	85,61%.

Pada Tahun 2017 kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : “Meningkatnya pelayanan Administrasi Kesejahteraan Sosial di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana” ditetapkan 2 indikator Kinerja yaitu :

➤ Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial

Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 98,77 % (masih belum mencapai target) namun telah menghasilkan rumusan kebijakan bagi kabupaten / kota.

➤ Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Masyarakat

Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kemasyarakatan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 91,47% (masih belum mencapai target) namun telah menghasilkan rumusan kebijakan bagi kabupaten / kota.

c. Program

- 1). Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp.6.805.415.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.469.284.782,00 atau 95,06 %, untuk mendukung 6 kegiatan yang secara rinci realisasi masing – masing kegiatan terdiri realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2). Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.24.982.536.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.084.949.176,00 atau 92,40% untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci realisasi masing – masing kegiatan terdiri realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Dalam menangani Permasalahan Sosial, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penanganan secara konkrit dan terukur, berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota se Jawa Timur dengan harapan untuk merealisasikan visi misi Bapak Gubernur.
- 2) Perlunya sinkronisasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masing – masing bagian pada Perangkat Daerah dan adanya komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga dapat terealisasi secara sinergi dan menyeluruh.
- 3) Perlu Peningkatan Kualitas Guru Madin
 - Sebagian Perguruan Tinggi Agama belum terakreditasi dan Perguruan Tinggi tersebut tidak bergerak untuk mengurus proses akreditasi, sehingga berakibat terhadap tidak diakuinya lulusan perguruan tinggi yang bersangkutan

- Kurangnya Kompetensi Guru Madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran baik kompetensi kepribadian; akademik; pedagogik maupun sosial
 - Banyaknya Guru-guru Madrasah Diniyah di lingkungan Pondok Pesantren yang masih belum mencapai jenjang pendidikan Strata satu (S1)
 - Sebagai upaya memberantas angka buta huruf di Jawa Timur
- 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi zakat di Jawa Timur dan belum optimalnya Lembaga Sosial Keagamaan dalam meredam tumbuhnya paham-paham keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik
 - 5) Masih terbatasnya jumlah lembaga Pendidikan Inklusi di Kab/Kota di Jawa Timur, masih kurangnya tenaga pengajar pada lembaga pendidikan PAUD dan sebagian besar belum memperoleh pelatihan sesuai dengan peraturan dan kurikulum pendidikan PAUD, belum semua lembaga pendidikan menerapkan/memberikan kurikulum/mata pelajaran tentang Pendidikan Karakter
 - 6) Belum adanya rumusan kesepahaman tentang ruang lingkup kebijakan kepemudaan dalam konstelasi Pembangunan Daerah Jawa Timur dan belum adanya pemetaan pembinaan serta pelaksanaan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
 - 7) Masih kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah PPPA Kab/Kota dengan Perangkat Daerah Provinsidalammelaksanakan rumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adanya diskriminasi gender yang berakar pada nilai-nilai agamis dan kultur budaya belum disadari masyarakat sebagai permasalahan.
 - 8) Perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder dan Kabupaten / Kota guna pengembangan dan pelestarian budaya dan pariwisata di Jawa Timur.

Solusi

- 1) Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan koordinasi dan penanganan permasalahan sosial di Jawa Timur serta Koordinasi dan penanganan bencana. Penanganan pasung, penanganan kejadian bencana,

penanganan permasalahan sosial di Jawa Timur dan Lanjut Usia didukung kegiatan rapat koordinasi dengan Kabupaten / Kota.

- 2) Dilaksanakan kegiatan Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum, didukung kegiatan Rapat sinkronisasi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan dan penanganan Transmigrasi.
- 3) Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan Persentase pelaksanaan kegiatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat didukung kegiatan rapat koordinasi dengan Kabupaten / Kota.
- 4) Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Guru Madin dengan mendorong dan memotivasi perguruan tinggi agama agar segera mengurus akreditasi, dan perlu dibuatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PTKI untuk menyelenggarakan program peningkatan kualitas Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur dengan pelatihan - pelatihan yang diselenggarakan workshop Guru Madrasah Diniyah dan mensinergikan program pelaksanaandan perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan dalam pengelolaan zakat di Jawa Timur dengan melakukan sosialisasi UU pengelolaan zakat secara intensif ke BAZ dan LAZ
- 5) Dilaksanakan kegiatan dan rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendukung tercapainya program dengan meningkatkan kualitas pengajar, menghimpun berbagai input pemikiran konstruktif dan konsep-konsep kreatif dari para pakar dan praktisi dalam rangka mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan di Jawa Timur dan melakukan sinkronisasi dan mensinergikan pelaksanaan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga di Jawa Timur.
- 6) Pelaksanaan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan koordinasi Perangkat Daerah dan

Kabupaten / Kota tentang percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender serta mensosialisasikan tentang kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Anak melalui para Tokoh Agama di Jawa Timur.

- 7) Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan berkoordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder dan Kabupaten / Kota guna pengembangan dan pelestarian budaya dan pariwisata di Jawa Timur.

3.3. BIRO HUKUM

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas produk hukum agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Meningkatkan kemampuan aparat sehingga mampu menangani setiap perkara di pengadilan, memberikan bantuan hukum dan HAM;
- 3) Meningkatkan pelayanan informasi dibidang hukum sehingga masyarakat dengan mudah, cepat, tepat dan akurat dalam mengakses.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum dan HAM	Produk Hukum Provinsi	60	103,87	95,91 %
1. Program Pembentukan Produk Hukum	Persentase ketepatan waktu pembentukan produk hukum Jawa Timur	60	103,87	173 %
2. Program Profesionalis me Bagi Aparat Hukum	Prosentase ketepatan waktu penanganan perkara	80	183,70	229,63 %
3. Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum	Prosentase ketepatan waktu upload produk hukum melalui website	80	98,81	124 %

Pada Tahun 2017 kinerja Biro Hukum yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Hukum dan HAM, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu :

- Persentase Ketepatan Waktu Pembentukan Produk Hukum Jawa Timur pada Tahun 2017 dengan target sebesar 60, dan terealisasi sebesar Pergub/Kepgub atau 95,91 persen ;
- Persentase Ketepatan Waktu Penanganan Perkara pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80 dan terealisasi sebesar 183,70 atau 229,63 persen ;
- Persentase Ketepatan Waktu Upload Produk Hukum Melalui Website pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80 dan terealisasi sebesar 98,81 atau 124 persen.

c. Program

- 1) Program Pembentukan Produk Hukum dengan anggaran Rp.4.067.734.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.901.187.900,00 atau 95,91 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.
- 2) Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum dengan anggaran Rp.2.289.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.038.122.814,00 atau 89,01 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.
- 3) Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum dengan anggaran Rp.1.974.695.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.921.849.472,00 atau 97,32 % untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

- 1) Masih banyak rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dalam Prolegda masih berupa judul saja sehingga waktu akan

dibahas oleh Komisi Pembahas DPRD, pengusul dari DPRD tidak siap dalam menyusun naskah akademik maupun konsep rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

- 2) Terlalu lama proses pembahasan di DPRD.
- 3) Terlalu lama proses fasilitasi dan evaluasi Raperda di kemendagri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- 4) Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota untuk setiap tahunnya tidak dapat selesai 100%. Hal ini disebabkan Raperda disampaikan ke Biro Hukum masih terdapat pada akhir bulan Desember, sehingga karena waktu yang terbatas maka Raperda tersebut tidak dapat selesai difasilitasi/dievaluasi pada tahun berkenaan, dan terpaksa difasilitasi atau dievaluasi pada bulan Januari tahun berikutnya, sedangkan pada awal Januari pun belum dapat segera dilakukan kegiatan fasilitasi/evaluasi karena anggaran belum cair.
- 5) Hasil Evaluasi Raperda oleh Tim Evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku selalu dikonsultasikan kepada Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi hasil konsultasi tersebut sebagian besar tidak mendapat jawaban dan walaupun ada jawaban, turunnya cukup lama yaitu berbulan-bulan dan melebihi batas waktu 15 hari kerja sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Dana APBD Murni sebesar Rp 1.728.054.000,- untuk pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dan Tim Evaluasi hanya mencukupi sampai akhir Triwulan III sedangkan kekurangannya Triwulan ke IV sebesar Rp 200.000.000,- tergantung pendanaan pada PAPBD.
- 7) Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 sampai saat ini belum disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Jember dengan Bupati Jember dikarenakan penempatan Anggaran Program dan Kegiatan sebesar Rp 125.000.000.000,- belum disepakati oleh DPRD Kabupaten Jember dengan Bupati Jember. Akibatnya Perda Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2018 belum dapat ditetapkan,

yang akan mengakibatkan program pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dilaksanakan.

- 8) Terkait kegiatan siaran sosialisasi melalui TVRI/RRI berbeda dengan tahun lalu karena Tahun 2016 mulai diberlakukan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 9) Jumlah perkara yang ditangani tidak dapat diprediksi, karena bergantung pada jumlah gugatan yang masuk/ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga berpengaruh pada penetapan anggaran.
- 10) Dalam menyusun saran/pertimbangan hukum yang baik, diperlukan data informasi dan referensi yang relevan untuk dikaji, dianalisa dan disusun secara sistematis.
- 11) Dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, maka jumlah Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan menurun, hal ini dikarenakan indikator yang semakin banyak dan juga adanya pergantian Perangkat Daerah pelaksanaan di daerah
- 12) Dalam Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mengalami beberapa kendala, yakni Sumber Daya Manusia tidak memahami pengelolaan website, sering terjadi serangan Hacker dan kurang personil yang memahami IT;
- 13) Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan hukum di Jawa Timur, adanya kendala keterbatasan anggaran, dimana permintaan masyarakat yang cukup tinggi untuk sosialisasi/penyuluhan hukum namun tidak diimbangi dengan pemenuhan anggaran untuk melaksanakannya;
- 14) Dalam rangka pelayanan perpustakaan kepada masyarakat belum bisa dilakukan secara optimal, sehingga menyebabkan kurangnya pengunjung perpustakaan, hal ini disebabkan kurangnya fasilitas perpustakaan yang menyebabkan pengunjung tidak nyaman, diantaranya tempat yang kurang memadai, seperti kurang luas, tidak adanya pendingin ruang (AC) dan kekurangan personil.

Solusi:

- 1) Agar penyusunan Propemperda di DPRD lebih ketat lagi dan menambahkan syarat agar Raperda yang ingin masuk Propemperda harus sudah siap draft dan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan.
- 2) Draft Propemperda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan ke Kemendagri.
- 3) Perlunya diatur dalam Perda mengenai batas maksimal proses pembahasan di DPRD.
- 4) Diminta kepada Bupati/Walikota supaya permohonan Fasilitasi dan Evaluasi Raperda diupayakan tidak bulan Desember karena pada bulan tersebut sedang fokus melakukan Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota.
- 5) Apabila terdapat Raperda yang belum sempat di Fasilitas atau di Evaluasi karena keterbatasan waktu pada tahun sebelumnya, maka sejak awal Januari tahun berikutnya segera dilakukan Fasilitasi dan Evaluasi Raperda dengan mengupayakan pendanaannya dibayarkan setelah APBD cair, dan dengan harapan alokasi anggaran yang cukup.
- 6) Mengingat hasil konsultasi Raperda dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tidak dapat segera didapatkan, dan juga karena tidak ada ketentuan yang memerintahkan supaya menunggu hasil konsultasi, maka hasil evaluasi Raperda tetap disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan maksud supaya Raperda tersebut segera ditetapkan, dengan konsekwensi apabila terdapat hasil konsultasi yang perlu diubah terhadap Perda tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Perda.
- 7) Untuk menjamin tetap berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Jember, Gubernur Jawa Timur telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/208.K/KPTS/013.4/2017 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penggunaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, yang penggunaannya untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib. Selanjutnya untuk

percepatan penetapan KUA PPAS akan dilakukan mediasi oleh Gubernur Jawa Timur dengan memanggil Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember, yang dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

- 8) Perlu adanya perencanaan anggaran yang dapat mengakomodasi hal yang tidak dapat diprediksi;
- 9) Untuk memperoleh data informasi dan referensi perlu adanya koordinasi dengan instansi yang membutuhkan saran/pertimbangan hukum;
- 10) Perlu adanya sosialisasi peraturan yang baru kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penerima Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- 11) Perlu adanya Bintek Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, memasang Security Server dan updating anti virus secara berkala serta penambahan personil yang memahami IT;
- 12) Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang cukup tinggi untuk sosialisasi/penyuluhan hukum, perlu adanya penambahan anggaran;
- 13) Untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan diperlukan kenyamanan ruangan, diantaranya ruangan yang lebih luas, pemasangan pendingin ruangan (AC) dan penambahan personil.

3.4 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

a. Tujuan

Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian di Jawa Timur

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian	8	21	262,5 %
1. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	8	21	262,5 %

Pada tahun 2017 kinerja Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

➤ **Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian**

Jumlah kebijakan yang terdaftar pada tahun 2017 dengan target sebesar 8 kebijakan dan terealisasi 21 kebijakan atau 262,5% sehingga pada tahun 2017 telah mencapai target. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kinerja perekonomian sebagai berikut :

- a) Perencanaan yang baik
- b) Kerjasama yang baik di lingkungan Biro Administrasi Perekonomian
- c) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya

d) Tersedianya sarana dan prasarana di Biro Administrasi Perekonomian

Berikut kebijakan bidang Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal yang dibuat pada tahun 2017:

- 1) Surat Pagu Subsidi Rastra Kabupaten/Kota se Jawa Timur tahun 2017
- 2) Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Dana Bergulir
- 5) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Tata Kelola Kredit melalui SIPDe
- 6) Perubahan atas peraturan gubernur No. 136 tahun 2016 tentang alokasi DBHCHT kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2017
- 7) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/70/KPTS/013/2017 tentang Senior Business Officer Provinsi Jawa Timur di Singapura Tahun 2017
- 8) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/69/KPTS/013/2017 tentang Senior Business Officer Provinsi Jawa Timur di Negara Maju dan Berkembang Tahun 2017
- 9) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/71/KPTS/013/2017 tentang Penasehat Senior (Senior Advisor) Bidang Promosi, Perdagangan dan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Jepang Tahun 2017
- 10) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/14/KPTS/013.1/2017 tentang Pengelola Pusat Pertukaran

(Exchange Centre) Provinsi Jawa Timur di Tianjin - China Tahun 2017

- 11) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 500/3893/021/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Himbauan Pengendalian Inflasi Jawa Timur 2017
- 12) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 500/3625/021/2017 tanggal 23 Februari 2017 perihal Penguatan Kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jawa Timur
- 13) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 500/10108/021/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Percepatan Penyelesaian Regulasi Paket Kebijakan Ekonomi XV
- 14) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 500/12937/021/2017 tanggal 14 Juli 2017 perihal Dukungan Kegiatan Lanjutan Sensus Ekonomi 2016
- 15) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 500/19303/021/2017 tanggal 19 Oktober 2017 perihal Penguatan Kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
- 16) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Rekomendasi Bongkar Impor Garam, Beras dan Gula
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
- 18) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/365/KPTS/013/2017 tentang Pengesahan Laporan Perhitungan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Tahun Buku 2016
- 19) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
- 20) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/13/KPTS/013.1/2017 tentang Pengesahan Keputusan

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Nomor : 910/039.1/SK.X/503/2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017
Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur
21) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembina BUMD
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

c. Program

- 1) Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian, dengan anggaran Rp. 37.284.265.436,00 Realisasi sebesar Rp. 32.936.852.589,00 atau 88,34% untuk mendukung 27 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatannya terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Program/kegiatan di kab/kota yang seringkali tidak mendukung program/kegiatan di provinsi karena kurangnya dukungan dari instansi terkait di daerah tersebut, kurangnya koordinasi antar instansi, tidak tersedianya anggaran di daerah sehingga membuat program yang seharusnya dilakukan berjalan lambat.
- 2) Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung mengingat masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Solusi

- 1) Diperlukan tim perencanaan dan evaluasi kegiatan sehingga perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan berjalan dengan baik.
- 2) Perlunya meningkatkan sinkronisasi dan konsultasi program dan kegiatan baik dengan pemerintah pusat, antar provinsi dan Kabupaten /Kota.

3.5 BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

a. Tujuan

Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sumber daya alam di Jawa Timur

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	8	0	-
1. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	8	0	-

Pada tahun 2017 kinerja Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam

➤ **Jumlah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam**

Jumlah kebijakan yang terdaftar pada RPJMD tahun 2017 dengan target sebesar 8 kebijakan dan belum terealisasi sehingga pada tahun 2017 belum mencapai target. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan kinerja bidang sumber daya alam adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan yang jauh dari kata baik.
- 2) Lemahnya sinergi atau kerjasama antar bagian di lingkungan Biro Administrasi Sumber Daya Alam.

- 3) Minimnya sumber daya manusia yang memiliki etos kerja maksimal.
- 4) Banyak sumber daya manusia yang belum memiliki pemahaman/kompetensi dalam bidang sumber daya alam.

c. Program

1. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi Dan Evaluasi bidang Sumber Daya Alam tahun 2017 dengan anggaran Rp. 3.054.030.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.706.983.857,00 atau 88.64% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- 2) Belum optimalnya sinkronisasi persepsi dan peningkatan peran, fungsi, kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Belum optimalnya peran dan fungsi Biro Administrasi Sumber Daya Alam sebagai administrator dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Solusi :

- 1) Perlunya peningkatan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;

- 2) Perlunya peningkatan sinkronisasi dan konsultasi program dan kegiatan pembangunan sumber daya alam, baik dengan Pemerintah Pusat, antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 3) Perlunya revitalisasi dan harmonisasi *database* pengelolaan sumber daya alam yang handal.

3.6 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang terintegrasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	100	100	100
	2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
1. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan	100	100	100

Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2017 kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan;

Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan pada tahun 2017 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 % (**mencapai target**).

Rumusan kebijakan yang ditargetkan pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) kebijakan terealisasi 4 (empat) kebijakan yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
- 4) Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/544/KPTS/013/ 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018.

➤ Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti.

Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti pada tahun 2017 dengan target sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % atau 100 % (mencapai target). Rekomendasi yang ditargetkan pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) rekomendasi terealisasi 1 (satu) rekomendasi yaitu berupa Surat Gubernur Jawa Timur No. 050/6636/023.3/2017 kepada Kepala Badan/Dinas/Rumah Sakit/Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Keterlambatan Penyerapan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, yang ditindak lanjuti laporan hasil rekonsiliasi kepada Gubernur Jawa Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Triwulan I dengan target 20 %, 50 Perangkat Daerah realisasi rata-rata 15,40 % dan capaian kinerja 77 %, 17 Rumah Sakit, UPT Rumah Sakit realisasi rata-rata 13,73 % dan capaian kinerja

68,65 % dan 3 Non Perangkat Daerah realisasi rata-rata 18,09 % capaian kinerja 90,45 %;

- 2) Triwulan II-III dengan target 85 %, 50 Perangkat Daerah realisasi rata-rata 61,59 % dan capaian kinerja 72,45 %, 17 Rumah Sakit, UPT Rumah Sakit realisasi rata-rata 57,17 % dan capaian kinerja 67,26 % dan 3 Non Perangkat Daerah realisasi rata-rata 71,13 % capaian kinerja 83,68 %;
- 3) Triwulan IV dengan target 100 %, 50 Perangkat Daerah realisasi rata-rata 91,62 % dan capaian kinerja 91,62 %, 17 Rumah Sakit, UPT Rumah Sakit realisasi rata-rata 84,05 % dan capaian kinerja 84,05 % dan 3 Non Perangkat Daerah realisasi rata-rata 94,73 % capaian kinerja 94,73 %. Dengan demikian bahwa dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 050/6636/ 023.3/2017 yang berisi tentang teguran kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menjadi sebuah langkah untuk tindak lanjut mengimplementasikan penyerapan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan.

c. Program

- 1) Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 17.166.645.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.018.641.373,00 atau 87,49 %, untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Belum optimalnya tingkat kelulusan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikarenakan beberapa sebab antara lain:

- Tidak semua pegawai yang lulus ujian dimanfaatkan sebagai pengelola pengadaan barang/jasa sehingga timbul keengganan dalam mengikuti ujian;
 - Ada pegawai yang enggan ditunjuk untuk menjadi pejabat dalam pengelola pengadaan barang/jasa;
 - Waktu pelaksanaan bimbingan teknis terlalu singkat sehingga peserta masih kurang dalam mempelajari materi.
- 2) Belum seluruh Perangkat Daerah untuk mengumumkan seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE Provnisi Jawa Timur baik yang pengadaan langsung maupun yang harus lelang;
 - 3) Masih terdapat Perangkat Daerah yang realisasi anggarannya tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu minimal mencapai 90 % pada akhir tahun anggaran;
 - 4) Tupoksi Biro Administrasi Pembanunan masih belum merujuk pada mitra Perangkat Daerah yang berhubungan dengan infrastruktur, sehingga dalam koordinasi masalah infrastruktur masih kurang optimal;
 - 5) Belum seluruh Perangkat Daerah yang mengupload Rencana Umum Pengadaan pada sistem aplikasi SIRUP.

Solusi:

- 1) Menambah waktu bimbingan teknis yang semula hanya 30 JPL menjadi 50 JPL sehingga diharapkan para peserta lebih memahami terhadap materi pengadaan barang/jasa;
- 2) Perangkat Daerah harus didorong dan dibina tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus lebih transparan dan akuntabel, selain itu harus dibuat suatu regulasi terhadap keharusan setiap Perangkat Daerah harus mengupload Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP dan mengumumkan paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE;

- 3) Harus terus dilakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan APBD yang dikelola oleh Perangkat Daerah dengan melakukan rekonsiliasi dan surat edaran untuk percepatan penyerapan anggaran;
- 4) Masih dilakukan usulan perubahan terhadap tupoksi Biro Administrasi Pembangunan agar nantinya dapat menjadi mitra yang memfasilitasi terhadap disusunnya kebijakan Gubernur dalam pelaksanaan infrastruktur di Jawa Timur.

3.7. BIRO ORGANISASI

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran didukung dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas pemerintahan melalui tatalaksana pemerintahan yang efektif, efisien dan terukur menuju pelayanan publik yang prima.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran	100%	64,71%	64,71%
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran	100%	64,71%	64,71%
II. Meningkatnya kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan Setda. Prov. Jatim	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./ Kota dan SKPD Provinsi	50%	41,17%	82,34%
Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./ Kota dan SKPD Provinsi	50%	41,17%	82,34%
III. Meningkatnya ketatalak-sanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima	69,82%	86,96%	124,55%
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	2. Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah	69,82%	86,96%	124,55%

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
	menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima			
IV. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja	Persentase SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat B (Baik)	70%	86,84%	124,05%
	Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik)	50%	63,63%	127,26%
	Persentase SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	20%	22%	110%
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Persentase SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat A (Sangat Baik)	70%	2,6%	3,71%
	2. Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik)	50%	63,63%	127,26%
	3. Persentase SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	20%	22%	110%

Pada tahun 2017 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

- Persentase kelembagaan Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

Persentase kelembagaan Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 64,71%. Capaian pada sasaran 1 belum mencapai target dikarenakan masih ada peraturan perundangan berkaitan dengan kelembagaan yang belum ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Salah satunya yaitu peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit dan Bakorwil. Selain itu, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus pada penataan UPT

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Organisasi masih menunggu rekomendasi tertulis dari Kementerian Dalam Negeri guna Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT dan Cabang Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk penataan UPT pada Kabupaten/ kota, baru 22 kabupaten/ kota yang telah mengirimkan kajian akademik tentang pembentukan UPT di wilayah mereka masing-masing.

Sasaran 2 : Meningkatnya kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan Setda Prov Jatim

- Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./ Kota dan SKPD Provinsi

Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./ Kota dan SKPD Provinsi pada Tahun 2017 dengan target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 41,17%. Capaian pada indikator sasaran ke-2 ini belum dapat mencapai target dikarenakan masih adanya SKPD yang belum ditata kelembagaannya sepanjang tahun 2017. Disamping itu kabupaten/ kota sedang dalam tahap pembentukan UPT, oleh karena itu penyelesaian penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menunggu selesainya penataan UPT.

Sasaran 3 : Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :

- Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan

Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Target telah tercapai karena kabupaten/ kota dan Perangkat Daerah Provinsi secara keseluruhan telah melaksanakan ketatalaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan tata naskah dinas, penggunaan pakaian dinas, standarisasi sarana-prasarana serta tata hubungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima

Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima pada Tahun 2017 dengan target sebesar 69.82% dan terealisasi sebesar 86.96%. Pada Tahun 2017 Biro Organisasi telah melakukan inventarisasi SOP yang terdapat pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian diketahui jumlah dan judul SOP secara keseluruhan. Pada tanggal 21 Desember 2017 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/730/KPTS/013/2017 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu Biro Organisasi juga telah melakukan inventarisasi terhadap SOP Administrasi Pemerintahan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten/ kota untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan untuk SKPD yang telah menerapkan pelayanan prima meningkat dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 14 September 2017 Nomor

065/16122/031.3/2017 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimana dalam surat tersebut disebutkan tentang komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka penerapan pelayanan prima sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu :

➤ Persentase SAKIP Kab./ Kota Jatim yang berpredikat B (Baik)

Persentase SAKIP Kab./ Kota Jatim yang berpredikat B (Baik) pada Tahun 2017 dengan target 70% dan terealisasi sebesar 86,84% atau capaian sebesar 124,05%. Adapun rincian perolehan penghargaan atas implementasi SAKIP sebagai berikut:

- Predikat A sebanyak 1 Kab;
- Predikat BB sebanyak 12 Kab./Kota;
- Predikat B sebanyak 20 Kab./Kota;
- Predikat CC sebanyak 5 Kab./Kota.

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap realisasi kinerja tersebut dikarenakan adanya pembinaan yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Pemerintah Kab/kota sudah semakin banyak yang sadar untuk memperbaiki SAKIP terutama pada perencanaan kinerjanya.

➤ Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik)

Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 63,63% atau capaian sebesar 127,26%. Capaian pada indikator ini melebihi target karena semakin baiknya praktik manajemen kinerja pada Perangkat Daerah. Hal ini didukung dengan telah dilakukan perubahan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur. Perangkat Daerah berbondong-bondong menjadi yang terbaik. Hal

yang perlu menjadi perhatian adalah semakin berkurangnya Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP dengan predikat B.

Adapun yang menjadi objek evaluasi SAKIP Tahun 2017 ini adalah sebanyak 64 entitas kerja yang terdiri atas 54 SKPD dan 12 UPT BLUD Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Predikat A sebanyak 42 SKPD;
- Predikat BB sebanyak 14 SKPD;
- Predikat B sebanyak 10 SKPD.

- Persentase SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)

Persentase SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Tahun 2017 dengan target sebesar 20% dan terealisasi sebesar 22% atau sebesar 110%. Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kab/ kota yang memiliki KBK sejumlah 304 Perangkat Daerah dari 1361 Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/kota di Jawa Timur. Capaian pada indikator ini dapat melebihi target dikarenakan adanya kemudahan dalam pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah. Disamping itu ditambah dengan telah adanya kesadaran terhadap pentingnya pembentukan Kelompok Budaya Kerja dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

c. Program

- 1) Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dengan anggaran Rp. 1.275.000.000 dan terealisasi Rp. 1.056.722.342 atau 82,88% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.

- 2) Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur, dengan anggaran Rp. 673.225.000 dan terealisasi Rp. 609.979.978 atau 90,61% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.
- 3) Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp. 2.442.395.000 dan terealisasi Rp. 2.259.183.220 atau 92,50% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.
- 4) Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan anggaran Rp. 3.422.737.540 dan terealisasi Rp. 2.989.598.248 atau 87,35% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Penyusunan Kajian Akademik terhadap usulan penbentukan cabang dinas dan UPT terselesaikan melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan mundurnya pelaksanaan audiensi pembentukan cabang dinas dan UPT oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian rekomendasi yang dihasilkan baru keluar pada akhir tahun 2017;
- 2) Baru 11 dari 47 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai yang diamanatkan dalam pasal 56 undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Solusi

- 1) Pembahasan rancangan peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi cabang dinas dan UPT akan dilaksanakan pada Tahun 2018;
- 2) Berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan, Biro Organisasi telah memberikan penekanan terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Desember 2017 Nomor 061/24971/031.1/2017 perihal Penyelesaian Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Berikut ini adalah daftar penghargaan nasional yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas peran dari Biro Organisasi:

- 1) Predikat A Implementasi SAKIP Provinsi Jawa Timur Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN dan RB.
- 2) TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

3.8. BIRO UMUM**a. Tujuan**

Meningkatkan layanan Biro Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatnya layanan arsip dan ekspedisi di Lingkungan Setda Prov.Jawa Timur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Arsip dan Ekspedisi	81	81,01	100,01
1. Program Pelayanan Umum	1. Persentase Komposisi surat masuk/keluar secara online ; Persentase pengiriman/penerimaan RDG di Jawa Timur ; Tercatatnya nilai aset ang dikelola di Lingkungan Setda	100	100	100

Pada Tahun 2017 kinerja Biro Umum yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya layanan arsip dan ekspedisi di Lingkungan Setda Prov.Jawa Timur:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Arsip dan Ekspedisi

Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Arsip dan Ekspedisi pada tahun 2017 dengan target sebesar 81 dan terealisasi sebesar 81,01 atau 100,01 persen (Mencapai target). Nilai IKM dihitung pada tahun 2016 yaitu sebesar 79 atau 100 % sedangkan pada tahun 2017 mencapai target 81,01 IKM atau 100,01 % mengalami peningkatan sebanyak 0,1 %. Program pelayanan umum dengan indikator kinerja sebesar 100 % terdiri dari 2 kegiatan yaitu pengelolaan surat dan online sistem administrasi dengan indikator

kegiatan yaitu Persentase Komposisi surat masuk/keluar secara online dengan target kinerja sebesar 100% realisasi sebesar 100 %, kegiatan kedua yaitu pengelolaan Administrasi Barang Setda dengan indikator kegiatan Presentase kesesuaian aset antara pencatatan dan kondisi aktual target kinerja sebesar 100% realisasi sebesar 100 %.

c. Program

- 1) Program Pelayanan Umum, dengan anggaran sebesar Rp1.413.771.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.341.407.660,- atau 94,88%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Sistem E-SMS berbasis web ini masih belum maksimal penggunaannya ada beberapa operator E-SMS/ Sekpri di setiap ruangan pimpinan dan staf Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang belum membisakan diri dengan keberadaan program ini.
- 2) Keterlambatan dokumen pendukung pencatatan arsip.

Solusi:

- 1) Dilakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Managemen Surat Berbasis Web yang rutin terhadap para operator E-SMS di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2) Dilakukan sosialisasi untuk tata tertib pencatatan aset terutama belanja modal.

3.9 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

a. Tujuan

Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.	1 Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluaskan (%)	70	70	100
	2 Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	98	98	100
	3 Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	92	92	100
	4 Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan	82	82	100
1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Persentase Berita dan Isu Publik Pemerintahan Prov. Jatim yang di Monitoring dan Di olah	100	100	100
2. Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi	Persentase Tersebar Luasnya Informasi Pada Masyarakat	100	100	100
3. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Prosentase cakupan layanan keprotokolan	100	100	100
4. Program Peningkatan Kerjasama	Prosentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang didokumentasikan	100	100	100

Pada Tahun 2017 kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

Indikator kinerja Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluarkan pada tahun 2017 sebesar 70 %. Dalam Target Realisasi bisa mencapai 70 % sesuai target, sehingga 100% berhasil;

- Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)
Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM) tahun 2017 sebesar 98 %. Dalam Target Realisasi bisa mencapai 98 % sesuai target, sehingga 100% berhasil;
- Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)

Indikator kinerja ndeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM) pada tahun 2017 sebesar 92 %. Dalam Target Realisasi bisa mencapai 92 % sesuai target, sehingga 100% berhasil;

- Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)

Indikator kinerja Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 70 %. Dalam Target Realisasi bisa mencapai 70 % sesuai target, sehingga 100% berhasil;

- Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Biro Humas dan Protokol (IKM)

Indikator kinerja Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 75 %. Dalam Target Realisasi bisa mencapai 75 % sesuai target, sehingga 100% berhasil.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.881.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.632.869.121,00 atau sebesar 91,38 %. Program ini di dukung 3 Kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari resalisasi anggaran capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 2) Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi dengan anggaran sebesar Rp. 12.792.586.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.052.115.248,00 atau sebesar 94,21 %. Program ini di dukung 4 Kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari resalisasi anggaran capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 4.285.651.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.147.624.992,00 atau sebesar 96,78 %. Program ini di dukung 2 Kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari resalisasi anggaran capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom;
- 4) Program Peningkatan Kerjasama dengan anggaran sebesar Rp. 3.323.012.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.670.715.102,00 atau sebesar 80,37 %. Program ini di dukung 2 Kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari resalisasi anggaran capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan**

- 1) Informasi-informasi positif tentang Jawa Timur belum semuanya terpublikasi di media massa cetak baik harian maupun mingguan;
- 2) Belum semua media massa khususnya media on line memuat siaran pers yang dikeluarkan Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim;
- 3) Adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah daerah dengan insan pers terhadap esensi pemberitaan yang positif dan negative, terkait kebijakan redaksi;

- 4) Kunjungan Kerja Pejabat negara, Pejabat pemerintah dan Tamu Negara di Jawa Timur Frekwensinya sangat tinggi dan kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi miss communication dalam rangka pelayanan keprotokolann yang berdampak terhadap kualitas pelayanan dan terkesan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang tanggap dalam memberikan pelayanan;
- 5) Personil Protokol yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas sehingga apabila ada kegiatan yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersamaan baik yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda atau Tamu Pemerintah tidak terpenuhi unsur keprotokolannya;
- 6) Tingginya kegiatan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh SKPD yang mengundang Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda waktunya hampir bersamaan, sehingga sangat kesulitan dalam pembuatan undangan resmi termasuk mengedarkan undangan resmi karena waktu dan petugas terbatas. Selama ini sudah menerapkan “satu Pintu” dalam pembuatan undangan resmi terutama yang menghadirkan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekda.

Solusi

- 1) Mengirimkan siaran pers ke seluruh media massa dan memperluas jangkauan penyebaran informasi melalui media on line dan media social;
- 2) Melakukan Up date informasi secara rutin melalui website;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jumpa pers dan memesan ruang pemberitaan di media massa berupa public expose serta menyediakan ruangan khusus berupa Press Room untuk aktivitas insan pers di lingkungan Kantor Gubernur dan Gedung Negara Grahadi;
- 4) Komunikasi ditingkatkan baik secara formal dengan mengadakan rapat koordinasi bersama dan informal dengan cara komunikasi secara langsung dengan penyelenggara kegiatan kunjungan kerja sehingga dapat terkomunikasikan hal-hal yang dibutuhkan serta dalam rangka kelancaran kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tamu Negara;

- 5) Penambahan staf Protokol dengan mengajukan penambahan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 6) Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekda Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh SKPD wajib berkoordinasi dengan Biro Humas dan Protokol terutama terkait dengan tanggal pelaksanaan acara sehingga dalam rangka pembuatan undangan resmi tidak terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam mengundang atau pengiriman undangannya.

e. Penghargaan yang diterima

- 1) Mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional tentang “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jatim dengan Nilai “A” (Interpretasi sangat baik)

3.10 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		PRESENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75,5	76,04	100,71
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah	26	11	42,3

Pada Tahun 2016 - 2017 kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016 adalah sebesar 75,89 dan pada tahun 2017 sebesar 76,04

(mengalami peningkatan sebesar 0,19 %). Dengan dihadapkan pada target tahun 2017 sebesar 75,5 % maka prosentase capaiannya adalah 100,71%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 terdapat 12 unsur pelayanan yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan unsur pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan meliputi :

1. Pelayanan dalam bidang pelayanan umum
2. Pelayanan dalam bidang persidangan
3. Pelayanan dalam bidang keuangan
4. Pelayanan dalam bidang perundang-undangan

Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur beberapa indikator pengukuran yang digunakan dalam penilaian tersebut didapatkan dari akumulatif penilaian kepuasan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Bagian. Prosentase capaian yang tinggi tersebut didukung oleh peningkatan kinerja dan pelayanan dari staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil IKM yang lalu (tahun 2016). Upaya peningkatan kualitas layanan dilaksanakan pada semua unsur di semua lini Bagian.

c. Program

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah;

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 122.220.468.140,00 terealisasi sebesar Rp 92.764.196.953,00 (75,90 %) untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi

anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik Kolom 16.

Properda (Program peraturan Daerah) Provinsi Jawa Timur merupakan indikator ketercapaian kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Ketercapaian kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur dalam fungsi pembentukan peraturan daerah tidak terlepas dari dukungan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Tahun 2017 target Properda DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 26 judul usulan yang terbagi menjadi 16 rancangan peraturan daerah usulan DPRD Provinsi Jawa Timur dan 10 rancangan peraturan daerah usulan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan realisasi Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Kepala Daerah adalah 11 Peraturan Daerah dengan prosentase tingkat capaiannya sebesar 42,3 %. Hal ini dikarenakan masing-masing rancangan peraturan daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga dalam pembahasan membutuhkan pemikiran, observasi lapangan, pemetaan masalah dan diskusi yang lebih mendalam.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih terdapat kelemahan dalam mekanisme kontrol terhadap orang atau masyarakat yang memasuki lingkungan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Penyediaan bahan rapat yang disampaikan pada saat menjelang rapat dilaksanakan.
- 3) Pelayanan gaji dalam bidang keuangan yang belum sesuai harapan.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai contoh:

pengaturan lahan parkir, koleksi buku perpustakaan yang minim).

- 5) Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum sepenuhnya optimal.
- 6) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur karena hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD dalam hal ini Peraturan Daerah sebagaimana RPJMD tahun 2014-2019 yang dihasilkan tiap tahunnya bukan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

Solusi

Berdasarkan permasalahan diatas dapat kami sampaikan beberapa solusi yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kewaspadaan yang lebih selektif melalui pengisian buku tamu serta meningkatkan sistem keamanan melibatkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan TNI AD.
- 2) Peningkatan pelayanan di bidang persidangan khususnya dalam hal penyediaan bahan rapat yang disampaikan melalui surat elektronik /email ke masing-masing Anggota DPRD.
- 3) Pelaksanaan pembayaran gaji Anggota DPRD melalui transfer bank dengan sistem payroll gaji setiap bulannya untuk mempercepat penerimaan.
- 4) Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
- 5) Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

- 6) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan bimbingan teknis.

e. Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

Sertifikat ISO 9001:2015 tahun 2017 dari Lembaga SQA Indonesia atas Supporting Service Activities For The Government (pelayanan administrasi dan sekretariat di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur);

3.11. INSPEKTORAT**a. Tujuan**

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur.	I. Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan daerah oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur.	70	50	71%
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.	70	50	71%
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.	2. Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan.	2	2	100
3. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	2. Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur.	WTP	(masih dalam proses audit BPK)	
II. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	II. Persentase aparat pengawasan yang berkompeten	60	70	116%
1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. persentase aparat pengawasan dengan nilai post test minimal 70	60	70	116%
2. Program Pencegahan Korupsi	2. Penilaian WBK WBBM	2 SKPD	0 (masih dalam proses pengusulan di pusat)	

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Inspektorat yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, dicapai dengan indikator kinerja yaitu persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan daerah oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur. Target kinerja yang ditetapkan yaitu 70% dan telah terealisasi 50%. Indikator kinerja sasaran diperoleh dari indikator kinerja program, di mana persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan daerah terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mencapai 50% atau lebih rendah dari target yang telah ditetapkan, karena Perangkat Daerah belum seluruhnya menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

Sasaran 2: Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dicapai dengan indikator kinerja yaitu persentase aparatur pengawasan yang berkompeten. Target kinerja yang ditetapkan yaitu 60% dan telah terealisasi 70%. Indikator kinerja sasaran diperoleh dari indikator kinerja program, di mana persentase aparatur pengawasan yang berkompeten terkait dengan nilai post test. Dalam hal ini, nilai post test aparatur pengawasan mencapai 116% dari target yang telah ditetapkan karena telah mengikuti dan memahami materi bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur yang telah dilaksanakan.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp2.324.815.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.176.442.907,00 atau 93,62% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari

realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

Indikator kinerja program yaitu Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada tahun 2017 memiliki target sebesar 70% dan terealisasi sebesar 50%. Target yang telah ditetapkan belum dapat tercapai karena Perangkat Daerah belum seluruhnya menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

- 2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp224.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp207.550.000,00 atau 92,55 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

Indikator kinerja program yaitu jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan pada tahun 2017 memiliki target 2 dokumen yang telah disusun, sehingga dapat terealisasi 100%.

- 3) Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dengan anggaran sebesar Rp18.811.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.963.085.003,00 atau 95,749% untuk mendukung 9 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

Indikator kinerja program yaitu opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 memiliki target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun realisasinya masih dalam proses audit BPK sampai dengan pertengahan semester I tahun 2018.

- 4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp669.835.000,00 dan terealisasi sebesar Rp640.646.975,00 atau 95,64% untuk mendukung 1 kegiatan yang

secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

Indikator kinerja yaitu persentase aparaturnya dengan nilai post test minimal 60 memiliki target nilai 60, sedangkan realisasinya sebesar 70 atau mencapai 116%. Sasaran tersebut telah mencapai target yang diharapkan karena peran aktif dari setiap elemen pegawai dan pimpinan Inspektorat.

- 5) Program Pencegahan Korupsi dengan anggaran sebesar Rp2.217.358.000,00 terealisasi sebesar Rp2.090.265.130,00 atau 94,27% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

Penilaian WBK/ WBBM memiliki target sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah yang diusulkan untuk menjadi WBK/WBBM, namun demikian target tersebut belum tercapai karena terdapat beberapa instrumen penilaian pada Perangkat Daerah terkait yang masih kurang nilainya, sehingga masih dilakukan proses pengajuan ulang di tataran pemerintah pusat.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kurangnya jumlah aparaturnya dan adanya kesenjangan kompetensi. Di sisi lain PNS yang memiliki keahlian pemeriksaan bidang keuangan memasuki masa purna tugas sedangkan SDM yang ada lebih banyak merupakan tenaga administratif yang masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi auditor yang kompeten di bidangnya.
- 2) Terdapat tambahan program yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, penanganan Whistle Blower System, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 terkait Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

- 3) Beberapa kegiatan Pemerintah Pusat yang belum terfasilitasi dalam Dokumen Perencanaan Anggaran.

Solusi

- 1) Melakukan Pelatihan Sendiri dengan mendatangkan Narasumber dari BPKP serta BPK maupun tenaga ahli dari Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur serta mengikuti bimbingan teknis maupun diklat peningkatan kompetensi.
- 2) Terkait dengan amanat monitoring dan evaluasi dana desa, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan ke desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD), Dana Desa (DD) dan hibah-bansos dengan membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa. Selain itu Inspektorat melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan POLDA Jatim untuk berkoordinasi terkait pungutan liar dengan membentuk Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).
- 3) Inspektorat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur terkait anggaran untuk kegiatan Pemerintah Pusat.

3.12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas SDM perencanaan.
- 2) Meningkatkan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparasi, partisipasi dan inovasi perencanaan.
- 3) Meningkatkan kualitas data/informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

b. Sasaran dan Program

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I	Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif	Persentase dokumen yang dipublikasikan	100%	100%	100%
		Persentase usulan stakeholder provinsi yang diakomodir	32%	42%	131%
		Persentase ketaatan terhadap tata ruang	70%	78,78%	112%
	1. Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
	2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	36%	42%	116,67%
	3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	50%	60,89%	121,78%
	4. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	36%	31.5%	87.5%
	5. Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100%	98,41%	98,41%
	6. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	26%	36,65%	140,96%
	7. Program Perencanaan	Persentase Usulan Kegiatan	32%	8,1%	2.31%

	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
	Pembangunan Pengembangan Regional	Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan			
II	Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	90%	99,8%	110,8%
		Persentase program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	86%	88%	102,32%
		Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	85%	92%	108%
		Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik	82%	95%	115,85%
	1. Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	85%	92%	108,24%
		persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD	91%	97,80%	107,47%
		Persentase SKPD provinsi dan kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu	65%	64,14%	98,68%

Pada Tahun 2017 kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

- Persentase dokumen yang dipublikasikan pada Tahun 2017 target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau 100 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala diantaranya: Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau Informasi lain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Bappeda Provinsi Jawa Timur membagi dokumen wajib publikasi menjadi 11 (sebelas) dokumen yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Bappeda Provinsi Jawa Timur, diantaranya: RPJPD, RPJMD, RTRW, Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, KUA, PPAS, KUA-P, dan PPAS-P. Dalam pelaksanaan publikasi dokumen-dokumen tersebut di atas, Bappeda Provinsi Jawa Timur membagi periode waktu pelaksanaan dalam 2 (dua) periode yang berbeda, Triwulan II dan Triwulan III karena berkaitan dengan adanya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Murni dan APBD perubahan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, sehingga menyebabkan adanya perubahan dokumen untuk murni dan perubahan. Realisasi Publikasi Dokumen Bappeda pada tahun 2017 terbagi dalam 2 (dua) triwulan, yaitu :

- 1) Triwulan II, dengan realisasi 64 % yang berarti bahwa pada TW II telah dilaksanakan publikasi dokumen sebanyak 7 macam dokumen, antara lain: RPJPD, RPJMD Perubahan 2014-2019, RTRW, Renstra Perubahan 2014-2019, RKPD 2018, RKPD-Perubahan 2017 ke-1 (sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan pada Perda Jatim No 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah), RKPD Perubahan ke-2 (tindak lanjut P-APBD) dan Renja 2018.
 - 2) Triwulan III, dengan realisasi akumulasi 100% yang berarti bahwa total 11 (sebelas) Dokumen dalam Daftar Informasi Publik Bappeda Provinsi Jawa Timur telah dipublikasikan semua, dengan tambahan dokumen yang dipublikasikan antara lain: KUA 2018, PPAS 2018, KUA-P 2017, dan PPAS-P 2017.
- Persentase usulan stakeholder provinsi yang diakomodir pada Tahun 2017 dengan target sebesar 32% dan terealisasi sebesar 42% atau 131% persen.

Pada dasarnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Sesuai dengan amanat dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 4 bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan, dan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Indikator Persentase Usulan Stakeholder yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan merupakan indikator yang mempunyai target tahunan sehingga definisi usulan ini diajukan pada saat Musrenbang RKPD Provinsi yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pembahasan rancangan RKPD Provinsi. Formulasi dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah usulan yang diakomodir dari total usulan yang masuk sesuai kriteria. Pada dasarnya setiap tahun total usulan yang masuk tidak dapat dipastikan. Selain itu, kriteria untuk terakomodirnya usulan disesuaikan dengan selaras tidaknya usulan tersebut terhadap program dan kegiatan pembangunan di Provinsi serta sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Pada tahun 2017, didapatkan dari jumlah total 3.062 usulan kegiatan, terdapat 1.282 usulan kegiatan yang diakomodir.

- Persentase ketaatan terhadap tata ruang pada Tahun 2017 dengan target sebesar 70% dan terealisasi sebesar 78,78% atau 112% persen.

Dalam Rencana Strategis Bappeda 2014-2019, indikator ini ditetapkan sampai tahun 2019 sebesar 75% karena nilai ketaatan tidak bergantung pada internal Bappeda, akan tetapi bergantung pada eksternal Bappeda

(Pemohon). Dalam mencapai indikator kinerja Persentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dalam mengawal pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional maupun Provinsi, juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031. Hal ini diterapkan pada Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dimana dalam penerbitan IPR selalu berdasarkan pada kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- 2) Berdasarkan definisi operasional dan formula penghitungan didapatkan data tahun 2017 untuk permohonan IPR sebanyak 33 permohonan, dan ijin yang diterbitkan sebanyak 26 IPR. Berdasarkan data tersebut didapatkan tingkat ketaatan terhadap tata ruang tahun 2017 sebesar 78,78% sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2017.
- 3) Untuk dapat menjaga dan meningkatkan prosentase ketaatan terhadap tata ruang diperlukan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait rencana tata ruang, sehingga dalam melaksanakan pembangunan harus disesuaikan dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku baik RTRW maupun Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis).

Sasaran 2 : Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu:

- Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 95% dan terealisasi sebesar 100% atau 105 persen

Sesuai ketentuan pada lampiran VII “Tahapan Dan Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah” Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, indikator *Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan* mempunyai definisi operasional kesesuaian jumlah program di RKPD dengan di RPJMD dengan catatan bahwa kesesuaian yang dimaksud jg sesuai secara nomenklatur. Hingga tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur masih menggunakan lampiran Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang mencakup 510 program untuk 71 Perangkat Daerah. Faktor yang berpengaruh pada pencapaian realisasi indikator ini antara lain:

- 1) Adanya kebijakan *Top-Down* yang mengatur nomenklatur Program maupun menambah atau menghapus program karena terkait dengan alokasi dana dari Pemerintah Pusat;
- 2) Pada RPJMD tersebut belum mewadahi program-program yang belum ada alokasi anggarannya;
- 3) Kesalahan sistem informasi perencanaan (*system error*) yang memungkinkan program terhapus atau tidak muncul, salah entry, dan lain-lain;

Maka untuk meminimalisir ketidakkonsistenan tersebut, maka telah dilaksanakan khususnya setelah disusunnya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2017 antara lain:

- 1) Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disiapkan dengan mencantumkan program-program yang akan mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Perbaiki sistem informasi perencanaan dengan sistem *e-planning* yang bersifat *single sign on* sehingga memudahkan Perangkat Daerah (PD) serta Kabupaten Kota dalam mengentry usulan dalam satu kali entry.
- Persentase program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% pada Tahun 2017 target sebesar 86% dan terealisasi sebesar 88% atau 102,32 persen.

Target indikator Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75% sebesar 86% dan terealisasi sebesar 88%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah outcome program-program pembangunan yang mencapai di atas 75%.

Dalam mencapai target indikator tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan didukung oleh 3 kegiatan pada Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan yaitu (1) Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan, (2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur, dan (3) Penyusunan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam perhitungan pengukuran indikator ini didapatkan bahwa dari jumlah total 510 Program di RKPD tahun 2017, sebanyak 501 Program didapatkan mempunyai indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian (outcome) minimal 75%.

- Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan dengan target sebesar 82% dan terealisasi sebesar 92% atau 107% persen.

Definisi Operasional perhitungan data informasi sesuai dengan lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri dari 3 aspek, antara lain: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dari perhitungan tersebut didapatkan bahwa dari total data berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 sejumlah 257 data, sebanyak 236 data telah dipenuhi.

- Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik pada Tahun 2017 dengan target sebesar 82% dan terealisasi sebesar 95% atau 115.85 persen.

Target indikator Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik pada tahun 2017 sebesar 82% dan terealisasi sebesar 95%, dengan penilaian 71 renstra PD yang terkumpul terdapat 68 PD yang telah memenuhi kriteria Renstra berkualitas baik. Sesuai dengan definisi operasional yang diuraikan di dalam Indikator Utama Kinerja Bappeda bahwa penilaian indikator ini dihitung berdasarkan data dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur.

c. Program

- 1) Pagu anggaran program perencanaan pembangunan daerah Rp 4.334.934.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.018.655.978,00 atau 92.70% sampai akhir tahun anggaran 2017. Untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom

- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran Rp 4.597.850.000,00 Realisasi sebesar Rp 4.459.914.741,00 atau 97,00%. Untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Pagu Anggaran Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 7.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.770.577.175,00 atau 88,50%. Untuk mendukung 6 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 4) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 4.306.921.400,00 Realisasi sebesar Rp 4.209.970.537,00 atau 97,75 %. Untuk mendukung 6 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp 5.595.228.600 ,00 Realisasi sebesar Rp 5.570.402.255,00 atau 99,56%. Untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan dengan anggaran Rp 4.700.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 4.355.496.807,00 atau 92,067%. Untuk mendukung 6 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional dengan anggaran Rp 5.200.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 5.103.424.127,00 atau 98,14%. Untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 8) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 8.000.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 6.624.422.537,00 atau 82,81%. Untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Adanya perubahan peraturan terkait Pemerintah Daerah yang mempengaruhi konsistensi dokumen perencanaan;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- 3) Masih kurangnya kepedulian PD terhadap substansi dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan perangkat daerah termasuk dalam penentuan program/kegiatan prioritas serta lokasi kegiatan;
- 4) Belum meratanya pengetahuan dan kompetensi dalam perencanaan pembangunan pada SDM yang ada;
- 5) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan karena kurangnya kedisiplinan pelaporan oleh PD;
- 6) Belum seimbangnya pembagian beban kerja pada masing - masing unit kerja;

Solusi:

- 1) Adanya sistem perencanaan pembangunan yang dapat dipantau oleh seluruh bidang;
- 2) Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
- 3) Jumlah SDM yang memadai ditinjau dari tingkat pendidikan dan analisa jabatan;
- 4) Terjalinnya koordinasi yang cukup baik dengan Perangkat Daerah;
- 5) Adanya peraturan yang jelas terkait tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan.

3.13 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Pada Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan Rumusan Tujuan sebagai berikut : “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik”.

b. Sasaran dan Program

Sejalan dengan Rumusan Tujuan diatas, maka Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2017 adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, yang kemudian dilaksanakan oleh 1 program pembangunan, berikut adalah uraian sasaran/program 5 (lima) indikator beserta target dan realisasinya:

Tabel Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dibandingkan realisasi tahun lalu)	8,76	12,34	140,87
	2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	50	57,99	115,98
	3. Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (dari sisa piutang tahun tetap 2016)	10	31,78 *)	102,76
	4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	86	88,37	102,76
	5. Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,84	100,98
	6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	45	51,41	114,24

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan PAD (dibandingkan realisasi tahun 2013)	28,38	51,90	182,88
	2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (dari sisa piutang tahun tetap 2013)	50,00	93,67*)	187,34
	3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	86,84	100,98
	4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001 :2008	1	1	100
	5. Jumlah Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	45	51,41	114,24

*) data piutang belum diaudit

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

SASARAN: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, ditetapkan melalui 6 indikator kinerja yaitu:

INDIKATOR SASARAN:

- Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2017, direncanakan naik sebesar 8,76% dari realisasi PAD Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 12.797.234.879.918,00, pada akhir tahun 2017, realisasi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 14.376.290.854.929,40, naik Rp 1.579.055.975.011,43 dari realisasi tahun 2016, sehingga capaian kinerjanya

adalah 12,34%, lebih tinggi 3,58% dari target yang telah ditentukan. Kinerja positif penerimaan PAD ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan seluruh sektor Pajak Daerah yang sangat baik, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

- Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan penerimaan PAD Jawa Timur dengan penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Jumlah realisasi PAD Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebesar Rp 17.326.483.824.756,20 dan jumlah Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 adalah sebesar Rp 28.879.164.203.941,90, sehingga rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menjadi 57,99%, lebih tinggi 7,99% dari target tahun 2017 sebesar 50%. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah penerimaan dari sektor dana perimbangan, dimana kebijakan Pemerintah Pusat atas pengalokasian dan penyalurannya bersifat dinamis, artinya bergantung pada penerimaan dalam negeri netto dan realisasi belanja tahun sebelumnya.
- Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor, pada tahun 2017 ditetapkan sisa piutang tahun 2016 adalah sebesar Rp 912.110.840.443,00, dan Target pencairan piutang tahun 2017 adalah 10%. Hasil perhitungan sisa piutang sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp 622.279.312.631,00 dan jumlah piutang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp 289.831.527.812, sehingga persentase penurunan piutang (tunggakan) PKB mencapai 31,78% dari piutang tahun tetap 2017 sebesar Rp 912.110.840.443,00,00. Kinerja positif pencairan piutang pajak kendaraan bermotor salah satunya disumbang oleh upaya penagihan secara *door to door* oleh petugas pajak, pelaksanaan operasi bersama dengan melibatkan pihak terkait (Polri) dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan secara gencar kepada masyarakat melalui berbagai media. Sebagai catatan data pencairan piutang tersebut adalah data *unaudited* dengan periode sampai dengan bulan Desember 2017.

- Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, adalah untuk mengetahui seberapa besar rasio wajib pajak dalam satu tahun pajak yang melakukan pengesahan ulang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio antara Wajib Pajak yang melakukan penelitian ulang dan yang wajib melakukan penelitian ulang mencapai 88,37%. Lebih tinggi 2,37% dari target tahun 2017 sebesar 86%. Capaian positif ini antara lain disebabkan oleh upaya penagihan secara *door to door* oleh petugas pajak, pelaksanaan operasi bersama dengan melibatkan pihak terkait (Polri).
- Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2017 perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survey pada 48 KB samsat di Jawa Timur adalah sebesar 86,64, lebih tinggi 0,64 dari target yang ditetapkan.
- Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan, pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 45%, dari hasil pengukuran pada akhir tahun 2017 diperoleh data persentase pengguna layanan samsat unggulan adalah sebesar 51,41%, lebih tinggi 6,41% dari target tahun 2017. Peralihan pengguna layanan dari KB Samsat Induk, ke Samsat Unggulan sangat penting, karena maksud dari diversifikasi layanan tersebut adalah untuk memberikan pilihan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Program

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pagu anggaran Rp 36.013.549.627,00 sampai dengan triwulan IV tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar Rp 32.264.463.511,00 atau 95,14% untuk mendukung 48 kegiatan yang secara rinci masing-masing realiasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan kewenangan yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur merupakan kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaan

tugas tersebut, ditemukan beberapa permasalahan pada saat pemungutan pendapatan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, yang dijelaskan sebagai berikut:

Permasalahan:

- 1) Penghitungan dan penetapan target Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan secara cermat, terukur, rasional dengan memperhatikan data potensi objek tahun lalu dan perkiraan tambahan/pengurangan pada tahun berjalan. Namun, dengan adanya kebijakan khusus pemberian insentif keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada triwulan IV, berdampak pada penerimaan PKB, yang lebih besar, karena adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga realisasi PKB akhir tahun jauh melebihi target yang telah ditentukan;
- 2) Laju pertumbuhan penjualan kendaraan baru roda 4 tumbuh sebesar 3,33% atau 4.158 unit apabila dibandingkan dengan tahun 2016, namun pertumbuhan positif ini tidak diikuti oleh kendaraan baru roda 2, karena pada tahun 2017 penjualannya turun sebesar 13,72% atau berkurang 140.859 unit. Secara kumulatif pertumbuhan jumlah kendaraan baru di Jawa Timur turun sebesar 11,87% atau berkurang 136.701 unit. Kondisi ini membuat penerimaan BBNKB Tahun ini lebih rendah 0,27% dari realisasi tahun lalu, namun tetap melebihi target tahun 2017;
- 3) Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2017, tidak menunjukkan potensi penerimaan sesungguhnya, karena terdapat penerimaan tunda salur sebesar 339 Milyar 780 Juta 129 Ribu 171 Rupiah yang merupakan realisasi Pajak Rokok bulan Oktober dan November Tahun 2016 yang diterima pada bulan Maret 2017;
- 4) Realisasi belanja langsung tidak dapat dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan antara lain karena pembatalan beberapa kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, serta sisa hasil lelang pengadaan barang/jasa yang nilainya cukup besar.

Solusi:

- 1) Melakukan pembaruan penghitungan target Pendapatan Asli Daerah tahun berikutnya, dengan memperhatikan kondisi yang mempengaruhi penerimaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada triwulan IV tahun 2017;
- 2) Memperhatikan secara seksama proyeksi penjualan kendaraan baru dari sektor roda dua dan roda empat untuk kemudian dijadikan basis penyesuaian perhitungan penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Memastikan bahwa penyaluran Pajak Rokok dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama, salah satunya dengan cara melaporkan bagi hasil pajak secara tepat waktu;
- 4) Melakukan tinjauan ulang secara cermat atas pelaksanaan belanja kegiatan yang tidak optimal, untuk dijadikan dasar dalam rencana penganggaran kebutuhan belanja kegiatan tahun berikutnya.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Penghargaan Nasional Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nomor 28 kategori Provinsi, Untuk Layanan Samsat Jujuk Desa Yang Ramah (JuDes) pada Kantor Bersama Samsat Jombang.

3.14 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a. Tujuan

- 1) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur	1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur	Tepat waktu	Tepat waktu	100
	2. Ketepatan waktu penyusunan RPAPBD Provinsi Jawa Timur	Tepat waktu	Tepat waktu	100
	3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	320	138,7	43,3
	4. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target (persen)	4,8	6	75
	5. Persentase OPD dengan realisasi diatas 95%	25	30	120
	6. Persentase OPD yang menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building	80	87,14	108,92
	7. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	85	77,03	90,62
	8. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat	21,38	21,35	99,85
	9. Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan	98,89	99,74	100,85
	10. Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur	60	57	95
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperda dan Rapergub tentang APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan jumlah sertifikat aset tetap tanah (dokumen, dokumen, sertifikat)	3, 3, 100	3, 3, 40	80

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota se Jawa Timur	1. Persentase Raperda/ Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran	100	100	100
	2. Persentase Raperda/ Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	100	100	100
	3. Persentase Raperda/ Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjwb n Pelaksanaan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	100	100	100
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim (Kab/Kota)	38	38	100

Pada Tahun 2017 kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

➤ Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur.

Target penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 adalah tepat Waktu, dan dapat terealisasi juga dengan Tepat Waktu dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 100 %. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disampaikan Gubernur Jawa Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal **12 Oktober 2017**. Mekanisme dan tahapan tersebut, sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada

DPRD paling lambat **minggu pertama bulan Oktober** tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan kondisi diatas, penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dikategorikan **“Tepat Waktu”**.

➤ Ketepatan waktu penyusunan RPAPBD Provinsi Jawa Timur.

Target penyusunan RPAPBD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 adalah tepat Waktu, dan dapat terealisasi juga dengan Tepat Waktu dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 100 %. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) disampaikan Gubernur Jawa Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal **10 Agustus 2017**. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat **minggu kedua bulan September** tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan kondisi diatas, penyusunan Raperda PAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dikategorikan **“Tepat Waktu”**.

➤ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Target Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2017 sebesar 320 % dan terealisasi sebesar 138,7 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 43,3 %, hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, bahwa terdapat perubahan postur

transfer dana perimbangan ke daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi. Semula dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Non Fisik antara terdiri dari :

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah;
3. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, dll.

Dengan adanya ketentuan baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sehingga dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp.3.455.045.286.752,00 atau 38 persen. Selain itu, kecilnya realisasi rasio kemandirian keuangan daerah disebabkan karena amanat Undang-undang tersebut, terdapat beberapa pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (dan sebaliknya), Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota (dan sebaliknya) yang berasal dari pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah menjadi berkurang.

- Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target.

Target Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target pada Tahun 2017 dengan target sebesar 4,8% dan terealisasi sebesar 6% dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 75 %

- Persentase OPD dengan realisasi diatas 95%.

Target Persentase OPD dengan realisasi diatas 95% pada Tahun 2017 sebesar 25 % dan terealisasi sebesar 30 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 120 %

- Persentase OPD yang menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building.

Target Persentase OPD yang menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building pada Tahun 2017 sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 87,14 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 108,92 %

- Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Target Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Tahun 2017 sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 77,03 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 90,62 %

- Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat.

Target Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat pada Tahun 2017 sebesar 21,38 % dan terealisasi sebesar 21,35 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 99,85 %

- Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan.

Target Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan pada Tahun 2017 sebesar 98,89% dan terealisasi sebesar 99,74% dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 100,85 %

- Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Target Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 sebesar

60% dan terealisasi sebesar 57 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 95 %

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota se Jawa Timur

- Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Target pada Tahun 2017 sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 100 %

- Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Target pada Tahun 2017 sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 100 %

- Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Target pada Tahun 2017 sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 % dengan persentase perbandingan target dan realisasi sebesar 100 %

c. Program

- 1) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 36.659.928.000,- dan terealisasi sebesar Rp 29.739.042.787,- atau 81,12 %, untuk mendukung 11 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 2) Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 5.148.855.300,- dan terealisasi sebesar Rp 3.924.758.173,- atau 76,23%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Sertifikasi aset tetap tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya (satu tahun anggaran), karena proses pengajuan sertifikasi harus clean dan clear sehingga memerlukan waktu dan beberapa tahapan, antara lain harus melakukan klarifikasi dengan tetangga kiri, kanan, depan serta belakang untuk memastikan tapal batas dan mengetahui proses perolehan;
- 2) Terkait dengan kegiatan rapat, bimbingan teknis maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh BPKAD, seringkali antara jumlah peserta yang diusulkan SKPD berbeda dengan jumlah yang hadir pada waktu pelaksanaan pelatihan, sehingga menyulitkan dalam penyediaan akomodasi, konsumsi dan pengadministrasiannya;
- 3) Beberapa SKPD kurang tertib, disiplin dan responsif dalam menyampaikan usulan peserta pelatihan, seringkali baru disampaikan ketika pelaksanaan pelatihan sedang berlangsung, sehingga penggantian peserta tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh SKPD pengirim;
- 4) Pelaksanaan kegiatan belum optimal hal tersebut dikarenakan volume kegiatan di Internal BPKAD, sehingga beberapa kali jadwal pelaksanaan kegiatan di UPT LPKD bersamaan dengan bidang-bidang dan bahkan dengan peserta yang sama.

Solusi:

- 1) Membantu mendorong terwujudnya SDM melalui pelatihan dan bimtek agar memiliki pola pikir kreatif, inovatif dan trampil yang dapat

memberikan solusi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

- 2) Sebelum mengajukan usulan pensertifikatan, perlu dilakukan rekon data aset dengan SKPD pengguna dan melakukan komunikasi yang aktif antara SKPD, BPKAD, BPN, Notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan warga sekitar objek sertifikasi terkait status aset tanah dan Kab/Kota serta melakukan identifikasi dan penyempurnaan tata kelola aset
- 3) Membuat Surat Edaran kepada SKPD yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa nama-nama yang diusulkan oleh SKPD wajib mengikuti pelatihan di UPT LPKD sesuai yang telah diusulkan;
- 4) Jika Usulan peserta pelatihan mengalami tambahan, maka SKPD pengirim, diharuskan untuk mengirim perubahan nama peserta pelatihan sebelum pelaksanaan pelatihan minimal H-3 pelaksanaan pelatihan;
- 5) Menyusun jadwal kegiatan (silabus pelatihan) terkait pelatihan teknis selama 1 tahun anggaran.

3.15 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

a) Tujuan

- 1) Mewujudkan penataan SDM Aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Mewujudkan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi;
- 3) Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin, integritas, dan berkinerja tinggi.

b) Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengikuti uji kompetensi dan lulus	85%	54,92 %	64.61%
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yg objektif, transparan dan akun tabel	85%	54,92%	64,61%
II. Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya	Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi	97%	84,22%	86,82%
1. Program Penyelenggaraan Pelayanan manajemen aparatur	Persentase Penataan SDM Aparatur Sesuai Dengan Formasi dan Kebutuhan	97%	84,22%	86,82%
III. Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang akurat	Persentase tingkat akurasi database kepegawaian	100%	93,52%	93,52%
1. Program pengembangan data Informasi	Persentase database yang berkualitas relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.	100%	93,52%	93,52%
IV. Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN	Persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN	100%	86%	86%
1. Program Pembinaan Anggota KORPRI dan Kelembagaan Unit KORPRI	Persentase pelaksanaan pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan Unit KORPRI	100%	97,73%	97,73%

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Pemerintahan (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur) yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditetapkan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- Persentase ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengikuti uji kompetensi dan lulus.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 54,92%, jadi belum mencapai target dengan evaluasi sebagai berikut :

Untuk kegiatan Kompetensi ASN (Assessment) Tahun 2017 difokuskan pada Jabatan Struktural meliputi (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dimana target 85% sebanyak 2.414 pegawai dari total seluruh jabatan struktural sebanyak 2.840 pegawai (termasuk Kasubag TU Sekolah) dan terealisasi sebanyak 1.326 pegawai jabatan struktural atau 54,92% hal ini disebabkan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima pelimpahan wewenang untuk tenaga pendidik dan non kependidikan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Penataan SDM Aparatur Sesuai Dengan Formasi dan Kebutuhan.

Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di Jawa Timur pada tahun 2017 dengan target sebesar 97 % dan terealisasi 84,22 % jadi belum mencapai target dari total seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

sebanyak 52,617 pegawai yang sudah tertata sebanyak 44.319 pegawai dengan analisa data sebagai berikut :

- a) Jabatan Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) sebanyak 2.840 pegawai.
- b) Pegawai untuk Jabatan fungsional (Medis, Paramedis, Non Medis) sebanyak 21.220 pegawai.
- c) Fungsional guru sebanyak 14.639 pegawai.
- d) Jabatan pelaksana sebanyak 5.620 pegawai.

Hal ini disebabkan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana turunan Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur di Tahun 2018 dengan merevisi Pergub Nomor 76 Tahun 2015 menjadi Pergub 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Fungsional dan pengembangan kompetensi melalui diklat teknis ,Ujian Dinas, dan Penyesuaian Ijazah (PI) serta pendistribusian pegawai sesuai syarat jabatan sehingga menciptakan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negeri (ASN) yang profesional dan berkualitas.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang akurat, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

➤ Persentase tingkat akurasi database kepegawaian.

Persentase tingkat akurasi database kepegawaian pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 93,52%. jadi belum mencapai target dengan evaluasi sebagai berikut:

Dari total jumlah seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 52,617 pegawai yang sudah mengupdate data kepegawaian secara lengkap dan akurat per 1 Januari 2018 sebanyak 49,207 pegawai atau 93,52%

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berupaya untuk mengembangkan aplikasi layanan data kepegawaian berbasis IT (*Information Tehnology*) melalui pengembangan aplikasi e-Master (Manajemen ASN Terpadu), sehingga akurasi dan kualitas database kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

Sasaran 4 : Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- Persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN

Persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai pada tahun 2017 dengan target 100% atau sebanyak 52.617 pegawai dan terealisasi sebesar 86% atau sebanyak 45.250 pegawai jadi belum memenuhi target dengan evaluasi sebagai berikut masih belum adanya pengukuran reward dan punishment secara jelas (*e-kinerja*).

c) Program

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan anggaran sebesar Rp.3.433.017.920,00 terealisasi Rp. 3.339.723.034,00 atau 97,28% untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom

2) Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur

Program penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 4.891.982.080,00 terealisasi Rp. 4.539.086.785,00 atau capaian kinerja keuangan 92,78%, untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri

dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

3) Program Pengembangan data informasi.

Program pengembangan data informasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.490.000.000,00 terealisasi Rp. 1.393.793.485,00 atau 93,54% untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

4) Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI

Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,00 terealisasi Rp. 3.420.642.381,00 atau 97,73% untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan secara umum didalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau majemen ASN antara lain:

- 1) Distribusi pegawai ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi masih belum maksimal dikarenakan masih belum adanya standar kompetensi jabatan khususnya untuk standar kompetensi jabatan pelaksana dan peta jabatan untuk kebutuhan pemetaan jabatan sesuai dengan syarat jabatan.
- 2) Kompetensi pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum dikembangkan secara optimal baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural.
- 3) Pelaksanaan integrasi akurasi database kepegawaian untuk pelayanan kepegawaian belum terintegrasi sepenuhnya dengan database kabupaten / kota di jawa timur.

- 4) Pelaksanaan evaluasi pengukuran kinerja untuk setiap pegawai ASN di masing – masing jabatan belum berlandaskan pada System Merit
- 5) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih diampu satu program yang bertanggungjawab dua bidang, contoh Program pembinaan dan pengembangan aparatur dan program penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur, sehingga didalam pertanggungjawaban capaian kinerja atau kerberhasilan dari pelaksanaan program masih kurang optimal dari sisi pertanggungjawaban capaian kinerja program.

Solusi

- 1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah menyusun revisi Pergub Nomor 76 Tahun 2015 menjadi Pergub 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Fungsional serta menyusun standar kompetensi jabatan baik jabatan tinggi, administrator, pengawas dan pelaksana sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan rencana pegawai yang ideal untuk 5 tahun ke depan dengan penetapan nama jabatan dan uraian tugas jabatan yang jelas.
- 2) Pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diarahkan pada kegiatan melalui diklat teknis , ujian dinas, ujian pembina, ujian pelaksanaan kegiatan penyesuaian ijazah (PI) dan pengembangan kompetensi lainnya,
- 3) Pengembangan Aplikasi E- Master dengan paradigma Sistem Informasi yang berbasis IT (Information Technology) dan Integrasi Database Kepegawaian sehingga menghasilkan database kepegawaian yang akurat dan akuntabel.
- 4) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mengembangkan aplikasi untuk mengukur kinerja masing-masing individu dengan aplikasi E-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai secara Elektronik) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga diharapkan lebih mempertajam dan memperjelas Kinerja serta *Reward*

and Punishment untuk **penerapan *system performance base pay* (sistem penggajian / pembayaran)**, maupun *competency based pay*.

- 5) Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 telah mengakomodir dimana satu bidang mengampu satu program dan untuk jabatan pengawas sudah mengampu minimal satu program sehingga didalam pertanggungjawaban capaian kinerja atau keberhasilan dari pelaksanaan program masing-masing bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur lebih optimal dari sisi pertanggungjawaban capaian kinerja program dan kegiatan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Pada Tahun 2017 BKD Prov.Jatim mampu meningkatkan prestasinya di BKN award dengan menerima penghargaan sebagai instansi **“Pengelola Kepegawaian Terbaik”** tingkat Provinsi pada 8 (delapan) kriteria.
- 2) Pada Tahun 2017, Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo, kembali meraih apresiasi tinggi dari pemerintah pusat dengan pemberian penghargaan **Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun 2017** kategori Inovasi penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah. Hal ini tak lepas juga dari peran BKD Prov.Jatim dalam turut serta mendukung inovasi Sistem Merit tersebut.

3.16. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR**a. Tujuan**

- 1) Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien.
- 2) Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (Center of excellence).

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan	1. % Alumni Diklat Kepemimpinan	100%	89,71%	89,71%
	2. % Alumni Diklat Teknis	100%	74,28%	74,28%
	3. % Alumni Diklat Fungsional	100%	95,09%	95,09%
	4. % Alumni Diklat Prajabatan	100%	86,91%	86,91%
	5. % Perkembangan hasil belajar peserta diklat	57%	58,38%	58,38%
	6. % Alumni yang menerapkan hasil diklat di tempat kerjanya	84%	93%	93%
1. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan fungsional (orang)	5.704	4.941	86,62%
2. Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	Pemenuhan standart kompetensi aparatur (orang)	1.435	1.275	88,85%
II. Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional	1. Index kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur	81	80,48	99,36%
	2. Persentase widyaiswara yang memperoleh hasil evaluasi dengan kualifikasi memuaskan, dan sangat memuaskan	81%	86,51%	106,80%
	3. % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti			

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
		100%	100%	100%
1. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan fungsional (orang)	5.704	4.941	86,62%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur berdasarkan :

Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan 6 indikator yaitu :

➤ **Persentase Alumni Diklat Kepemimpinan**

Target Persentase Alumni Diklat Kepemimpinan pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 89,71%. Tidak tercapainya target 100% disebabkan Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan sendiri penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola Kemitraan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

➤ **Persentase Alumni Diklat Teknis**

Target Persentase Alumni Diklat Teknis pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 74,28%. Tidak tercapainya target 100% disebabkan terbatasnya anggaran di Kab/Kota untuk pengembangan kompetensi aparatur khususnya diklat teknis serta belum ada regulasi yang mengharuskan aparatur wajib mengikuti diklat dengan sanksi yang tegas bila tidak mengikuti diklat.

➤ **Persentase Alumni Diklat Fungsional**

Target Persentase Alumni Diklat Fungsional pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 95,09%. Tidak tercapainya target 100% disebabkan beberapa peserta ada yang mengundurkan diri/ tidak hadir pada saat pelaksanaan karena

ditugaskan oleh instansinya untuk urusan tugas lain, atau saat ditugaskan mengikuti diklat yang bersangkutan jatuh sakit.

➤ **Persentase Alumni Diklat Pra Jabatan**

Target Persentase Alumni Diklat Pra Jabatan pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 86,91%. Tidak tercapainya target 100% disebabkan adanya moratorium rekrutmen PNS, sedangkan CPNS yang ada sebagian besar sudah mengikuti diklat Prajabatan.

➤ **Persentase Alumni yang menerapkan hasil diklat di tempat kerjanya**

Target Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat pada tahun 2017 adalah sebesar 84% dengan realisasi sebesar 93%. Pelampauan realisasi dari target ini disebabkan dalam kurikulum dan silabi diklat khususnya untuk diklat kepemimpinan mewajibkan peserta untuk membuat proyek perubahan dan diimplementasikan di instansinya dan alumni diklat secara sadar menerapkan hasil diklat di tempat kerjanya.

➤ **Persentase perkembangan hasil belajar**

Target Persentase perkembangan hasil belajar pada tahun 2017 adalah sebesar 57% dengan realisasi sebesar 58,38%. mengalami peningkatan dari target sebesar 1,38% disebabkan materi yang diajarkan dipandang oleh peserta diklat sangat bermanfaat ditempat kerjanya serta penyampaian materi diklat oleh narasumber dapat dipahami oleh peserta diklat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Sumberdaya Kediklatan Yang Modern dan Profesional, ditetapkan 3 indikator yaitu :

➤ **Index Kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur**

Target Index Kepuasan peserta diklat terhadap pelayanan diklat aparatur pada tahun 2017 adalah sebesar 81 dan realisasi sebesar 80,48 dengan capaian 99,36%. Tidak tercapainya target sebesar 81 ini

disebabkan belum optimalnya penyediaan sarana prasarana, dan pelayanan kepada peserta diklat yang hasilnya diukur melalui *feedback* yang diberikan oleh peserta, alumni maupun *user*.

➤ **Persentase widyaiswara yang memperoleh hasil evaluasi dengan kualifikasi memuaskan, dan sangat memuaskan**

- Target Persentase widyaiswara yang memperoleh hasil evaluasi dengan kualifikasi memuaskan, dan sangat memuaskan pada tahun 2017 adalah sebesar 81% dengan realisasi sebesar 86,51% mengalami peningkatan sebesar 5,51% disebabkan secara berkala dilakukan kegiatan pengembangan widyaiswara berupa workshop, seminar maupun pelatihan yang berdampak pada meningkatnya kompetensi dan performance widyaiswara.

➤ **% Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti**

Target Persentase Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 adalah sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa hasil audit internal dan eksternal dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 semua temuan dari hasil audit telah ditindaklanjuti untuk diperbaiki, serta Badan Diklat Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan oleh IKRCS mendapatkan sertifikat ISO 9001: versi 2015.

c. Program

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.82.415.357.300,-. Realisasi sebesar Rp.64.830.889.101,- atau 78,66%. Untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing masing realisasi perkegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom
- 2) Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 9.895.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 8.464.414.569,- atau 85,54%. Untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing masing realisasi

perkegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan semua tahapan dalam siklus diklat secara konsisten, terutama tahapan pra diklat, pelaksanaan dan evaluasi diklat;
- 2) Terbatasnya tenaga pengajar untuk diklat teknis dan fungsional;
- 3) Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam menyelenggarakan diklat utamanya dalam penyediaan sarana prasarana belum memadai;
- 4) Belum terstandarnya pelaksanaan diklat aparatur yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi kesenjangan kualitas penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota.

Solusi

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat di kab/kota se Jawa Timur serta hanya memberikan izin penyelenggaraan diklat yang memenuhi kriteria.
- 2) Memantapkan penyelenggaraan diklat dengan bekerjasama dengan instansi teknis untuk menyediakan tenaga pengajar/widyaiswara diklat dan melakukan pelatihan bagi aparatur kab/kota khususnya Training Of Trainer (TOT) untuk diklat teknis dan diklat fungsional;
- 3) Melakukan koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan program pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan berdampak nyata terhadap kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka seluruh tahapan

dalam pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dan terintegrasi;

- 4) Melakukan evaluasi diklat dan peningkatan kapasitas SDM pengelola diklat Kab/kota melalui Management of Training (MOT) untuk pejabat struktural pengelola diklat kab/kota dan Training Officer Course (TOC) untuk petugas diklat serta pembinaan dalam pengelolaan diklat aparatur;

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 1) Widyaiswara berprestasi Tingkat Nasional Terbaik III Tahun 2017 dari LAN-RI
- 2) Penghargaan Anugerah KASN Tahun 2017 kategori Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Pelayanan Masyarakat Assesment Center Bagi Instansi Pemerintah

3.17 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Tujuan

Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 adalah:

- 1) Meningkatkan hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan diseminasi hasil litbang serta kajian;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3 * 100)
I. Meningkatnya hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders	1. Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian (dokumen)	28	28	100
	2. Persentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders (%)	25	75	300
1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian (dokumen)	28	28	100
II. Meningkatnya pelaksanaan diseminasi hasil litbang serta kajian	Persentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media (%)	30	57	190,48
1. Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Kajian	Persentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan	30	57	190,48
III. Meningkatnya pelaksanaan pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SIDA (%)	32	36,84	115,13
1. Program Pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Persentase Cakupan Fasilitasi dalam Pelaksanaan SIDA Jatim	32	36,84	115,13

Pada Tahun 2017 kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders

- Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian (dokumen);
Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian pada tahun 2017 adalah sebanyak 28 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Persentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders;
Persentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders pada tahun 2017 adalah sebesar 75%. Persentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders mengalami kenaikan sebesar 300% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih terlalu kecilnya pada saat penetapan target. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Balitbang telah mampu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program yang lebih intensif dengan stakeholder terkait sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan hasil litbang secara signifikan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelaksanaan diseminasi hasil litbang serta kajian

- Persentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media (jurnal dan website)
Persentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media pada tahun 2017 sebesar 57%, hal ini mengalami peningkatan sebesar 190,48% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya kedalam jurnal ilmiah. Selain itu juga disebabkan oleh semakin banyaknya kesempatan yang diberikan oleh Balitbang untuk mempublikasikan hasil litbang melalui media jurnal dan website Balitbang.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelaksanaan pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur

- Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SiDa

Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SiDa pada tahun 2017 sebanyak 36,84%. Terdapat peningkatan sebesar 115,13% untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SiDa.

c. Program

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan anggaran Rp.3.682.000.000 Realisasi sebesar Rp. 3.650.293.832 atau 99,14% untuk mendukung 13 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 2) Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran Rp. 750.913.000 Realisasi sebesar Rp. 700.435.272 atau 93,28% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
- 3) Program Pendampingan SiDa Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan anggaran Rp. 848.913.000 Realisasi sebesar Rp. 848.414.650 atau 99,94% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar stakeholder;
- 2) Belum banyak hasil-hasil penelitian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh stakeholder maupun sebagai perencanaan dan kebijakan;
- 3) Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna;

- 4) Kurang adanya rasa percaya masyarakat maupun stakeholder terhadap hasil litbang.

Solusi

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait baik dalam menentukan tema kegiatan litbang maupun dalam pemanfaatan hasil litbang;
- 2) Meningkatkan diseminasi & sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian kepada stakeholder dalam rangka mempublikasikan kepada masyarakat luas baik melalui website, jurnal dan buletin;
- 3) Mempertajam/meningkatkan kualitas hasil penelitian melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi atau dengan para pakar;
- 4) Menciptakan inovasi-inovasi IPTEK secara profesional dan menjaga citra hubungan yang konsisten dengan kebutuhan pengguna;
- 5) Meningkatkan sinergi antar lembaga litbang dan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi litbang, kerjasama litbang, Forum Komunikasi kelitbangan, Seminar, Diskusi, Lokakarya atau Workshop;
- 6) Membangun image kepada masyarakat bahwa pengembangan Hasil Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan.

3.18 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintah dari Provinsi Jawa Timur;
2. Meningkatkan fasilitasi promosi dibidang UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya pelayanan kepada unsur pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan (%)	100%	99,94%	99,94%
1. Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan (%)	100%	99,94%	99,94%
II. Meningkatnya fasilitasi promosi potensi daerah	1. Jumlah kegiatan pameran Jawa Timur di Jakarta	51 kali	51 kali	100%
	2. Jumlah kegiatan pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta	78 kali	78 kali	100%
	3. Jumlah pelatihan keterampilan	1 kali	1 kali	100%
1. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Persentase pelaksanaan promosi potensi daerah	100%	96,64%	96,64%

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Urusan Pemerintahan (Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur) yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintahan, ditetapkan 1 indikator kinerja yaitu :

- Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,94%, dikarenakan :

Pada prinsipnya tidak ada kendala yang berarti hanya saja pada saat-saat tertentu keterbatasan personil, transportasi, akomodasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur terkadang tidak maksimal dalam memberikan pelayanan secara bersamaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Promosi Potensi Daerah, ditetapkan dengan 1 indikator kinerja yaitu :

➤ Persentase pelaksanaan promosi potensi daerah

Persentase pelaksanaan promosi potensi daerah pada tahun 2017 dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 96,64%, yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Terpenuhinya kegiatan pameran Jawa Timur di Jakarta pada Tahun 2017, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan akan tetapi ada sedikit kendala, hal tersebut dikarenakan :
 - Adanya penyesuaian jadwal kegiatan oleh Pihak TMII karena event tersebut jatuh pada bulan Ramadhan yaitu Pameran Pekan Liburan Sekolah, sehingga Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur menjadwalkan ulang realisasi kegiatan dimaksud.
 - Terdapat penyesuaian perhitungan sewa lahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pameran yaitu pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), sehingga anggaran diefisienkan sesuai dengan penggunaannya.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta pada tahun 2017, dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan :

- Jadwal kegiatan tersusun pada perencanaan dan dapat terealisasi tanpa hambatan waktu dan kesiapan Tim Kesenian yang pentas, sehingga bisa tercapai tingkat kemajuannya.
 - Semakin tingginya minat masyarakat JABODETABEK terhadap seni budaya Jawa Timur.
- 3) Jumlah Pelatihan Ketrampilan kepada Paguyuban Warga Jakarta Asal Jawa Timur (PAWARTA JATIM) pada tahun 2017 dapat terealisasi memenuhi target sesuai jadwal yang direncanakan, hal tersebut dikarenakan :
- Tingginya minat anggota PAWARTA JATIM untuk mengikuti pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga semua bisa berjalan dengan baik.

c. Program

- 1) Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah pada tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 1.034.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.033.369.737,00 atau 99,94%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 14.982.135.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.478.793.716,00 atau 96,64%, untuk mendukung 3 kegiatan yang masing-masing secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pada aspek pelayanan pada saat saat tertentu keterbatasan personil, transportasi, akomodasi seringkali tidak maksimal didalam melayani secara bersamaan;
- 2) Adanya jadwal kegiatan pameran yang disesuaikan oleh Pihak TMII karena event tersebut jatuh pada bulan Ramadhan yaitu Pameran Pekan Liburan Sekolah, sehingga Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur menjadwalkan ulang realisasi kegiatan dimaksud
- 3) Terdapat penyesuaian perhitungan sewa lahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pameran yaitu pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), sehingga anggaran diefisienkan sesuai dengan penggunaannya.

Solusi

- 1) Penyempurnaan standar pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif dengan mengacu pada prinsip standar pelayanan publik.
- 2) Kedepan lebih intensif koordinasi dengan pihak TMII agar bisa menyesuaikan event pameran sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3) Didalam perencanaan anggaran sewa lahan dan lain-lain agar lebih teliti sehingga perhitungan angka didalam pelaksanaan tidak terdapat kelebihan anggaran dan selalu menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas.
- 4) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan evaluasi terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.

3.19. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**a. Tujuan**

- Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jatim Kondusif

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol	1. Persentase peningkatan Ormas/LSM yang aktif	1	2,45	245
	2. Persentase terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	20	5,26	26,3
II. Meningkatnya penghormatan HAM	1. Persentase penurunan kejadian terkait Politik	15	16,67	111,13
	2. Persentase penurunan kejadian terkait HAM	15	20,83	138,87
III. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenteram, tertib, dan aman di masyarakat	1. Persentase penurunan kejadian yang menonjol terkait poleksosbud dan tibmas	15	15,3	102
	2. Persentase terbentuknya FKDM:			
	- Kab/Kota	5	5,26	105,2
	- Kecamatan	10	38,86	388,6
	- Desa/Kel	10	0	0
	3. Persentase penurunan kejadian terkait keagamaan	15	16,67	111,13

Pada Tahun 2017 kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ **Persentase Peningkatan Ormas / LSM yang aktif**

Persentase peningkatan Ormas/LSM yang aktif pada tahun 2017 dengan target sebesar 1 dan terealisasi sebesar 2,45 atau 245 persen (Mencapai target). Ormas/LSM yang aktif pada tahun 2016 terhitung sebanyak 449 organisasi, sedangkan pada tahun

2017 sebanyak 460 organisasi atau mengalami peningkatan sebanyak 11 organisasi. Mengingat terbitnya Keputusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas nomor 82/PUU-XI/2013/2013 tanggal 23 Desember 2014, khususnya terkait dengan teknis pendaftaran Ormas yang salah satunya menyebutkan bahwa pada prinsipnya Ormas dapat terdaftar disetiap tingkat instansi pemerintahan dan dapat juga tidak terdaftar.

➤ **Persentase Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)**

Persentase terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten/Kota pada Tahun 2017 dengan target sebesar 20 dan terealisasi sebesar 5,26 atau 26,3 persen (Belum mencapai target). Namun secara jumlah keseluruhan FPK yang terbentuk di Kab/Kota di Jawa Timur sebanyak 31 Kab/Kota pada tahun 2017 atau sudah terbentuk di 81,58 persen, yang target pada akhir masa jabatan tahun 2019 terbentuk di 38 Kab/Kota.

Sasaran 2: Meningkatnya penghormatan HAM, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

➤ **Persentase Penurunan Kejadian terkait Politik**

Persentase Penurunan Kejadian terkait Politik pada Tahun 2017 dengan target sebesar 15 dan terealisasi sebesar 16,67 atau 111,13 persen (Mencapai target). Kejadian terkait Politik tahun 2017 sebanyak 15 kejadian dan tahun 2016 sebanyak 18 kejadian atau turun sebanyak 3 kejadian. Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 di Kota Batu berjalan lancar dengan partisipasi pemilih sebesar 81,2 persen.

➤ **Persentase Penurunan Kejadian terkait HAM**

Persentase Penurunan Kejadian terkait HAM pada Tahun 2017 dengan target sebesar 15 dan terealisasi sebesar 20,83 atau

138,87 persen (Mencapai target). Kejadian terkait HAM pada tahun 2016 sebanyak 48 kejadian, dan pada tahun 2017 sebanyak 38 kejadian, atau turun 10 kejadian. Koordinasi yang kuat antara instansi vertikal dan Pemerintah Daerah sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan HAM. Sehingga dapat menekan jumlah kejadian terkait HAM di wilayah Jawa Timur.

Sasaran 3: Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenteram, tertib, dan aman di masyarakat, ditetapkan 3 indikator kinerja, yaitu:

- Persentase penurunan kejadian yang menonjol terkait poleksosbud dan tibmas

Persentase penurunan kejadian yang menonjol terkait poleksosbud dan tibmas pada Tahun 2017 dengan target sebesar 15 dan terealisasi sebesar 15,3 atau 102 persen (Mencapai target). Kejadian yang menonjol terkait Poleksosbud dan Tibmas pada tahun 2016 sebanyak 268 kejadian, dan pada tahun 2017 sebanyak 227 kejadian, atau turun sebanyak 41 kejadian. Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam bergerak bersama aparaturnya Pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Timur, sangat berhasil menekan jumlah kejadian yang menonjol terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan tibmas.

- Persentase terbentuknya FKDM

Persentase terbentuknya FKDM Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan pada Tahun 2017 dengan target untuk FKDM Kab/Kota sebesar 5 dan terealisasi sebesar 5,26 atau 105,2 persen (Mencapai target), target untuk FKDM Kecamatan sebesar 10 dan terealisasi sebesar 38,86 atau 388,6 persen (Mencapai target), dan target untuk FKDM Desa/Kelurahan sebesar 10 dan terealisasi sebesar 0 atau 0 persen (Belum

mencapai target). FKDM di tingkat Kab/Kota serta Kecamatan berhasil melampaui target, namun di tingkat desa/kelurahan terdapat beberapa yang belum membentuk FKDM, dikarenakan tingginya efektifitas FKDM tingkat Kecamatan yang dapat mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

➤ **Persentase penurunan kejadian terkait keagamaan**

Persentase penurunan kejadian terkait keagamaan pada Tahun 2017 dengan target sebesar 15 dan terealisasi sebesar 16,67 atau 111,13 persen (Mencapai target). Kejadian terkait keagamaan pada tahun 2016 sebanyak 18 kejadian, dan pada tahun 2017 sebanyak 15 kejadian, atau turun 3 kejadian. Peran aktif aparatur, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dalam melakukan komunikasi horisontal baik inter atau antar agama, sangat berperan dalam menekan angka kejadian terkait keagamaan di Jawa Timur.

c. Program

- 1) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, dengan anggaran sebesar Rp 750.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 719.666.551,- atau 95,96%, untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 896.780.228,- dan terealisasi sebesar Rp 822.171.638,- atau 91,68%, untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Perbaikan Proses Politik dengan anggaran sebesar Rp 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 244.136.240,- atau 97,65%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan

terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 4) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM dengan anggaran sebesar Rp 500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 475.339.972,- atau 95,07%, untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 1.250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.221.903.382,- atau 97,75%, untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 6) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sebesar Rp 153.219.772,- dan terealisasi sebesar Rp 148.456.590,- atau 96,89%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kondisi masyarakat saat ini cenderung kritis dan emosional (irasional).
- 2) Belum semua Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- 3) Belum optimalnya peran institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.
- 4) Kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM (KDRT).
- 5) Aktifitas Ormas/LSM belum semua melaporkan kepada Bakesbangpol Jawa Timur.
- 6) Kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dan budaya politik yang santun pada aparaturnya maupun elemen masyarakat.

- 7) Masyarakat Jawa Timur sangat pluralistik sehingga mudah terjadi gesekan.
- 8) Belum maksimalnya komunikasi untuk menyatukan pemahaman guna mewujudkan kerukunan umat beragama menuju kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Solusi

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) secara berkala mengkomunikasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) terkait pasal (8) PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah agar segera membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan jenjang/tingkatannya.
- 2) Dalam setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol (Bidang Integrasi Bangsa) selalu disosialisasikan tentang pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan bagi masyarakat, baik kepada Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota maupun elemen masyarakat lainnya dan mendorong Kabupaten/Kota segera membentuk FPK.
- 3) Meningkatkan penggalangan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- 4) Mendorong Pemkab/Kota untuk segera membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (yang belum membentuk).
- 5) Meningkatkan sinkronisasi kegiatan peningkatan kesadaran HAM dengan SKPD terkait agar lebih berperan dan membantu mengembangkan peningkatan wawasan sadar hukum dan HAM kepada Aparatur dan masyarakat secara menyeluruh, serta mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dengan pihak terkait, dengan tujuan meningkatkan perkembangan kepribadian dan wawasan serta kesadaran sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku sosial dalam masyarakat.

- 6) Meningkatkan monitoring kegiatan Ormas/LSM, serta sosialisasi Keputusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas nomor 82/PUU-XI/2013/2013 tanggal 23 Desember 2014, khususnya terkait dengan teknis pendaftaran Ormas, yang belum dibarengi dengan Juklak/Juknisnya.
- 7) Mengadakan sosialisasi, diseminasi, seminar tentang budaya politik yang demokratis, santun dan beretika melalui forum-forum dan harmonisasi sosial politik bagi aparatur dan elemen masyarakat.
- 8) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-masing agar tidak mudah terjebak pada eksklusivisme negatif dalam beragama.
- 9) Meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi suku, Agama, Ras dan antar golongan, serta meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi.

3.20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- 1) Pengurangan Resiko Bencana;
- 2) Penanganan Bencana yang Responsif;
- 3) Mendorong Pemulihan Kawasan Terdampak Pasca Bencana.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran / Program	Tahun 2017		Persen (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(4/3*100)
Menurunnya Resiko Bencana di Jawa Timur	Persentase pengembangan desa tangguh daerah rawan bencana	9,59%	17,26%	180%
	Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS yang berfungsi	100%	100%	100%
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana	40 desa	72 desa	180%
	Jumlah Sistem peringatan dini (EWS) yang berfungsi	78 buah	78 buah	100%
Meningkatnya Responsifitas dalam menangani bencana pada saat Pra, Tanggap dan Transisi Bencana di Jawa Timur	Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	100%	100%	100%
	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	100%	100%	100%
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah korban terdampak bencana yang ditangani	100%	100%	100%
	Jumlah kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	100%	100%	100%
Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	80%	80%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Jumlah rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	5 dok	4 dok	80%

Pada Tahun Anggaran 2017 Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Resiko Bencana di Jawa Timur

➤ **Persentase pengembangan desa tangguh daerah rawan bencana**

Persentase pengembangan desa tangguh daerah rawan bencana pada tahun 2017 dengan target 40 desa dan terealisasi sebesar 72 desa atau 180%.

Realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan karena adanya lomba desa tangguh yang memacu Kabupaten untuk membentuk desa tangguh, serta adanya kontribusi dari BPBD Kabupaten dan adanya bantuan dari Pusat (BNPB), dan ada bantuan dari NGO (Non Government Organization).

➤ **Persentase Early Warning System (EWS) / Alat peringatan dini di daerah rawan bencana**

Persentase Early Warning System (EWS) / Alat peringatan pada tahun 2017 dengan target 2 unit EWS dan terealisasi sebesar 2 unit atau 100%.

Realisasi yang dicapai telah sesuai dengan perencanaannya.

Sasaran 2 : Meningkatnya Responsifitas dalam menangani bencana pada saat Pra, Tanggap dan Transisi Bencana di Jawa Timur

➤ **Persentase korban terdampak bencana yang ditangani**

Persentase korban terdampak bencana yang ditangani pada tahun 2017 dengan target 100%

korban yang tertangani dan terealisasi sebesar 18.460 jiwa korban yang tertangani atau 100%

➤ **Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap**

Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap pada tahun 2017 dengan target 100% dan realisasi 413 kejadian atau 100%. BPBD Provinsi Jawa Timur telah melakukan penanganan bencana sesuai dengan waktu tanggap.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemulihan Pasca Bencana di Jawa Timur

➤ **Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan**

Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan pada tahun 2017 dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%.

Realisasi yang dicapai telah sesuai dengan perencanaannya.

c. Program

- 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.977.419.300,00 dan Realisasi sebesar Rp.1.927.904.900,00 atau 97,50% untuk mendukung program tersebut ada 4 kegiatan yang secara rinci dari realisasi anggaran serta capaian kinerja pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.780.220.400,00 dan Realisasi sebesar Rp.1.745.218.604,00 atau 98,03% untuk mendukung program tersebut ada 4 kegiatan yang secara rinci dari realisasi anggaran serta capaian kinerja pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
- 3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.534.273.200,00 dan Realisasi sebesar Rp.

1.528.314.619,00 atau 99,61% untuk mendukung program tersebut ada 4 kegiatan yang secara rinci dari realisasi anggaran serta capaian kinerja pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

- 4) Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana dengan Anggaran sebesar Rp. 74.984.400,00 dan Realisasi sebesar Rp.74.323.050,00 atau 99,12% untuk mendukung program tersebut ada 1 kegiatan yang secara rinci dari realisasi anggaran serta capaian kinerja pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Pembentukan desa tangguh belum menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- 2) Untuk penanganan korban bencana yang terjadi di daerah terpencil yang sulit di jangkau mobilitas kendaraan; (contoh untuk keperluan evakuasi)
- 3) Terbatasnya anggaran BNPB untuk pemulihan pasca bencana.

Solusi:

- 1) Pemberian pembekalan dan pencerahan kepada aparat dan tokoh masyarakat akan arti penting pembentukan desa tangguh;
- 2) Koordinasi lintas sektoral di intensifkan antara BPBD, SAR, TNI / POLRI dan lembaga teknis lain untuk penanganan bencana;
- 3) Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana diusulkan kembali baik melalui dana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten / Kota disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

3.21. BAKORWIL I MADIUN

a. Tujuan

Tujuan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun.

b. Sasaran dan Program

Target dan realisasi indikator kinerja Bakorwil Madiun pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 4/3 * 100)
I. Meningkatnya koordinasi, Fasilitasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kerja Bakorwil Madiun	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	87%	102,4%
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Presentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	85%	87%	102,4%
2. Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase jumlah keterisian data dan informasi	61%	61%	100%

Kinerja Bakorwil Madiun yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN I : Meningkatnya hasil koordinasi yang dapat ditindaklanjuti.

➤ Indikator : **Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.**

- Prosentase koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dengan target sebesar 85%, terealisasi sebesar 87%. Pencapaian target tersebut di atas tidak terlepas dari peran, tanggung jawab, integritas dan komunikasi mulai dari pimpinan dan pejabat struktural maupun staf di Bakorwil I Madiun terhadap peran tugas dan tanggung jawabnya.

c. Program

- 1) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.563.896.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.538.820.107,00 atau 98,40%, untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci, realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengembangan Data Informasi, dengan anggaran Rp. 307.231.000,- dan realisasi sebesar Rp. 299.919.996,- atau 97,62% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, di wilayah kerja Bakorwil Madiun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan harus segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan solusinya. Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain:

Permasalahan :

- 1) Adanya karakteristik daerah yaitu oleh perguruan pencak silat yang mempunyai tradisi nyekar para leluhur yang dilaksanakan pada saat Tahun Baru Islam agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.;
- 2) Permasalahan adanya kondisi alam di sebagian daerah yang berpotensi terkena bencana tanah longsor, banjir, dan daerah pegunungan rawan kekeringan;
- 3) Permasalahan geografis wilayah Bakorwil Madiun yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu penegasan batas wilayah dan terutama dalam rangka mewujudkan kerja sama antar daerah.

Solusi :

- 1) Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang efektif pada saat persiapan, dan pelaksanaan beserta unsur terkait dalam rangka mengantisipasi permasalahan/konflik sosial (gangguan keamanan);
- 2) Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan monitoring dalam rangka penanganan bencana dan mendorong kabupaten/kota yang rawan bencana untuk terus membangun kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 3) Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan monitoring dalam rangka mewujudkan kerjasama antar daerah yang saat ini telah terbentuk diantaranya KARISMAPAWIROGO, PAWONSARI, GOLEKPAWON.

3.22. BAKORWIL II BOJONEGORO**a. Tujuan**

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro.

b. Sasaran dan Program**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2017		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Bojonegoro	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Pembangunan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
2. Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Keterisian Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro.	68%	100%	147,06%

Pada Tahun 2017 kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Di Bojonegoro yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah kerja BAKORWIL Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro, ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

- Presentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dengan target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% atau 117,65% (melebihi pencapaian target tahun 2017 sebesar 32,65%)

c. Program

- 1) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.348.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.320.715.452,- atau 97,98 %, untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom;
- 2) Program pengembangan Data Informasi, dengan anggaran Rp. 115.860.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 108.885.169,- atau 93,98 %, untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan

- 1) Sinkronisasi dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah *RATUBANGNEGORO Tahun 2017.*

- Bahwa Kerjasama antar daerah belum dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga penanganannya juga tidak optimal;
 - Pembuatan MoU hanya sebatas untuk memenuhi LAKIP, hanya dibuatkan MoU tapi tidak ada tindaklanjutnya;
 - Pembuatan PKS tidak dibarengi dengan penyesuaian anggaran di masing-masing Kabupaten sehingga tidak ada aksi nyata dari PKS tersebut;
 - Bahwa daerah disekitarnya dianggap sebagai pesaing, sehingga mindset yang ada adalah bagaimana cara untuk mengalahkan pesaingnya, bukannya untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan untuk daerah masing-masing.
- 2) Sinkronisasi Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Angin Puyuh / Puting Beliung dan Tanah Longsor) di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017.
- Penyempitan saluran air/ sungai dan belum adanya pompa air untuk mengatur banjir;
 - Kerusakan hutan penyangga DAS semakin meningkat;
 - Ada indikasi perubahan karakteristik hidrografi banjir;
 - Peningkatan penggunaan lahan bantaran dan sempadan sungai sebagai tempat hunian.
- 3) Sinkronisasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta persiapan festival pertunjukan rakyat (PERTURA) di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017.
- Bahwa keberadaan KIM belum dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting, sehingga penanganannya juga tidak optimal;
 - Pembentukan KIM hanya sebatas untuk memenuhi permintaan Provinsi tapi tidak ada tindaklanjutnya;
 - Terlalu sering terjadi mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga program kerja tidak sempat untuk dilaksanakan sudah di mutasi;
 - Keberadaan KIM sering disalah artikan dengan kelompok UMKM, sehingga pembinaannya sering salah sasaran.

- 4) Koordinasi, Sinkronisasi Masalah Dampak Pelimpahan SMA/ SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah II Di Bojonegoro Tahun 2017.
 - Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten/ Kota menentukan dan melaksanakan kebijakan dalam pengembangan kurikulum, pembiayaan pendidikan, rehabilitasi sarpras sekolah, dana operasional pendidikan, pengadaan buku, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, dan sebagainya;
 - Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi;
 - Rendahnya kapasitas fiskal daerah yang mampu mempengaruhi kemampuan daerah secara ekonomi dalam pengelolaan pendanaan Pendidikan
- 5) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PMKS Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah II Di Bojonegoro Tahun 2017.
 - Belum semua Kabupaten/ Kota pada Wilayah Kerja BAPERWIL Bojonegoro memiliki shelter bagi PMKS yang akan di rujuk ke UPT. DINSOSPROV;
 - Usulan musrenbang Provinsi pada aplikasi E-Musrenbang tidak memperhatikan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga usulan tidak dapat diakomodir untuk tahun 2018;
 - Lemahnya koordinasi DINSOSPROV dengan Kabupaten /Kota dalam rangka akses kegiatan provinsi di Kabupaten/ Kota;
- 6) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.
 - Alih fungsi lahan Sawah terhadap pemukiman atau Pabrik;
 - Munculnya Masalah Pangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti : meningkatnya serangan hama, terjadinya kekeringan atau banjir, rusaknya jaringan irigasi, turunnya harga pangan, dan konversi lahan sawah.

- 7) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Terhadap Pengembangan dan Peningkatan Koperasi Wanita (KOPWAN) Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- Masih ada yang belum menerima bantuan Hibah ke-2 (dua) di Kabupaten/ Kota se Wilayah Kerja BAKORWIL II Bojonegoro karena tidak memenuhi persyaratan dalam pengelolaan Koperasi Wanita;
 - Adanya Campur Tangan Kepala Desa pada Koperasi Wanita sehingga Koperasi wanita tidak bisa berkembang;
 - Masih adanya pinjaman dengan bunga tinggi;
 - Koperasi Wanita masih kesulitan mencari pinjaman modal.
- 8) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- Masih ditemukan ketidaktaatan/ konsistensi dari Kabupaten/ Kota untuk mentaati jadwal memasukkan hasil akhir usulan MUSRENBANG Kabupaten/ Kota dalam portal yang disediakan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur;
 - Masih ditemukan kesalahan memasukkan Program/ Kegiatan pada SKPD yang bukan menjadi kewenangan SKPD dimaksud;
 - Masih ditemukan usulan yang seharusnya menjadi urusan Kabupaten/ Kota.
- 9) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Program ADIPURA Kabupaten/ Kota Se-Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- Ada beberapa hal baru dalam Indikator penilaian semenjak bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu :
 - Nilai adipura memenuhi di atas batas minimal yang ditetapkan oleh Kementerian KLHK;
 - Tidak mengoperasikan TPA dengan sistem terbuka (open dumping);
 - Pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan lahan;
 - Pencegahan dan pengelolaan pertambangan;

- Serta tidak terjadi tindak pidana korupsi (tipikor).
 - Mengingat biaya operasional pengelolaan sampah di TPA tidaklah sedikit sedangkan TPA di Kabupaten/ Kota Se Wilker BAKORWIL Bojonegoro dikelola Seksi/ Bidang pada Badan/ Dinas SKPD yang ditunjuk, berdampak pada tidak difungsikannya secara maksimal fasilitas yang ada pada TPA.
- 10) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi (LOMBA) HIPPA/ GHIPPA tingkat Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- Minimnya dana pembinaan dan evaluasi yang disediakan dari dana APBD Kabupaten/ Kota sehingga POKJA Kabupaten/ Kota sangat sedikit melakukan pembinaan baik HIPPA/ GHIPPA dilapangan, selain itu dengan minimnya dana maka berakibat kondisi jaringan irigasi primer, sekunder banyak yang mengalami kerusakan, hal ini berdampak pada sistem manajemen Irigasi yaitu pengelolaan air yang tepat, cukup, dan berkelanjutan khususnya Pengelolaan Air Irigasi;
 - Belum adanya fasilitas gedung kantor sebagai sarana prasarana kelembagaan HIPPA/ GHIPPA, dan masih kurangnya tertib administrasi kelembagaan HIPPA/ GHIPPA misalnya belum ada buku notulen rapat;
 - Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki Rencana Tata Tanam Golongan (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) yang merupakan rencana Tata Tanam yang memperhatikan kemampuan suatu daerah irigasi dan terperinci per petak tersier.

Solusi

- 1) Sinkronisasi dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah RATUBANGNEGORO Tahun 2017.
- Memperbaharui nota kesepakatan Kepala Daerah / MoU RATUBANGNEGORO yang ditandatangani pada Tahun 2016;

- Mengevaluasi 13 Perjanjian Kerja sama yang telah ditanda tangani oleh SKPD teknis, menyesuaikan ketentuan yang berlaku, misalkan perubahan Nomenklatur, Kewenangan OPD, Jangka Waktu Perjanjian dan lain-lain;
 - Bidang – bidang yang sudah dikerjasamakan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sepanjang sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - Kabupaten wilayah RATUBANGNEGORO hendaknya konsisten terhadap perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani dan disepakati, konsisten juga dalam penganggarannya sehingga program kegiatan dapat direalisasikan dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari hasil kerjasama tersebut.
- 2) Sinkronisasi Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Angin Puyuh / Puting Beliung dan Tanah Longsor) di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017.
- Perbaikan saluran air dengan mengganti gorong-gorong yang lebih besar terutama di daerah rawan banjir dan memasang pompa untuk pembuangan air;
 - Penanaman 1.000 pohon untuk peresapan air;
 - Mempersiapkan sistem peringatan dini (EWS) serta informasi internet tentang tinggi muka air melalui WEB;
 - Penyadaran masyarakat yang tinggal di daerah bantaran dan sepadan sungai serta daerah rawan banjir untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang telah dipasang.
- 3) Sinkronisasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta persiapan festival pertunjukan rakyat (PERTURA) di di Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro Tahun 2017.
- Pemerintah daerah harus lebih serius lagi dalam menangani KIM, karena keberadaan KIM sangat membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pembangunannya kepada masyarakat. Untuk itu, anggota KIM perlu diberikan pembinaan secara intensif agar mereka mampu mengikuti semua informasi yang ada untuk kepentingan masyarakat;

- Keberadaan KIM sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah mengingat saat ini personil dari aparaturnegara terus dikurangi jumlahnya. Dan dengan jumlah personil yang terbatas ini akan sangat terbantu dengan adanya KIM di masyarakat. Untuk itu, anggaran untuk pembinaan KIM hendaknya juga ditambah, agar anggota KIM bisa lebih berdaya guna;
 - Pembinaan terhadap KIM agar lebih ditingkatkan lagi dengan membuat program kegiatan yang menarik bagi kaum muda sehingga mereka dengan sukarela mau bergabung menjadi anggota KIM dan bahkan menjadi motor penggerak bagi KIM itu sendiri.
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi Masalah Dampak Pelimpahan SMA/ SMK dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- Sambil menunggu petunjuk pelaksanaan tata cara perubahan urusan dan sub urusan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Provinsi ke pusat, maka dinas Pendidikan membentuk POKJA Implementasi UU. 23 /2014;
 - Mempersiapkan data P3D yang harus dipenuhi;
 - Memperhatikan petunjuk pelaksanaan perubahan kewenangan dari Kementerian teknis.
- 5) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PMKS Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- Diharapkan agar segera membentuk shelter sementara sebelum reveral ke UPT. DINSOSPROV (Lansia terlantar tanpa NIK);
 - Usulan Musrenbang Provinsi pada aplikasi E-Musrenbang.
- 6) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- Konversi lahan pertanian dapat disebabkan oleh tarikan permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian dan dorongan penawaran lahan pertanian oleh petani pemilik lahan. Perilaku permintaan dan penawaran lahan

tersebut tidak terlepas dari kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan sarana publik sehingga fenomena konversi lahan. Maka lahan sawah yang produktif sebaiknya dimanfaatkan guna keberlangsungan swasembada pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan, serta lahan yang tidak produktif bisa untuk pemukiman dan pabrik;

- Perencanaan RT/ RW Kabupaten/ Kota diwilayah Kerja BAKORWIL II di Bojonegoro harus benar-benar ada perhatian khusus oleh eksekutif maupun legeslatif;
 - Melakukan pembenahan :
 - Kelembagaaan BULOG;
 - Optimalisasi penerapan sarana produksi tanaman;
 - Penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu;
 - Pengamanan tanaman.
- 7) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Terhadap Pengembangan dan Peningkatan Koperasi Wanita (KOPWAN) Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.
- BAKORWIL membuat surat penegasan ke Kabupaten/ Kota bahwa keberadaan koperasi wanita adalah lembaga resmi bukan milik Kepala Desa;
 - Kabupaten/ Kota membuat program kegiatan evaluasi koperasi wanita dan penganugerahan Reward mulai dari Kepala Desa sampai Kecamatan yang diserahkan pada Hari Koperasi, untuk mendukung perkembangan Koperasi wanita kedepan;
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mensuport Kabupaten/ Kota membantu pembinaan tenaga ahli simpan pinjam;
 - Untuk kerja sama lintas koperasi wanita karena akses keluar sulit perlu di fasilitasi kerja sama lintas koperasi wanita agar terwujud dan terlaksana pengembangannya.
- 8) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Program Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG) Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.

- BAPPEDA Provinsi seharusnya agar lebih tegas dan konsisten terkait aturan kesepakatan tentang jadual dan mekanisme MUSRENBANG;
- BAPPEDA Provinsi agar mengkoordinasikan dengan SKPD, terkait usulan yang baru menjadi kewenangan SKPD;
- Dalam MUSRENBANG Provinsi khususnya dalam sidang kelompok pembahasan MUSRENBANG hendaknya BAPPEDA Provinsi memposisikan BAKORWIL menjadi juru bicara bertindak sebagai aspirator usulan diwilayah kerja masing-masing BAKORWIL.

9) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Program ADIPURA Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.

- Pemerintah Kabupaten/ Kota meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait guna menunjang keberhasilan program ADIPURA khususnya kebakaran hutan, pertambangan dan tindak pidana korupsi;
- Pemerintah Kabupaten/ Kota memperhatikan 19 (sembilan belas) sasaran penilaian ADIPURA khususnya yang mempunyai bobot penilaian tertinggi;
- Pemerintah Kabupaten/ Kota memperhatikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat baik barang/ jasa khususnya yang menangani TPA, agar diberikan keleluasaan/ fleksibilitas praktek-pratek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (BLUD).

10) Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi (LOMBA) HIPPA/ GHIPPA tingkat Kabupaten/ Kota Se Wilayah Kerja BAKORWIL II Di Bojonegoro Tahun 2017.

- Pemerintah Kabupaten/ Kota lebih sering lagi mengadakan pembinaan HIPPA dan GHIPPA. Pembinaan ini tentunya juga di tunjang dengan anggaran APBD yang mencukupi untuk perbaikan jaringan irigasi yang telah rusak.

Diharapkan Dinas terkait HIPPA dan GHIPPA dapat lebih aktif lagi di lapangan dalam melakukan pembinaan kepada para Petani;

- Sarana dan Prasarana pada HIPPA/ GHIPPA yang berupa kantor sangat penting yang harus dimiliki, kantor HIPPA/ GHIPPA ini nantinya merupakan tempat berkumpul para Petani dalam menyelesaikan masalah pertanian. Diharapkan bagi HIPPA/ GHIPPA bisa mandiri memiliki kantor dan melengkapi secara administrasi buku-buku yang seharusnya ada;
- Pemerintah Kabupaten/ Kota mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan rencana Tata Tanam antara SKPD yang membidangi, perwakilan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan perwakilan pengguna jaringan irigasi.

3.23. BAKORWIL III MALANG

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM	Tahun 2017 (%)		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	85	79,15	93,14
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Prosentase (%) koordinasi, fasilitasi, dan monev yang ditindaklanjuti	85	79,15	93,14
2. Program pengembangan Data Informasi	Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi yang dilaksanakan	67	66,74	99,61

Evaluasi kinerja terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

- Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti.

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 85% terealisasi sebesar 79,15% atau 93,14%. Pada Tahun 2017 Kinerja Perangkat Daerah Bakorwil Malang diimplementasikan berupa koordinasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebanyak 24 kegiatan yang menghasilkan rekomendasi atau hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Bapak Gubernur, Bakorwil Malang maupun Perangkat Daerah terkait sebanyak 19 kegiatan/sub kegiatan menghasilkan realisasi sebesar 79,15 % dengan Target 85% maka menghasilkan capaian kinerja sebesar 93,14%. Capaian Kinerja 93,14% berbanding Realisasi Anggaran Program Pembangunan sebesar 85,90% masih ada efisiensi sebesar 7,24%.

c. Program

- 1) Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan anggaran Rp. 1.071.475.000,- realisasi sebesar Rp. 901.887.604,- atau 84,17% untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
- 2) Program Pengembangan Data Informasi, dengan anggaran Rp. 140.050.000,- realisasi sebesar Rp. 138.857.326,- atau 99,15% untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Kegiatan Bidang Pemerintahan antara lain :

- Regulasi yang mengatur tentang rusaknya jalan akibat kendaraan berat belum ada perkembangan
- Belum ada tindak lanjut perkembangan rencana pembangunan jalan alternatif.
- Pemahaman dan tanggung jawab individu, kelompok, dan masyarakat belum maksimal.
- Penanganan bencana masih bersifat lokal (kedaerahan), kurang koordinasi antar Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan pameran produk-produk unggulan dalam rangka HUT Provinsi Jawa Timur kurang optimal.
- Penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran untuk kegiatan HUT Provinsi Jawa Timur kurang memadai.
- Pelaksanaan pameran produk-produk unggulan kurang strategis.

2) Kegiatan Bidang Pembangunan Ekonomi antara lain :

- Keterampilan teknis yang dimiliki petani dalam mengolah produk hasil pertanian masih minim, karena kurangnya pembinaan oleh dinas terkait.
- Komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum terlaksana.
- Meningkatnya persaingan produk perikanan, namun masih belum didukung informasi akses pemasaran produk perikanan.
- Kawasan agropolitan tersebar di beberapa daerah wilayah kerja Bakorwil Malang (agropolitan Ijen, Bromo, Tengger Semeru belum didukung kerjasama antar daerah dalam pengelolaan potensi.
- Pemasaran produk industri kerajinan masih berupa barang setengah jadi sehingga keuntungan pengrajin sangat kecil.
- Minimnya kopontren yang aktif dalam mengelola koperasi.

- Pemberian bantuan hibah untuk kopontren hanya untuk kopontren yang sudah mandiri.

3) Kegiatan Bidang Kemasyarakatan antara lain :

- Kualitas beras raskin yang diberikan kepada penerima kurang baik.
- Data RTSM penerima beras raskin kurang valid.
- Tidak ada dana sharing dari Kabupaten/Kota untuk biaya angkut beras dari titik distribusi ketitik bagi.
- Pelayanan di Rumah Sakit dengan menggunakan BPJS kurang mendapat perhatian.
- Program JKN belum dilaksanakan disetiap rumah sakit.
- Belum ada Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan Pasien Bebas Pasung.
- Belum terbentuknya Kader Pengawasan Orang Masalah Dengan Kejiwaan (OMDK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
- Lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan daerahnya bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- Belum sinerginya kalender kegiatan pariwisata dan budaya antar Kabupaten/Kota se wilayah kerja Bakorwil Malang.

4) Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana antara lain :

- Beberapa program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota masih belum sinergis dengan program kegiatan SKPD Provinsi.
- Banyaknya usulan program kegiatan dari kabupaten/kota pada Musrenbang belum diverifikasi ditingkat Bakorwil.
- Belum tersusunnya dokumen strategis terkait perubahan iklim, tindaklanjut issue global warning.
- Beberapa daerah masih belum melakukan kajian kawasan strategis terkait kerentanan dan analisis dampak perubahan iklim.
- Masih terdapat aset Provinsi di wilayah kerja Bakorwil Malang yang belum jelas penggunaannya dan perikatannya.
- Pembinaan HIPPA/GHIPPA belum dilakukan terstruktur dari desa, kecamatan.

- Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyediakan anggaran untuk pembinaan HIPPA/GHIPPA yang terpadu antara Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan.

Solusi :

1) Kegiatan Bidang Pemerintahan antara lain :

- Memantau perkembangan proses rekomendasi usulan peraturan daerah tentang rusaknya jalan akibat kendaraan berat.
- Mendorong percepatan jalan alternative dari Purwosari Pasuruan, Malang ke Batu.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dan sosialisasi kegiatan yang terkait.
- Menyiapkan sarana prasarana antisipasi bencana dan penanganan bencana secara terpadu.
- Menambah alokasi anggaran penanganan bencana.
- Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan HUT Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan masyarakat dan promosi produk unggulan daerah untuk menstimulasikan UKM..

2) Kegiatan Bidang Pembangunan Ekonomi antarlain :

- Mendorong SKPD terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada petani dalam pengolahan produk pertanian dan diversifikasi tanaman.
- Memfasilitasi dan mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan hutan bagimasyarakat.
- Bersama SKPD terkait mendorong peningkatan akses pemasaran produk perikanan, dan bantuan modal pengembangan
- Mendorong peningkatan kerjasama pengelolaan potensi daerah di sector pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kelautan.
- Memperluas jangkauan sasaran sosialisasi ke masyarakat terkait pengembangan usaha koperasi, revitalisasi kelembagaan dan memfasilitasi bantuan hibah bersama Dinas Koperasi dan UMKM.

- Bersama SKPD terkait memberikan pembinaan kepada Koppondren terkait manajemen modern koperasi yang maju.

3) Kegiatan Bidang Kemasyarakatan antara lain :

- Meningkatkan monitoring layanan kesehatan melalui program JKN dan menyebarkan informasi program JKN.
- Memantau penyaluran beras raskin secara berkelanjutan baik kualitas beras raskin maupun penerima beras raskin.
- Memantau pembentukan Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan Pasien Bebas Pasung dan Kader Pengawasan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
- Mengkoordinasikan dan menyusun kesepakatan bersama dengan Kabupaten/Kota terkait penggunaan data kependudukan adalah data hasil registrasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.
- Memantau Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten/Kota.

4) Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana antara lain :

- Meningkatkan sinergitas program kegiatan provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui musrenbang di tingkat Bakorwil.
- Mendorong kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen strategis terkait perubahan iklim di daerah.
- Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan kajian kawasan strategis dampak perubahan iklim.
- Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset provinsi yang ada di daerah.
- Bersama SKPD terkait melakukan pembinaan dalam bentuk lomba pengelolaan HIPPA/GHIPPA di daerah.
- Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dan memberikan pembinaan secara berkala kepada HIPPA/GHIPPA.

3.24. BAKORWIL IV PAMEKASAN

a. Tujuan

Tujuan Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan (Bakorwil Pamekasan) sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan.

b. Sasaran dan Program

Target dan realisasi indikator kinerja Bakorwil Pamekasan pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan	Prosentase koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti	85%	84,85%	99,82%
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti	85%	84,85%	99,82%
2. Program Pengembangan Data Informasi	Persentase Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	85%	97,83%	108,71%

Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

SASARAN I : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

➤ Indikator : **Prosentase koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti**

Prosentase koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dengan target sebesar 85%, terealisasi sebesar 84,85%. Mencapai target karena selain masing-masing Pegawai memiliki integritas dan tanggungjawab tinggi terhadap pekerjaan, juga adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pimpinan dan staf. Hubungan yang baik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Perangkat Daerah di Kabupaten se wilayah kerja juga mendukung kegiatan koordinasi, monitoring, sinkronisasi dan evaluasi yang dilaksanakan.

c. Program

- 1) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.956.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.885.256.121,00 atau 96,35%, untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang secara rinci, realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.
- 2) Program Pengembangan data Informasi dilaksanakan melalui peningkatan penyediaan data dan sarana prasarana informasi, dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 32.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.950.630,00 atau 97,63% dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, Bakorwil Pamekasan menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugasnya baik permasalahan internal maupun eksternal, yang dijabarkan sebagai berikut :

Permasalahan:

- 1) Penyelenggaraan budaya Kerapan Sapi masih menggunakan kekerasan sehingga belum sesuai harapan untuk mengembalikan fitrah kerapan sapi tradisional sebagaimana awal mulanya yakni tanpa menggunakan kekerasan;
- 2) Program perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum sinkron dan terintegrasi khususnya dalam menunjang kinerja utama pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat;
- 3) Pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia), khususnya di 4 Kabupaten di Madura;
- 4) Lahan pertanian produktif semakin berkurang karena dijadikan lahan perumahan, serta pengelolaan Sumber Daya Alam yang kurang memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Belum termanaatkannya secara optimal potensi sumber daya alam dan potensi pasar khususnya di wilayah Madura, diakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam upaya pemanfaatan SDA yang melimpah;
- 6) Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana masih belum ditangani secara optimal, sehingga dijumpai beberapa permasalahan pengembangan wilayah.

Solusi :

- 1) Peningkatan kualitas rekomendasi yang ditindaklanjuti atas hasil koordinasi, monitoring, sinkronisasi dan evaluasi ke Kabupaten se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan;
- 2) Mengintensifkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur terkait penyelarasan dukungan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten;
- 3) Mendorong kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan potensi ekonomi dan infrastruktur sarana prasarana.

3.25. BAKORWIL V JEMBER

a. Tujuan

Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Jember.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	TAHUN 2017		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)
I. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1. Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
2. Program pengembangan Data Informasi	1. Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	68%	65%	95,59%

Evaluasi Kinerja Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2017 kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Bakorwil V Jember) yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Koordinasi yang dapat ditindaklanjuti, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

- **Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti**
Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti tahun 2017 dengan target sebesar 85% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian target indikator persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti adalah 117,65%. Pencapaian target ini didukung oleh terpenuhinya target pelaksanaan program dengan indikator Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti dari target 85% terealisasi melebihi target yaitu 100%.

c. Program

- 1) Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 847.317.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 843.056.450 atau 99,50% untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom;
- 2) Program pengembangan Data Informasi, dengan anggaran sebesar Rp. 43.441.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.199.000 atau 99,44% untuk mendukung 1(satu) kegiatan yang secara rinci realisasi masing-masing kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan :**

- 1) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Bakorwil V Jember) merupakan Perangkat Daerah yang baru menjalankan tugas pokok dan fungsinya sejak tahun 2017, sehingga 2017 merupakan tahun pertama bagi Bakorwil V Jember. Sebagai Perangkat Daerah baru kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Bakorwil V Jember adalah belum optimalnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana;
- 2) Pelaksanaan desentralisasi mengakibatkan hirarki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak optimal, pelaksanaan pembangunan berbasis kewilayahan yang di gagas oleh Pemerintah Provinsi memiliki peluang yang besar untuk tidak selaras dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan egosentris desentralisasi akibat implementasi otonomi daerah.

Solusi :

- 1) Berkoordinasi dengan instansi terkait (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur) untuk segera dapat memperoleh tambahan personil sesuai dengan kebutuhan Bakorwil V Jember;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten/Kota dapat selaras dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

B. KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2015-2017) terus menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015, total nilai PDRB Jawa Timur sebesar Rp. 1.692,90 triliun dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.855,04 triliun. Selanjutnya pada tahun 2017, PDRB ADHB Jawa Timur mencapai Rp. 2.019,20 triliun. Sedangkan bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 1.331,31 triliun, selanjutnya meningkat menjadi Rp. 1.405,56 triliun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.482,15 triliun.

Tabel 4.21
Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Dan Nasional

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
PDRB ADHB – Jawa Timur (Triliun Rupiah)	1.692,90	1.855,04	2.019,20
PDRB ADHK 2010 – Jawa Timur (Triliun Rupiah)	1.331,39	1.405,56	1.482,15
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (%)	5,44	5,55	5,45
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4,79	5,02	5,07

Sumber : BPS Pusat dan Provinsi Jawa Timur

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2015 perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,44 persen, kemudian pada tahun 2016 menjadi 5,55 persen dan pada tahun 2017

mencapai 5,45 persen. Kondisi tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu berturut-turut 4,79 persen (2015); 5,02 persen (2016) dan 5,07 persen (2017). Perekonomian Jawa Timur tahun 2017 tumbuh sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,91 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,47 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,92 persen. Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,03 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,80 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 18,18 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2017, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,66 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,14 persen; Konstruksi 0,63 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,41 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,17 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh melambat dari 2,41 persen pada tahun 2016 menjadi 1,48 persen pada tahun 2017. Curah hujan tinggi dan serangan hama di beberapa wilayah menyebabkan turunnya produksi tanaman pangan terutama padi. Faktor tersebut yang mengakibatkan Sub Kategori Tanaman Pangan berkontraksi sebesar -2,18 persen. Sedangkan pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh meningkat dari 4,44 persen pada tahun 2016 menjadi 5,69 persen pada tahun 2017.

1.1.2. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Peningkatan ini juga akan sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian,

karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 4.22
Gini Rasio Jawa Timur Dan Nasional

Gini Rasio	Tahun		
	2015	2016	2017
Jawa Timur	0,40	0,40	0,41
Nasional	0,40	0,39	0,39

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

$G < 0,3$ = Ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan sedang, dan

$G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2015-2017 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Pada tahun 2015, gini rasio Jawa Timur mencapai 0,40, kemudian pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan yaitu 0,40 dan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,41. Sebenarnya dengan meningkatnya gini ratio ini tidak berarti kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan, sebenarnya mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

1.1.3. Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%)

Seperti halnya gini ratio, pemerataan pendapat versi bank dunia juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat guna mengetahui ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Bank Dunia mengukur

pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/ menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Tabel 4.23
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur

Tahun	40 persen bawah	40 % menengah	20 % atas
2015	16,61	34,52	48,87
2016	17,03	35,60	47,37
2017	16,49	35,06	48,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah selama tiga tahun terakhir persentase distribusinya berfluktuatif, pada tahun 2015 persentasenya sebesar 16,61 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 17,03 persen dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 16,49 persen. Berdasarkan pengelompokkan distribusi bank dunia, pada tahun 2017 Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan sedang karena jumlah pendapatan dari penduduk pada kategori

40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk diantara 12-17 persen.

1.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Tabel 4.24
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur Dan Nasional

Penduduk Miskin	Tahun		
	2015	2016	2017
Jawa Timur	12,28	11,85	11,20
Nasional	11,13	10,70	10,12

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara gradual (2015-2017) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa, selanjutnya menurun pada tahun 2016 menjadi 11,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.638,53 ribu jiwa dan tahun 2017 menjadi 11,20 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.405,27 ribu jiwa. Berbagai upaya yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

1.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita menurut paritas daya beli.

Tabel 4.25
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia	68,95	69,74	

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tiga tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2015 sebesar 68,95,

kemudian meningkat menjadi 69,74 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 masih menunggu BPS Maret 2018 yang diperkirakan meningkat di atas 70, termasuk kategori tinggi. Kenaikan IPM ini tidak terlepas dari adanya berbagai program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan pembangunan manusianya, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

1.1.6. Indeks Pembangunan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublish. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka

sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan atau apple to apple. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Jawa Timur mengikuti tren naik.

Tabel 4.26
Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017*)
Indeks Pembangunan Gender	91,07	90,72	92,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : *) Angka Sangat Sementara

Perkembangan IPG Pada Tahun 2015 sebesar 91,07, Kondisi ini menurun pada tahun 2016 menjadi 90,72, kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 (Angka Sangat Sementara) menjadi 92,39. Naiknya angka IPG Jawa Timur, mengindikasikan program pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Daerah cukup berhasil. Kenaikan IPG ini didukung meningkatnya AHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan. Dengan demikian, SDM perempuan di Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki-laki, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Jawa Timur sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan Jawa Timur di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

1.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Tabel 4.27
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47	4,21	4,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2015 sebesar 4,47 persen, selanjutnya pada tahun 2016-2017 kondisi ketenagakerjaan menunjukan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 (2016) dan 4,00 (2017). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2017 bertambah sebanyak 984 ribu orang jika dibanding tahun 2016. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut otomatis berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat dari 66,14 persen pada tahun 2016 menjadi 68,78 persen pada tahun 2017 atau naik sebesar 2,64 poin persen.

1.1.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Provinsi Jawa Timur tentang kondisi lingkungan di Jawa Timur sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Jawa Timur tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.28
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,70	63,98	66,29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30 persen, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30 persen dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40 persen. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

- Unggul : >90
- Sangat baik : 82 - 90
- Baik : 74 - 82
- Cukup : 66 - 74
- Kurang : 58 - 66
- Sangat Kurang : 50 – 58
- Waspada : <50

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan tiap tahunnya, yaitu dari 61,70 (Kategori Kurang) pada tahun 2015 menjadi 66,29 (Kategori Cukup) pada tahun 2017. Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus meningkatkan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur dan mencapai target IKLHD Provinsi Tahun 2019 sebesar 67,00-68,52 atau dengan kategori cukup.

1.1.9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel 4.29
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	81,33

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 80 dan terus meningkat menjadi 81,33 pada tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

1.1.10. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks.

Tabel 4.30
Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Reformasi Birokrasi	63,00	65,00	69,54

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 63,00, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 65,00 dan tahun 2017 meningkat kembali menjadi 69,54. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

1.1.11. Indeks Kesalehan Sosial

Secara konseptual, Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap kesalehan sosial tersebut meliputi:

- Solidaritas social (al-takaful alijtima"i);
- Toleransi (al-tasamuh);
- Mutualitas/Kerjasama (al-ta'awun);
- Tengah-tengah (al-l'tidal); dan
- Stabilitas (al-stabat);

Sedangkan secara operasional, Kesalehan sosial adalah skor yang diperoleh dari sikap seseorang/responden yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat yang diukur dengan :

- Solidaritas sosial;
- Kerjasama/mutualitas;
- Toleransi;
- Adil; dan
- Menjaga ketertiban umum.

Tabel 4.31
Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017*)
Indeks Kesalehan Sosial	-	-	62,34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*Ket : *) Angka Sangat Sementara*

Indeks Kesalehan Sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, pada tahun 2017 (angka sangat sementara) capaiannya 62,34. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1.2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 4.32
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017*)
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,14	7,23	7,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*Ket : *) Angka Sangat Sementara*

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2015-2017 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 7,14 tahun ditahun 2015 meningkat menjadi 7,23 tahun pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 masih menunggu rilis dari BPS yang diperkirakan meningkat mencapai 7,29.

1.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1.3.1. Kebudayaan

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan

nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Total grup kesenian tahun 2016 adalah 5.695 sanggar dan naik menjadi 6.037 sanggar di tahun 2017. Grup kesenian yang mengalami kenaikan di tahun 2017 adalah Pedalangan, Rupa, dan teater.

1.3.1.1. Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional

Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar 26 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Jawa Timur berkembang dengan pesat.

Tabel 4.33
Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional	16	22	26

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

1.3.1.2. Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) Yang Dipelihara/Dilestarikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Keberadaan benda , situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu kepedulian terhadap cagar budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri.

Tabel 4.34
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/ Dilestarikan

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/ Dilestarikan	-	94,50	96,30

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2017, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan di Jawa Timur sebesar 96,30 persen. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan terus memperhatikan cagar budaya agar kelestariannya dapat terjaga dengan baik.

1.3.2. Pemuda dan Olahraga

1.3.2.1. Persentase Pemuda Yg Berpartisipasi & Berperan Aktif Dalam Pembangunan

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel 4.35
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan	29,52	20,73	14,43

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2017, persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan sebesar 14,43 persen ini diukur dari prosentase pemuda kader tingkat Provinsi Jawa Timur yang berperan aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan. Penurunan persentase dari Tahun 2016 dikarenakan adanya

perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berakibat bergantinya formulasi perhitungan yaitu jumlah pemuda kader tingkat Provinsi dibagi jumlah pemuda yang aktif berorganisasi tingkat Provinsi.

1.3.2.2. Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat

Pembibitan olahragawan adalah upaya mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari, sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemassalan olahraga. Pembibitan dapat dilakukan dengan melaksanakan identifikasi bakat (Talent Identification), kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan bakat (Talent Development). Dengan cara demikian, maka proses pembibitan diharapkan akan lebih baik.

Tabel 4.36
Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	8,86	13,72	23,46

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015, pembibitan olahragawan berbakat sebesar 8,86 persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 23,46 persen. Pencapaian nilai realisasi sebesar 23,46 persen dihasilkan dari prosenstase atlet pelajar Jawa Timur yang berprestasi ditingkat Nasional (POPNAS) dan diukur dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga massal(rekreasi) dengan formulasi perhitungan Jumlah atlet pelajar Jatim yang meraih Prestasi Nasional dibagi jumlah atlet pelajar yang dibina Peningkatan persentase pembibitan olahragawan berbakat ini diharapkan akan mampu menghasilkan prestasi olahraga.

2. Aspek Pelayanan Umum

2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.2.1. Pendidikan Menengah

2.2.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Seperti halnya pada pendidikan dasar, dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun.

Tabel 4.37
APS (Usia 16-18 tahun) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
APS (Usia 16-18 tahun)	72,14	72,76	73,38

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2015 APS sebesar 72,14 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi 73,38 persen. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar.

2.2.1.2. Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Tabel 4.38
Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,62	0,58	0,54

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Jenjang pendidikan setingkat SMA/MA/SMK, dalam tiga tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 0,62 persen kemudian tahun 2017 menurun menjadi sebesar 0,54 persen. Pada tahun 2017 dalam tiap 1.000 anak usia 16-18 tahun sekitar 5 anak yang putus sekolah.

2.2.1.3. Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti Ujian Akhir Nasional (UNAS). Namun UNAS bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. Unas disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi, untuk kelas reguler kelas 6 untuk SD sederajat & kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Tabel 4.39
Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK	98,57	98,63	98,68

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam tiga tahun terakhir terus meningkat mulai 98,57 persen tahun 2015, meningkat menjadi 98,68 persen pada tahun 2017. Hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang pendidikan, karena secara umum sekolah setingkat SD hingga setingkat SLTA angka kelulusan meningkat mendekati angka sempurna yaitu 100 persen.

2.2.1.4. Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PK-LK berkualifikasi minimal S1/D4

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 4.40
Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4	95,55	98,78	98,80

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S.1-D.IV pendidikan menengah selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 95,55 persen pada tahun 2015 menjadi 98,80 persen tahun 2017. Hal ini merupakan suatu tuntutan dan juga dengan adanya pemberian tunjangan sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

2.2.1.5. Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key

Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Tabel 4.41
Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK	65,83	68,21	68,65

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015-2017, APM SMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yaitu sekitar 54-68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Peningkatan APM SMA/MA/SMK ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah.

2.2.1.6. Indeks pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks pembangunan manusia, yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2015 indeks pendidikan mencapai 0,59 kemudian capaiannya meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,60. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

Tabel 4.42
Indeks pendidikan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks pendidikan	0,59	0,60	0,60

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.2.1.7. Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini memberikan

gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4.43
Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas	7,14	7,23	7,23

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2015-2017 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 7,14 tahun ditahun 2015 meningkat menjadi 7,23 tahun pada tahun 2017.

2.2.1.8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Tabel 4.44
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	79,14	81,42	82,80

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015-2017, APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yaitu dari 79,14 persen pada tahun 2015 menjadi 82,80 persen tahun 2017. Hal ini menunjukkan

bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di jenjang pendidikan tertentu.

2.2.2. Kesehatan

2.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Perkembangan angka kematian bayi selama enam tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 24,00, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 23,10. Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun tidak cukup signifikan secara nilai absolut, akan tetapi tingkat penurunan ini menunjukkan bahwa upaya keras semua pihak, khususnya pemerintah untuk menekan angka kematian bayi membuahkan hasil. Hal tersebut terkait dengan adanya peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Tabel 4.45
Angka kematian bayi (AKB) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka kematian bayi (AKB)	24,00	23,60	23,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Secara perlahan namun pasti AKB mengalami penurunan, artinya kesehatan bayi menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel 4.46
Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu (AKI)	89,60	91,00	91,92

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Secara umum selama tahun 2015-2017 AKI di Jawa Timur terus menunjukkan penurunan, pada tahun 2015 capaiannya sebesar 89,60 kemudian pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi 91 dan tahun 2017 menjadi 91,92. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut,

berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

2.2.2.3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Tabel 4.47
Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,68	70,74	71,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk

program pemberantasan kemiskinan. Perkembangan AHH di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 70,68 (Thn.2015) menjadi 71,00 (Thn.2017).

2.2.2.4. Persentase stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Prevalensi balita stunting mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 27,1 persen pada tahun 2015 menjadi 26,01 persen di tahun 2016. Sementara itu pada tahun 2017, persentasenya meningkat menjadi 26,70 persen.

Tabel 4.48
Persentase stunting di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase stunting	27,1	26,01	26,70

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2.2.2.5. Persentase Rumah Sakit terakreditasi

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

Tabel 4.49
Prosentase Rumah Sakit Terakreditasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Prosentase Rumah Sakit Terakreditasi	65,00	67,00	74,50

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Secara umum selama tahun 2013-2014 prosentase Rumah Sakit di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, Pada tahun 2015 sebesar 65,00 persen dan tahun 2016 sedikit meningkat kembali menjadi 67,00 persen. Sementara itu pada tahun 2017, persentasenya meningkat kembali menjadi 74,50 persen. Peningkatan prosentase rumah sakit yang terakreditasi dikarenakan adanya kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu persyaratan supaya rumah sakit bisa bekerjasama dengan BPJS. Rumah Sakit yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan manajemen yang ditetapkan. Peningkatan ini merupakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

2.2.2.6. Persentase RFT Rate Kusta

Pengobatan kusta menggunakan Multi Drug Therapy (MDT) sudah digunakan secara global sejak tahun 1985 sampai sekarang dan telah menyembuhkan > 140.000 penderita kusta yang ada di Jawa Timur. Faktor yang memegang peranan dalam keberhasilan pengobatan adalah stigma yang ada dimasyarakat dan motivasi yang kuat dari penderita untuk menyelesaikan pengobatan kusta karena MDT harus diminum setiap hari selama 6 atau 12 bulan tergantung dari tipe kustanya. Selain itu MDT juga mempunyai efek samping kulit jadi hitam. Hal tersebut diatas yang menyebabkan keberhasilan pengobatan MDT tidak bisa maksimal atau terjadinya putus pengobatan.

Tabel 4.50
Persentase RFT Rate Kusta di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase RFT Rate Kusta	91	90	90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Pencapaian prosentase RFT rate kusta pada tahun 2015 sebesar 91 persen dan menurun pada tahun 2017 sebesar 90 persen. Perlu upaya secara kofrehensif untuk keberhasilan pengobatan mulai dari penemuan kasus baru secara dini, penjelasan dan motivasi saat akan mulai pengobatan, pembinaan pengobatan,

sosialisasi pada masyarakat terutama yang ada di daerah endemis kusta yang melibatkan sektor-sektor lain selain kesehatan.

2.2.2.7. Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV

Antiretrovirals (ARV) telah diakui dunia sebagai obat yang bisa digunakan untuk mengobati HIV/AIDS. Namun, ARV belum mampu menyembuhkan HIV secara menyeluruh. ARV berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi.

Tabel 4.51
Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	77,00	79,80	80,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 77,00 persen dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 79,80 persen. Sementara itu pada tahun 2017, persentasenya meningkat menjadi 80,00 persen. Meskipun belum mampu menyembuhkan HIV secara menyeluruh, tapi sejauh ini terapi ARV dipercaya bisa menurunkan angka kematian dan rasa sakit, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan meningkatkan harapan masyarakat.

2.2.2.8. Persentase keberhasilan pengobatan TB

Berdasarkan WHO Global Tuberculosis Report Tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India. Diperkirakan kasus TBC baru (insidensi) di Indonesia adalah 395 per 100.000 penduduk (total kasus TB 1.020.000). Program Penanggulangan TBC selain melakukan kegiatan promosi aktif dan pencegahan, juga melakukan kegiatan deteksi dini dimana dilakukan penemuan penderita TBC secara intensif, aktif dan masif berbasis keluarga dan masyarakat serta pemberian pengobatan sampai sembuh. Gerakan 115 merupakan inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menemukan penderita TBC sedini mungkin dan mendapatkan pengobatan secepat

mungkin, dimana 1 (satu) penderita TBC akan dicatat dan dicari 15 (lima belas) kontak erat penderita TBC tersebut baik oleh petugas, kader maupun tokoh masyarakat serta dipastikan status TBC nya. Program penanggulangan TBC juga harus mendapat dukungan komitmen dari Para Stakeholder.

Tabel 4.52
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	91,00	89,91	90,10

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dengan target success rate > 90%, diharapkan bisa menggambarkan semakin banyak masyarakat yang menderita TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai tuntas sehingga dapat memutus rantai penularan. Mayoritas penderita TBC adalah usia produktif, dengan pengobatan TBC yang sesuai standar sampai sembuh berarti produktifitas mereka diharapkan bisa pulih kembali dan lebih meningkat. Maka dampaknya adalah masyarakat Jawa Timur terbebas dari resiko sakit TBC dan masalah-masalah sosial ekonomi yang diakibatkan karena penyakit TBC.

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.3.1. Jalan dan Jembatan

2.2.3.1.1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap

Kriterianya adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 4.53
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	89,43	88,87	90,31

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR no: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan ruas – ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupun kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2015 adalah sebesar 89,43 persen dan meningkat pada tahun 2017 adalah sebesar 90,31.

2.2.3.1.2 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan sebagai berikut :

- Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;
- Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Tabel 4.54
Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer	56,89	57,90	59,16

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen dan pada tahun 2017 adalah sebesar 59,16 persen mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen. Peningkatan capaian sasaran tersebut dikarenakan ada rekonstruksi dan peningkatan jalan sepanjang 72,08 km.

2.2.3.1.3 Persentase pembangunan jalan menuju kawasan potensial

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumberdaya alam atau sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.

Tabel 4.55
Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial	44,50	47,36	47,36

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial pada tahun 2016 adalah sebesar 47,36 persen dan pada tahun 2017 adalah sebesar 47,36 persen. Tidak ada peningkatan dalam pembangunan jalan menuju kawasan potensial, karena fokus terhadap pemenuhan jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.

2.2.3.2. Pengairan

2.2.3.2.1. Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan air baku

Air baku adalah air yang dijadikan sebagai sumber untuk pengolahan air bersih. Air baku dapat berasal dari berbagai macam sumberdaya air. Pengertian air bersih adalah air yang terbebas dari zat-zat terlarut dan telah memenuhi syarat

kualitas sehingga dapat dikonsumsi sebagai air minum. Ketersediaan air baku merupakan kemampuan suatu sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan air baik secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu wilayah. Ketersediaan air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air yang ada di bumi.

Tabel 4.56
Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku	87,61	87,78	87,84

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016, ketersediaan dan kebutuhan air baku di Jawa Timur sebesar 87,78 persen, kemudian meningkat menjadi 87,84 pada tahun 2017. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kebutuhan air baku adalah pembangunan sarana prasarana infrastruktur pengairan dan melakukan normalisasi tampungan air sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan.

2.2.3.2.2. Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Pelayanan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Dalam hal tertentu, pelayanan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Tabel 4.57
Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi	70,00	82,20	100,09

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015, persentase pelayanan air untuk irigrasi di Jawa Timur sebesar 7000 persen kemudian meningkat menjadi 100,09 persen pada tahun 2017.

Kondisi ini berdampak pada peningkatan ketersediaan air sehingga meningkatkan produktifitas pertanian.

2.2.3.2.3. Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik

Pemeliharaan jaringan irigrasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigrasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya.

Tabel 4.58
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	68,35	68,50	69,32

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik pada tahun 2017 sebesar 69,32 persen, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 68,35 persen. Kenaikan tersebut berdampak pada meningkatnya penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian.

2.2.3.2.4. Persentase Penanganan luas daerah genangan banjir

Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elevasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan yang timbul di daerah rendah sebagai akibat yang ditimbulkannya juga termasuk dalam pengertian ini. Penanggulangan banjir harus dilakukan oleh berbagai pihak antara pemerintah dan masyarakat. Mulai dari tata kota dan saluran air yang baik, serta perilaku masyarakat yang bijak terhadap lingkungan.

Tabel 4.59
Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir	75,88	72,37	67,62

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

Persentase penanganan luas daerah genangan banjir di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 72,37 persen dan pada tahun 2017 sebesar 67,62 persen.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan luas genangan banjir adalah melalui operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sungai.

2.2.3.3. Penataan Ruang

2.2.3.3.1. Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 4.60
Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	45,00	47,90	48,00

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jawa Timur

Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW pada tahun 2015 sebesar 45 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 48,00 persen. Semakin meningkatnya persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW maka kesenjangan antar wilayah bisa teratasi, disamping itu meratanya pengembangan infrastruktur wilayah memberikan dampak distribusi ekonomi dan investasi menjadi lebih optimal.

2.2.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.4.1. Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Rumah dan fasilitas perumahan yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Di beberapa negara sedang

berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar sangat terasa. Hal ini disebabkan oleh penambahan penduduk kota dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi perumahan yang memadai. Dalam dasar-dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Sarana perumahan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan prasarana perumahan adalah drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, listrik, telepon, dan jalan.

Tabel 4.61
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman	32,91	51,55	61,29

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jawa Timur

Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 32,91 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 61,29 persen. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.2.5.1. Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum & ketentraman yang diselesaikan

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Tabel 4.62
Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman yang diselesaikan	-	-	83,33

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Pada Tahun 2017 persentase penanganan kasus pelanggaran tramtibus dan ketentraman yang diselesaikan sebesar 83,33 persen. Kedepan pemerintah terus berupaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga tercipta kondisi, aman, nyaman dan tentram.

2.2.5.2. Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, dan pemadam kebakaran

Satlinmas merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsi, lamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Tugas dari Satlinmas adalah melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Perkembangan persentase pertumbuhan anggota Satlinmas yang terlatih atau bersertifikat pada tahun 2017 sebesar 100 persen.

Tabel 4.63

Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, dan pemadam kebakaran

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase pertumbuhan anggota Satlinmas dan masyarakat yang bersertifikat dalam pelaksanaan tugas PAM Swakarsa, penanggulangan bencana, dan pemadam kebakaran	-	-	100

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

2.2.6. Sosial

2.2.6.1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah, menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Tabel 4.64

Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	13,05	13,51	15,35

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015, persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 13,05 persen, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2016 menjadi 13,51 persen. Dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 semakin mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 15,35 persen. Meningkatnya pembinaan terhadap PSKS maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

2.2.6.2. Persentase PMKS Penerima Manfaat Program Sosial Yang Meningkatkan Kemampuannya Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimalnya Dan Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Tabel 4.65
Persentase PMKS Penerima Manfaat Program Sosial Yang Meningkatkan Kemampuannya Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimalnya Dan Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase PMKS penerima manfaat program sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya	1,08	1,38	1,27

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Persentase PMKS penerima manfaat program sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya pada tahun 2013 sebesar 1,67 persen dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,38 persen. Dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 1,27 persen. Dengan adanya program sosial ini diharapkan penyandang PMKS dapat hidup mandiri dan meningkatkan fungsi sosialnya.

2.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.2.1. Ketenagakerjaan

2.2.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Tabel 4.66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,84	66,14	68,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2017 menunjukkan keadaan terus menjadi lebih baik dibandingkan Pebruari 2017 dan Agustus 2016. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2017 sebesar 20.940.000 jiwa bertambah sebanyak 48 ribu orang dibanding Pebruari 2017 (20.890.000 jiwa). Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut otomatis berpengaruh terhadap TPAK, dimana berdasarkan data BPS Pebruari 2017 (hasil Sakernas 2017), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur. Pada Agustus 2015, TPAK Jawa Timur tercatat mencapai angka 67,84 persen dan pada Agustus 2017 naik menjadi 68,78 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 68,78 persen penduduk Jawa Timur yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 31,22 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Kondisi kesehatan di Jawa Timur yang relatif semakin baik membuat angka harapan hidup di Jawa Timur semakin meningkat dan membuat jumlah lansia semakin bertambah. Di sisi lain, peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

2.2.1.2. Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja

Nasional (Sakernas) persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 62,00 persen (Tahun 2015); 67,23 persen (Tahun 2016) dan 68,56 persen (Tahun 2017). Dengan meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan maka secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran.

Tabel 4.67
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	62,00	67,23	68,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.1.3. Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jawa Timur

Kesejahteraan merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan semangat pada pekerja. Pelayanan kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk tertentu kepada karyawan diluar gaji, biasanya berupa transportasi, uang lembur, cuti, kantin, asuransi, jamsostek dan sebagainya.

Tabel 4.68
Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	-	11,75	8,25

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 8,25 persen dari seluruh pekerja di Jawa Timur. Adapun jumlah Penduduk yang Bekerja Tahun 2017 di Provinsi Jawa Timur menurut SAKERNAS 2017 yaitu sebanyak 20.099.220 jiwa dengan klasifikasi 7 jenis pekerjaan, 7 Status Pekerjaan Utama, dan 9 lapangan usaha. Dengan semakin tingginya kesejahteraan pekerja maka menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang bagus di Jawa Timur karena akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal pekerja terhadap perusahaan.

2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabel 4.69
Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017*)
Indeks Pemberdayaan Gender	68,41	69,06	69,06

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

Ket : *) Angka Sangat Sementara

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2015 sebesar 64,41, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 69,06 dan pada tahun 2017 menjadi 69,06 (angka sangat sementara). Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus berupaya agar pemberdayaan gender selalu meningkat, diantaranya adalah melibatkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi.

2.2.2.2. Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafiking di Jawa Timur

Tindak kekerasan dan trafiking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham adanya bahaya yang ditimbulkan.

Tabel 4.70
Persentase Penurunan Kasus Tindak Kekerasan Dan Trafiking di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking	-6,88	12,50	30,51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

Pada tahun 2015, Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jawa Timur sebesar (-6,88) persen dan pada tahun 2016 persentasenya menjadi 12,50 persen. Sedangkan tahun 2017 persentase menjadi 30,51 persen, hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan Trafficking melalui Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Trafficking di Kabupaten/Kota.

2.2.3. Ketahanan Pangan

2.2.3.1. Ketersediaan Pangan

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadangan pangan nasional. Sebagai provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga.

Tabel 4.71
Ketersediaan Pangan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
a. Beras (Ton)	7.497.051	8.495.592	7.975.352
b. Jagung (Ton)	5.425.180	5.749.634	5.638.374
c. Kedelai (Ton)	316.390	298.121	268.142

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Ketersediaan beras di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 7.497.051 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 7.975.352 ton. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas jagung dan kedelai, dimana ketersediaanya terus meningkat tiap tahunnya. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin

dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

2.2.3.2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Tabel 4.72
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,3	84,4	84,8

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Skor PPH Jawa Timur mencapai 84,8 pada tahun 2017 dan meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 84,4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan pengeneragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

2.2.4. Lingkungan Hidup

2.2.4.1. Indeks Kualitas Air

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai air bersih untuk rumah tangga, air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Pada Provinsi Jawa Timur terdapat 2 (dua) sumber air sungai utama, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo yang memegang peranan sangat penting sebagai sumber air baku namun di sisi lain juga sangat rentan terhadap adanya pencemaran kualitas air oleh limbah domestik dan industri. Adanya penurunan terhadap kualitas air sungai tentunya juga akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor – sektor perekonomian. Oleh karena itu, kualitas air sungai merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidup. Penilaian terhadap kualitas air sungai dapat dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya yang terangkum dalam Indeks Kualitas Air (IKA).

Tabel 4.73
Indeks Kualitas Air (IKA) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,33	52,00	52,77

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sehingga IKA Provinsi Jawa Timur masih berada dalam kategori sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tahun 2017 terjadi penurunan kualitas air sungai di Jawa Timur yang disebabkan karena adanya pencemaran air yang berasal dari aktivitas domestik dan terjadinya alih fungsi lahan, terutama di wilayah tangkapan air yang menyebabkan debit air yang masuk ke beberapa sungai berkurang.

2.2.4.2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter individual polusi udara yang

berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Tabel 4.74
Indeks Kualitas Udara (IKU) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,21	89,25	85,49

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2016 namun kembali menurun pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2017 terjadi penurunan kualitas udara di Jawa Timur yang disebabkan karena adanya pencemaran udara yang berasal dengan pemakaian energi, terutama dari sektor industri dan transportasi yang sebagian besar masih sangat tergantung kepada bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batubara. Di lain pihak, meski mengalami penurunan, nilai IKU Provinsi Jawa Timur masih termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu 85,49.

2.2.4.3. Indeks Tutupan Lahan

Hutan dan lahan merupakan salah satu media lingkungan yang juga tidak terlepas dari permasalahan lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah provinsi. Secara detail, nilai dari ITL Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2017 tertera pada berikut.

Tabel 4.75
Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Tutupan Lahan (ITL)	49,59	54,00	62,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas Indeks Tutupan Lahan (ITL) di Jawa Timur tahun 2015 hingga tahun 2017 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 49,59 pada tahun 2015 menjadi 62,02 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju penurunan luasan hutan di Jawa Timur cenderung berkurang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil melakukan reforestasi dalam rentang waktu 2015 hingga 2017.

2.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.2.5.1. Persentase penduduk ber KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38 Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2015 hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus menunjukkan peningkatan menjadi 92,09 persen dan pada tahun 2016 sebesar 92,82 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 98,36 persen. Persentase Penduduk Ber KTP adalah indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel 4.76
Persentase penduduk ber KTP di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase penduduk ber KTP	92,09	92,82	98,36

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jawa Timur

Peningkatan kepemilikan e-KTP selama 3 tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP hal ini ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP dari tahun ke tahun. Selain itu, pada saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor kecamatan setempat.

2.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.6.1. Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel

Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal. Persentase tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, Sementara itu pada tahun 2017 persentasenya sebesar 56 persen

Tabel 4.77
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel	-	-	56

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Hal ini perlu ditingkatkan kembali karena peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa/kel secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraannya yang semakin membaik sehingga terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, antara lain melalui Program Pemberdayaan dari OPD Pelaksana seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas-Dinas sektor Ekonomi.

2.2.6.2. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. Yang Aktif (%)

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif indikator baru penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tabel 4.78
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel	60,00	70,00	75,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015, Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel. yang aktif sebesar 60 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 75 persen. Semakin meningkatnya lembaga kemasyarakatan Desa/Kel yang aktif diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

2.2.7. Pengendalian Penduduk dan KB

2.2.7.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Tabel 4.79
Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Laju pertumbuhan penduduk	0,61	0,59	0,56

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38,84 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 39,29 juta jiwa pada tahun

2017. Sedangkan pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, yaitu dari 0,61 persen pada tahun 2015 menjadi 0,56 persen tahun 2017.

2.2.7.2. Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Tabel 4.80
Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Cakupan KB aktif	75.70	76.83	76,25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jawa Timur

Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 75,70 persen dan pada tahun 2016 sebesar 76,83 persen Mengalami peningkatan sebesar 1.49 persen dan di tahun 2017 cakupan KB Aktif sebesar 76,25 persen, hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB.

2.2.8. Perhubungan

2.2.8.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sector transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan Pelayanan (U1), Prosedur Pelayanan (U2), Waktu Pelayanan (U3), Biaya/Tarif Pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku

Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9).

Tabel 4.81
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	74,41	77,91	71,53

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 77,91, dan menurun pada tahun 2017 sebesar 71,53. Terkait implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor atau jembatan timbang yang semula dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017 dikelola oleh Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat pelimpahan kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B dari kabupaten/kota di Jawa Timur sejumlah 26 Terminal Tipe B. Sehingga menyebabkan rendahnya capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut, karena penilaian dilakukan pada saat yang sama ketika Terminal Tipe B baru diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kondisi Terminal Tipe B adalah kondisi sebelum mendapatkan perhatian dan penanganan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2.8.2. Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Tabel 4.82
Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017 (TW III)
Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB	2,19	2,27	3,43

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Kategori sub sektor transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain. Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2011 persentasenya sebesar 1,76 persen dan meningkat menjadi 2,27 persen pada tahun 2016. Sementara itu pada tahun 2017 (TW III) persentasenya menjadi 3,43 persen.

2.2.9. Komunikasi dan Informasi

2.2.9.1. Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Good governance akan terlaksana dengan baik apabila ada pengawasan publik, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tabel 4.83
Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017*)
Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	-	94,50	85,11

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Ket :) Angka Sementara*

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Kominfo terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Pada tahun 2016 Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Jawa Timur sebesar 94,50 persen, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 85,11 persen (angka sementara).

Semakin tingginya implementasi keterbukaan informasi publik mengindikasikan keterbukaan atau transparansi yang diberikan badan public kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

2.2.10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2.2.10.1. Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM

Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan

PDRB Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Tabel 4.84
Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UKM	-	7,60	8,97

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Capaian persentase pertumbuhan omzet koperasi dan UKM pada tahun 2016 sebesar 7,60 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 8,97 persen. Capaian ini tidak lepas dari kinerja koperasi dan UKM selama kurun waktu 2017 yang terus menunjukkan peningkatan.

2.2.11. Penanaman Modal

2.2.11.1. Izin Prinsip Investasi

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Tabel 4.85
Izin Prinsip Investasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Izin Prinsip Investasi (trilyun Rp.)	172,5	61,43	328,15

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

Capaian izin prinsip investasi di Jawa Timur tahun 2015 sebesar Rp. 172,5 triliyun, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi Rp. 61,43 triliyun dan tahun 2017 meningkat kembali menjadi Rp. 328,15 triliyun. Kenaikan signifikan tersebut

disebabkan oleh adanya 1 IP Mega Proyek dari PT. Pertamina Rosneft Pengolahan Dan Petrokimia, kedepannya pemerintah akan terus berupaya agar izin prinsip investasi di Jawa Timur terus meningkat diantaranya dengan peningkatan SDM serta sarana prasaran infrastruktur penunjang investasi.

2.2.11.2. Realisasi Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Tabel 4.86
Realisasi Investasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Realisasi Investasi (trilyun Rp.)	163,68	155,04	152,39

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

Capaian realisasi investasi di Jawa Timur tahun 2015-2016 terus menunjukkan penurunan, yaitu dari Rp. 163,68 triliyun pada tahun 2015 menjadi Rp. 155,04 triliyun pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 turun kembali menjadi Rp. 152,39. Penurunan ini dikarenakan terbatasnya lahan untuk kawasan industri dan regulasi perizinan yang masih terlalu panjang. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk menyediakan kawasan industry di tiap-tiap daerah serta mengoptimalkan regulasi perizinan agar prosesnya tidak terlalu panjang.

2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

2.2.12.1. Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di

dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel 4.87
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan	29,52	20,73	14,43

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2017, persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan sebesar 14,43 persen ini diukur dari prosentase pemuda kader tingkat provinsi Jawa Timur yang berperan aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan. Penurunan persentase dari Tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berakibat bergantinya formulasi perhitungan yaitu jumlah pemuda kader tingkat Provinsi dibagi jumlah pemuda yang aktif berorganisasi tingkat Provinsi.

2.2.12.2. Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat

Pembibitan olahragawan adalah upaya mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari, sebagai langkah atau tahap lanjutan dari pemassalan olahraga. Pembibian dapat dilakukan dengan melaksanakan identifikasi bakat (Talent Identification), kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan bakat (Talent Development). Dengan cara demikian, maka proses pembibitan diharapkan akan lebih baik.

Tabel 4.88
Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	8,86	13,72	23,46

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015, pembibitan olahragawan berbakat sebesar 8,86 persen dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 23,46 persen. Pencapaian nilai realisasi sebesar 23,46 persen dihasilkan dari prosenstase atlet pelajar Jawa Timur yang berprestasi ditingkat Nasional (POPNAS) dan diukur dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan olahraga massal(rekreasi) dengan formulasi perhitungan Jumlah atlet pelajar Jatim yang meraih Prestasi Nasional dibagi jumlah atlet pelajar yang dibina Peningkatan persentase pembibitan olahragawan berbakat ini diharapkan akan mampu menghasilkan prestasi olahraga.

2.2.12.3. Jumlah Atlet Yang Berprestasi

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut dengan prestasi olahraga.

Tabel 4.89
Jumlah Atlet Berprestasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Atlet Berprestasi	-	1.121	1.261

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2017 sebesar 1.261 orang. Kedepannya pemerintah terus berupaya agar atlet-atlet Jawa Timur terus berprestasi dikancah Nasional maupun Internasional, diantaranya melalui peningkatan pembinaan

pelatih, pencarian bibit-bibit muda yang potensial, dan pembangunan sarana prasarana.

2.2.13. Statistik

2.2.13.1. Persentase release data statistik akurat yang tepat

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta/investor. Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, sehingga belum ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2016.

Tabel 4.90
Persentase Release Data Statistik Akurat Yang Tepat di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Release Data Statistik Akurat Yang Tepat	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2.14. Persandian

2.2.14.1. Persentase informasi persandian yang diamankan

Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Salah satu misi dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur adalah meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi

penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Ini merupakan suatu harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan TIK, menyediakan hosting dan colocation, membangun data center dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK di era keterbukaan informasi. Selain itu Dinas Kominfo meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam pengamanan informasi.

Tabel 4.91
Persentase informasi persandian yang diamankan

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase informasi persandian yang diamankan	-	-	100

Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dari Dinas Kominfo, persentase informasi persandian yang diamankan di Jawa Timur adalah 100,00 persen. Adapun Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Informasi Persandian Yang Diamankan baru dimulai pada tahun 2017.

2.2.15. Kebudayaan

2.2.15.1. Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional

Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar 26 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Jawa Timur berkembang dengan pesat disamping itu juga meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian.

Tabel 4.92
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional	16	22	26

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

2.2.15.2. Persentase Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) Yang Dipelihara/Dilestarikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu kepedulian terhadap cagar budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri.

Tabel 4.93

Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan	-	94,50	96,30

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2017, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan di Jawa Timur sebesar 96,30 persen. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan terus memperhatikan cagar budaya agar kelestariannya dapat terjaga dengan baik.

2.2.16. Perpustakaan

2.2.16.1. Indeks Minat Baca

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi, Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya selalu ramai dikunjungi masyarakat.

Tabel 4.94
Indeks Minat Baca di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Minat Baca	65,25	69,75	72

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Indeks Minat dan Budaya Baca sejak pertama kali dilakukan penelitian pada tahun 2006 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 penelitian dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan hasil sebesar 42 persen. Sementara itu dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) indeksnya terus mengalami peningkatan yaitu masing-masing 62,25 (tahun 2015); 69,75 (tahun 2016); dan 72 (tahun 2017). Peningkatan Indeks Minat Budaya Baca dikarenakan adanya upaya mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan melalui program perpustakaan PKK desa/kelurahan dan bekerjasama dengan PKK sebagai tenaga penyuluh gemar membaca.

2.2.16.2. Persentase penerbit dan Perusahaan Rekaman yang Menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam

Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Karena itu penerbit dan perusahaan rekaman wajib menyerahkan hasil budaya bangsa kepada pemerintah untuk disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Tabel 4.95
Persentase Penerbit Dan Perusahaan Rekaman Yang Menyerahkan Karya Cetak Dan Karya Rekam di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Penerbit Dan Perusahaan Rekaman Yang Menyerahkan Karya Cetak Dan Karya Rekam	-	48	50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Persentase penerbit dan perusahaan rekaman yang menyerahkan karya cetak dan karya rekam di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 48,00 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 50 persen. Masih rendahnya Persentase Penerbit dan Perusahaan Rekaman yang menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam dikarenakan masih lemahnya penegakan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Kedepanya persentase akan terus ditingkatkan karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

2.2.17. Kearsipan

2.2.17.1. Persentase Arsip yang Terselamatkan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sangatlah penting karena berfungsi untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Persentase arsip yang terselamatkan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, sehingga belum ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, capainnya sebesar 25 persen.

Tabel 4.96
Persentase arsip yang terselamatkan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase arsip yang terselamatkan	-	-	25

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

2.2.17.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tertib Arsip

Pengelolaan arsip secara profesional sangatlah penting di era globalisasi yang teknologi kian pesat perkembangannya. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, pemerintah dituntut untuk mengelolanya secara baik. Penanganan yang paling mendasar dari pengelolaan arsip adalah ketepatan dalam menggunakan kode klarifikasi surat. Karena tanpa menggunakan kode klarifikasi yang tepat, tentu arsipnya akan kacau. Sehingga jika diperlukan sebagai bahan informasi akan sulit ditemukan. Karena itu, sangat penting bagi organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tertib arsip.

Tabel 4.97

Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	-	20,41	21,28

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016, Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip di Jawa Timur 20,41 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 21,28 persen. Persentase tersebut diharapkan terus meningkat tiap tahunnya agar untuk memudahkan layanan akses secara cepat dan tetap serta meningkatkan mutu pelayanan kearsipan bagi masyarakat.

2.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.1. Kelautan dan Perikanan

2.3.1.1. Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan terhadap PDRB

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2014 sebesar 6,87 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 4,82 persen.

Tabel 4.98
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	5,71	5,06	4,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.2. Pariwisata

2.3.2.1. Persentase Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel 4.99
Persentase Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB	5,48	5,73	5,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kinerja positif dari sektor pariwisata ini nampak dari persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Jawa Timur yang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 5,48 persen tahun 2015, kemudian menjadi 5,73 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 5,82 persen pada tahun 2017. Peningkatan ini dikarenakan kunjungan wisman wisnus yang meningkat berdampak pada konsumsi, kebutuhan jasa dan produksi industri pariwisata yang menggeser komponen-komponen yang lainnya, pariwisata saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan pada pilar pariwisata yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat dan swasta sudah berjalan.

2.3.3. Pertanian

2.3.3.1. Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan terhadap PDRB

Sub kategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya). Pertumbuhan Sub sektor ini terus menunjukkan penurunan tiap tahunnya, yaitu masing-masing 3,13 persen (2015), 1,76 persen (2016) dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi (-2,18) persen

Tabel 4.100
Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Kontribusi Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB	3,13	1,76	-2,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.3.2. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, tebu, rami, serat manila dan tanaman lainnya. Pada tahun 2015, pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 1,25 persen, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi (-0,74) persen dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 1,36 persen.

Tabel 4.101
Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Perkebunan Terhadap PDRB

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Sub Kategori Perkebunan Terhadap PDRB	1,25	-0,74	1,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.3.3. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

Pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 2,01 persen menjadi 3,48 persen pada tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 terjadi akselerasi percepatan menjadi 3,89 persen.

Tabel 4.102
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	2,01	3,48	3,89

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.4. Kehutanan

2.3.4.1. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB

Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan, kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB pada tahun 2015 sebesar 3,34 persen, selanjutnya turun pada tahun 2016 menjadi (-8,75) persen dan meningkat menjadi 7,23 persen pada tahun 2017.

Tabel 4.103
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	3,34	-8,75	7,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.4.2. Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya

erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota.

Tabel 4.104
Indeks Tutupan Hutan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Tutupan Hutan	-	54,83	62,01

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, pada tahun 2016 capaiannya sebesar 54,83 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 62,01.

2.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.5.1. Rasio elektrifikasi

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor – sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya) termasuk juga sektor perumahan yang kesemuanya tidak bisa terlepas dari pasokan listrik. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total rumah tangga. Di sisi lain, sebagai tolak ukur untuk melaksanakan tugas dalam pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menetapkan Rasio Elektrifikasi (RE) sebagai indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur sebagai mana termuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Tabel 4.105
Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Rasio Elektrifikasi	0,85	0,87	0,91

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga tahun 2017 cenderung meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan, baik rumah tangga, swasta, industri, instansi, dan lembaga perusahaan lainnya yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi sehari – harinya yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Melalui capaian RE pada tahun 2017 sebesar 0,91, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pelayanan urusan ESDM pada Tahun 2019 masih memiliki tugas untuk terus membantu meningkatkan dan melakukan pemerataan pasokan listrik ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur termasuk wilayah kepulauan.

2.3.6. Perdagangan

2.3.6.1. Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan

Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. pada tahun 2015 capaiannya sebesar 1,63 persen, dan terus meningkat pada tahun 2016-2017 yaitu masing-masing 4,06 (2016) dan 4,67 (2017).

Tabel 4.106
Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan di Jawa Timur	1,63	4,06	4,67

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3.7. Perindustrian

2.3.7.1. Persentase pertumbuhan industri pengolahan

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang menjadikan industri pengolahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan

yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah - wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah - wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain.

Tabel 4.107
Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase pertumbuhan industri pengolahan	5,60	4,51	5,69

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur

Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 5,60 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,51 persen. Sementara itu pada tahun 2017 menjadi 5,69 persen. Kedepannya pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan karena berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran.

2.3.8. Ketransmigrasian

2.3.8.1. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya

Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) adalah merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) tahun 2015 sebesar 82,00 persen dan pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan menjadi 81,65 persen. Sementara itu pada tahun 2017 persentasenya menurun kembali menjadi 72,00 persen.

Tabel 4.108
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya	82,00	81,65	72,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumberdaya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya.

2.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.1. Urusan perencanaan

2.4.1.1. Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodasi dalam Dokumen Perencanaan

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional yang dilaksanakan setiap Tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/Kab/Kota . Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, terdapat tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan, antara lain:

- Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- Penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Persiapan penyusunan RKPD
 - Penyusunan rancangan awal RKPD
 - Penyusunan Rancangan RKPD

- Pelaksanaan Musrenbang RKPD
- Perumusan Rancangan Akhir RKPD
- Penetapan RKPD

Tabel 4.109
Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	42

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Pada Dokumen RKPD Tahun 2017 ini, indikator Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan adalah indikator baru yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum pada lampiran Perda Jatim No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga belum terdapat angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Sedangkan capaiannya pada tahun 2017 sebesar 42 persen.

2.4.1.2. Persentase Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
- Hasil rencana pembangunan daerah;
- Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;

- Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 4.110
Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	100

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Pada indikator Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsistensi kesesuaian nomenklatur program antara yang terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD sehingga diharapkan jumlah program yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan menjadi program yang sama yang diturunkan dalam RKPD dalam bentuk target tahunan. Pada Dokumen RKPD Tahun 2019 ini, indikator Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD merupakan indikator baru yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tercantum pada lampiran Perda Jatim No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga belum terdapat angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2017, didapatkan hasil dari Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebesar 100 persen.

2.4.2. Urusan keuangan

2.4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 15,40 triliun, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 15,89 triliun. Sementara itu pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 17,33 triliun. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan

kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 4.111
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah (PAD)(dalam trilyun)	15,40	15,89	17,33

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

2.4.2.2. Nilai Opini BPK

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.112
Nilai Opini BPK di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	-

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Untuk opini BPK Tahun 2015-2016 Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. Sedangkan untuk opini BPK Tahun 2017 belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan bulan Mei tahun 2017. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK juga disampaikan di hadapan DPRD Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni.

2.4.3. Urusan kepegawaian

2.4.3.1. Persentase Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan & Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer).

Tabel 4.113

Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	96,20	96,80	84,22

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 96,20 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 96,80 persen. untuk kondisi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 84,22 persen atau turun 12,58 persen dengan rincian sebagai berikut untuk total seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 52.617 pegawai yang sudah tertata sebanyak 44.319 pegawai terdiri dari Jabatan Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) sebanyak 2.840 pegawai dan Jabatan fungsional (Medis, Paramedis, Non Medis) sebanyak 21.220 pegawai dan fungsional guru sebanyak 14.639 pegawai dan jabatan pelaksana sebanyak 5.620 pegawai hal ini disebabkan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana turunan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur di Tahun 2018 dengan merivisi Pergub Nomor 76 Tahun 2015 menjadi Pergub 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Fungsional dan pengembangan kompetensi melalui diklat teknis,Ujian Dinas, dan Penyesuaian Ijazah (PI) serta pendistribusian pegawai sesuai syarat jabatan sehingga menciptakan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negeri (ASN) yang profesional dan berkualitas.

2.4.3.2. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien menuju layanan pemerintahan yang semakin berkualitas. Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode composite index. Indikator yang digunakan, antara lain: kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja. Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pegawai yang semakin bersih. Data-data yang digunakan harus bersinggungan dengan individu karena profesionalitas dihitung berdasarkan individu. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

Tabel 4.114
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	75,00	75,73	81,11

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 75,00 (2015); , 75,73 (2016) dan 81,11 (2017). Perhitungan IP ASN Tahun 2017 dilaksanakan untuk Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dan untuk tahun 2018 IP ASN dilaksanakan untuk Jabatan Pelaksana, Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas PNS di Jatim lebih terukur, memiliki kredibilitas & reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap PNS disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

2.4.4. Urusan Pendidikan dan pelatihan

2.4.4.1. Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Pada tahun 2015, Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) sebesar 91,00 persen selanjutnya terus meningkat hingga menjadi 93,00 pada tahun 2017. Kondisi tersebut mencerminkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Timur yang profesional dan berkualitas serta memiliki pengetahuan dan berwawasan luas sebagai pelayan masyarakat dari tahun ketahun semakin meningkat.

Tabel 4.115

Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	91,00	92,50	93,00

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

2.4.5. Urusan penelitian dan pengembangan

2.4.5.1. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang dipakai dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan sebagainya. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kemakmuran masyarakat. Pada tahun 2015, Persentase hasil penelitian dan pengembangan hasil penelitian yang dimanfaatkan sebesar 26,00 persen. Pada tahun 2016 menurun menjadi 24,00 persen, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 26,25 persen.

Tabel 4.116

Persentase hasil penelitian dan pengembangan hasil penelitian yang dimanfaatkan

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase hasil penelitian dan pengembangan hasil penelitian yang dimanfaatkan	26,00	24,00	26,25

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

2.4.5.2. Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Pada tahun 2016, Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem inovasi daerah Jawa Timur sebesar 6 persen dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 7 persen. Kedepannya persentase ini akan terus ditingkatkan agar daya saing ekonomi di tiap-tiap daerah melalui inovasi terus berkembang.

Tabel 4.117
Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem inovasi daerah

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kegiatan mendukung sistem inovasi daerah	-	6	7

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

2.4.6. Wawasan Kebangsaan

2.4.6.1. Indeks Demokrasi Indonesia

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Tabel 4.118
Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks Demokrasi Indonesia	76,90	72,24	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

IDI Jawa Timur tahun 2016 sebesar 72,24 dalam skala 0 sampai 100, turun sebesar 4,66 poin dibandingkan dengan angka IDI Jawa Timur 2015 sebesar 76,90. Meskipun demikian angka IDI Jawa Timur masih lebih tinggi dibandingkan angka IDI nasional (70,09). Capaian kinerja demokrasi Jawa Timur tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

2.4.6.2. Persentase Kejadian Terkait Poleksosbud Di Jawa Timur

Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan kualitas bangsa secara menyeluruh. Persentase kejadian terkait Poleksosbud di Jawa Timur merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur dan capaiannya pada tahun 2017 sebesar 100 persen.

Tabel 4.119
Persentase kejadian terkait Poleksosbud di Jawa timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase kejadian terkait Poleksosbud	-	-	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

2.4.7. Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.4.7.1. Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau

kejadian alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya. Membunyikan sirine saat akan terjadi merupakan langkah untuk mengantarkan informasi kepada masyarakat, harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini.

Tabel 4.120
Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015-2017, persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi sebesar 100 persen, kondisi ini memberikan rasa aman pada masyarakat yang tinggal di kawasan bencana dalam beraktifitas sebab peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa di ketahui, sehingga masyarakat juga bisa melakukan pencegahan untuk menyelamatkan diri saat terjadinya bencana alam.

2.4.7.2. Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Korban bencana adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi.

Tabel 4.121
Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani di Jawa timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015-2017 persentase korban terdampak bencana yang tertangani mencapai 100 persen. Hal ini perlu dipertahankan karena dengan tertanganinya korban terdampak maka akan meminimalkan kondisi terburuk setelah terjadinya bencana.

2.4.8. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Badan Penghubung

2.4.8.1. Persentase Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Perkembangan persentase pelayanan keprotokolan pada tahun 2015 sebesar 92 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 100 persen dan pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan menjadi 99,94 persen.

Tabel 4.122
Persentase Pelayanan Keprotokolan di Jawa timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Pelayanan Keprotokolan	92	100	99,94

Sumber : Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur

2.4.8.2. Persentase Promosi Potensi Daerah

Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lebih cerah. Persentase promosi potensi daerah pada tahun 2015-2016 sebesar 100 persen dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 menjadi 96,64 persen. Kegiatan promosi potensi daerah sangat

diperlukan dan diharapkan terus meningkat tiap tahun karena untuk menarik wisatawan dan investor.

Tabel 4.123
Persentase Promosi Potensi Daerah di Jawa timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Promosi Potensi Daerah	100	100	96,64

Sumber : Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur

2.4.9. Pengawasan

2.4.9.1. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingan masyarakat harus diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015-2016 sebesar 70 persen, sedangkan pada tahun 2017 capaiannya adalah 50 persen.

Tabel 4.124
Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota	70	70	50

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

2.4.10. Kesekretariatan Daerah

2.4.10.1. Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (OUTCOME). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem

pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perkembangan nilai SAKIP selama tiga tahun terakhir 2015-2017 menunjukkan nilai A. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik.

Tabel 4.125
Nilai SAKIP

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Nilai SAKIP	A	A	A

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2.4.10.2. Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

Tabel 4.126
Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Peringkat Hasil Evaluasi LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Perkembangan nilai LPPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2016 adalah sangat tinggi artinya pembangunan di Jawa Timur benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk capaian tahun 2017 masih menunggu rilis dari pemerintah pusat pada April 2018.

2.4.10.3. Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV (empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia.

Tabel 4.127
Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum	-	-	100

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling). Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan final. Sedangkan peraturan adalah produk hukum tertulis yang substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi. Capaian pada tahun 2017, Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum adalah 100 persen.

2.4.10.4. Persentase Penegakan Supremasi Hukum dan HAM di Jawa Timur

Supremasi hukum memiliki pengertian menempatkan hukum/aturan pada kedudukan tertinggi, aturan dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Supremasi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia. Meskipun dalam pengertiannya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan hingga lahir dan hidup di dunia. Dengan menjadikan supremasi hukum berada dalam kedudukan tertinggi maka hak asasi manusia dapat ditegakkan dan terjaga dengan baik.

Tabel 4.128
Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur	-	-	-

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, sehingga belum ada angka capaiannya sampai dengan tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 belum ada capaiannya karena pengukurannya dilakukan pada tahun 2018.

2.4.11. Koordinasi Wilayah Bakorwil

2.4.11.1. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah Hasil Kegiatan Koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Bakorwil, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

Tabel 4.129
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	60	80	93

Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

Pada tahun 2015 persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti mencapai 60 persen, pada tahun meningkat 2016 menjadi 80 persen kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 93 persen. Peningkatan ini mengindikasikan koordinasi yang dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota.

2.4.12. Kesekretariatan DPRD

2.4.12.1. Indeks kepuasan masyarakat DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel 4.130
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	71,23	75,89	76,04

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama tiga tahun terakhir (2015-2017) terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 71,23 (2015); 75,89 (2016); dan 76,04 (2017). Hal ini menggambarkan semakin

membaiknya dan efektif pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyarakat

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

3.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

Tabel 4.131
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	830.472	870.412	938.801

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran per kapita penduduk Jawa Timur tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan dari Rp.830.472 per kapita sebulan di tahun 2015 menjadi Rp 938.801 per kapita sebulan di tahun 2017. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk

kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat. Kalau kita perhatikan komposisi persentase antara makanan dan non makanan penduduk Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir ini (2014-2016) sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya perbaikan ekonomi, maka pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Tabel 4.132
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	54,12	50,92	49,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015 proporsi pengeluaran penduduk Jawa Timur untuk non makanan sebesar 54,12 persen dan meningkat hingga menjadi 52,5 persen pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 49,21 persen. Jika kita perhatikan menurut wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa untuk daerah perdesaan pengeluaran penduduknya masih banyak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Fakta ini sedikit banyak menjelaskan kalau kesejahteraan penduduk daerah perdesaan masih dibawah penduduk daerah perkotaan.

3.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Rata-rata Nilai Tukar Petani Jawa Timur tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,50 persen dibanding tahun 2016 yaitu dari 104,62 menjadi 104,10. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (2,58 persen) lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (3,09 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2017, secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun 2016.

Tabel 4.133
Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,83	104,62	104,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2017, NTP Jawa Timur secara umum lebih rendah dibanding dengan bulan yang sama tahun 2016, kecuali untuk bulan Agustus lebih tinggi 0,63 persen, September sebesar 0,54 persen, Oktober sebesar 1,86 persen, November sebesar 2,61 persen, dan Desember sebesar 2,39 persen. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2017, kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1,43 persen karena indeks harga yang diterima petani pada bulan yang sama mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,31 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Februari sebesar 1,27 persen karena indeks yang diterima petani turun sebesar 0,68 persen sedangkan indeks yang dibayar petani naik 0,59 persen.

3.1.4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.

Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 9,93 persen dibanding tahun 2016 yaitu dari 111,84 menjadi 121,77. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (16,69 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (3,49 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk perikanan tangkap terhadap barang konsumsi rumah tangga nelayan dan biaya produksi tahun 2017 secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2016.

Tabel 4.134
Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,69	111,84	121,77

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2017 NTN Jawa Timur lebih tinggi dibanding kondisi pada tahun 2016. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2017, kenaikan NTN terbesar terjadi pada Bulan Juni sebesar 1,84 persen, karena indeks harga yang diterima nelayan pada bulan yang sama mengalami kenaikan sebesar 1,75 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan sebesar 0,08 persen. Penurunan NTN terbesar terjadi pada bulan April sebesar 0,45 persen, karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami penurunan sebesar 0,52 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen.

3.2. Fokus Iklim Berinvestasi

3.2.1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel 4.135
Angka Kriminalitas di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Angka Kriminalitas	2,67	2,00	-

Sumber : Polda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Polda Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2015-2016 angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan yaitu dari 2.67 pada tahun 2015 menjadi 2,00 tahun 2016. Angka kriminalitas sebesar 2,00 menunjukkan bahwa terjadi hampir 2 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

3.2.2. Lama Proses Perizinan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

Tabel 4.136
Lama Proses Perizinan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Lama Proses Perizinan	1-17	1-17	1-17

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Timur

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah wilayah atau daerah. Meski demikian, peran pemerintah daerah masih dominan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan

modalnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan di semua sektor pelayanan publik, terutama dalam kegiatan pelayanan perizinan. Upaya untuk meminimalisir permasalahan perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang optimalnya investasi di Jawa Timur adalah dengan membentuk model Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit P2T Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari.

3.3. Fokus Sumber Daya Manusia

3.3.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia harus disiapkan supaya tidak kalah dengan SDM dari negara Asean lainnya. Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 ke atas merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.

Tabel 4.137
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Rasio Lulusan S1/S2/S3	356	358	406

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam dua tahun terakhir (2015-2016) proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1 ke atas semakin meningkat dari 356 per sepuluh ribu penduduk pada tahun 2015 menjadi 406 per sepuluh ribu penduduk di tahun 2016. Bila dilihat

sex rasionya maka penduduk laki-laki yang berpendidikan tinggi proporsinya lebih banyak dibanding perempuan.

3.3.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 4.138
Rasio Ketergantungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2015	2016	2017
Rasio Ketergantungan	44,22	44,10	43,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2017, angka dependency ratio untuk Jawa Timur sebesar 43,80 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka dependency ratio menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.